BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana ...

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah, RPJPD, RTRW, dan kajian lingkungan hidup strategis.

(2) RPJMD ...

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab i berisi pendahuluan;
   b. bab ii berisi gambaran umum Daerah;
   c. bab iii berisi Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Daerah;
   d. bab iv berisi Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. bab v berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil ...

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan penyusunan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (5-162/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO
Pembina
NIP 19740115 200604 1 003

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pembangunan Daerah yang merujuk pada RPJPD, serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPJMD menjadi landasan penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta dalam menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien, serta mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka RPJMD disusun dengan menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, RPJMD juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, sehingga selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Dalam RPJMD, berbagai aspek strategis turut menjadi pertimbangan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dinamika kependudukan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sistem hukum. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan menjadi instrumen utama dalam menjabarkan Visi dan Misi Bupati ke dalam Program dan kegiatan prioritas yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 331

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen 6
1.4 Maksud dan Tujuan 10
1.5 Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 12
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 12
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 12
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 20
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 22
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 33
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 36
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 38
2.1.1.7 Demografi 43
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 46
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 46
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua 53
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 55
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 57
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 58
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 59
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 61
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 61
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 61
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 67
2.1.3.4 Transformasi Digital 71
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 72
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 75
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 79
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 79
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif 79
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 82
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 84
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah 84
2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal 100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah 100
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 102
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 103
2.2.1.2 Neraca Daerah 122
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 128
2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 128
2.2.2.2 Analisis Pembiayaan 132
2.2.3 Kerangka Pendanaan 133
2.2.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan 136
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 137
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 137
2.3.2 Isu Strategis 150
2.3.2.1 Isu Strategis Internasional 151
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional 152
2.3.2.3 Isu Strategis Regional 157
2.3.2.3.1 Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah 157
2.3.2.3.2 Telaah RPJPD 161
2.3.2.3.3 Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali 2025-2029 164
2.3.2.3.4 Telaah RTRW 166
2.3.2.3.5Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali 169
2.3.2.3.6 Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Boyolali 170
2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Boyolali 173
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 180
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 180
3.1.1 Visi 180
3.1.2 Misi 184
3.1.3 Tujuan dan Sasaran 187
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 201
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 201
3.2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan 201
3.2.1.2 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali 207
3.2.1.3 Kebijakan Pertahapan Pembangunan 217
3.2.2 Program Unggulan Bupati dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Boyolali 2025-2029 226
3.2.3 Dukungan Kabupaten Boyolali terhadap Arahan Nasional dan Provinsi 239
3.2.3.1 Arahan Nasional 239
3.2.3.2 Arahan Program Strategis Nasional 244
3.2.3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 246
3.2.3.4 Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Boyolali 251
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 280
4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 280
4.1.1 Kerangka Pendanaan 280
4.1.2 Program Perangkat Daerah 280
4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 280

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 286
4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 299
4.1.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 303
4.1.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 304
4.1.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 306
4.1.1.7 Unsur Kewilayahan 307
4.1.1.8 Unsur Pemerintahan Umum 308
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 436
4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja 436
BAB V PENUTUP 490
5.1 Pedoman Transisi 490
5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD 491
5.3 Pengarusutamaan Pembangunan 492
5.4 Kaidah Pelaksanaan 492

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 6
Gambar II. 1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali 12
Gambar II. 2 Peta Topografi Kabupaten Boyolali 15
Gambar II. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali 16
Gambar II. 4 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Boyolali 17
Gambar II. 5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Boyolali 19
Gambar II. 6 Peta Rencana Pola Ruang 20
Gambar II. 7 Persentase D3TLH Air Kabupaten Boyolali 23
Gambar II. 8 Persentase Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Boyolali 24
Gambar II. 9 Peta Status D3TLH Air Kabupaten Boyolali 25
Gambar II. 10 Tren IKU Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 32
Gambar II. 11 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 34
Gambar II. 12 Peta Potensi Bencana Kabupaten Boyolali 38
Gambar II. 13 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024 40
Gambar II. 14 Hasil Inventarisasi GRK Berbasis *Signsmart* Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 42
Gambar II. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2024 45
Gambar II. 16 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 48
Gambar II. 17 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 49
Gambar II. 18 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 49
Gambar II. w19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 50
Gambar II. 20 PDRB per Kapita Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 51
Gambar II. 21 Rasio Gini Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 51
Gambar II. 22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 52
Gambar II. 23 Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Tahun 2020-2024 53
Gambar II. 24 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan 2020-2024 54
Gambar II. 25 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 59
Gambar II. 26 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 61
Gambar II. 27 Angka Ketergantungan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (%) 61
Gambar II. 28 Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 65
Gambar II. 29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 65
Gambar II. 30 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024 67
Gambar II. 31 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 72

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Gambar II. 32 Data Dasar Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Kabupaten Boyolali 2020-2024 77
Gambar II. 33 Laju Inflasi Tahun 2020-2024 79
Gambar II. 34 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 104
Gambar II. 35 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 105
Gambar II. 36 Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 108
Gambar II. 37 Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 109
Gambar II. 38 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (juta rupiah) 109
Gambar II. 39 Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (%) 110
Gambar II. 40 Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 110
Gambar II. 41 Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 111
Gambar II. 42 Perkembangan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 113
Gambar II. 43 Rata-Rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 113
Gambar II. 44 Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (juta rupiah) 114
Gambar II. 45 Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 114
Gambar II. 46 Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 115
Gambar II. 47 Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 116
Gambar II. 48 Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 117
Gambar II. 49 Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Boyolali 138
Gambar II. 50 Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 138
Gambar II. 51 Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Suku Jawa Tahun 2018-2022 140
Gambar II. 52 Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Wilayah Subosukawonosraten 141
Gambar II. 53 Rasio Gini Kabupaten Boyolali 142
Gambar II. 54 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 142
Gambar II. 55 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali dibandingkan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 143
Gambar II. 56 Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 145
Gambar II. 57 Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 146
Gambar II. 58 Capaian IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 147

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Gambar II. 59 Isu Global 151
Gambar II. 60 Isu Strategis Nasional 152
Gambar II. 61 Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2030 158
Gambar II. 62 Kerangka Visi RPJPD 2025-2045 162
Gambar II. 63 Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali 167
Gambar II. 64 Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Boyolali 171
Gambar II. 65 Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali 172
Gambar II. 66 Kawasan Strategis Kabupaten Boyolali 173
Gambar III. 1 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali dengan Visi RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah 183
Gambar III. 2 Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 . 184
Gambar III. 3 Keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 185
Gambar III. 4 Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali 202
Gambar III. 5 Pengembangan Kawasan di Provinsi Jawa Tengah 239

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali 13
Tabel II. 2 Topografi Kabupaten Boyolali 14
Tabel II. 3 Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali 15
Tabel II. 4 Jenis Tanah di Kabupaten Boyolali 18
Tabel II. 5 Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Sawah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 21
Tabel II. 6 Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Boyolali 23
Tabel II. 7 Penilaian Koefisien *Run Off* Tertimbang 25
Tabel II. 8 Kebutuhan Beras Kabupaten Boyolali 28
Tabel II. 9 Produksi Beras Kabupaten Boyolali 29
Tabel II. 10 Produktivitas Lahan Kabupaten Boyolali 30
Tabel II. 11 Daya Dukung Lahan Sawah Kabupaten Boyolali 31
Tabel II. 12 Ketersediaan Energi di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 33
Tabel II. 13 Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 34
Tabel II. 14 Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 35
Tabel II. 15 IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 36
Tabel II. 16 Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 37
Tabel II. 17 Kawasan Rawan Bencana 39
Tabel II. 18 Indeks Risiko Per Ancaman Bencana 2024 39
Tabel II. 19 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024 41
Tabel II. 20 Hasil Inventarisasi GRK *Signsmart* 42
Tabel II. 21 Data Kependudukan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 43
Tabel II. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2024 44
Tabel II. 23 Proyeksi Kependudukan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 46
Tabel II. 24 Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024 47
Tabel II. 25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 52
Tabel II. 26 Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 .. 53
Tabel II. 27 Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2023 55
Tabel II. 28 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 56
Tabel II. 29 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2024 56
Tabel II. 30 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 60
Tabel II. 31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 62
Tabel II. 32 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 63
Tabel II. 33 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 64
Tabel II. 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jenis Kelamin 66

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 35 Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 67
Tabel II. 36 Capaian Produksi Peternakan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 68
Tabel II. 37 Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 69
Tabel II. 38 Komoditas EBT Kabupaten Boyolali Tahun 2024 70
Tabel II. 39 Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 72
Tabel II. 40 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 73
Tabel II. 41 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 74
Tabel II. 42 Perkembangan Investasi PMA di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 74
Tabel II. 43 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024 75
Tabel II. 44 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024 75
Tabel II. 45 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024 76
Tabel II. 46 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024 76
Tabel II. 47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 78
Tabel II. 48 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020-2024 80
Tabel II. 49 Indeks Manajemen Risiko Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 81
Tabel II. 50 Indikator Kondusifitas Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 82
Tabel II. 51 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 ... 84
Tabel II. 52 Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 84
Tabel II. 53 Capaian Indikator Kinerja Kunci (Rancangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 92
Tabel II. 54 Rekapitulasi Capaian SPM Tahun 2020-2024 100
Tabel II. 55 Skala Interval Otonomi Fiskal 102
Tabel II. 56 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 103
Tabel II. 57 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 119
Tabel II. 58 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 124
Tabel II. 59 Rasio Lancar Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 125
Tabel II. 60 Rasio Hutang Kabupaten Boyolali Tahun 2020 – 2024 126
Tabel II. 61 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 126
Tabel II. 62 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 127
Tabel II. 63 Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 128
Tabel II. 64 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 129

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 65 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 131
Tabel II. 66 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 132
Tabel II. 67 Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 132
Tabel II. 68 Proyeksi APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 134
Tabel II. 69 Permasalahan Perurusan Kabupaten Boyolali 148
Tabel II. 70 Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten 159
Tabel II. 71 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 165
Tabel II. 72 Teknik Perumusan Isu Strategis Kabupaten Boyolali 177
Tabel III. 1 Uraian Pokok Visi 181
Tabel III. 2 Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 188
Tabel III. 3 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 190
Tabel III. 4 Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 193
Tabel III. 5 Arah Kebijakan Tahunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali Tahun 2026-2030 203
Tabel III. 6 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 204
Tabel III. 7 Tahap I RPJMD 2025-2029 217
Tabel III. 8 Tahap II RPJMD 2025-2029 219
Tabel III. 9 Tahap III RPJMD 2025-2029 221
Tabel III. 10 Tahap IV RPJMD 2025-2029 223
Tabel III. 11 Tahap V RPJMD 2025-2029 224
Tabel III. 12 17 Program Unggulan Bupati dan Program Prioritas Kabupaten Boyolali 231
Tabel III.13 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 234
Tabel III. 14 Tabel Dukungan Program Daerah Kabupaten Boyolali terhadap *Highlight* Intervensi RPJMN 241
Tabel III. 15 Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional 245
Tabel III. 16 Dukungan Kabupaten Boyolali terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah 246
Tabel III. 17 Keselarasan Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 250
Tabel III. 18 Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya dan Lindung 253
Tabel IV. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 309
Tabel IV. 2 Penjabaran Cascading Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 368
Tabel IV. 3 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030 437
Tabel IV. 4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030 439
Tabel IV. 5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030 441
Tabel IV. 6 Indikator Utama Pembangunan RPJPD 447

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 7 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 2025-2029 452
Tabel IV. 8 Indikator Kinerja Kunci 479

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Boyolali, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, yang menjadi penopang utama pembangunan daerah. Kabupaten Boyolali dikenal sebagai "Kota Susu", yang mana memiliki produksi susu sapi yang melimpah, sehingga mendukung industri peternakan dan produk olahan susu. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi kekuatan ekonomi daerah, dengan hasil utama seperti padi, sayuran, dan buah-buahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan di tingkat regional. Selain sektor pertanian, Kabupaten Boyolali juga berkembang pesat di sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan penopang perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang melimpah. Pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan dan bantuan kepada para pembudidaya, termasuk teknologi pakan, manajemen kolam, dan akses pasar. Selain itu, pengembangan sistem perikanan berbasis desa dan ekowisata perikanan mulai diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Keunikan Kabupaten Boyolali semakin terlihat dengan keindahan alamnya yang berada di kawasan strategis di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Destinasi wisata alam seperti Umbul Pengging menawarkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Kabupaten Boyolali juga memiliki wisata buatan yaitu Kebun Raya Indrokilo dan Wisata Edukasi Religi Qolbu Boyolali. Selain itu, tidak hanya destinasi wisata saja, Kabupaten Boyolali juga kaya akan tradisi budaya yang masih dilestarikan, seperti seni wayang, tari tradisional seperti tari topeng ireng gugur gunung, tari dadak merak, tari sekar merapi, tari soreng, tari garuda nusantara dan upacara adat, yang menambah daya tarik wisata budaya. Potensi sumber daya manusia yang terampil dan inovatif terus diberdayakan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis, menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah dengan prospek pembangunan yang terdepan dan inovatif. Dengan mengoptimalkan karakteristik dan keunikannya, Kabupaten Boyolali memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya dalam era pembangunan 2025-2029.

Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna mencapai harapan yang masyarakat inginkan. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, melalui perencanaan yang baik dan tepat menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah. Pembangunan daerah memegang peranan vital dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Dengan dilantiknya Bapak Agus Irawan sebagai Bupati dan Ibu Dwi Fajar Nirwana sebagai Wakil Bupati, yang diselenggarakan pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2025 maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Boyolali periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 70 bahwa Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Boyolali menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Boyolali periode 2025-2029 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap 1 (pertama), yang mana RPJMD ini merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

1) teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya consensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan masukan dan kesepakatan dengan DPRD;
4) atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*;
5) holistik-tematik, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

6) integratif, RPJMD Kabupaten Boyolali menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan; dan
7) spasial, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir dan (6) Penetapan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029. Dokumen teknokratik RPJMD adalah dokumen pendahuluan berbasis kajian akademik dan teknis yang berfungsi sebagai bahan dasar dalam menyusun RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahunan kepala daerah. Dokumen ini memastikan bahwa RPJMD memiliki dasar rasional, terukur, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Dengan ini, dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan rumusan rujukan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi PD untuk merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah ke dalam dokumen Renstra. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap PD di Kabupaten Boyolali diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, *stakeholder* akan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Boyolali.

Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini diwujudkan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, RPJMD ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan global dan lokal, sekaligus menjadi panduan strategis dalam mewujudkan visi daerah yaitu “Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Boyolali tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga instrumen pembangunan yang adaptif, responsif, dan inklusif, yang mengintegrasikan isu-isu strategis global seperti transformasi digital, transisi energi, serta keberlanjutan lingkungan, dengan kebutuhan lokal berupa peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pelayanan dasar. Melalui sinergi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, dan dukungan para pemangku kepentingan, RPJMD ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berdaya

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

saing, memperkuat daya tahan sosial budaya, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan pijakan tersebut, Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkontribusi nyata dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang¬Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 324);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Keterkaitan ini memastikan keselarasan dan sinergi antara program-program pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. RPJMD harus mencerminkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sehingga penyusunannya melibatkan penjabaran aspirasi tersebut ke dalam rencana pembangunan yang konkret. Proses ini juga melibatkan acuan pada dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD Provinsi). Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah. Berikut merupakan sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

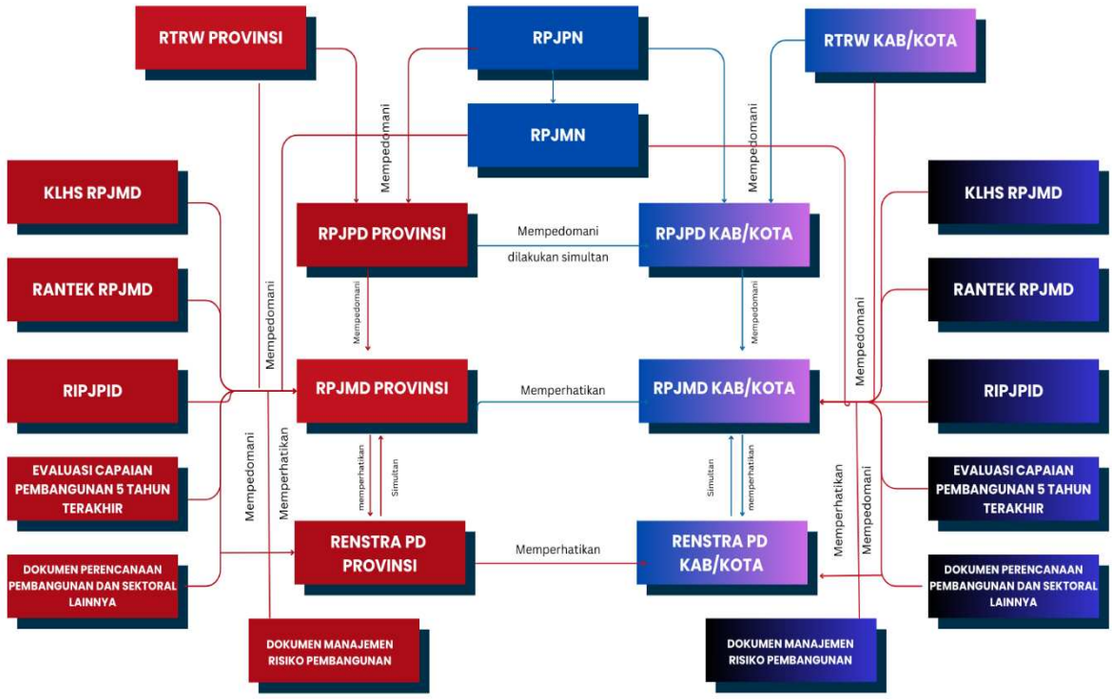

Gambar I. 1
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
(Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

Berdasarkan gambar diatas, berikut penjelasan beberapa keterkaitan dokumen RPJMD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah memiliki hubungan erat dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. RPJMN berfungsi sebagai pedoman strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sinkronisasi arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD Boyolali harus memuat visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang mendukung capaian tujuan nasional. Dalam rancangan awal RPJMN Tahun 2025-2029, fokus pembangunan nasional meliputi penguatan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta digitalisasi. Kabupaten Boyolali, sebagai daerah dengan potensi agraris dan industri, dapat menyelaraskan program-program lokalnya, seperti pengembangan pertanian berteknologi, perluasan jaringan transportasi daerah, peningkatan akses pendidikan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar berkontribusi optimal pada target nasional. Hubungan ini menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 memiliki hubungan strategis dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 karena keduanya saling terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah dan provinsi. RPJMD Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk Kabupaten Boyolali, sehingga RPJMD Kabupaten Boyolali perlu menyesuaikan prioritas, sasaran, dan programnya agar selaras dengan tujuan pembangunan tingkat provinsi. Dalam konteks ini, Kabupaten Boyolali berperan sebagai bagian dari jaringan daerah yang mendukung pencapaian visi Provinsi Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, seperti peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur. Sebagai contoh, jika RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengusung prioritas pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri dan pertanian terpadu, Kabupaten Boyolali dapat berkontribusi melalui penguatan sektor agribisnis dan pengelolaan hasil pertanian. Sinergi antara RPJMD Kabupaten Boyolali dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah memastikan konsistensi antara pembangunan lokal dan provinsi, menciptakan dampak pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang strategis dengan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045, karena RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai tahapan awal dalam pencapaian visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD. RPJPD, sebagai dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, menetapkan visi besar pembangunan Kabupaten Boyolali selama 20 (dua puluh) tahun, mencakup berbagai sektor strategis seperti ekonomi, infrastruktur,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pendidikan, dan lingkungan. RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 harus disusun dengan mengacu pada sasaran tahap awal yang telah dirancang dalam RPJPD, termasuk pondasi untuk target jangka panjang seperti transformasi ekonomi berbasis teknologi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, RPJMD berfungsi untuk menerjemahkan arah strategis RPJPD ke dalam program-program yang lebih operasional dan terukur selama lima tahun. Hubungan ini memastikan keberlanjutan perencanaan pembangunan, sehingga Kabupaten Boyolali dapat mencapai tujuan besarnya secara bertahap dan terencana sesuai dengan visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan RTRW Kabupaten Boyolali karena keduanya saling melengkapi dalam mendukung pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan. RTRW merupakan dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dalam jangka panjang. Sementara itu, RPJMD adalah dokumen strategis pembangunan jangka menengah yang harus disusun dengan mempertimbangkan arahan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Hubungan ini memastikan bahwa program-program pembangunan dalam RPJMD, seperti pengembangan infrastruktur, kawasan ekonomi, perumahan, dan fasilitas publik, sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang diatur dalam RTRW. Dengan keterpaduan antara RPJMD dan RTRW, pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat berjalan sesuai dengan prinsip keteraturan ruang, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi pemanfaatan lahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.

e. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Boyolali dituangkan di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang secara kelembagaan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati Boyolali akan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Secara hierarki, staf/eselon 4 (kepala seksi/kepala subbagian) akan berfokus pada pencapaian *output*, eselon 3 (kepala bidang/kepala bagian) pada *outcome*, eselon 2 (kepala dinas/kepala badan) pada *impact* dan kemudian memberikan benefit pada tingkat kabupaten dalam pencapaian visi dan misi bupati.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dikarenakan KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan ini penting untuk dapat mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam RPJMD Kabupaten Boyolali sehingga menjadi upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui integrasi ini, setiap sasaran pembangunan dalam RPJMD tidak hanya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mitigasi risiko bencana, serta pelestarian sumber daya alam sebagai modal pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim, berpihak pada generasi mendatang, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

g. Hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

RPJMD Kabupaten Boyolali sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan menjadi pedoman utama dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan. Di sisi lain, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) disusun untuk memperkuat proses perencanaan tersebut melalui basis riset dan inovasi. RIPJPID berfungsi mengidentifikasi potensi unggulan daerah, menganalisis isu strategis, serta merumuskan prioritas riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan. Dengan demikian, RIPJPID tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan secara langsung menyokong perumusan maupun sinkronisasi RPJMD.

Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi yang dimana RPJMD menetapkan arah dan sasaran pembangunan yang bersifat makro, sedangkan RIPJPID menyediakan landasan teknokratik berbasis bukti melalui riset dan inovasi untuk memastikan arah kebijakan lebih terukur, adaptif, dan berdaya saing. Dengan adanya RIPJPID, program prioritas dalam RPJMD, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola, dan pembangunan sumber daya manusia unggul dapat dijalankan secara lebih efektif. Sinergi ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan global maupun lokal.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Boyolali dengan dokumen perencanaan sektoral bersifat hirarkis dan saling melengkapi. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sementara dokumen perencanaan sektoral, memberikan detail masukan dan rekomendasi yang lebih lanjut

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

mengenai kebijakan dan program di masing-masing sektor. RPJMD menjadi acuan utama bagi penyusunan dokumen perencanaan sektoral, memastikan bahwa setiap rencana sektoral selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keselarasan, saling bersinergi dan koordinasi antar sektor sangat ditekankan dalam hubungan ini, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Hal ini agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 adalah:

1) merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2) merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Boyolali Tahun 2025-2029;
4) menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
5) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6) sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7) sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan pembangunan daerah;
8) menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun;
9) mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah; dan
10) memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi dan karakteristik Kabupaten Boyolali sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Aspek-aspek meliputi kondisi geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Pada bab ini juga menjelaskan kondisi keuangan daerah, permasalahan serta isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati Boyolali, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan, strategi yang akan diterapkan, serta program-program prioritas yang menjadi fokus utama dalam kurun waktu RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target pencapaian, serta kebutuhan anggaran yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga menyajikan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Boyolali berada di antara 110° 22’ – 110° 50’ Bujur Timur dan antara 7° 7’ – 7° 36’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Boyolali berada pada jalur penghubung di antara tiga kota besar yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang memiliki potensi pada sektor peternakan, pertanian, dan industri.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 109.661,32 Ha. Wilayah Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam 22 (dua puluh dua) wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan. Berikut merupakan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Boyolali:

- sebelah utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang;
- sebelah selatan: Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Surakarta;
- sebelah barat: Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang; dan
- Sebelah Timur: Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar.

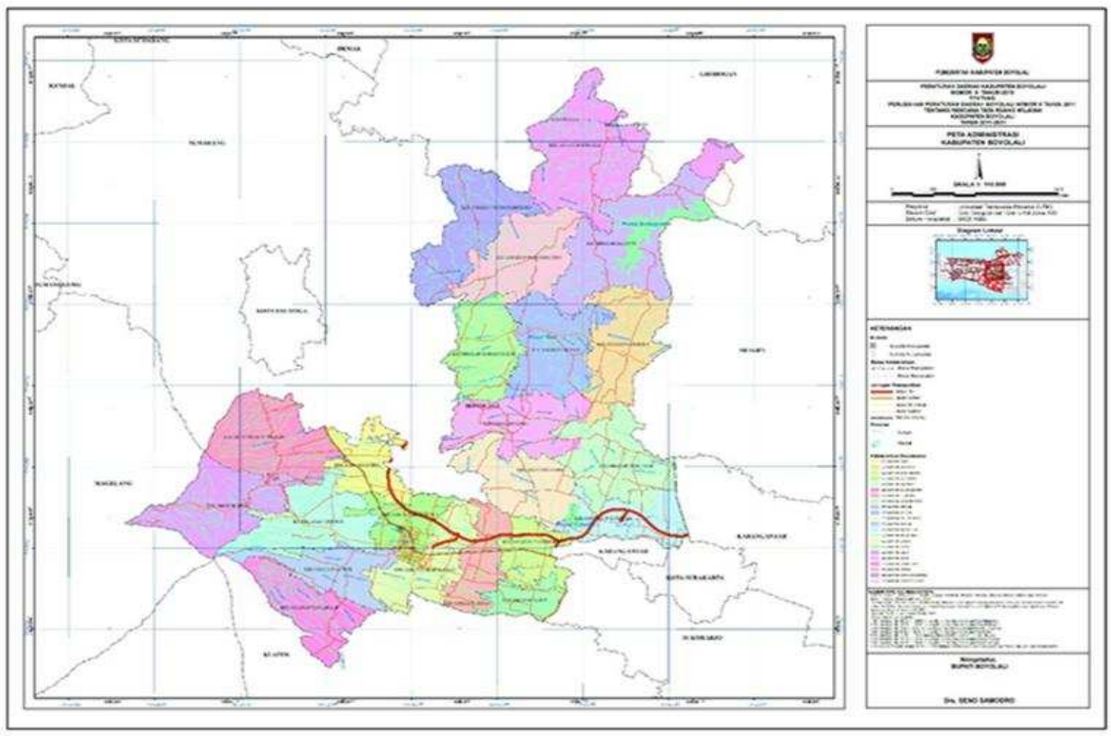

Gambar II. 1
Peta Administrasi Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Juwangi merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, yaitu 96,13 km². Sementara Kecamatan Sawit merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu 18,71 km². Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Boyolali adalah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Sambi, Kecamatan Karanggede, dan Kecamatan Andong dengan jumlah desa masing-masing 16 (enam belas). Kecamatan Boyolali merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) desa.

Tabel II. 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Persentase (%)
1.	Selo	Samiran	60,28	5,50
2.	Ampel	Candi	31,69	2,89
3.	Gladagsari	Gladagsari	62,87	5,73
4.	Cepogo	Mliwis	55,75	5,08
5.	Musuk	Musuk	34,68	3,16
6.	Tamansari	Karangkendal	42,82	3,90
7.	Boyolali	Banaran	29,11	2,65
8.	Mojosongo	Mojosongo	45,81	4,18
9.	Teras	Mojolegi	31,41	2,86
10.	Sawit	Kemasan	18,71	1,71
11.	Banyudono	Jembungan	27,52	2,51
12.	Sambi	Sambi	50,39	4,60
13.	Ngemplak	Sawahan	39,69	3,62
14.	Nogosari	Glonggong	55,69	5,08
15.	Simo	Simo	51,36	4,68
16.	Karanggede	Kebonan	46,78	4,27
17.	Klego	Klego	56,35	5,14
18.	Andong	Kacangan	56,26	5,13
19.	Kemusu	Klewor	84,70	7,72
20.	Wonosegoro	Wonosegoro	57,57	5,25
21.	Wonosamodro	Garangan	61,02	5,56
22.	Juwangi	Juwangi	96,13	8,77
Kabupaten Boyolali		Boyolali	1.096,61	100,00

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka (2025)

Sebaran topografi Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah yang termasuk ke dalam dataran tinggi berada di bagian barat yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari, dan Gladagsari dengan variasi ketinggian wilayah tersebut berada di kisaran 450 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 2
Topografi Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1	Ampel	< 450 – 1399
2	Andong	< 450
3	Banyudono	< 450
4	Boyolali	< 450 – 1399
5	Cepogo	450 - > 2000
6	Gladagsari	450 - > 2000
7	Juwangi	< 450
8	Karanggede	< 450
9	Kemusu	< 450
10	Klego	< 450
11	Mojosongo	< 450 – 699
12	Musuk	< 450 - > 2000
13	Ngemplak	< 450
14	Nogosari	< 450
15	Sambi	< 450
16	Sawit	< 450
17	Selo	700 - > 2000
18	Simo	< 450
19	Tamansari	700 - 1999
20	Teras	< 450
21	Wonosamodro	< 450
22	Wonosegoro	< 450

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Sebagian besar wilayah paling rendah berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali yang meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Wonosamodro, Juwangi, Wonosegoro, Sambi dan sebagian Kecamatan Boyolali, yaitu berada di kisaran ketinggian <450 mdpl.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

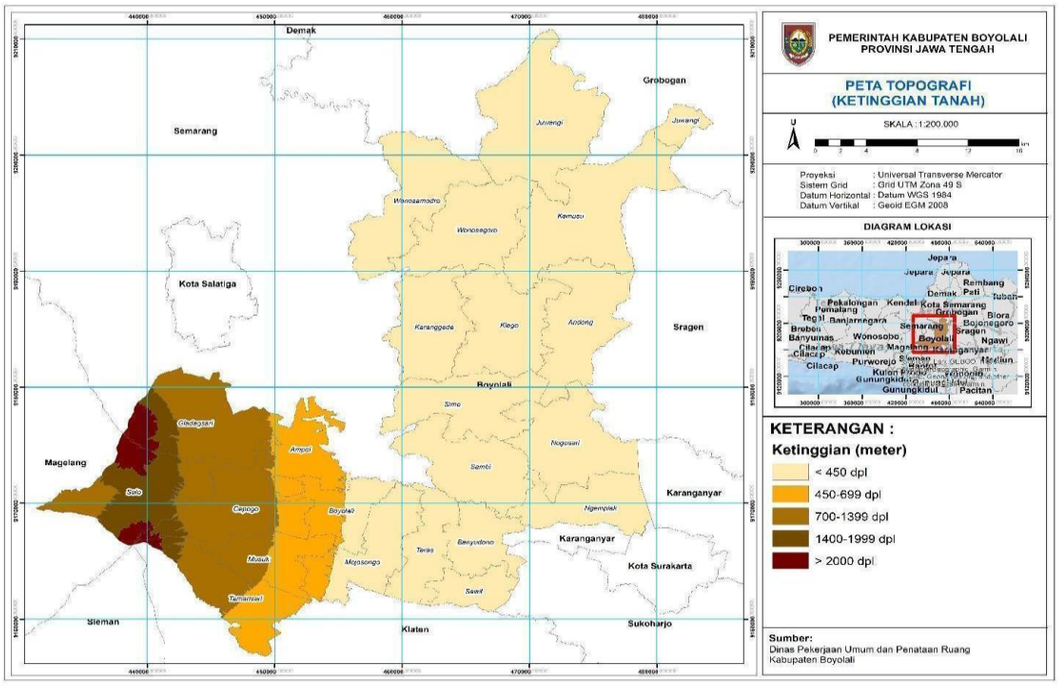

Gambar II. 2
Peta Topografi Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Klasifikasi tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi 5 (lima) jenis. Secara umum wilayah Kabupaten Boyolali didominasi oleh dataran dengan tingkat kemiringan 2 – 15% tersebar di wilayah dataran berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali. Wilayah barat Kabupaten Boyolali didominasi oleh daerah yang memiliki tingkat kemiringan 15 - >40%. Jika dilihat per wilayah kecamatan, daerah yang memiliki tingkat kemiringan >40% adalah kecamatan Selo dan Gladagsari. Kondisi tersebut dipengaruhi kondisi geografis keduanya yang terletak di antara lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Tabel II. 3
Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng
1	Ampel	2 – 15% s.d. > 40%
2	Andong	0 – 2% s.d. > 40%
3	Banyudono	0 – 2% s.d. 25 – 40%
4	Boyolali	2 – 15% s.d. 25 – 40%
5	Cepogo	2 – 15% s.d. > 40%
6	Gladagsari	2 – 15% s.d. > 40%
7	Juwangi	0 – 2% s.d. > 40%
8	Karanggede	0 – 2% s.d. > 40%
9	Kemusu	0 – 2% s.d. > 40%
10	Klego	0 – 2% s.d. > 40%
11	Mojosongo	2 – 15% s.d. 25 – 40%
12	Musuk	2 – 15% s.d. > 40%
13	Ngemplak	0 – 2% s.d. 25 – 40%
14	Nogosari	0 – 2% s.d. > 40%
15	Sambi	0 – 2% s.d. > 40%
16	Sawit	0 – 2% s.d. 15 – 25%
17	Selo	2 – 15% s.d. > 40%

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng
18	Simo	0 – 2% s.d. > 40%
19	Tamansari	2 – 15% s.d. > 40%
20	Teras	2 – 15% s.d. > 40%
21	Wonosamodro	0 – 2% s.d. > 40%
22	Wonosegoro	0 – 2% s.d. > 40%

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

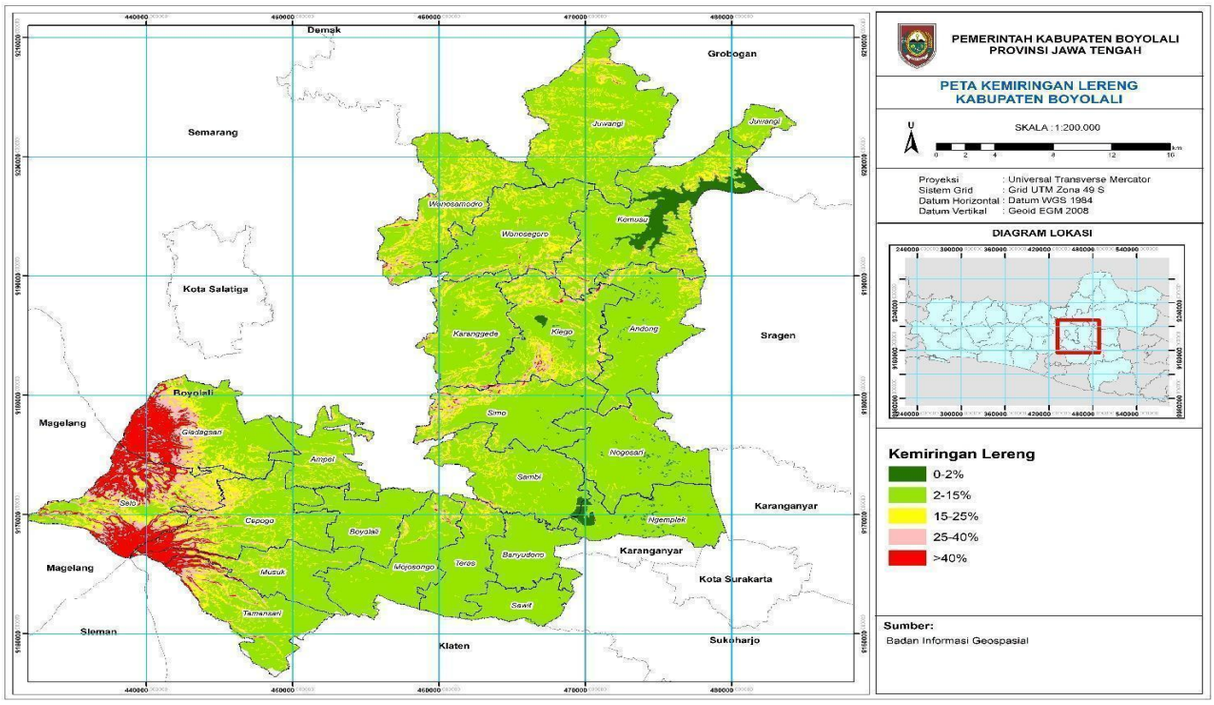

Gambar II. 3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Kondisi hidrologi di Kabupaten Boyolali cukup berlimpah karena termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Serang, DAS Progo, dan DAS Tuntang. DAS Bengawan Solo berada dalam pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Total luas masing-masing DAS adalah sebagai berikut: DAS Bengawan Solo sebesar 1.593.902 hektar, DAS Serang sebesar 401.248 hektar, DAS Progo sebesar 246.208 hektar, dan DAS Tuntang sebesar 130.040 hektar. Pemetaan wilayah sungai di Kabupaten Boyolali terlihat pada gambar di bawah ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

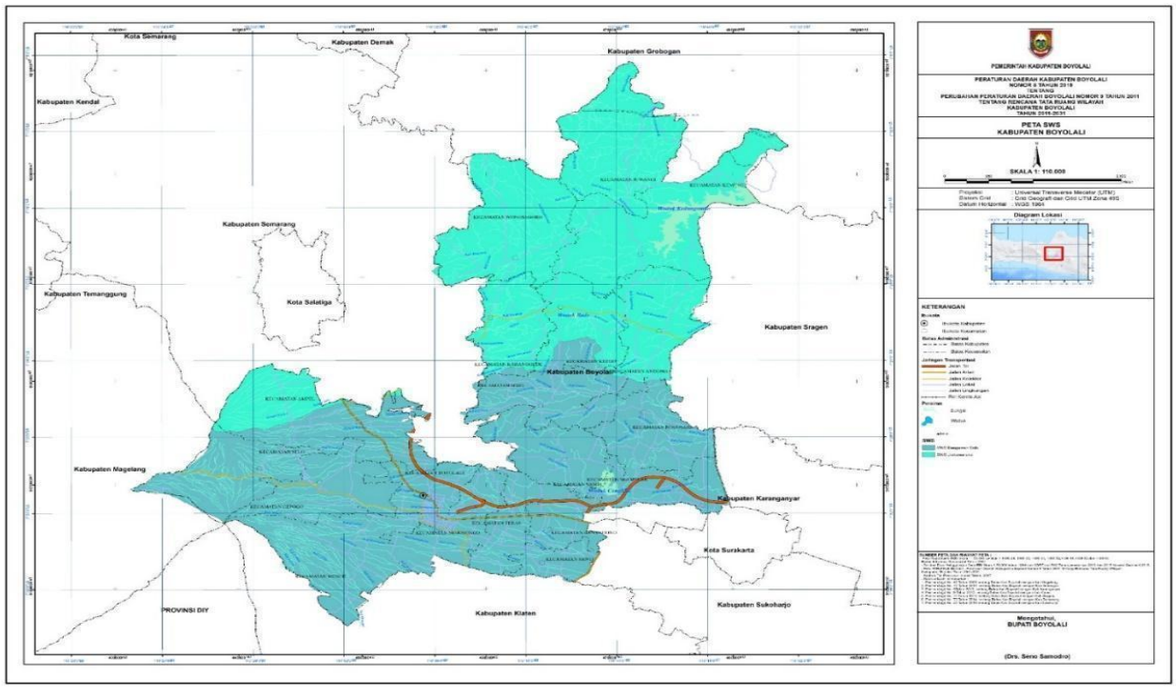

Gambar II. 4
Peta Wilayah Sungai Kabupaten Boyolali
(Sumber: Perda No. 8 tahun 2019)

Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki beberapa sumber air, baik alami maupun buatan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakter hidrologi yang ada di Kabupaten Boyolali memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, kondisi topografi, maupun struktur geologi wilayah. Beberapa sumber hidrologi potensial yang dimiliki Kabupaten Boyolali berupa sungai dan waduk, dengan rincian sebagai berikut.

a. sungai

Kabupaten Boyolali memiliki sebanyak 46 (empat puluh enam) aliran sungai. Sungai terpanjang di Kabupaten Boyolali adalah sungai Gandul sepanjang 28,5 km dengan debit air minimal di angka 6.960 m^3/detik serta maksimal di angka 7.128 m^3/detik. Sungai Gandul mengalir dari Lereng Gunung Merapi melewati Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras dan Sawit. Sedangkan jika dilihat dari ukuran debit air, Sungai Pepe dengan panjang 11,5 km memiliki debit air terbesar di Kabupaten Boyolali dengan debit air minimal di angka 11.179 m^3/detik serta debit air maksimal di angka 24.346 m^3/detik. Sungai ini mengalir dari lereng Gunung Merbabu hingga Sungai Bengawan Solo. Debit air yang besar menjadi salah satu potensi hidrologi yang dapat dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangkit listrik, maupun untuk lokasi wisata.

b. waduk/situ/embung

Salah satu potensi hidrologi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali adalah Waduk Kedungombo yang terletak di Kecamatan Kemusu. Sesuai dengan namanya waduk ini menjadi waduk terluas di Kabupaten Boyolali dengan luas 3.536,00 ha yang memiliki volume 723.000.000,00 m^3. Waduk ini menggunakan Kali Serang sebagai sumber air utamanya. Sumber air lainnya dipasok dari beberapa anak sungai besar maupun kecil lainnya. Beberapa anak sungai yang menyuplai air ke Waduk Kedungombo antara lain adalah Sungai Braholo, Sungai Tengah, Sungai Nglanji, Sungai Tapen dan Sungai Sambas. Waduk Cengklik yang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

berlokasi di Kecamatan Sambi dan Ngemplak merupakan waduk yang menjadi potensi irigasi dan potensi ekonomi di Kabupaten Boyolali. Waduk tersebut memiliki luas 336,00 ha dengan volume 9.299.240,00 m^3. Waduk Cengklik menjadi objek wisata di Kabupaten Boyolali dan merupakan potensi ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali. Selain itu, terdapat Waduk Klego atau dikenal juga sebagai Waduk Bade yang terletak di Kecamatan Klego. Waduk ini memiliki fungsi utama sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian di sekitarnya sekaligus berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata perairan. Dengan keberadaannya, Waduk Klego tidak hanya mendukung ketahanan pangan melalui suplai air irigasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas perikanan dan wisata lokal.

Wilayah Kabupaten Boyolali berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Salatiga dengan luas sekitar 85 km^2 dan Cekungan Air Tanah Karanganyar Boyolali dengan Luas 3.877 Km^2. CAT Salatiga yang terdapat di Kawasan Daerah menggunakan sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir. Tingkat produktivitas akuifer tergolong rendah dengan debit <2 lt/detik (0,28-1,47 lt/detik) yang terletak di Kecamatan Selo dan Kecamatan Wonosegoro. Jumlah air tanah bebas pada CAT Salatiga sebesar 10.000.000 m^3/tahun dan jumlah air tanah tertekan sebesar 2.000.000 m^3/tahun. Sedangkan litologi akuifer utama dari Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali berupa endapan sungai: pasir-kerakal; batuan Gunung Api Gunung Merapi: breksi gunung api, lava vesikuler/scoria, dan tuf; batuan Gunung Api Lawu tak teruraikan: breksi gunung api, lava, tuf, dan breksi lahar. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Boyolali sebagai berikut secara geologis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 4
Jenis Tanah di Kabupaten Boyolali

No	Jenis Tanah	Lokasi (Kecamatan)
1.	Asosiasi litosol dan grumosol	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Wonosamodro dan Juwangi.
2.	Litosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Ampel, Gladagsari dan Selo.
3.	Regosol kelabu	Kecamatan Cepogo, Ampel, Gladagsari Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit.
4.	Regosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Musuk, Tamansari, Mojosongo, Teras, Sawit dan Banyudono.
5.	Andosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Ampel, Gladagsari dan Selo.
6.	Kompleks regosol kelabu dan grumosol	Kecamatan Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro dan Juwangi.
7.	Grumosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Simo, Sambi, Nogosari, dan Ngemplak.
8.	Kompleks andosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
9.	Asosiasi grumosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Simo, Sambi, Nogosari dan Ngemplak.
10.	Mediteranian cokelat tua	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Wonosamodro, Simo, Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambi, Teras dan Banyudono.

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

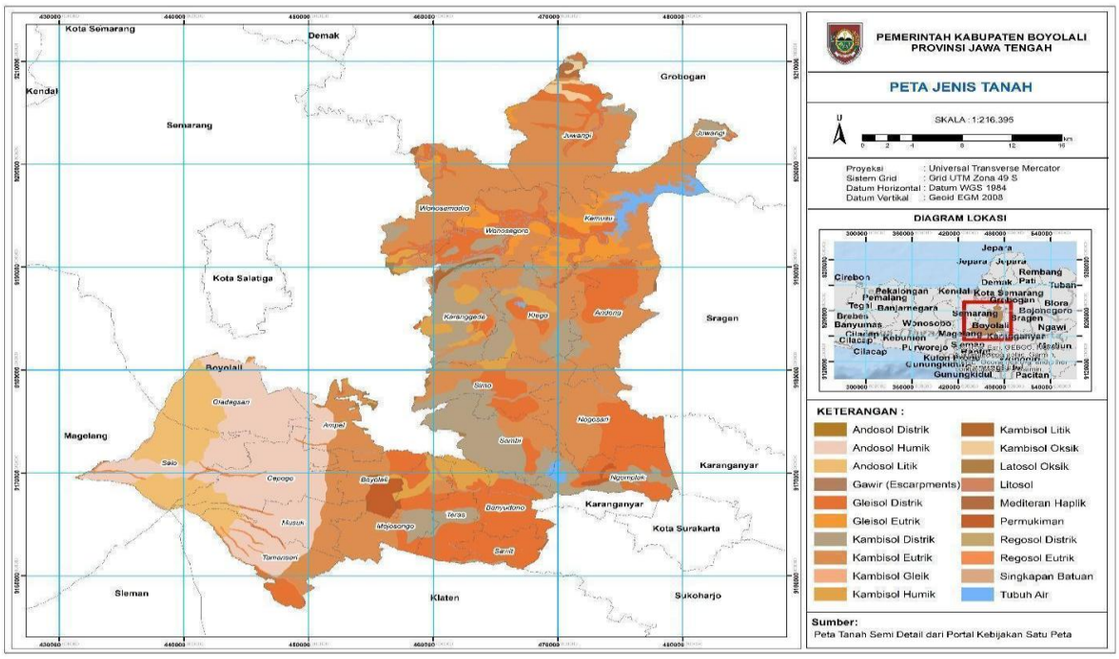

Gambar II. 5
Peta Jenis Tanah Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit Bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu.

Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama.

Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain, kekeringan, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat dan penurunan keanekaragaman hayati. Melihat dampak perubahan iklim yang luas, pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan hal tersebut. Kabupaten Boyolali telah mencanangkan Program Kampung Iklim guna mendorong kelompok masyarakat melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Proklim yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat kampung terlibat secara aktif dalam pengelolaannya. Proklim merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal dan merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016. tentang Program Kampung Iklim. Perkembangan program Kampung Iklim Kabupaten Boyolali awalnya pada tahun 2016 hanya 1 (satu) namun kini hingga tahun 2024 program kampung iklim Kabupaten Boyolali sebanyak 63 (enam puluh tiga).

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali sangat bervariasi meliputi sektor pertanian, industri, jasa serta pariwisata. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Boyolali dilaksanakan berdasar potensi komoditas unggulan, kondisi sosial, ekonomi serta pengaturan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. Penetapan kawasan pada RTRW Kabupaten Boyolali dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatannya.

Pengalokasian ruang tersebut selain merujuk pada kesesuaian lahan, juga mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan prioritas nasional atau daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan kelestarian lingkungan hidup. Adapun identifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali terbagi dalam beberapa jenis kawasan sebagaimana dalam Peta Rencana Pola Ruang berikut:

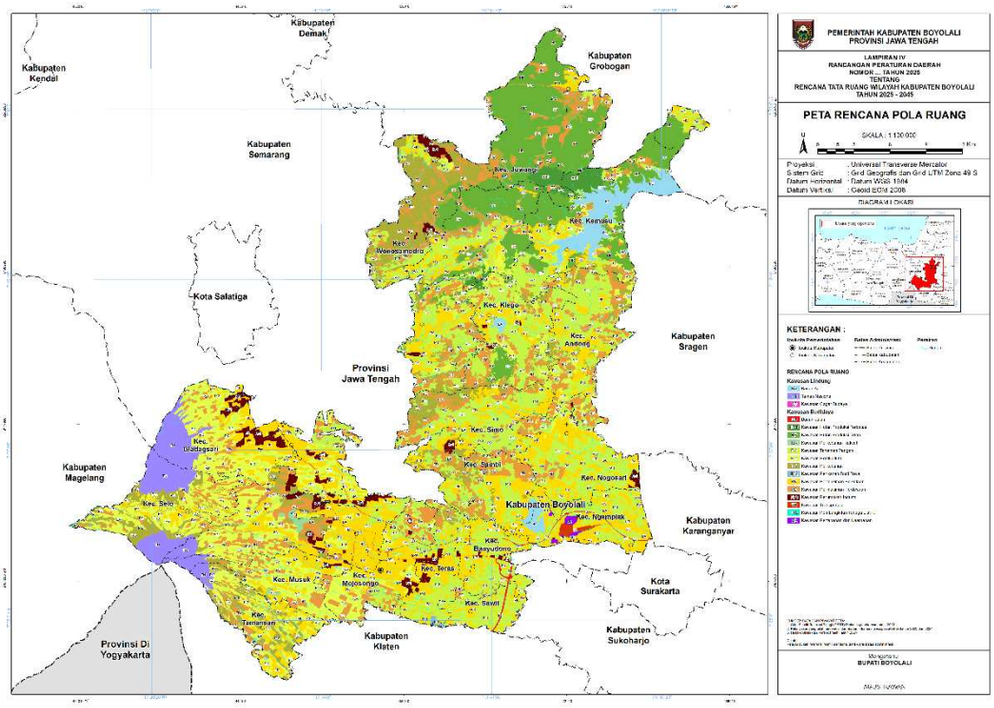

Gambar II. 6
Peta Rencana Pola Ruang
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat dan kawasan pertanian. Kawasan budidaya hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.588 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar berada di wilayah Kecamatan Andong, Juwangi, Karanggede, Klego, Kemusu, Simo, Wonosegoro dan Wonosamodro serta hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar berada di wilayah Kecamatan Klego, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro dan Wonosamodro. Kawasan hutan rakyat terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, seluas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar. Adapun pola ruang kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 21.134 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh empat) hektar. Sedangkan luas realisasi penggunaan lahan sawah di Kabupaten Boyolali dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 5
Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Sawah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Selo	35	35	35	35	35
2.	Ampel	531	531	531	532	532
3.	Cepogo	55	55	55	55	55
4.	Musuk	-	-	-	-	-
5.	Boyolali	285	285	285	285	285
6.	Mojosongo	891	891	891	943	943
7.	Teras	1.423	1.423	1.423	1.365	1.365
8.	Sawit	1.263	1.263	1.263	1.245	1.245
9.	Banyudono	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
10.	Sambi	2.123	2.123	2.123	2.160	2.160
11.	Ngemplak	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
12.	Nogosari	2.490	2.490	2.490	2.480	2.480
13.	Simo	2.117	2.117	2.117	2.086	2.086
14.	Karanggede	1.586	1.586	1.586	1.682	1.682
15.	Klego	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
16.	Andong	2.233	2.233	2.233	2.234	2.234
17.	Kemusu	503	503	503	503	503
18.	Wonosegoro	1.237	1.237	1.237	1.239	1.239
19.	Juwangi	380	380	380	381	381
20.	Tamansari	-	-	-	-	-
21.	Gladagsari	-	-	-	-	-
22.	Wonosamodro	789	789	789	794	794
Jumlah		22.693	22.390	22.390	22.467	22.467

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2025

Sedangkan pola ruang pertanian lahan kering dibedakan menjadi Kawasan Pertanian Lahan Kering 14.943 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) hektar dan Kawasan Perkebunan 10.866 (sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar, sedangkan realisasi penggunaan lahan untuk pertanian lahan kering dan Kawasan Perkebunan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel II.2 Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan. Lokasi kawasan pertanian hortikultura berada di Kecamatan Ampel, Andong, Boyolali, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Nogosari, Sambi, Selo, Simo, Tamansari, Teras, Wonosamodro, dan Wonosegoro.

Kawasan perikanan budidaya berada di seluruh kecamatan. Kawasan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Mojosongo, Sawit, dan Teras. Kawasan pengolahan ikan berada di Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit dan potensi pengolahan ikan di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT)–Balai Benih Ikan (BBI) yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Tlatar dan Metuk.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.360 (dua ribu tiga ratus enam puluh) hektare meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Gladagsari, Karanggede, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Teras, Wonosamodro, dan Wonosegoro. Klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Perdagangan adalah Industri Kimia Dasar, Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronik (IMELDE), Aneka Industri, Industri Kecil (IK) dan Industri pariwisata. Industri besar terdiri atas industri permesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya. Industri menengah terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis lainnya. Kabupaten Boyolali mengakomodasi kegiatan industri tersebut untuk meningkatkan produktivitas kawasan sehingga meningkatkan laju perekonomian wilayah.

Kawasan wisata alam meliputi Air Terjun Kedung Kayang di Kecamatan Selo, Sumber Sipendok di Kecamatan Gladagsari, Agrowisata Sapi Perah di Kecamatan Cepogo, dan Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu. Kawasan wisata religi terdiri atas Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro di Kecamatan Selo, dan Makam Ki Ageng Pantaran di Kecamatan Gladagsari. Kawasan wisata budaya terdiri atas kesenian tradisional dan upacara tradisional di Kecamatan Selo, wayang di Kecamatan Sawit, upacara tradisional di Kecamatan Banyudono dan lain-lain. Kawasan wisata rekreasi meliputi Pesanggrahan Paras di Kecamatan Cepogo, Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak, Waduk Kedungombo di Kecamatan Kemusu, dan lain-lain.

Kawasan permukiman kota mencapai 21.710 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh) hektare berada di seluruh Kecamatan mencakup wilayah pengembangan kota untuk ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik yang telah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun yang belum. Kebijakan pemanfaatan ruangnya bertujuan untuk mengembangkan sarana prasarana penunjang yang meliputi penataan ruang kota termasuk peninjauan kembali (evaluasi dan revisi) jika diperlukan.

Sedangkan Kawasan permukiman pedesaan diarahkan pada kepadatan penduduk rendah hingga sedang dengan luas mencapai lebih 13.729 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) hektare berada di Kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Tamansari, Teras, Wonosamodro, dan Wonosegoro.

Perkada RDTR perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang sehingga arah pembangunan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu RDTR sebagai acuan perizinan investasi melalui integrasi dengan sistem OSS dan menjadi alat pengendalian agar pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. daya dukung dan daya tampung air

Daya dukung air merupakan kemampuan suatu lingkungan atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi (penduduk dan kegiatan budidaya di dalamnya) dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumber daya air. Status daya dukung air dihitung dengan menggunakan pendekatan ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten Boyolali. Perhitungan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Boyolali merujuk pada Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020.

Status daya dukung air berdasarkan dokumen RPPLH Kabupaten Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tahun 2023-2053, dihitung berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pemodelan mengikuti perhitungan dari Status D3TLH Air Nasional, dengan sedikit modifikasi berupa ketersediaan air dihitung dengan menggunakan pemodelan curah hujan rerata maka diperoleh hasil Kabupaten Boyolali berada pada status daya dukung dan daya tampung air terlampaui sebesar 38% dan tidak terlampaui sebesar 62%. Kemungkinan akan ada perbedaan dengan data bencana kekeringan, hal ini disebabkan pemodelan ini menggunakan data curah hujan sebagai ketersediaannya dan bukan debit air permukaan. Sehingga dapat dikatakan apabila terjadi kekeringan di Kabupaten Boyolali lebih disebabkan oleh manajemen air yang kurang baik, sebab secara curah hujan air dapat dikatakan Kabupaten Boyolali sudah tercukupi, namun akibat banyak air hujan yang langsung lewat saluran drainase yang mengakibatkan ketersediaan air permukaan menjadi sangat berkurang. Apabila dapat dilakukan pemanenan air hujan, maka kebutuhan air di Kabupaten Boyolali akan tercukupi.

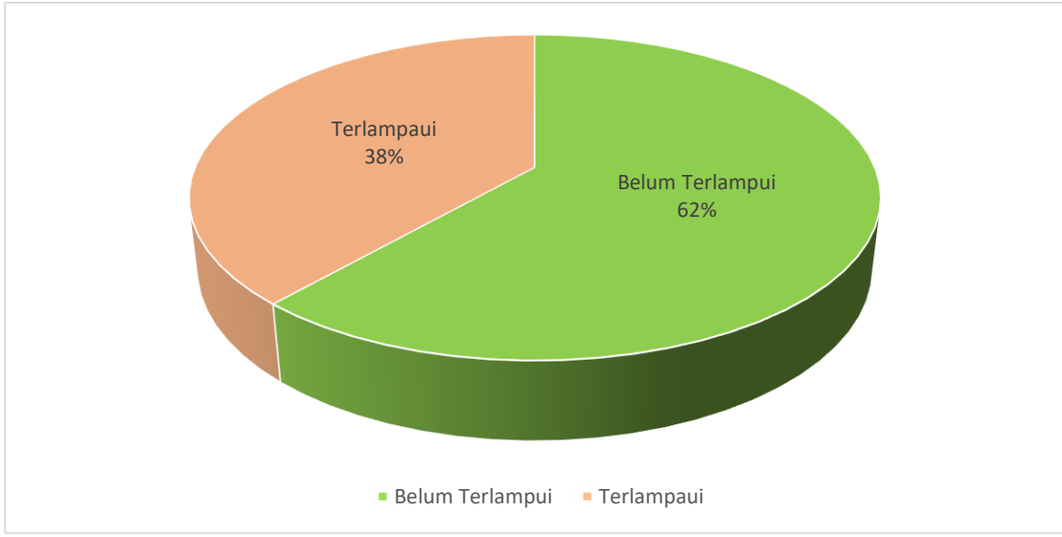

Gambar II. 7
Persentase D3TLH Air Kabupaten Boyolali
(Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053)

Walaupun secara umum status terlampaui dan tidak terlampaui tersebar secara merata namun yang perlu mendapat perhatian adalah Kecamatan Juwangi, Kemusu dan Wonosegoro yang kondisi wilayahnya memiliki status air terlampauinya cukup besar. Secara rinci, sebaran luas kecamatan berdasarkan status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Boyolali pada dokumen RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel II. 6
Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Ampel	2.659,02	197,79
2	Andong	4.134,23	1.037,55
3	Banyudono	1.904,94	621,37
4	Boyolali	2.823,23	105,00
5	Cepogo	5.048,91	297,21
6	Gladagsari	5.717,84	7,52
7	Juwangi	2.447,30	6.361,64
8	Karanggede	3.828,27	454,88
9	Kemusu	5.636,90	1.982,43

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui
10	Klego	4.613,91	657,19
11	Mojosongo	3.562,21	417,26
12	Musuk	3.341,37	288,86
13	Ngemplak	2.653,79	729,55
14	Nogosari	3.809,77	1.222,95
15	Sambi	4.133,04	688,61
16	Sawit	1.126,38	558,63
17	Selo	5.534,07	293,04
18	Simo	3.978,98	845,92
19	Tamansari	3.959,65	-
20	Teras	2.560,34	344,43
21	Wonosamodro	4.991,47	365,88
22	Wonosegoro	3.710,80	1.856,08
Total		**82.176,42**	**19.333,78**

Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053

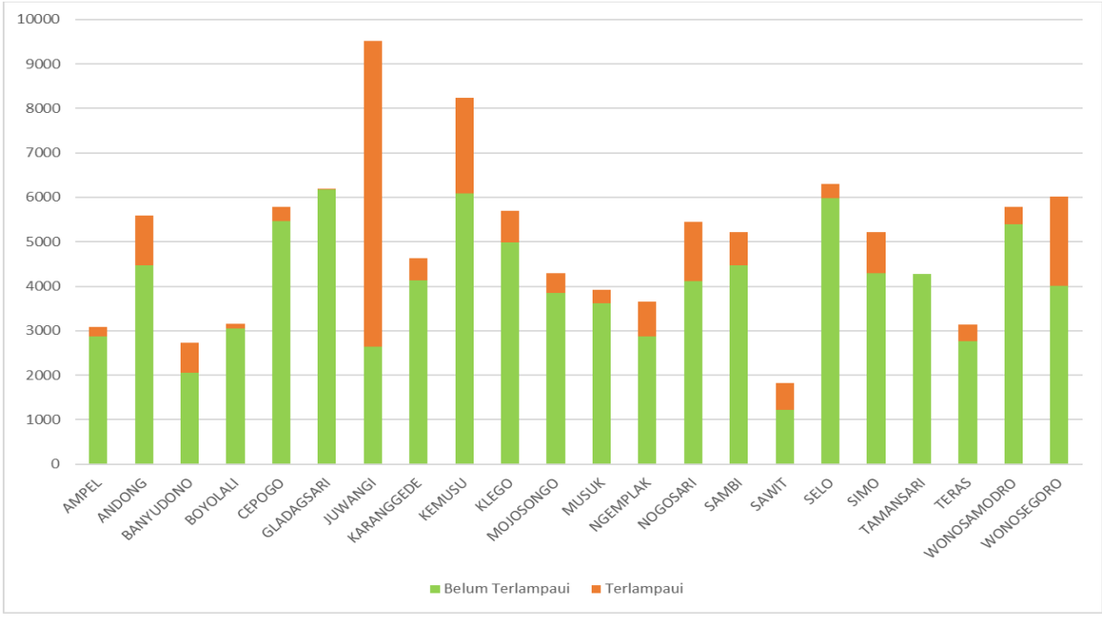

Gambar II. 8
Persentase Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Boyolali
(Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053)

Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung air bersih di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

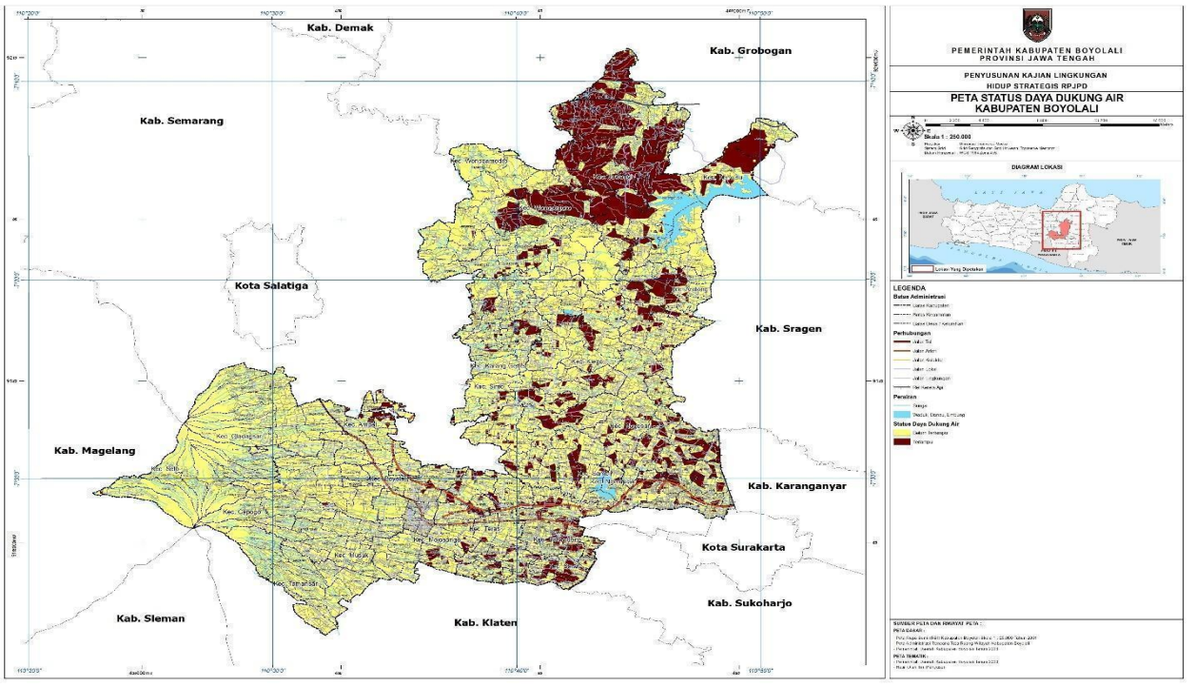

Gambar II. 9
Peta Status D3TLH Air Kabupaten Boyolali
(Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053)

Posisi sebagai hulu dari DAS dengan dominasi status D3TLH Airnya terlampaui tentu sangat rawan, mengingat kawasan hulu DAS menyumbang suplai air ke kawasan di bagian bawah atau bagian hilir. Peran vital ini sering disebut sebagai menara air bagi wilayah di bawahnya atau bertopografi lebih rendah. Oleh karena itu hal-hal yang terkait penyediaan air menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Selain berpengaruh terhadap DAS, Status D3TLH Air di Kabupaten Boyolali juga mempengaruhi Cekungan Air Tanah yang ada. Di Kabupaten Boyolali terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Karanganyar-Boyolali, CAT Magelang-Temanggung dan CAT Salatiga. Pengaruhnya adalah terhadap keberlangsungan CAT sebagai cadangan (reserve) air.

Berdasar pada data penggunaan lahan eksisting diperoleh informasi nilai koefisien limpasan tertimbang (C) di Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 0,3710. Selengkapnya perhitungan koefisien limpasan tertimbang (C) sebagai berikut:

Tabel II. 7
Penilaian Koefisien *Run Off* Tertimbang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Nilai C	Luas x Nilai C	Nilai C Tertimbang (Total Nilai C/Total Luas)
1	Embung/Waduk	1,56	0	0	0,3710
2	Hutan	3424,61	0,1	342,461	
3	Hutan Jati	11895,69	0,18	2141,2242	
4	Industri	246,4	0,9	221,76	
5	Kebun	11172,55	0,3	3351,765	
6	Kebun Campuran	1514,17	0,3	454,251	
7	Perikanan	29,7	0	0	
8	Permukiman	24374,24	0,7	17061,968	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Nilai C	Luas x Nilai C	Nilai C Tertimbang (Total Nilai C/Total Luas)
9	Sawah Irigasi	20504,03	0,3	6151,209	
10	Sawah Tadah Hujan	1811,65	0,3	543,495	
11	Semak	216,07	0,2	43,214	
12	Sungai	716,55	0	0	
13	Tambang	5,15	0,4	2,06	
14	Tegalan	23781,86	0,3	7134,558	
15	Transportasi	230,98	0,9	207,882	
16	Waduk	1585,01	0	0	
Jumlah Total		101510,22		37655,8472	

Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Boyolali saat ini sudah terlampaui. Adanya kondisi tersebut perlu dilakukan beberapa skenario dalam meningkatkan kondisi daya dukung air di Kabupaten Boyolali. Selengkapnya upaya dalam peningkatan daya dukung air sebagai berikut.

1. peningkatan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. peningkatan perlindungan kawasan sempadan sungai, waduk dan mata air;
3. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai maupun waduk;
4. peningkatan Pengawasan dan Pembinaan *Higiene* Sanitasi Sarana Air Minum;
5. pengembangan sumur resapan dan biopori;
6. revitalisasi mata air melalui kegiatan penghijauan *recharge* area;
7. pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan;
8. penyediaan infrastruktur air bersih yang adaptif iklim;
9. peningkatan peran kelembagaan sumber daya air;
10. pengadaan tampungan-tampungan air misalnya dalam bentuk kolam retensi;
11. pembangunan sumur resapan dan biopori baru;
12. pembangunan RTH sebagai fungsi ekologis resapan air;
13. penghijauan sempadan sungai dan mata air;
14. pemanenan air hujan melalui pengembangan embung dan penampung air lainnya;
15. pengendalian pemanfaatan air tanah;
16. pemberian insentif penghematan air pada sektor pertanian/perkebunan dan perindustrian; dan
17. terinternalisasinya Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam RTRW.

Untuk meningkatkan kualitas daya tampung air yang ada di Kabupaten Boyolali, dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

1. peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
2. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah;
3. pengoptimalan kinerja pengelolaan air limbah;
4. pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

5. monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas IPAL pada setiap perusahaan;
6. pengoptimalan kinerja IPAL bagi rumah tangga dan industri kecil di kawasan perkotaan;
7. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
8. pemeliharaan saluran drainase kota dan lingkungan;
9. pembangunan IPAL komunal untuk mengolah limbah cair rumah tangga;
10. pengembangan kinerja pengelolaan air limbah;
11. pengembangan serta pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
12. penindakan kepada pihak yang mencemari sumber air;
13. pengendalian kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air melalui upaya pengendalian tata ruang, khususnya kegiatan industri;
14. monitoring dan evaluasi kualitas air secara berkala;
15. pembangunan IPAL pada setiap perusahaan yang memiliki potensi limbah;
16. monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas IPAL pada setiap perusahaan; dan
17. sosialisasi peraturan terkait pengelolaan limbah kepada pelaku usaha.

Pengelolaan kehutanan di Kabupaten Boyolali telah menunjukkan langkah maju melalui skema Perhutanan Sosial yang memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat. Saat ini terdapat empat Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang telah diterbitkan, yaitu Wonosari I di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu seluas 33 hektare, Wonosari II di desa yang sama seluas 400 hektare, Wonomakmur I di Desa Gondanglegi Kecamatan Klego seluas 103 hektare, serta Wonomakmur II di desa yang sama seluas 191 hektar. Keberadaan IPHPS ini bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola lahan, tetapi juga mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

b. daya dukung pangan

Status daya dukung pangan Kabupaten Boyolali, dilakukan melalui pendekatan analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan daya dukung pangan ditentukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan serta daya dukung lahan pertanian padi.

Perhitungan daya dukung lahan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$a = x / k$$

Dimana:

a = daya dukung lahan

x = luas lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan/padi (x dicari dengan menggunakan rumus)

x = luas panen/jumlah penduduk

Kriteria nilai α, dimasukkan dalam standar evaluasi sebagai berikut:

- α > 1, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- α < 1, berarti wilayah tersebut tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal.
- α = 1, berarti wilayah tersebut memiliki daya dukung yang optimal.

➢ Perhitungan daya dukung lahan sawah pada tahun 2024: Luas lahan yang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

tersedia (X) sebesar 0,047; Luas lahan yang diperlukan (k) sebesar 0,02, sehingga daya dukung lahan (α) sebesar 2,27;

Berdasarkan perhitungan daya dukung lahan sawah dari tahun 2024, daya dukung lahan sawah mempunyai nilai α > 1. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali masih mampu melakukan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya belum melampaui jumlah penduduk optimal.

Status daya dukung pangan Kabupaten Boyolali, dilakukan melalui pendekatan analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

1. perhitungan kebutuhan (*Demand*)
   a. menghitung jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2024.
      Jumlah penduduk tahun 2024: 1.114.070jiwa
   b. menentukan indeks konsumsi beras penduduk pertahun.
      Dalam hal ini, indeks konsumsi beras per tahun ditentukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan kepada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebesar 124,89 kg/kap/tahun.
   c. menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi dan indeks konsumsi beras penduduk per tahun dengan cara:
      Kebutuhan beras total = penduduk hasil proyeksi x indeks konsumsi beras
      Hasil perhitungan kebutuhan beras Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 8
Kebutuhan Beras Kabupaten Boyolali

Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	989.619	1.070.247	1.079.952	1.090.129	1.114.070
Indeks Konsumsi Beras (Kg/Kap/Thn)*)	78,48	81,51	81,04	80,90	79,08
Produksi Beras (Ton)	128.965,46	164.554,00	169.015	159.313	163.634
Produksi Padi/ GKG (Ton)	225.425,92	286.152,00	293.909	277.038	284.552
Luas Panen (Ha)	47.760	50.948	51.248	49.819	50.394

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2025

*Keterangan: *) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan kepada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebesar 124,89 kg/kap/tahun*

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2. perhitungan ketersediaan (*Supply*)

a. produksi padi di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan:

Total produksi padi (ton) = Luas lahan padi sawah (Ha) x IP x produktivitas padi (ton/ha)

Catatan: untuk menghitung IP (Indeks penanaman padi) digunakan rumus:
IP direncanakan 200 (dalam 1 tahun direncanakan panen sebanyak 2 kali)
Produktivitas padi (Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2023): 5,735 ton/Ha

b. produksi beras di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan:

Total produksi beras (Ton) = Total Produksi Padi / GKG (Ton) x Indeks konversi padi ke beras

Catatan: Indeks Konversi padi ke beras (1 Kg GKG = 0,575 Kg Beras)

Tabel II. 9
Produksi Beras Kabupaten Boyolali

Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Baku Sawah (ha)	22.390	22.390	22.518,9	22.525,6	22.481,4
Produksi Padi/ GKG (Ton)	225.425,92	286.152,00	293.909	277.038	284.552
Faktor Konversi Beras (kg)	0,5721	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751
Produksi Beras (Ton)	128.965,46	164.554,00	169.015	159.313	163.634

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2025

c. tingkat produktivitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras penduduk di Kabupaten Boyolali.

- Jika total *supply* < 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.
- Jika total *supply* = 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.
- Jika total *supply* > 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.

Produktivitas lahan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 10
Produktivitas Lahan Kabupaten Boyolali

Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	989.619	1.070.247	1.079.952	1.090.129	1.114.070
Produksi Beras (Ton)	128.965,46	164.554,00	169.015	159.313	163.634
Konsumsi Fisik Beras minimum/ tahun (Ton)	77.665	87.236	87.519	88.191	86.976
Supply Beras (Ton)	51.300,16	77.318,17	81.495,69	71.121,56	76.657,86
Keterangan	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian untuk pemenuhan pangan (beras) mempunyai nilai > 0,12 ton/orang/tahun yang berarti bahwa Kabupaten Boyolali mengalami surplus dalam pemenuhan pangan beras penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali masih mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya.

3. daya dukung lahan pertanian padi di Kabupaten Boyolali

Perhitungan daya dukung lahan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$a = x / k$$

Dimana:

a = daya dukung lahan

x = luas lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan/padi (x dicari dengan menggunakan rumus)

x = luas panen/jumlah penduduk

Luas panen tahun 2024 menggunakan luas panen tahun 2024 seluas 51.248 ha.

k = luas lahan yang diperlukan untuk swasembada pangan. (k dicari dengan rumus)

k = konsumsi fisik minimal beras / produksi beras rata-rata

Konsumsi Fisik Minimal (KFM) dihitung dari kebutuhan beras sebesar 342 gr/orang/hari atau setara dengan 124,89 kg/org/tahun. Produksi beras rata-rata/ha dikonversikan dari padi ke beras sebesar 0,575. Nilai α, dipergunakan sebagai indikator kemampuan lahan tanaman padi terhadap jumlah penduduk di satu wilayah.

Kriteria nilai α, dimasukkan dalam standar evaluasi sebagai berikut:

- α > 1, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- α < 1, berarti wilayah tersebut tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal.
- α = 1, berarti wilayah tersebut memiliki daya dukung yang optimal.

Perhitungan daya dukung lahan sawah dapat dilihat pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 11
Daya Dukung Lahan Sawah Kabupaten Boyolali

Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Lahan yang tersedia (X)	22.390,0	22.390,0	22.518,9	22.525,6	22.481,4
Luas Lahan yang diperlukan (k)	22.390,0	22.390,0	22.518,9	22.525,6	22.481,4
Daya Dukung Lahan (α)	2,90	3,28	3,36	3,14	3,27

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2025

Dari perhitungan posisi daya dukung lahan sawah pada tahun 2024, daya dukung lahan sawah mempunyai nilai α > 1. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali masih mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya belum melampaui jumlah penduduk optimal.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan sebagai berikut.

1. pengujian dan peningkatan mutu benih;
2. peningkatan infrastruktur pertanian dalam mendukung kegiatan budidaya pertanian;
3. pengawasan perubahan pemanfataan ruang pada pertanian;
4. pemberian insentif disinsentif bagi petani;
5. peningkatan produktivitas pertanian;
6. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. peningkatan mutu dan keamanan pangan;
8. sosialisasi terkait sistem kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
9. peningkatan program diversifikasi pangan;
10. peningkatan program intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi pertanian;
11. penanganan kerawanan pangan;
12. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
13. peningkatan konsumsi pangan;
14. pembangunan prasarana pendukung pertanian; dan
15. pengendalian OPT atau Organisme Pengganggu Tanaman.

c. pengelolaan persampahan

Kondisi timbulan sampah di Kabupaten Boyolali semakin mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Potensi timbulan sampah Kabupaten Boyolali berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mengalami kenaikan 1,01% pada tahun 2020-2021, dan kenaikan 0,59% pada tahun 2021-2022. Upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah juga mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 26.628,17 ton meningkat menjadi 29.914,85 ton. Kondisi daya tampung TPA Winong masih mampu menampung timbulan sampah Kabupaten Boyolali. Luas TPA Winong sebesar 64.700 m^2 dengan Kapasitas TPA Winong sebesar 54.630 m^3 dan telah digunakan sebesar 21.370 m^3 sehingga kapasitas yang masih bisa digunakan sebesar 33.260 m^3. Beberapa upaya untuk meningkatkan penanganan sampah dapat dilakukan melalui:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
2. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa TPS, Bank sampah, dan TPS3R;
3. peningkatan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah;
4. mewujudkan pengelolaan sampah mandiri tingkat desa;
5. pemilahan sampah organik dan anorganik dari hulu atau tingkat rumah tangga sehingga memudahkan proses pengelolaan sampah;
6. optimalisasi pemrosesan sampah di TPA dalam rangka memperpanjang usia TPA;
7. perbaikan sistem pengelolaan sampah antara lain dengan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem *sanitary landfill* dan pengembangan pengolahan sampah dengan teknologi modern; dan
8. penambahan lahan TPA.

Adapun upaya untuk meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan melalui:

1. menggiatkan pengolahan sampah dari sumber sampah di tingkat rumah tangga melalui pengomposan dan daur ulang;
2. sosialisasi pengurangan barang sekali pakai;
3. sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
4. peningkatan dan pengembangan bank sampah.

d. daya tampung udara dan gas rumah kaca (GRK)

Kondisi daya tampung udara di Kabupaten Boyolali berdasarkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Boyolali pada tahun 2024, nilai IKU sebesar 83,34 berada pada kategori baik (>80). Selama 5 tahun terakhir (2020-2024) kualitas IKU Kabupaten Boyolali mengalami penurunan.

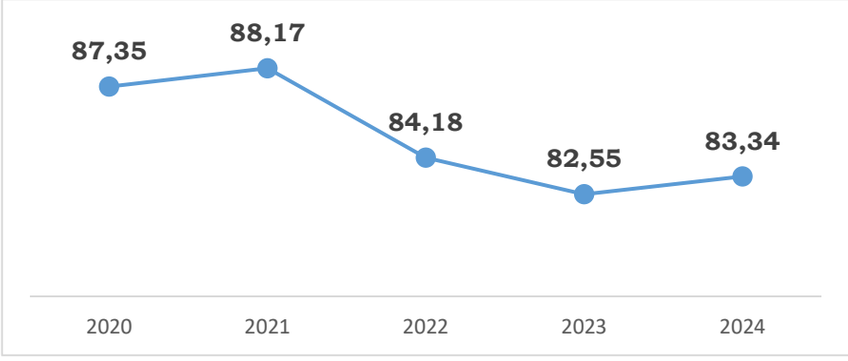

Gambar II. 10
Tren IKU Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: IKPLHD Kabupaten Boyolali Tahun 2024)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan udara di suatu wilayah. Berdasarkan kriteria penilaian, kualitas udara dikategorikan baik apabila nilai IKU melebihi angka 80. Udara yang berkualitas baik sangat penting bagi kesehatan masyarakat serta mendukung kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2024, Kabupaten Boyolali mencatatkan nilai IKU sebesar 83,34. Angka ini menempatkan wilayah tersebut dalam kategori kualitas udara yang baik. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, kondisi udara di Boyolali masih mendukung kehidupan masyarakat secara sehat dan aman. Namun, jika melihat tren selama 5 (lima) tahun terakhir (2020–

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2024), kualitas udara di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IKU tercatat sebesar 87,35 dan meningkat menjadi 88,17 pada tahun 2021, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode ini. Namun setelah itu, terjadi penurunan berturut-turut: menjadi 84,18 pada 2022, 82,55 pada 2023, hingga 83,34 pada 2024. Meskipun nilai IKU tetap berada dalam kategori baik, tren ini menunjukkan penurunan secara perlahan dari tahun ke tahun setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam faktor-faktor yang memengaruhi kualitas udara, seperti pertumbuhan aktivitas industri, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, dan perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kualitas udara tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara serius.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi di Kabupaten Boyolali dapat dilihat melalui indikator jumlah rumah tangga berlistrik dan jumlah pemakaian listrik (Kwh yang mencerminkan sejauh mana akses masyarakat terhadap energi listrik dapat terpenuhi sekaligus menunjukkan tingkat konsumsi energi seiring dengan dinamika kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik terus meningkat dari 152.774 rumah tangga pada 2020 menjadi 171.668 rumah tangga pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perluasan akses listrik yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, jumlah pemakaian listrik juga menunjukkan tren meningkat signifikan, dari 178 juta Kwh pada 2020 menjadi 200,5 juta Kwh pada 2024. Peningkatan konsumsi listrik tersebut mencerminkan bertambahnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, baik dalam sektor rumah tangga maupun produktif, seperti industri kecil, usaha jasa, dan perdagangan.

Peningkatan baik dari sisi akses maupun konsumsi listrik, dapat disimpulkan bahwa ketahanan energi Kabupaten Boyolali berada dalam arah positif. Namun, peningkatan konsumsi energi ini juga mengisyaratkan pentingnya strategi efisiensi dan diversifikasi sumber energi agar ketersediaan listrik dapat terjaga berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin dinamis.

Tabel II. 12
Ketersediaan Energi di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Parameter	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	152.774	157.936	162.900	167.498	171.668
Jumlah Pemakaian Kwh	178.009.017	183.328.478	182.279.091	190.379.939	200.588.643

Sumber: PLN Kabupaten Boyolali, 2025

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar II. 11
Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025)

IKP Kabupaten Boyolali tahun 2021 mencapai 85,14, tahun 2022 mencapai 85,26, tahun 2023 mencapai 87,31 dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 87,70. Nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah pada aspek "Ketersediaan" (91,42) yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Boyolali adalah sangat baik. Sementara itu aspek "Pemanfaatan" memiliki nilai terendah (85,57) diantara aspek lainnya. Dengan demikian pada aspek "Pemanfaatan", Perbaikan Pola Konsumsi, Penganekaragaman Konsumsi, Perbaikan Gizi dan Keamanan dan Mutu Pangan perlu ditingkatkan. Permasalahan ini perlu penanganan yang terintegrasi oleh semua *stakeholder* baik pemerintah, petani produsen, masyarakat konsumen, swasta/industri pangan, lembaga penelitian/pendidikan maupun organisasi non pemerintah, karena hal ini memiliki dimensi yang cukup luas.

Tabel II. 13
Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	85,35	85,14	85,26	87,31	87,70
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	12,59	13,46	14,24	12,73	9,10

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan.

Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari:

1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita;
3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran.

Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin. Faktor Pendorong turunnya PoU adalah menurunnya angka kemiskinan. Faktor Penghambat naiknya angka PoU adalah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas pangan.

- tahun 2020 mencapai 12,59% sedangkan Tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 13,46%, hal ini disebabkan karena tahun 2021 merupakan puncak pandemi Covid-19.
- tahun 2022 angka PoU kembali mengalami kenaikan lagi mencapai 14,24% hal ini disebabkan karena masih ada pengaruh pandemi dan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas pangan.
- PoU tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 12,73%, hal ini mengikuti tren penurunan angka kemiskinan.
- PoU tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 9,1%, hal ini mengikuti tren penurunan angka kemiskinan.

Dalam aspek cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2023 terealisasi 96,44% dan pada tahun 2024 sebesar 97,56%. Peningkatan akses air minum yang berkualitas dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain: peningkatan jaringan perpipaan dan ketersediaan air baku PUDAM, BPSPAM, peningkatan jumlah embung pada daerah yang sulit air, penyediaan sarana prasarana swadaya masyarakat dan pembangunan sumur uji. Selain itu untuk meningkatkan kualitas air dilakukan pengawasan kualitas air baik secara bakteriologis maupun kimiawi.

Tabel II. 14
Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih Kabupaten Boyolali
Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja		Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perkotaan	RT	102.530	103.967	105.479	100.336	97.943
		%	94,72	94,70	95,75	97,13	96,02
2	Pedesaan	RT	183.156	190.312	196.787	211.110	219.235
		%	83,30	90,50	93,26	96,08	97,83
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Air Minum Layak)	%	90,5	91,94	94,11	96,44	97,26

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Indikator kinerja		Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Air Minum Aman	%	34,13	35,23	38,87	39,83	39.31
5	Total Capaian Kab Boyolali	RT	285.686	294.279	302.266	311.446	317.178
		%	90,50	91,94	94,11	96,44	97,56
6.	Air Bersih Jaringan Perpipaan (JP)	RT	-	163.532	171.997	172.702	183.283
		%	-	50,53	52,58	53,48	56,20
7	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	RT	-	134.005	135.856	138.744	133.895
		%	-	41,41	41,53	42,96	41,06

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH merupakan indikasi awal yang dapat menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu.

Nilai IKLH Kabupaten Boyolali dibentuk dari 3 (tiga) parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL). Nilai IKA mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 IKA sebesar 58,57 menjadi 60,59 pada tahun 2024. Sedangkan nilai IKU menurun dari tahun 2020 sebesar 87,35 menjadi 83,34 pada tahun serta IKTL juga menurun menjadi 40,91 pada tahun 2024 yang semula berada di angka 40,99 pada tahun 2020. Nilai IKLH Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 15
IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	58,57	52,5	48,42	50,00	60,59
IKU	87,35	88,17	84,18	82,55	83,34
IKTL	40,99	38,71	38,71	41,82	40,91
IKLH	60,17	63,93	60,77	61,39	65,49

Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Boyolali, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan di suatu wilayah secara menyeluruh. Nilai IKLH disusun dari tiga parameter utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Masing-masing parameter mencerminkan kondisi dari aspek lingkungan yang berbeda: kualitas sumber daya air, kebersihan udara, serta ketersediaan tutupan lahan hijau atau vegetasi.

Selama periode 2020 hingga 2024, nilai IKLH Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi namun secara umum menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 60,17 dan meningkat menjadi 65,49 pada tahun 2024.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek lingkungan tertentu yang mengimbangi penurunan di aspek lainnya.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten berada dalam kategori baik (>80), meskipun mengalami sedikit penurunan setelah mencapai puncaknya di tahun 2021 (88,17). IKU tahun 2024 tercatat sebesar 83,34, menunjukkan kualitas udara yang masih relatif bersih dan aman.

Sementara itu, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan tren yang sempat menurun cukup tajam dari 58,57 pada tahun 2020 menjadi 48,42 pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 60,59 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan kualitas air, kemungkinan dari peningkatan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah.

Untuk Indeks Tutupan Lahan (IKTL), nilai yang tercatat relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. IKTL sempat menurun dari 40,99 pada tahun 2020 menjadi 38,71 pada tahun 2021–2022, kemudian meningkat menjadi 41,82 pada tahun 2023 sebelum sedikit turun ke 40,91 pada 2024. Hal ini mencerminkan dinamika dalam penggunaan lahan dan vegetasi hijau, yang dapat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan maupun kegiatan reboisasi.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKLH Kabupaten Boyolali hingga mencapai 65,49 pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan lingkungan yang cukup signifikan, terutama dari sektor kualitas air dan upaya menjaga kualitas udara. Namun demikian, fluktuasi pada aspek tutupan lahan dan masih terbatasnya nilai IKA pada beberapa tahun menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi berkelanjutan.

Dalam aspek sanitasi akses masyarakat terhadap sanitasi sehat pada tahun 2023 tercapai sebesar 98,30% dan pada tahun 2024 terealisasi 98,33%. Peningkatan akses terhadap sanitasi sehat dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah pada DPUPR, kegiatan jambanisasi pada Dinas Kesehatan serta penanganan limbah B3 dan program pengelolaan sampah pada DLH.

Tabel II. 16
Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja		Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perkotaan	Jiwa	333.500	338.509	371.649	348.909	349.101
		%	32,02	31,99	34,30	32.28	32,24
2	Pedesaan	Jiwa	707.950	719.637	711.875	732.077	733.502
		%	67,98	68,01	65,70	67,72	67,76
3	Sanitasi Layak	%	98,03	98,26	98,28	98,30	98,33
4	Sanitasi Aman	%	27,25	27,47	29,19	29,21	29,24
5	Total Capaian Kab Boyolali	Jiwa	1.041.450	1.058.146	1.083.524	1.080.980	1.091.803
		%	98,03	98.23	98,28	98,30	98,33

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu tugas pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan maka pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi volume sampah yang dikirim ke TPA antara lain dengan melakukan pengelolaan sampah di sumbernya (pemukiman, pasar, perkantoran dan sekolahan sebelum dikirim ke TPA) maupun dengan pengelolaan sampah TPS 3R, Rumah Kompos, Bank sampah dan daur ulang sampah sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul). Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, ditetapkan target indikator Persentase sampah yang tertangani/terkelola sebesar 60%. Dari target tersebut dapat tercapai 61,60% dengan realisasi kinerja sebesar 102,7%. Persentase sampah yang terkelola sebesar 61,60% terdiri dari kegiatan pengurangan sampah sebesar 29.945,62 ton (27,37%) dan penanganan sampah (terutama penanganan di TPA) sebesar 37.451,80 ton (34,23%), sehingga sampah yang terkelola sebanyak 67.397,42 ton dari total potensi timbulan sampah tahun 2024 sebesar 109.424,60 ton. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 66%, progress capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah 93,3%.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja persentase sampah yang tertangani/terkelola, dilaksanakan melalui program pengelolaan persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dan sub kegiatan:

1) pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali;
2) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
3) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; dan
4) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam, sehingga memiliki kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Bencana alam yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Boyolali adalah banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan dan gempa bumi. Berikut adalah jenis bencana berdasarkan wilayah yang berpotensi.

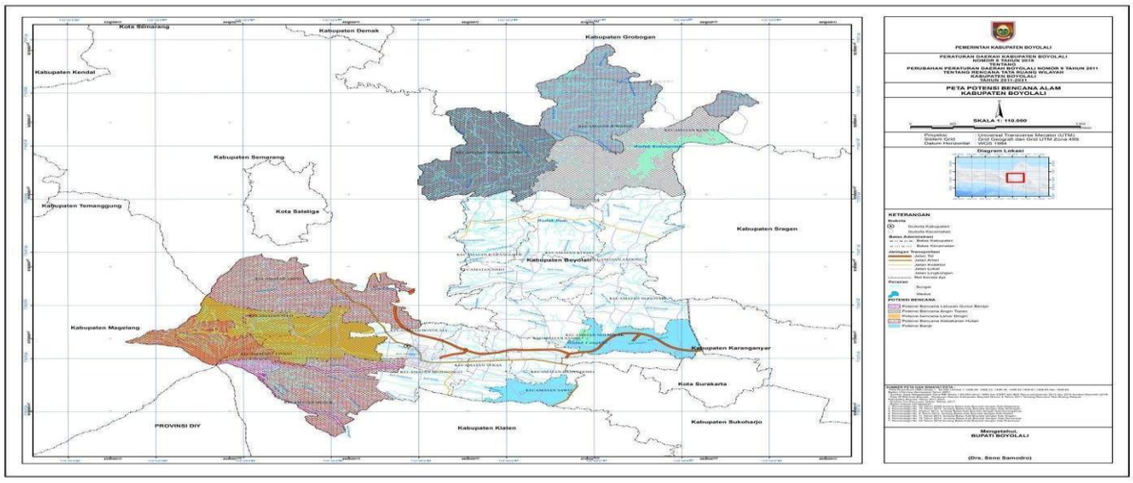

Gambar II. 12
Peta Potensi Bencana Kabupaten Boyolali
(Sumber: Perda No.8 Tahun 2019)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 17
Kawasan Rawan Bencana

No	Bencana	Kawasan/Wilayah
1.	Gempa bumi	Semua Kecamatan di Boyolali
2.	Letusan gunung api	Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari.
3.	Cuaca ekstrem	Semua Kecamatan di Boyolali
4.	Banjir	Kecamatan Juwangi, Wonosamodro, Ngemplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, Simo, Sambi, dan Wonosegoro.
5.	Tanah longsor	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Kemusu, Klego, Tamansari, Wonosamodro, Andong, Wonosegoro, dan Musuk.
6.	Kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Ampel, Selo, Musuk, Cepogo, Juwangi, Tamansari, dan Wonosegoro
7.	Banjir bandang	Kecamatan Selo, Gladagsari, Musuk, Cepogo, Ampel, Boyolali dan Mojosongo.
8.	Kekeringan	Kecamatan Musuk, Sambi, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Kemusu, Klego, Wonosamodro, Tamansari dan Juwangi.

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2025

Berdasarkan nilai indeks masing-masing bahaya yang menjadi ancaman di Kabupaten Boyolali, diperoleh hasil rekapitulasi tingkat/kelas sedang – tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahaya gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang dan kekeringan berada pada kelas sedang. Bahaya letusan gunung api, cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor termasuk dalam kelas tinggi. Apabila disandingkan dengan kecenderungan kejadian bencana, maka diperoleh bencana yang harus menjadi prioritas untuk ditangani secara menyeluruh melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yaitu: (1) Cuaca Ekstrem, (2) Banjir, (3) Tanah longsor, (4) Kekeringan dan (5) Letusan Gunung Api.

Kabupaten Boyolali termasuk daerah yang memiliki risiko bencana alam sedang, kecuali kebakaran hutan dan lahan yang memiliki risiko tinggi. Secara keseluruhan, risiko per ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 18
Indeks Risiko Per Ancaman Bencana 2024

Jenis Bencana	Skor	Kategori
Banjir	8,86	Sedang
Gempa Bumi	7,98	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	13,29	Tinggi
Cuaca Ekstrim	5,02	Sedang
Tanah Longsor	8,86	Sedang
Letusan Gunung Api	5,91	Sedang
Kekeringan	8,86	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Diketahui indeks risiko per ancaman bencana yang paling tinggi di Kabupaten Boyolali adalah kebakaran hutan dan lahan dengan skor sebesar 14,19. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi terdapat di 151 (seratus lima puluh satu) dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Boyolali. Luas wilayah terdampak risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kelas sedang mencapai 34014,8 ha. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

di Kabupaten Boyolali, disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan membuat keadaan tanaman menjadi cukup kering sehingga sangat mudah terbakar dan sebagian besar kejadian terbakarnya lahan ini disebabkan aktivitas manusia yang dengan sengaja membakar lahan untuk bercocok tanam atau menghilangkan rumput liar dan membakar sampah.

Salah satu rekomendasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah peningkatan sosialisasi pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masyarakat dalam membuka lahannya tidak langsung melakukan pembakaran, sosialisasi pengelolaan sampah yang memadai, dan pengawasan oleh petugas harus lebih ditingkatkan pada saat kekeringan terjadi pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

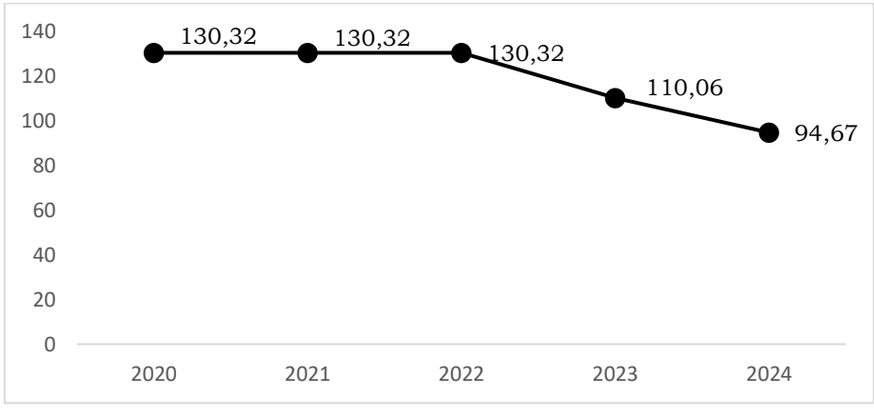

Gambar II. 13
Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024
(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025)

Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.

Data indeks risiko bencana di Kabupaten Boyolali dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai indeks risiko bencana stagnan di nilai 130,32 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 94,67. Penurunan indeks risiko bencana ini menunjukkan efektivitas ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana di Kabupaten Boyolali.

Indeks Ketahanan Daerah stagnan dalam tiga dari lima tahun yang tercatat, dengan nilai indeks sebesar 0,82. Namun pada tahun 2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,05 poin menjadi 0,87. Langkah prioritas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana diantaranya: (1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (4) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (5) Perkuatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel II. 19
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,82	0,82	NA	0,82	0,87

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Peningkatan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil dalam berbagai aktivitas manusia, khususnya di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga, telah mendorong peningkatan timbulan limbah padat maupun cair. Aktivitas ini secara signifikan berkontribusi terhadap naiknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak langsung terhadap perubahan iklim global, terutama melalui fenomena pemanasan global yang semakin ekstrem. Di samping itu, pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pembangunan, intensifikasi sektor pertanian, serta aktivitas peternakan juga menjadi sumber utama penyumbang emisi GRK.

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) pada tahun 2025. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung emisi GRK yang dihasilkan dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan data tahun 2024.

Perlu digaris bawahi bahwa data yang digunakan dalam laporan ini adalah hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) berdasarkan kalkulasi data pada tahun 2024, yang merupakan evaluasi komprehensif terhadap emisi dan penyerapan GRK dalam berbagai sektor. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi GRK terhadap perubahan iklim serta mengevaluasi keefektifan kebijakan dan tindakan mitigasi yang ada.

Laporan ini menyajikan hasil perhitungan emisi dan penyerapan GRK secara komprehensif dari berbagai sektor, dengan mengacu pada metodologi yang diterapkan dalam sistem pelaporan nasional, yakni *Signsmart*. Perlu dicatat bahwa hasil perhitungan dapat menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan inventarisasi tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya pembaruan data aktivitas penyumbang emisi yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Namun, data dari *signsmart* akan menjadi acuan resmi untuk pengukuran emisi GRK di tingkat nasional.

Hasil inventarisasi menunjukkan adanya peningkatan emisi GRK di beberapa sektor utama, terutama pada sektor industri dan transportasi yang dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi. Meski demikian, tren positif juga teridentifikasi pada sektor energi, di mana terjadi peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Pemantauan periodik dilakukan terhadap Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh berbagai sektor penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Boyolali untuk menilai efektivitas upaya mitigasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO^2e, data tersebut memungkinkan untuk menentukan tingkat emisi GRK Kabupaten Boyolali dengan data terakhir pada tahun 2024 seperti yang tertera di bawah ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

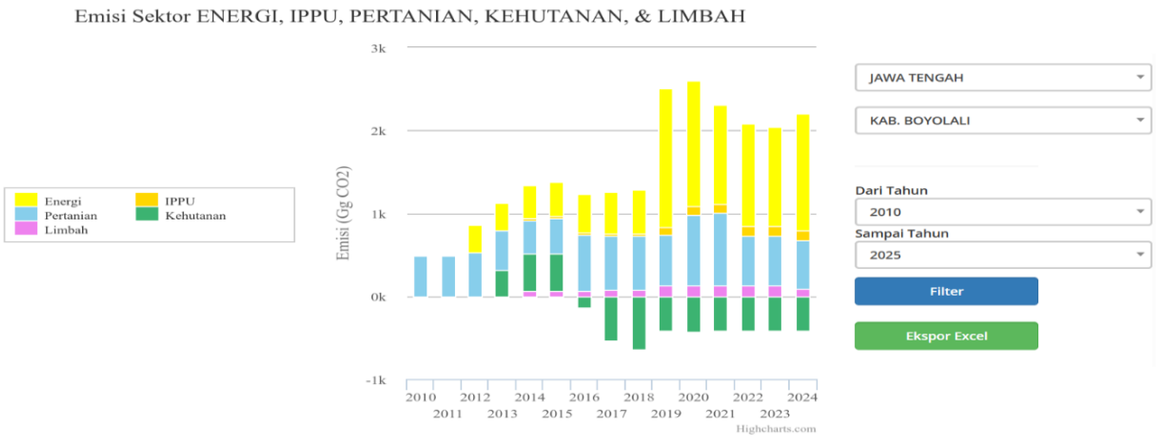

Gambar II. 14
Hasil Inventarisasi GRK Berbasis Signsmart
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: Signsmart, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebesar 1.791,11 ton Gg CO^2. Dengan sektor yang paling besar menyumbang emisi GRK adalah sektor energi sebesar 1.406,95 Gg CO^2, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU) sebesar 583,90 Gg CO^2, dan sektor IPPU sebesar 130,67 Gg CO^2, serta sektor Limbah sebesar 86,04 Gg CO^2. Dimana sektor kehutanan menyumbang pengurangan emisi sebesar -416,44 Gg CO^2.

Tabel II. 20
Hasil Inventarisasi GRK *Signsmart*
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

SEKTOR	Gg CO_2				
	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	1.514,35	1.194,99	1.232,08	1.198,60	1.406,95
Ippu	107,61	101,17	120,15	124,39	130,67
Afolu	852,96	883,28	599,71	595,57	583,90
Kehutanan	-425,91	-416,70	-416,44	-416,70	-416,44
Limbah	127,20	126,98	128,47	129,81	86,04
Total	**2.176,21**	**1.889,72**	**1.663,97**	**1.631,67**	**1.791,11**

Sumber: Kalkulasi Signsmart, 2025

Analisis tren emisi mengindikasikan perubahan pola emisi selama beberapa tahun terakhir. Laporan ini secara rinci mengidentifikasi sumber-sumber utama emisi GRK dari masing-masing sektor, menyoroti aktivitas spesifik yang menjadi penyebab utama emisi. Beberapa opsi untuk tindakan mitigasi juga disajikan, menyoroti kebijakan, teknologi, dan praktik berkelanjutan sebagai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi emisi GRK. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang status emisi GRK di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dan mendorong perlunya upaya mitigasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan data Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA), Kabupaten Boyolali telah berkontribusi dalam penurunan emisi yang didukung dengan 465 kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan, sehingga mampu menurunkan emisi secara kumulatif sebesar 75.895,35 Ton CO^2eq. Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Boyolali semakin tahun mengalami peningkatan. Semula mampu

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

menurunkan emisi sebesar 85,59 Ton CO^2eq di tahun 2020 dan meningkat menjadi 80.481,02 Ton CO^2eq di tahun 2024. Sektor pengelolaan limbah untuk bidang persampahan pada kategori bank sampah menyumbang penurunan emisi sebesar 26.053 Ton CO^2eq.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi kualitas udara di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. pengembangan pengolahan limbah ternak dan pemanfaatan biogas;
2. penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (gas dan biofuel) sebagai pengganti bahan bakar fosil;
3. pengendalian dan optimalisasi pemakaian pupuk dan pestisida;
4. mengembangkan energi yang ramah lingkungan, misalnya biogas dalam kegiatan rumah tangga dan industri;
5. mewajibkan setiap industri yang menghasilkan polutan untuk melakukan pengelolaan terhadap gas buang sebelum dilepas di udara; dan
6. pengenalan dan penerapan sistem pengolahan tanah yang meminimalkan emisi GRK.

2.1.1.7 Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu.

Tabel II. 21
Data Kependudukan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.131	1.114.070
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,29	0,95	0,92	0,95	0,94%
Persentase Penduduk Terhadap Jawa Tengah	2,91%	2,91%	2,92%	2,90%	2,90%
Kepadatan Penduduk	1.047	1.061	1.070,52	994,09	1.012,95
Rasio Jenis Kelamin	101,3	101,2	101,0	101,0	100,88
Capaian Identitas Kependudukan Digital	NA	NA	1,95	16.000	50,70
Capaian penerbitan akta kematian	8,219	8,739	10,856	19,670	21,558
Capaian akta perkawinan	262,955	320,097	320,202	320,302	320,429
Capaian Kartu Keluarga	361,967	369,810	374,624	376,393	378,582

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah 2025 dan Dispendukcapil, 2025

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Boyolali, pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Boyolali sebanyak 1.114.070 (satu juta seratus empat belas ribu tujuh puluh rupiah) jiwa hal tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan penduduk sebanyak 1.062.713 (satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebesar 0,94%, pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena dengan meningkatnya jumlah penduduk akan diiringi dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah sebagai

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pengambil kebijakan harus turut aktif dalam pengendalian penduduk agar tercipta pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebesar 100,88 yang berarti bahwa dalam 100 (seratus) penduduk perempuan di Kabupaten Boyolali terdapat 101 (seratus satu) penduduk laki-laki dengan jumlah absolut penduduk laki-laki sebanyak 552.325 jiwa (50,21%) dan penduduk perempuan sebanyak 547.525 jiwa (49,79%).

Kondisi demografi juga dapat dilihat dari sisi struktur penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 81.986 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam) jiwa, diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 81.507 (delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh) jiwa, dan kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 81.790 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa. Struktur piramida Tabel jumlah penduduk menunjukkan bahwa secara keseluruhan distribusi penduduk Kabupaten Boyolali hampir merata di semua umur dengan kecenderungan pada usia kelompok muda dan produktif. Dasar piramida yang cukup lebar Banyaknya jumlah populasi penduduk usia 0-14 menunjukkan penduduk Kabupaten Boyolali memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua (usia 65-75+).

Tabel II. 22
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	41.958	40.489	82.447
5-9	40.526	38.572	79.098
10-14	40.325	38.490	78.815
15-19	41.995	39.512	81.507
20-24	41.847	39.496	81.343
25-29	42.002	39.788	81.790
30-34	40.334	39.644	79.978
35-39	40.280	39.781	80.061
40-44	40.545	38.503	79.048
45-49	37.575	37.288	74.863
50-54	35.081	34.880	69.691
55-59	31.408	33.128	64.536
60-64	26.749	28.256	55.005
65-69	21.579	22.834	44.413
70-74	14.945	16.649	31.594
75+	15.176	20.215	35.391
Kabupaten Boyolali	552.325	547.525	1.099.850

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

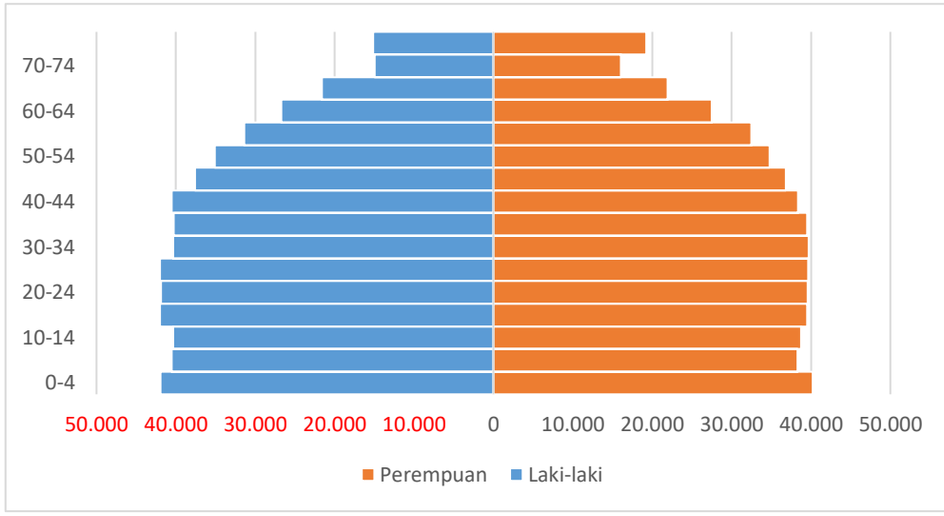

Gambar II. 15
Piramida Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2024
(Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2025)

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 (lima belas) tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Boyolali diproyeksikan mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 1.109,33 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 1.144,58 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun pada tahun 2029, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 573,23 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 571,35 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 100,33. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 1.127-1.128 jiwa per kilometer persegi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kabupaten Boyolali pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi dimana rasio ketergantungan selama 5 (lima) tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada dibawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II. 23
Proyeksi Kependudukan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.109,33	1.118,56	1.127,52	1.136,19	1.144,58
Laki-laki	556,80	561,14	565,32	569,35	573,23
Perempuan	552,53	557,42	562,20	566,84	571,35
Rasio Jenis Kelamin	100,77	100,67	100,56	100,44	100,33
Kepadatan Penduduk	1.092,83	1.101,92	1.110,75	1.119,29	1.127,55
Rasio Ketergantungan	47,42	47,86	48,34	48,84	49,35
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	240,97	241,69	242,48	243,30	244,04
15–64	752,51	756,50	760,13	763,38	766,39
65+	115,87	120,40	124,93	129,52	134,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (Data Diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini cukup rentan sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Namun, pasca penanganan dan pemulihan pandemi, Kabupaten Boyolali mampu bangkit dan terus berupaya mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Adapun penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali dapat terlihat sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Boyolali utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Boyolali. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Boyolali antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan hingga ketenagakerjaan masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai parameter untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel II. 24
Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	22,41	34,90	38,79	42,74	45,85
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	32,69	34,90	24,93	26,33	27,55
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,20	4,63	6,33	5,62	4,64

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah merosot menjadi -1,20%. Namun pada tahun berikutnya Kabupaten Boyolali mampu bangkit dari dampak negatif pandemi dan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 6,33% pada tahun 2022. Namun pada tahun berikutnya, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 4,64% pada tahun 2024.

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Indikator ini sangat penting dalam mengukur kesejahteraan sosial-ekonomi suatu daerah serta berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Angka kemiskinan yang rendah biasanya menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sementara angka yang tinggi dapat menjadi indikasi perlunya intervensi lebih lanjut. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat dilihat dari persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, serta garis kemiskinan.

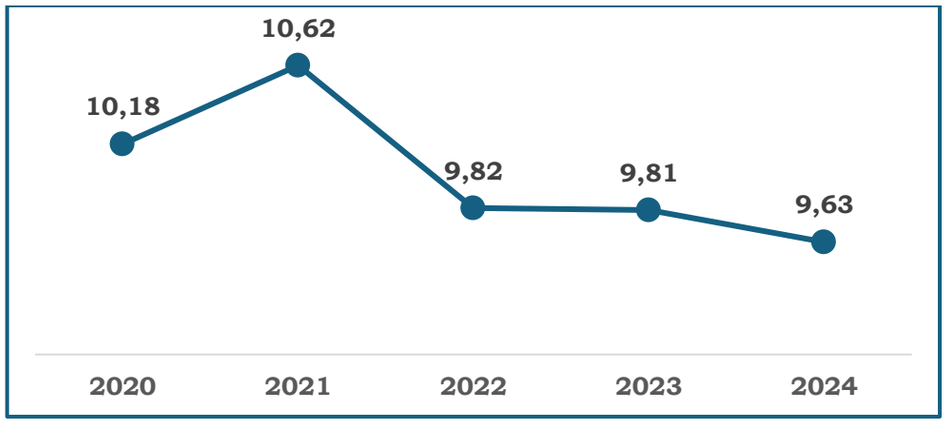

Gambar II. 16
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali (2021-2025))

Berdasarkan data persentase kemiskinan Kabupaten Boyolali, tingkat kemiskinan terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,18%, kemudian berada pada titik puncak di tahun 2021 menjadi 10,62%. Hal ini dilatarbelakangi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan. Angka ini kembali menurun hingga 9,82% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,81%, dan terus menurun menjadi 9,63% pada tahun 2024.

Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang menjadi tolak ukur suatu daerah untuk mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat yang mendiami daerah tersebut sudah terpenuhi. Jika melihat grafik di bawah dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boyolali tertinggi pada tahun 2021 dimana merupakan dampak dari Covid-19. Jumlah penduduk miskin sebanyak 100.600 jiwa pada tahun 2020. Puncaknya pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 104.820 jiwa. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 97.180 jiwa dan terjadi peningkatan kembali menjadi 97.480 jiwa pada tahun 2023. Terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 95.960 jiwa.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Gambar II. 17
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka (2021-2025))

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seseorang atau sebuah rumah tangga, termasuk makanan dan non-makanan seperti kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten Boyolali, data menunjukkan bahwa garis kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan biaya hidup di daerah tersebut. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Boyolali berada di angka Rp347.520 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah). Garis kemiskinan meningkat mencapai Rp361.922 (tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada tahun 2021. Pada tahun 2022, garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp383.030 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Kemudian, pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Boyolali mencapai Rp420.339 (empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah. Dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 442.071 rupiah.

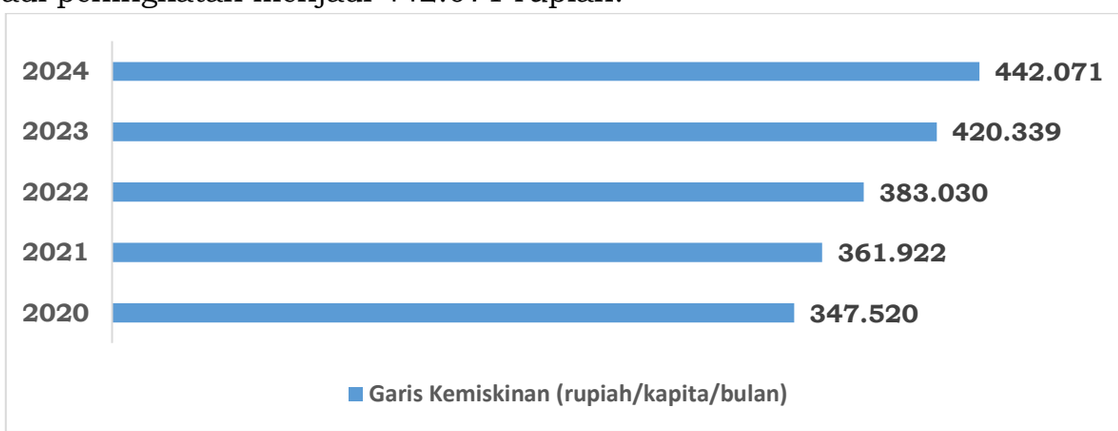

Gambar II. 18
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali (2021-2025))

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat keparahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin, sehingga semakin tinggi nilai indeks, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami. Di Kabupaten Boyolali,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,30 pada tahun 2020. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 1,76. Pada tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi 1,13. Terjadi penurunan pada tahun 2023, di mana indeks kedalaman kemiskinan turun lagi menjadi 1,02, dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1,56.

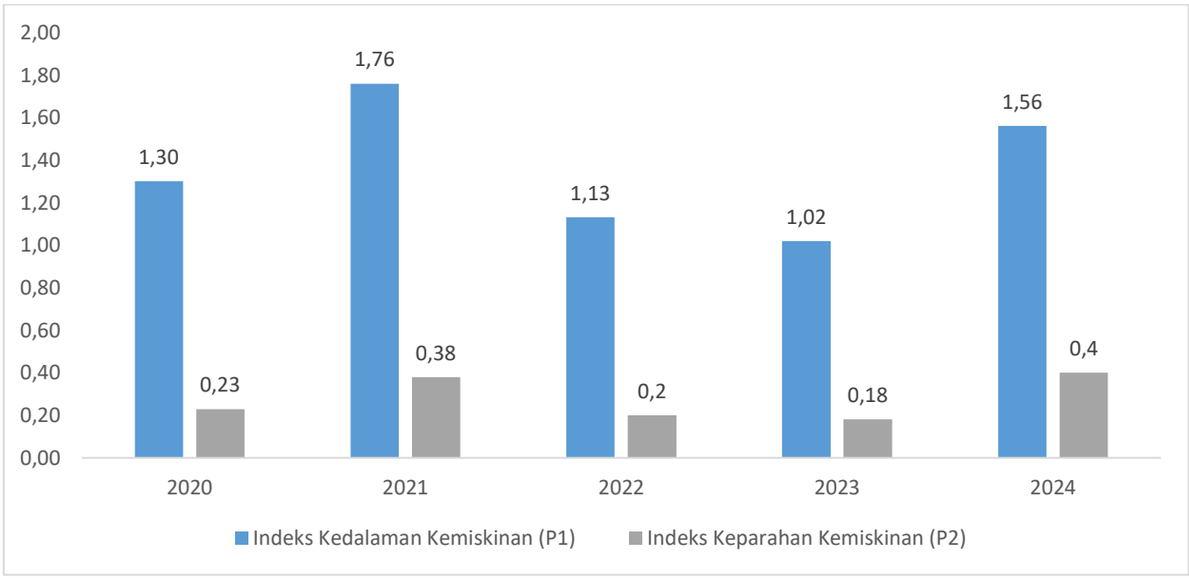

Gambar II. 19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali (2021-2025))

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran yang menggambarkan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, menunjukkan seberapa tidak meratanya pendapatan mereka. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan di antara orang-orang miskin, sehingga semakin tinggi nilai indeks, semakin parah kesenjangan pendapatan tersebut. Di Kabupaten Boyolali, indeks keparahan kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,23. Angka ini kemudian naik menjadi 0,38 pada tahun 2021, mencerminkan peningkatan kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin. Pada tahun 2022, indeks ini mulai mengalami penurunan menjadi 0,2 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 0,18, menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan penduduk miskin. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 0,4.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata setiap individu di wilayah tersebut. Angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih besar dan, secara umum, tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Dari data yang tersedia, PDRB per kapita Kabupaten Boyolali menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 sebesar Rp30.830.000 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp41.690.000 (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tahun 2024.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

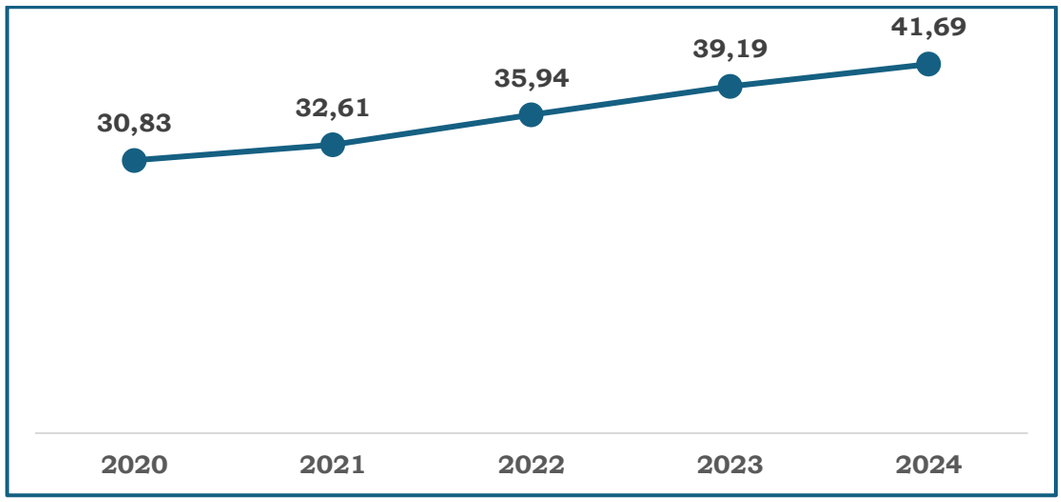

Gambar II. 20
PDRB per Kapita Kabupaten Boyolali
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: PDRB Kabupaten Boyolali Menurut Lapangan Usaha (2021-2025))

Rasio Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan di suatu wilayah. Indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 0 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di suatu wilayah yang semakin kecil.

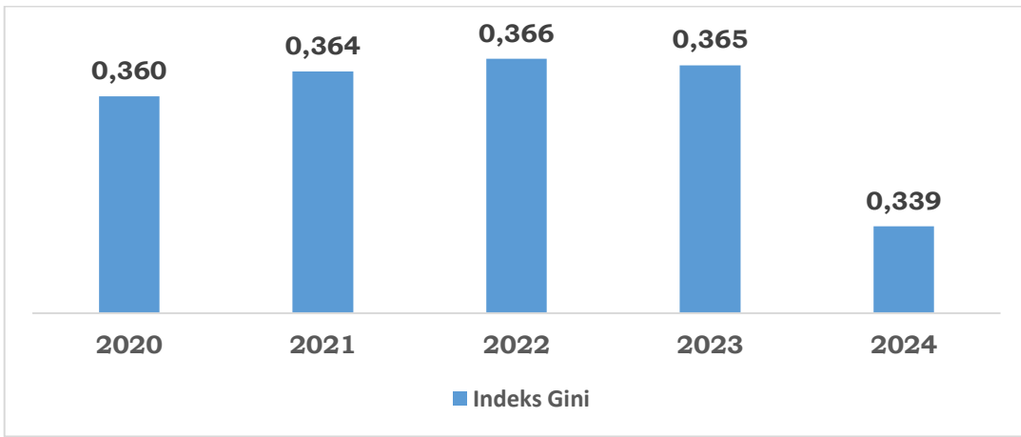

Gambar II. 21
Rasio Gini Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali dan BPS Prov. Jawa Tengah, 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pergerakkan rasio gini di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Walaupun pada rentang tahun 2020-2022 sempat mengalami kenaikan yang semula sebesar 0,360 pada tahun 2020 menjadi 0,364 pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,366. Hal tersebut terjadi merupakan efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian di seluruh dunia. Namun pada tahun 2023 rasio gini mengalami sedikit penurunan menjadi 0,365. Serta pada tahun 2024 berhasil menurun hingga 0,339, hal tersebut mengindikasikan terjadi pemulihan perekonomian yang baik sehingga ketimpangan pendapatan mengalami penurunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. IPM angka harapan hidup, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan per kapita.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

IPM Kabupaten Boyolali menunjukkan tren positif dimana terus mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 74,25 meningkat menjadi 75,96 pada tahun 2024.

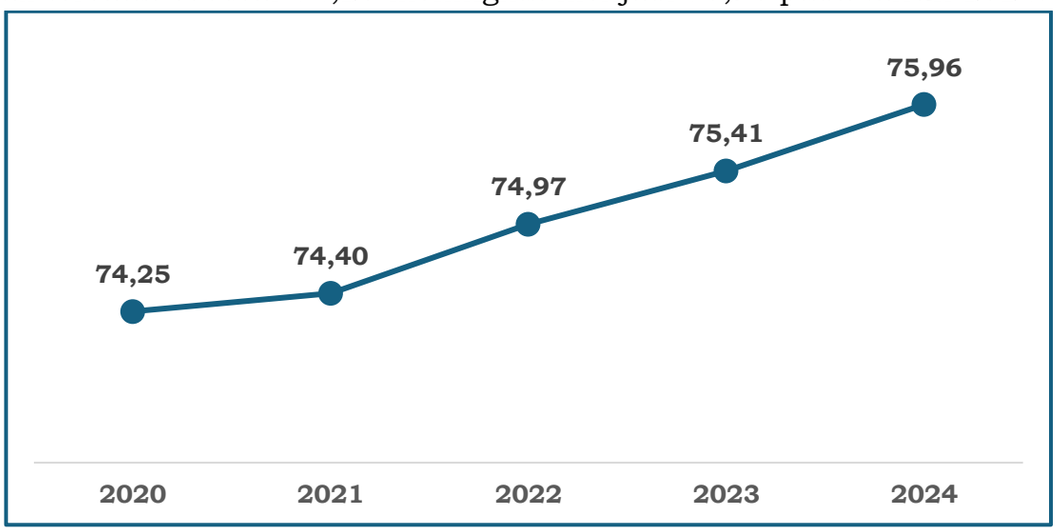

Gambar II. 22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021-2025)

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Boyolali, dengan kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 25
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,84	7,85	8,08	8,09	8,17
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,56	12,57	12,62	12,66	12,67
Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,95	76,03	76,12	76,23	76,44
Paritas Daya Beli (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	12.910,00	13.031,00	13.250,00	13.716,00	14.195,00

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2025

Pertumbuhan IPM menjadi hal krusial yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah karena hal ini berkaitan dengan perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika pertumbuhan IPM tidak didorong maka capaian pembangunan manusia di Kabupaten Boyolali dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus digencarkan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Boyolali.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. TPT merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi dan lapangan kerja di suatu wilayah. TPT di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 TPT Kabupaten Boyolali sebesar 5,28% menurun menjadi 3,16% pada tahun 2024.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

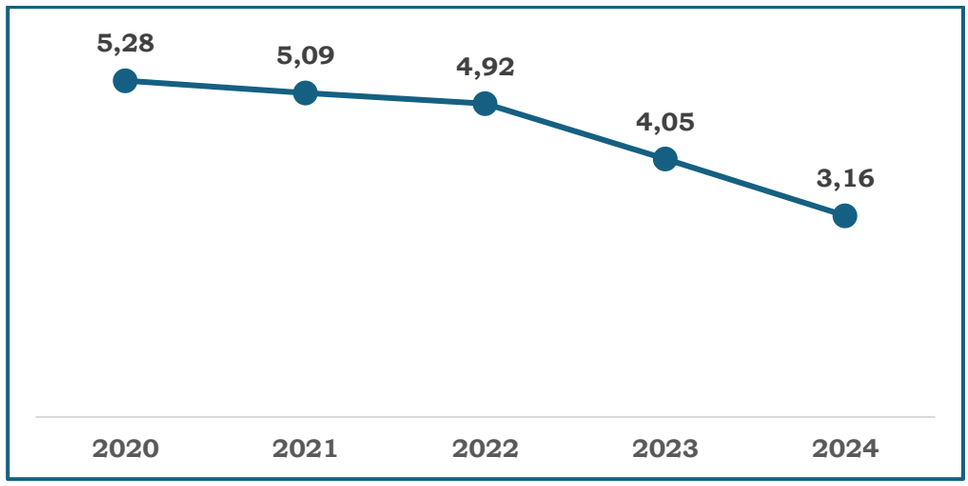

Gambar II. 23
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2025)

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berelasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumber daya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif.

Pengelolaan kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup tersebut antara lain tercermin melalui ukuran Angka Harapan Hidup (AHH).

Tabel II. 26
Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	75,95	76,03	76,12	76,23	76,44
Angka Kematian	123	333	154,4	63,7	174,17
Jumlah Kasus Kematian Ibu	17	26	20	8	19
Stunting (SKI/SSGI)	N/A	20,7	20	21,5	20,9
Persentase Balita *Stunting* (e-PPGBM)	N/A	8,6	7,3	8,54	11,9
Treatment coverage/Case Detection Rate	33,5	21,9	34,8	52,5	19,7

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2025

Data kesehatan penduduk Kabupaten Boyolali selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis. Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AHH secara konsisten mengalami peningkatan, dari 75,95 tahun pada 2020 menjadi 76,44 tahun pada 2024. Kenaikan ini

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, edukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat, serta pemenuhan gizi dasar. AHH yang tinggi juga menjadi indikasi bahwa masyarakat Boyolali memiliki akses yang semakin baik terhadap fasilitas kesehatan dan pola hidup yang lebih terjaga.

Namun demikian, indikator angka kematian dan jumlah kematian ibu menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada 2021, angka kematian melonjak drastis hingga 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kasus, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Setelah sempat turun ke titik terendah pada 2023 sebesar 63,7 kasus, angka ini kembali meningkat menjadi 174,17 pada 2024. Jumlah kematian ibu juga menunjukkan tren serupa, dengan peningkatan tajam pada 2021 (26 kasus), kemudian penurunan menjadi 8 (delapan) kasus pada 2023, dan kembali naik menjadi 19 (sembilan belas) kasus di tahun berikutnya. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem ketahanan kesehatan serta layanan kesehatan maternal yang lebih responsif dan merata, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam hal prevalensi *stunting*, data menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung sumbernya. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Boyolali cukup stabil di angka sekitar 20–21% selama periode 2021–2024. Sementara itu, data e-PPGBM mencatat angka yang lebih rendah, namun menunjukkan peningkatan dari 7,3% pada 2022 menjadi 11,9% pada 2024. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh metodologi pengumpulan data dan cakupan wilayah yang berbeda, tetapi peningkatan dalam data e-PPGBM tetap harus menjadi perhatian serius, karena mencerminkan kondisi riil di lapangan yang dilaporkan langsung oleh tenaga kesehatan.

Indikator *Treatment Coverage* atau *Case Detection Rate* (CDR) juga menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan. Setelah mencapai 52,5% pada 2023, angka ini turun drastis menjadi 19,7% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam pelacakan dan penanganan kasus penyakit menular maupun kronis di masyarakat. Hal ini bisa mencerminkan masalah dalam sistem pelaporan, keterbatasan tenaga kesehatan, atau penurunan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan diri secara dini. Diperlukan langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kinerja deteksi dini penyakit, baik melalui optimalisasi sistem informasi kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, maupun penguatan edukasi masyarakat.

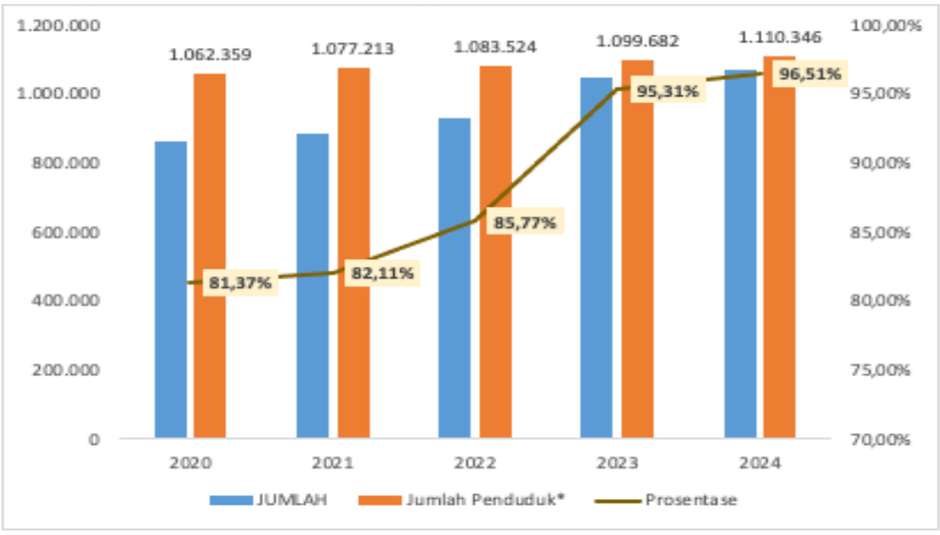

Gambar II. 24
Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Gambar II.4 memperlihatkan peningkatan tren persentase kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Boyolali selama periode 2020–2024. Jumlah penduduk yang mengikuti program jaminan kesehatan terus bertambah, dari 1.062.359 (satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) jiwa pada 2020 menjadi 1.110.346 (satu juta seratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) jiwa pada 2024. Hal ini diiringi dengan peningkatan rasio kepesertaan dari 81,37% pada tahun 2020 menjadi 96,51% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perluasan cakupan jaminan kesehatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang ideal.

Secara spesifik, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 1:44.414, yang menandakan beban pelayanan yang cukup besar pada setiap unit puskesmas. Namun demikian, ketersediaan layanan kesehatan non-pemerintah (seperti klinik dan DPM) telah tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga turut menopang pelayanan dasar kesehatan. Selain itu, rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit telah melampaui standar minimal yang ditetapkan. Dengan 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) tempat tidur yang tersedia di 13 (tiga belas) rumah sakit, dan jumlah penduduk sebesar 1.110.346 (satu juta seratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) jiwa, rasio tempat tidur adalah sekitar 1:800. Angka ini sudah lebih baik dari standar ideal nasional sebesar 1:1.000, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Daya saing SDM akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Kabupaten Boyolali. Proporsi penduduk Kabupaten Boyolali yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas dan berpendidikan terakhir perguruan tinggi hanya 6,53%. Penduduk yang berpendidikan tertinggi SD, SMP, dan SMA sederajat masih mendominasi. Hal ini perlu diantisipasi karena menyangkut kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. Bila dalam jangka panjang belum ada perubahan signifikan, sangat mungkin SDM penggerak pembangunan di Kabupaten Boyolali akan diisi oleh masyarakat luar Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 27
Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tidak mempunyai Ijazah	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
Kab. Boyolali	15,62	24,9	25,25	27,7	6,53	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, 2024

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 (lima belas) tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 (dua

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

puluh lima) tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 (dua puluh lima) tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Berdasarkan data indikator sosial Kabupaten Boyolali dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat perkembangan yang positif pada berbagai aspek pendidikan dan kesehatan. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 7,84 tahun pada 2020 menjadi 8,17 tahun pada 2024. Harapan lama sekolah juga menunjukkan tren peningkatan dari 12,56 tahun pada 2020 menjadi 12,67 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperpanjang masa pendidikan formal masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 28
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	7,84	7,85	8,08	8,09	8,17
Harapan Lama Sekolah	12,56	12,57	12,62	12,66	12,67

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2025

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting peningkatan pendidikan di daerah. Literasi merujuk pada kemampuan menulis sedangkan numerasi terhadap kemampuan berhitung masyarakat. Kondisi literasi dan numerasi di Kabupaten Boyolali tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik jenjang SD maupun SMP.

Tabel II. 29
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2024

Indikator	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Literasi SD	-	-	65,73	78,92	86,14
Literasi SMP	-	-	67,19	78,27	85,34
Numerasi SD	-	-	38,69	67,11	81,60
Numerasi SMP	-	-	46,16	62.15	83.23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap pembinaan dan pengembangan wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, Kabupaten Boyolali memperoleh peringkat 3 (tiga) Provinsi Jawa Tengah dalam Pengukuran IPLM dengan skor 95,48. Dengan perolehan angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pada tahun 2022, Kabupaten Boyolali mulai mengimplementasikan program Merdeka Belajar di berbagai jenjang pendidikan. Dengan fokus pada kurikulum yang lebih fleksibel, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pengembangan karakter, Kabupaten Boyolali menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya dengan terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Meskipun tantangan dan evaluasi terus dilakukan, semangat untuk mewujudkan Merdeka Belajar telah tertanam di kalangan pendidik dan pemangku kebijakan di Kabupaten Boyolali.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sarana sosial dikelola Dinas Sosial salah satunya adalah Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sementara bagi PMKS. Rumah Singgah sudah dioperasikan mulai tahun 2019. Dalam mengatasi permasalahan PMKS Dinas Sosial Kabupaten Boyolali melakukan berbagai kegiatan seperti razia PGOT, pembinaan dan pelatihan PMKS, pemberian bantuan sosial dan penyuluhan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selama ini dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti Balai Resos Taruna Yudha Sukoharjo, RSJD Surakarta, RSJ Klaten, panti Sosial milik provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait.

Persentase penanganan terhadap PMKS adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada. Penanganan PMKS tahun 2020 sebesar 90,54%. Pada tahun 2021 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 83,7%. Jumlah PMKS pada tahun 2021 sebanyak 58.331 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 48.803 jiwa. Pada tahun 2022 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 89,38%. Jumlah PMKS pada tahun 2022 sebanyak 61.029 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 54.551 jiwa. Pada tahun 2023 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100%. Jumlah PMKS pada tahun 2023 sebanyak 53.122 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 53.122 jiwa realisasi cukup tinggi karena adanya program dari kementerian Sosial RI yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Elnino dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program yang ada tentunya berdampak positif yaitu dapat meringankan beban keluarga tidak mampu dan meningkatkan kemandirian PMKS di Kabupaten Boyolali.

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal. Pada tahun 2024, indeks zakat Kabupaten Boyolali mencapai 0,61 (bertumbuh) lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,52 (stabil), yang menunjukkan keberhasilan sinergi antara BAZNAS Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pemerintah daerah memberikan dukungan nyata berupa penyediaan infrastruktur perkantoran, kendaraan dinas, laptop, pemberian insentif kepada petugas pengumpul zakat, hibah rutin tahunan dengan nilai yang terus meningkat, serta dukungan personel untuk memperkuat kapasitas BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Boyolali juga berperan sebagai pembina lembaga zakat lainnya untuk mengoptimalkan pemerataan pengumpulan dan penyaluran ZIS, sehingga zakat dapat berfungsi lebih maksimal sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pendukung pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Boyolali memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga oleh masyarakatnya dengan kebudayaan jawa yang kental dengan adat istiadatnya. Meskipun tidak sepopuler daerah lain dalam hal keberadaan masyarakat adat yang diakui secara formal, Boyolali memiliki komunitas-komunitas lokal yang menjaga tradisi dan adat istiadat mereka dengan baik.

Tradisi budaya adalah warisan berharga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tradisi memiliki cerita, nilai, dan makna tersendiri yang menghubungkan kita dengan akar-akar budaya nenek moyang kita. Melalui tradisi budaya, kita bisa memahami sejarah, identitas, dan kedalaman peradaban manusia. Boyolali yang sekarang merupakan kota modern masih memiliki berbagai acara tradisi seni dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi yang sudah diwariskan dari leluhur masih dijaga hingga saat ini. Warga Kabupaten Boyolali masih setia melangsungkan acara tradisi ini agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Ada beberapa tradisi yang memiliki usia menembus ratusan tahun.

Salah satu tradisi dan upacara adat yang dilaksanakan adalah Sedekah Gunung. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan keselamatan yang diberikan. Biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Acara ini melibatkan ritual-ritual tradisional dan sering kali diiringi dengan pertunjukan seni seperti tari dan gamelan. Selain itu, terdapat tradisi Sadranan yang merupakan kegiatan yang paling dikenal oleh masyarakat Boyolali maupun luar Kabupaten Boyolali. Tradisi ini merupakan kegiatan bersih makam leluhur dan ziarah kubur dengan proses penyampaian doa dan keduri. Tradisi yang biasanya dilakukan pada pertengahan bulan ruwah (penanggalan jawa) atau menjelang datangnya bulan ramadhan yang biasa disebut oleh Nyadran masih terjaga dan terus berlangsung hingga saat ini.

Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Boyolali juga merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Beberapa kearifan lokal seperti pengelolaan pertanian tradisional dimana Boyolali dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Masyarakat adat di sini memiliki kearifan lokal dalam mengelola lahan pertanian, seperti teknik irigasi tradisional dan pola tanam yang diwariskan turun-temurun. Selain itu terdapat pula kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat di Boyolali memiliki pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Mereka menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Meskipun tidak memiliki masyarakat adat yang diakui secara formal, namun kekayaan budaya dan tradisi lokal tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya. Upaya pelestarian budaya ini terus dilakukan oleh berbagai komunitas lokal, pemerintah daerah, dan organisasi budaya untuk memastikan warisan ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.

Di Kabupaten Boyolali belum ada rumusan yang tepat untuk menghitung Indeks Kerukunan Umat beragama tetapi untuk mengukur kerukunan umat beragama bisa dilihat dari jumlah angka potensi konflik keagamaan di wilayah kabupaten Boyolali. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tidak ada angka konflik umat beragama yang muncul pada masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali dalam keadaan kondusif. Kondusivitas Kabupaten Boyolali didukung beberapa faktor, antara lain:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

a. secara berkala dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengantisipasi adanya permasalahan/konflik keagamaan;
b. dibentuknya lembaga FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) di tingkat Kabupaten dan lembaga FORKUMA (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat Kecamatan, yang secara rutin juga melaksanakan koordinasi dan dialog antar pimpinan umat beragama dan tokoh masyarakat;
c. melakukan mediasi jika terdapat indikasi konflik antar umat beragama;
d. menyediakan media untuk usulan, saran dan pengaduan dari seluruh masyarakat; dan
e. segera memberikan respon/tindakan terhadap usulan saran dan pengaduan yang diterima sesuai kewenangan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan kualitas keluarga tidak hanya berbicara soal kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, nilai moral, relasi antar anggota keluarga, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsinya secara seimbang: sebagai tempat kasih sayang, pendidikan pertama, perlindungan, sosial budaya, dan bahkan sebagai agen ekonomi. Sebagai investasi jangka panjang, pembangunan kualitas keluarga perlu dijaga dan didukung agar ke depan, masyarakat dan negara menjadi lebih baik. Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Boyolali tahun 2024 dengan capaian 63,79 yang meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 56,24. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan nilai norma budaya dalam keluarga sehingga bersama mencapai keluarga yang mandiri dan sejahtera.

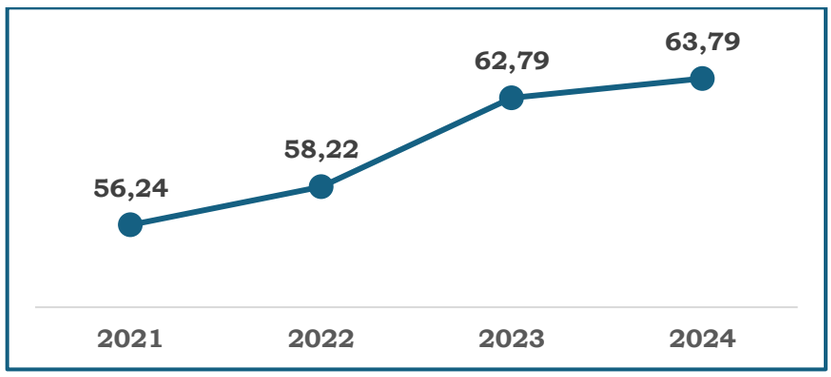

Gambar II. 25
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka, 2025)

Pemenuhan kesejahteraan serta baiknya kualitas dalam keluarga dapat dilihat melalui indeks perlindungan khusus anak. Indeks perlindungan khusus anak digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan hak-hak anak dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus. Di Kabupaten Boyolali indeks perlindungan khusus anak berdasarkan data yang bersumber dari aplikasi SIGA KemenPPA pada tahun 2024 sebesar 76,32.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau daerah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Boyolali sudah cukup tinggi dimana pada tahun 2020 mencapai 94,19 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2024 mencapai angka 94,79. Selanjutnya pada indeks pemberdayaan gender sebagai indikator untuk melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, terlihat capaian yang ada bahwa indeks pemberdayaan gender Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 mencapai 81,95 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 82,98. Pada tahun 2024 indeks pemberdayaan gender mengalami penurunan menjadi 80,31. Kondisi ini harus ditingkatkan dan dijaga kestabilannya guna memberdayakan penduduk secara merata dan berkeadilan.

Tabel II. 30
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,19	94,22	94,37	94,70	94,79
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,95	82,23	82,94	82,98	80,31
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,323	0,279	0,363	0,306	0,233

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami tren positif. Hal ini memiliki arti bahwa para perempuan juga turut aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari 3 (tiga) aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG yang semakin kecil mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik.

Capaian IKG di Kabupaten Boyolali cukup fluktuatif yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia khususnya perempuan di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi berjalan cukup dinamis. Terjadi peningkatan IKG pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,363 setelah pada tahun 2021 mencapai 0,279. Kenaikan ini tentu menjadi perhatian bagi *stakeholder* mengingat peran perempuan terhadap pembangunan mengalami kendala. Namun pada tahun 2023, angka tersebut menurun kembali meskipun tidak serendah tahun 2021 yakni sebesar 0,306. Pada tahun 2024 indeks ketimpangan gender berhasil menurun menjadi 0,233. Oleh karena itu, perlu upaya memeratakan pembangunan berbasis gender, khususnya peningkatan akses pembangunan terhadap perempuan di berbagai bidang, secara umum semakin memperkecil ketimpangan gender ini.

Jika dibandingkan dengan ketimpangan gender di Jawa Tengah, maka capaian Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Boyolali lebih baik karena berada di bawah capaian IKG Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan meski masih cukup tinggi, tetapi ketimpangan gender di Kabupaten Boyolali berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

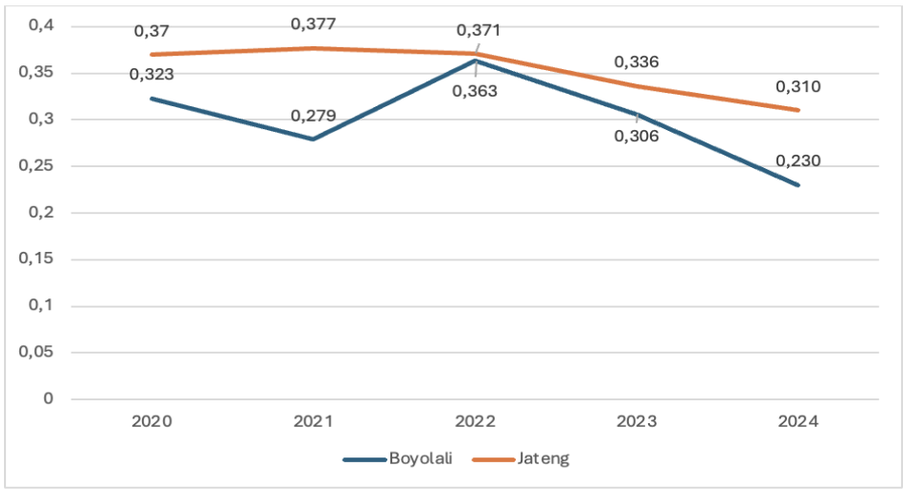

Gambar II. 26
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024
(Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka, 2025)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut ini merupakan rasio ketergantungan di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024.

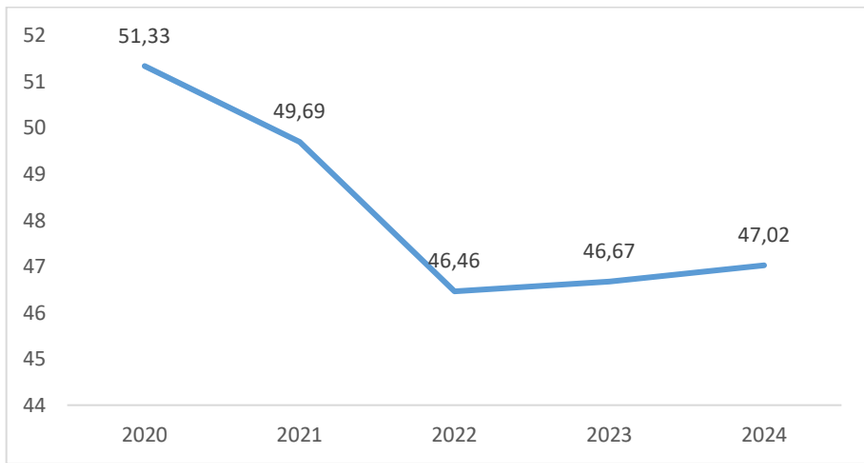

Gambar II. 27 Angka Ketergantungan
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka, 2025)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah indikator ekonomi yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada harga pasar yang berlaku pada setiap tahun. PDRB ADHB digunakan untuk menilai

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kinerja ekonomi suatu daerah dan melihat struktur serta pergeseran ekonomi dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Boyolali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam PDRB ADHB selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PDRB ADHB tercatat sebesar 32.687,59 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 34.896,96 di tahun 2021. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan PDRB ADHB sebesar Rp38.788,25 juta rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 42.724,95 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2024 yaitu sebesar 45.853,42 jura rupiah.

Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Boyolali adalah sektor industri pengolahan dengan sumbangan sebesar Rp14.433.860.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 31,48% dari total PDRB pada tahun 2024. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyusul di posisi kedua dengan kontribusi sebesar Rp9.415.890.000,00 (sembilan milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) pada tahun 2024 dengan kontribusi terhadap struktur ekonomi sebesar 20,53%.

Tabel II. 31
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

KATEGORI	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.356,77	7.731,62	8.182,51	8.785,98	9.415,89
B. Pertambangan dan Penggalian	1.391,45	1.404,81	1.491,21	1.525,27	1.582,44
C. Industri Pengolahan	9.848,29	10.692,64	11.645,48	13.066,62	14.433,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,29	6,64	6,96	8,15	8,55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,06	15,66	16,15	17,47	19,11
F. Konstruksi	2.138,89	2.421,88	2.661,04	3.043,00	3.248,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.057,68	4.481,93	4.861,07	5.305,30	5.508,28
H. Transportasi dan Pergudangan	1.014,74	993,12	2.273,08	2.791,01	2.874,16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	810,67	850,39	1.036,19	1.181,36	1.317,12
J. Informasi dan Komunikasi	1.073,42	1.078,91	1.105,74	1.253,20	1.347,91
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	756,61	836,43	930,66	1.008,07	1.033,03
L. *Real Estate*	356,17	366,04	393,50	431,87	454,07
M,N.Jasa Perusahaan	129,18	134,95	149,54	168,21	187,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	805,12	804,88	813,03	826,79	879,14
P. Jasa Pendidikan	2.043,98	2.167,53	2.237,34	2.247,78	2.396,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	362,76	376,44	378,21	386,02	412,36
R,S,T,U.Jasa Lainnya	520,52	533,12	606,53	678,85	734,92
Produk Domestik Regional Bruto	**32.687,59**	**34.896,96**	**38.788,25**	**42.724,95**	**45.853,42**

Sumber: PDRB Kabupaten Boyolali Menurut Lapangan Usaha (2020-2024)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Boyolali tahun 2020-2024 menunjukkan variasi kontribusi dari berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data yang ada, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 31,48% pada tahun 2024. Sektor kedua terbesar yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,53%.

Tabel II. 32
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,51	22,16	21,10	20,56	20,53
B. Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,03	3,84	3,57	3,45
C. Industri Pengolahan	30,13	30,64	30,02	30,58	31,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	6,54	6,94	6,86	7,12	7,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	12,84	12,53	12,42	12,01
H. Transportasi dan Pergudangan	3,10	2,85	5,86	6,53	6,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,48	2,44	2,67	2,77	2,87
J. Informasi dan Komunikasi	3,28	3,09	2,85	2,93	2,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,40	2,40	2,36	2,25
L. *Real Estate*	1,09	1,05	1,01	1,01	0,99
M,N. Jasa Perusahaan	0,40	0,39	0,39	0,39	0,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	2,31	2,10	1,94	1,92
P. Jasa Pendidikan	6,25	6,21	5,77	5,26	5,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,08	0,98	0,90	0,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,59	1,53	1,56	1,59	1,60
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Dalam Angka (2020-2024)

Pariwisata menjadi sektor pendorong perekonomian Kabupaten Boyolali. Pariwisata didukung dengan ketersediaan jumlah rumah makan, serta akomodasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.847.093.800,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Perolehan PAD 2024 tercatat

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

sebesar Rp7.827.744.700,00 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian capaian data sebagai berikut beserta daya dukung lainnya.

Tabel II. 33
Jumlah PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Tahun	PAD Sekor Pariwisata
2020	1.109.682.350
2021	1.486.636.900
2022	1.625.406.800
2023	1.847.093.800
2024	7.827.744.700

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Upaya pendukung produktivitas ekonomi juga diterapkan melalui sistem peningkatan ekonomi syariah. Kabupaten Boyolali telah menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai inisiatif pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung UMKM serta penguatan sektor wisata religi. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, disertai sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal, sekaligus memperkuat literasi dan publikasi kewajiban sertifikasi halal. Upaya ini selaras dengan ketentuan nasional bahwa produk makanan dan minuman UMKM wajib bersertifikat halal, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Selain pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi syariah juga diwujudkan melalui pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan keagamaan. Salah satu realisasi nyata adalah pembangunan wisata edukasi religi berupa miniatur Ka'bah di Kabupaten Boyolali, yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, termasuk dari wilayah regional, sebagai sarana edukasi dan destinasi wisata religi. Kehadiran program dan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali tidak hanya fokus pada peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal, tetapi juga berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas dengan melibatkan sektor wisata dan layanan publik yang bernuansa islami.

Return on Asset (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki. Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ROA mencerminkan seberapa efektif pengelolaan aset daerah yang diinvestasikan dalam BUMD untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap PAD.

Berdasarkan grafik, ROA BUMD Kabupaten Boyolali periode 2021–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 ROA tercatat sebesar 2,11, kemudian mengalami penurunan pada 2022 menjadi 1,98. Selanjutnya, kinerja BUMD membaik pada 2023 dengan peningkatan ROA mencapai 2,12, meskipun kembali sedikit menurun menjadi 2,08 pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja pengelolaan aset BUMD sempat tertekan, secara umum kemampuan BUMD Kabupaten Boyolali dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan keuntungan relatif stabil dan berada di atas 1,9 persen selama periode tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

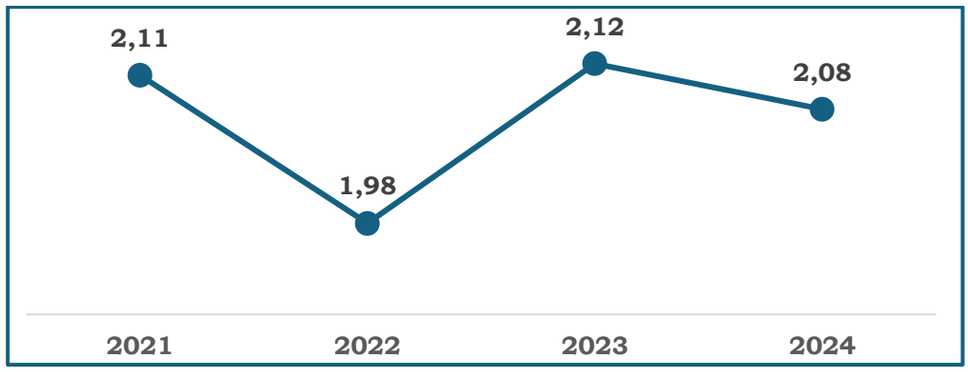

Gambar II. 28
Return on Asset (ROA) BUMD
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Adapun pada kinerja keuangan di Kabupaten Boyolali menunjukkan tren yang relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Total dana pihak ketiga (DPK) terhadap PDRB tercatat sebesar 1,64 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 1,60 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan dan lembaga keuangan masih terjaga, meskipun terdapat indikasi penurunan tipis yang perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sementara itu, rasio total kredit terhadap PDRB juga mengalami kecenderungan serupa, yaitu sebesar 1,34 pada tahun 2023 dan turun menjadi 1,32 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan dalam penyaluran kredit yang berpotensi dipengaruhi oleh faktor kehati-hatian perbankan maupun daya serap sektor riil. Meski demikian, angka tersebut tetap mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi keuangan di Kabupaten Boyolali masih berjalan dengan baik, dan ke depan diperlukan dorongan untuk memperluas akses kredit produktif, terutama bagi sektor UMKM, pertanian, dan industri pengolahan yang menjadi basis utama perekonomian daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

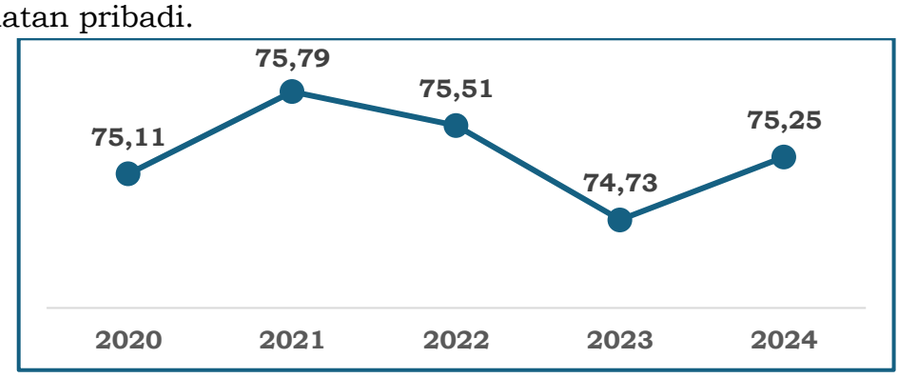

Gambar II. 29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	TPAK Laki-laki (%)	TPAK Perempuan (%)	TPAK Total (%)
2020	85,3	65,41	75,11
2021	86,13	65,93	75,79
2022	85,12	66,34	75,51
2023	85,48	63,99	74,73
2024	84,67	65,85	75,25

(Sumber: Diskopnaker Kabupaten Boyolali, 2025)

TPAK memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi mencerminkan keterlibatan ekonomi yang kuat, sementara TPAK yang rendah dapat menunjukkan adanya tantangan ekonomi atau faktor lain yang memengaruhi partisipasi kerja. Di Kabupaten Boyolali, TPAK periode tahun 2020–2024 berada pada kisaran 75 persen, yang menunjukkan mayoritas penduduk usia kerja telah terserap dalam aktivitas ekonomi formal maupun informal. Tren partisipasi sempat meningkat dari 75,11 persen pada tahun 2020 menjadi 75,79 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023, sebelum kembali naik ke 75,25 persen pada 2024. Dari sisi gender, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sekitar 85 persen pada laki-laki dan 65 persen pada perempuan, yang mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses dan kesempatan kerja. Fluktuasi yang terjadi, terutama pada partisipasi perempuan, menunjukkan adanya tantangan struktural maupun sosial budaya yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa Boyolali memiliki potensi tenaga kerja yang besar namun masih didominasi laki-laki, sehingga diperlukan strategi afirmatif berupa peningkatan keterampilan, perluasan akses kesempatan kerja, serta dukungan sosial bagi perempuan agar kesenjangan dapat diperkecil dan potensi angkatan kerja dapat dioptimalkan bagi pembangunan daerah.

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Boyolali terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 memiliki capaian yang meningkat signifikan mencapai 83,64 dengan kategori Sangat Inovatif. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali meningkat signifikan dimana pada tahun 2021 memiliki Indeks Inovasi Daerah sebesar 48,89.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

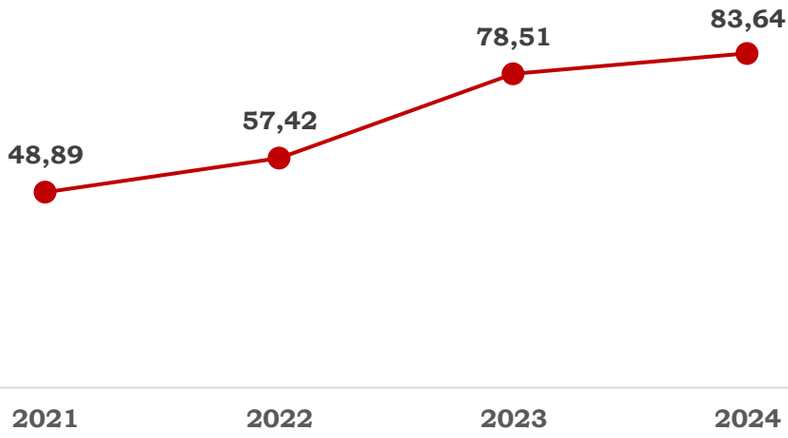

Gambar II. 30
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2024
(Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025)

Realisasi ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 1.265 dikarenakan terdapat perbedaan nilai antara penilaian IID tahun 2020 dan tahun 2021-2024, hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri. Mulai tahun 2021, penilaian sudah menggunakan skala 100, sedangkan pada tahun 2020, tidak ada nilai maksimalnya, sehingga terdapat kesenjangan nilai yang sangat besar antara daerah yang mendapatkan peringkat atas dan daerah yang mendapatkan peringkat menengah dan bawah serta Badan di Kemendagri yang melakukan penilaian pun berbeda. Mulai tahun 2021, penilaian dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sedangkan pada tahun 2020, penilaian masih dilakukan oleh Badan Litbang.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Boyolali terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Boyolali dapat terlihat pada aktivitas perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara umum, terjadi penurunan daya saing sektor tersebut dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yang terlihat pada penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Kabupaten Boyolali. Peningkatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada Tahun 2020 sebesar 2,01% hingga 2024 meningkat menjadi 2,99%.

Tabel II. 35
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,01	3,45	1,29	1,47	2,99

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2025

Sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah, Kabupaten Boyolali memiliki pemetaan sektor-sektor yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

daya saing ekonomi daerah. Salah satunya merupakan sektor pertanian, meliputi sub sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam Kabupaten Boyolali memiliki berbagai potensi pada kategori sebagai berikut:

a. pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Boyolali adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan didominasi oleh padi dan jagung. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur, buah, biofarmaka, dan tanaman hias. Sedangkan tanaman perkebunan antara lain tembakau, kopi, dan kelapa. Dalam rangka mendukung sistem budidaya pertanian berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengimplementasikan berbagai praktik yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Salah satunya adalah penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan produktif untuk jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah dan ketertelusuran produk pertanian melalui pengembangan pertanian organik, sehingga hasil budidaya tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

b. peternakan

Kabupaten Boyolali memiliki potensi peternakan yang sangat besar, baik dari ruminansia besar, ruminansia kecil, maupun unggas. Ruminansia besar khususnya sapi perah telah lama menjadi ikon daerah ini, sehingga Kabupaten Boyolali dikenal sebagai kota susu sekaligus sentra penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Selain susu dan daging sapi, produk olahan lain seperti abon, dendeng, serta keripik berbahan paru, kulit, urat, dan ceker juga memperkuat nilai tambah subsektor peternakan.

Produksi ternak tahun 2020–2024 terlihat adanya dinamika yang cukup beragam pada setiap komoditas. Produksi daging sapi mengalami tren menurun dari 14.500 ton pada tahun 2020 menjadi 13.400 ton pada 2024, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga ketersediaan produksi daging. Produksi telur unggas relatif stabil, namun juga cenderung menurun dari 27.907 ton (2020) menjadi 23.470 ton (2024). Sementara itu, produksi susu sapi menunjukkan fluktuasi yang signifikan, di mana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 51.559 ton namun menurun drastis pada 2023 (38.863 ton) sebelum kembali naik menjadi 43.958 ton pada tahun 2024. Berbeda dengan komoditas lainnya, produksi kambing/domba justru menunjukkan tren kenaikan dari 260.000 ekor pada tahun 2020 menjadi 343.000 ekor pada tahun 2024.

Tabel II. 36
Capaian Produksi Peternakan
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Produksi ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi (Ton)	14.500	14.081	13.897	13.783	13.409
2	Telur Unggas (Ton)	27.907	27.006.	27.248	22.484	23.470
3	Susu (Ton)	51.388	51.559	51.962	38.863	43.958
4	Kambing domba (ekor)	260.600,00	261.814,00	339.382,00	341.277,21	343.589,20

Sumber: Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan, 2025

c. Perikanan

Potensi perikanan Kabupaten Boyolali tidak hanya berasal dari perikanan tangkap dan budidaya yang memanfaatkan waduk, sungai, maupun kolam

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

buatan, tetapi juga dari pengolahan hasil perikanan yang terus berkembang. Komoditas utama seperti ikan mas, lele, nila, gurame, dan patin memiliki nilai tambah melalui produk olahan seperti abon ikan, keripik kulit lele, keripik daging lele, hingga aneka frozen food yang semakin diminati pasar.

Produksi ikan segar cenderung stabil namun menunjukkan fluktuasi ringan, yakni 36.271 ton pada 2020, menurun ke 35.494 ton pada 2022, kemudian meningkat kembali ke 36.693 ton pada 2023, dan sedikit turun menjadi 35.367 ton pada 2024. Meskipun produksi ikan segar relatif stagnan, perkembangan justru terlihat signifikan pada produk olahan ikan yang meningkat tajam dari 79,86 ton pada 2020 menjadi 242,17 ton pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar produksi bahan mentah ke arah penguatan industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi lebih besar.

Tabel II. 37
Capaian Produksi Perikanan
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Produksi ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Ikan (ton)	36.271,00	36.081,00	35.494,00	36.693,00	35.367,07
2	Produk Olahan Ikan (ton)	79,86	117,38	213,00	228,00	242,17

Sumber: Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan, 2025

Kabupaten Boyolali telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru guna mendorong pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2024 ditekankan pada sinergi dalam penguatan riset dan inovasi, penerapan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Salah satu implementasi nyata dari ekonomi hijau di Kabupaten Boyolali adalah pengelolaan desa wisata dengan konsep ramah lingkungan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, upaya konservasi melalui konservasi air dan tanah dengan konsep kecamatan konservasi, serta pengelolaan koleksi tanaman langka di Kebun Raya Indrokilo juga telah dilakukan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sumber daya air di wilayah tersebut. Ekonomi hijau tidak terlepas dari pemanfaatan energi hijau yaitu energi yang memanfaatkan sumber dari air, angin dan tenaga surya. Ketersediaan sumber energi baru terbarukan di Kabupaten Boyolali sesuai data Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 38
Komoditas EBT Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Komoditas EBT																				
Potensi Angin		Potensi Surya		Potensi Hidro		Potensi Bioenergi									Potensi Panas Bumi					
						Potensi Biomassa Existing Limbah Industri						Potensi Biomassa Existing Produk Utama		Potensi Biomassa Pengembangan	Cadangan					Total Potensi Panas Bumi
Onshore	Offshore	PLTS	PLTS Terapung	PLTA RoR	PLTA Bendungan	Gula	Kayu	Kelapa Sawit	Padi	Pulp dan Kertas	Tapioka	Sampah Kota Teknis	Sampah Kota Teoritis	Hutan Produksi Kritis	Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
MW	MW	GWp	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Ha	MW	MW	MW	MW	MW	MW
288,7	3.347,0	13,4	167,3	2,7	-	-	-	-	0,6	-	-	3,6	11,9	13,2	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian ESDM, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kabupaten Boyolali berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Boyolali menekankan penguatan riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta perbaikan tata kelola. Implementasi ekonomi hijau diwujudkan melalui pengembangan desa wisata ramah lingkungan, konservasi air dan tanah, pengelolaan tanaman langka, serta optimalisasi energi terbarukan. Kabupaten Boyolali telah mendukung hal tersebut dengan pengembangan bank sampah untuk mendorong ekonomi sirkuler serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pembuatan biogas dari kotoran ternak sebagai upaya konservasi energi. Sementara itu, prinsip ekonomi biru diterapkan melalui pengelolaan sumber daya air tawar, perikanan darat berkelanjutan, konservasi air, dan ekowisata berbasis perairan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dan bertujuan menjaga ekologi, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang inklusif dan ramah lingkungan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Jika melihat dari tabel di bawah diketahui pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi sempat mengalami kontraksi pada tahun 2021 menjadi 0,49% yang semula sebesar 18,58% pada Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,22% dan terus meningkat menjadi 12,55% pada tahun 2023. Pada Tahun 2024 kembali menurun menjadi 6,48%.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diimplementasikan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik guna menunjang pelayanan yang prima. Salah satu indikator yang mampu melihat perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indeks ini mengukur pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Boyolali sehingga dapat terukur perbandingan antar wilayah dan perkembangan secara periodiknya. Pada Tahun 2024, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Boyolali meningkat hingga mencapai 3,62 dan merupakan pencapaian tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel II. 39
Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	18,58	0,49	2,22	12,55	6,48
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	3,31	3,15	3,30	3,62

Sumber**:** BPS Kabupaten Boyolali, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Investasi di Kabupaten Boyolali pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang positif terutama pada 2022–2024. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Boyolali tahun 2020–2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 PMTB tercatat sebesar 20,75 dan meningkat cukup signifikan pada 2021 menjadi 21,17. Namun, pada 2022 terjadi penurunan tajam ke angka 20,34 sebelum kembali mengalami tren kenaikan pada 2023 sebesar 20,55 dan mencapai 20,86 pada 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tekanan yang sempat menurunkan investasi pada 2022, secara keseluruhan arah PMTB menunjukkan pemulihan yang positif sehingga mencerminkan kembalinya aktivitas investasi dan penguatan struktur perekonomian daerah.

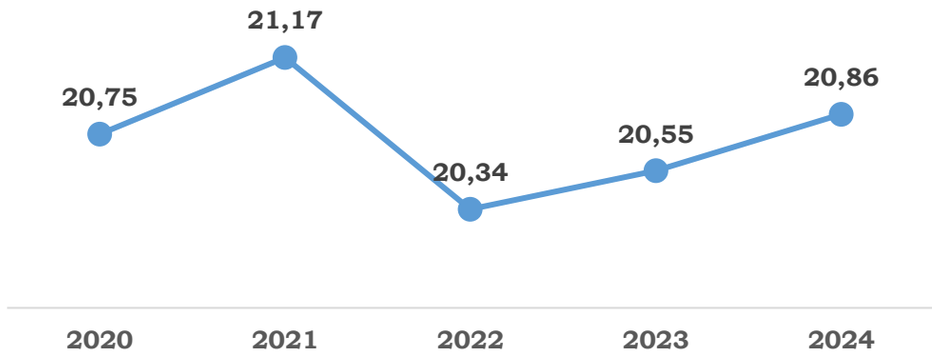

Gambar II. 31
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMPTSP Kabupaten Boyolali, 2025)

Faktor pendorong utama adalah pembangunan infrastruktur strategis (Tol Solo–Jogja, akses tol Semarang–Solo), kebijakan perizinan yang dipermudah, serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan layanan investasi. Sektor industri dan UMKM menjadi motor pertumbuhan, diikuti dengan pengembangan agroindustri peternakan sapi terpadu, yang memperkuat struktur ekonomi lokal.

Dengan capaian investasi yang terus tumbuh, Kabupaten Boyolali berhasil memperkuat peran PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dalam perekonomiannya, sekaligus menjadi daerah yang mampu menjaga daya tarik investasi di tengah dinamika ekonomi nasional.

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam hal jumlah bidang usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan. Sedangkan untuk realisasi investasi mengalami fluktuasi. Nilai Investasi pada tahun 2024

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

mengalami peningkatan karena iklim investasi yang meningkat di Kabupaten Boyolali. Realisasi investasi di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir digambarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel II. 40
Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Bidang usaha /proyek Masuk	Akumulasi Jumlah Bidang usaha /proyek	Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)	Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)	Persentase Kenaikan akumulasi
2020	1.283	11.197	1.675.461.000.000	14.676.560.149.604	12,88
2021	3.853	15.050	1.988.107.934.178	16.664.668.743.935	13,54
2022	7.650	22.700	3.125.294.501.658	19.789.963.245.593	18,75
2023	14.186	36.886	1.937.439.740.864	21.727.402.986.457	8,91
2024	19.845	56.731	3.045.473.744.959	24.772.876.731.416	14.02

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Perkembangan jumlah bidang usaha/proyek di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Kenaikan jumlah bidang usaha/proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik, serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor di atas berpengaruh terhadap faktor peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah bidang usaha/proyek. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis lewat daring, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Kenaikan Jumlah Bidang Usaha yang signifikan menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin dipermudah dalam menambah bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hal ini disebabkan berkembangnya iklim investasi di Kabupaten Boyolali, terjadinya penguatan investasi dengan adanya kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali. diantaranya penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali maka kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 41
Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi PMDN
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Bidang usaha / Proyek	Akumulasi Jumlah Bidang Usaha/Proyek	Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)	Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)
2020	1.205	11.029	1.600.692.480.153	12.135.953.998.388
2021	3.792	14.821	1.611.489.646.178	13.747.443.644.566
2022	7.630	22.451	2.345.050.397.716	16.092.494.042.282
2023	14.186	36.637	1.644.210.560.290	17.736.704.602.572
2024	19.631	56.268	2.098.800.126.921	19.835.504.729.493

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Kenaikan jumlah bidang usaha yang signifikan pada tahun 2024 untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri disebabkan dengan berlakunya OSS maka pelaku usaha semakin dipermudah dalam menambah bidang usaha sesuai dengan KBLI.

Peningkatan jumlah bidang usaha/proyek PMDN selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boyolali serta adanya kemudahan untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Kenaikan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik, serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor di atas berpengaruh terhadap faktor jumlah bidang usaha/proyek PMDN. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis lewat daring, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Tabel II. 42
Perkembangan Investasi PMA
di Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi	Investasi Kumulatif
1	2020	78	Rp74.769.180.000	Rp2.540.606.811.369
2	2021	61	Rp376.618.288.000	Rp2.917.225.099.369
3	2022	20	Rp780.254.103.942	Rp3.697.479.203.311
4	2023	166	Rp293.229.180.573	Rp3.990.708.383.884
5	2024	214	Rp946.673.618.038	Rp4.937.382.001.922

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025 (dengan kurs 1 US$ = Rp 13.000)

Peningkatan jumlah bidang usaha/proyek PMA selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boyolali serta adanya kemudahan untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Kenaikan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik, serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor di atas berpengaruh terhadap faktor peningkatan jumlah bidang usaha/proyek PMA. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis lewat daring, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pengembangan penanaman modal, serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk tahun 2020 sebesar 1,29; Tahun 2021 sebesar 1,26; tahun 2022 terealisasi sebesar 1,35; tahun 2023 sebesar 1,13; dan tahun 2024 sebesar 1,09. Kondisi ini disebabkan penambahan jumlah kendaraan dengan penambahan panjang jalan tidak sebanding.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2020 sebanyak 817.956 orang, dan tahun 2021 sebanyak 544.173 orang, tahun 2022 sebanyak 366.217 orang, tahun 2023 sebanyak 115.087 orang, tahun 2024 sebanyak 197.627 orang.

Tabel II. 43
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Hasil				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Volume/ Kapasitas	1,29	1,26	1,35	1,13	1,09
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang (barang)	228.116	151.846	102.147	115.087	128.541
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun	Orang (barang)	817.956	544.173	366.217	115.087	197.627

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/692 tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Boyolali, bahwa jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 262 ruas jalan dan panjang jalan adalah 674 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, untuk Tahun 2024 menjadi sebesar 83,20% atau 560,76 km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 674 km.

Tabel II. 44
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	504,735	74,445	438,452	64,668	431,684	63,670	412,883	60,897	471,21	69,91
Sedang	52,895	7,802	121,847	17,972	93,402	13,776	148,882	21,959	89,54	13,29
Mantap	557,63	82,25	560,30	82,64	525,09	77,45	561,77	82,86	560,76	83,20
Rusak Ringan	42,220	6,227	69,334	10,226	63,815	9,412	67,222	9,915	59,05	8,76
Rusak Berat	78,150	11,527	48,367	7,134	89,099	13,141	49,013	7,229	54,18	8,04
Tidak Mantap	120,37	17,75	117,70	17,36	152,91	22,55	116,24	17,14	113,23	16,80
Jumlah	678,000	100,00	678,000	100,00	678,000	100,00	678,000	100,00	674	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antar wilayah di Kabupaten Boyolali. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020 jalan di Kabupaten Boyolali yang berada pada kondisi mantap sepanjang 557,63 km dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pada tahun 2024 jalan di Kabupaten Boyolali yang berada pada kondisi mantap sepanjang 560,76 km, hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang signifikan oleh Pemerintah Daerah. Ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 45
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan
di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	35,46	35,46	35,46	38,13	38,13
Provinsi	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44
Kabupaten/Kota	678,000	678,000	678,000	674,000	674,000
JUMLAH	762,900	762,900	762,900	761,570	761,570

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Apabila dilihat tingkat kewenangannya, pada tahun 2020-2024 jalan terpanjang merupakan jalan dengan milik kabupaten/kota sepanjang 678,00 km, sedangkan jalan dengan tingkat kewenangan negara sepanjang 35,46 km dan jalan dengan tingkat kewenangan provinsi sepanjang 49,44 km. Total panjang jalan di Kabupaten Boyolali adalah 762,90 km. Pada tahun 2023 karena adanya perubahan SK jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terjadi perubahan Tingkat kewenangan jalan. Jalan dengan milik Kabupaten/Kota sepanjang 674 Km, jalan dengan tingkat kewenangan negara sepanjang 38,13 km, dan jalan dengan tingkat kewenangan Provinsi sepanjang 49,44 km.

Tabel II. 46
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Boyolali (KM) Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	460,057	468,19	456,849	487,689	478,63
Beton	139,793	161,343	172,293	185,051	194,86
Kerikil	72,480	47,767	46,895	0,000	0,00
Tanah	5,670	0,700	1,963	1,260	0,07
JUMLAH	678,000	678,000	678,000	674,000	674

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025

Perubahan jenis permukaan jalan di Kabupaten Boyolali dari tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya signifikan untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Peningkatan panjang jalan beton pada periode 5 (lima) tahun tersebut sepanjang 65,07 km dan pengurangan jalan kerikil dan tanah mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan jalan dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Fluktuasi pada panjang jalan beraspal menunjukkan adanya pemeliharaan dan perbaikan yang konsisten untuk memastikan aksesibilitas yang optimal di seluruh wilayah. Upaya peningkatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Kriteria rumah layak huni berdasarkan penjelasan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (PKP) rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi kualifikasi keselamatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Kriteria rumah layak huni yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. ketahanan atau keselamatan bangunan, hal ini mencakup kelengkapan standar komponen struktur dan kualitas komponen non-struktur bangunan. Komponen struktur mencakup balok, kolom, pondasi, dan rangka atap. Kualitas komponen struktur bangunan mencakup campuran atau bahan bangunan, ikatan antar-komponen struktur, dan dimensi.
2. kecukupan luas tempat tinggal, hal ini mencakup pemenuhan standar minimum ruang gerak per kepala guna kenyamanan tempat tinggal. Minimum luas per kepalanya adalah 7,2 meter persegi dan tinggi uang 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah melihat dari kemampuan berswadaya dan ketersediaan lahan.
3. akses sanitasi layak, hal ini mencakup bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus (MCK) dengan *septic tank* yang layak pakai, sakuran pembuangan air kotor, sistem pembuangan air limbah, dan tempat sampah. Sanitasi bisa ditempatkan di halaman rumah, dalam rumah, atau komunal dengan jarak terjangkau.
4. akses air minum layak, hal ini mencakup pemenuhan akses air minum yang gampang terjangkau dari segi jarak tempuh atau waktu. Di samping 4 (empat) indikator ini, rumah layak huni harus melengkapi persyaratan kesehatan, yakni ada penghawaan dan pencahayaan. Sarana penghawaan minimal 5% dari luas lantai ruangan, berbentuk bukaan jendela serta memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% dari luas lantai bangunan serta memperhatikan sinar matahari.

Terjadi peningkatan rumah tangga di Kabupaten Boyolali yang mampu mengakses hunian layak. Pada Tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 88,01% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 94,25% pada Tahun 2024. Kedepan, pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat sehingga hak dasar sebagai warga negara terpenuhi dalam mewujudkan kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat.

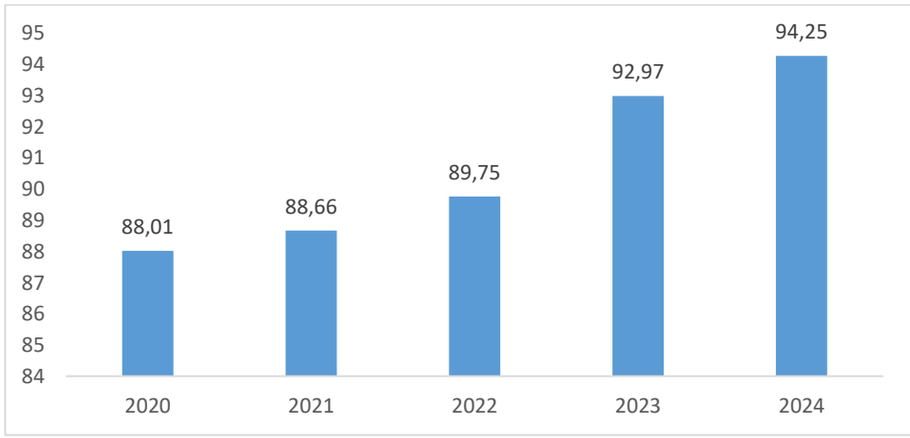

Gambar II. 32
Data Dasar Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Kabupaten Boyolali 2020-2024
(Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Boyolali, 2025)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam segala aspek meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, kuat, dan demokratis.

Dalam rangka mengetahui perkembangan pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa maka Kemendes membuat sebuah *assessment* yaitu Indeks Desa Membangun. Indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. IDM dapat menentukan status desa menjadi desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan nilai indeks-indeks tersebut. Adapun target utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya adalah Desa Mandiri. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Adapun jumlah persentase kenaikan status desa mandiri dari tahun 2022 sebesar 13,61%, untuk tahun 2023 sebesar 15,61%. Dengan detail yaitu; desa mandiri sejumlah 28 (dua puluh delapan) desa, desa di kategori maju sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) desa dan kategori Berkembang sejumlah 64 (enam puluh empat) desa. Sedangkan target untuk tahun 2024 sebesar 17,61% dan dapat dicapai sebesar 24,52% dengan rincian desa dengan kategori Mandiri sejumlah 64 desa, desa dengan kategori maju sejumlah 156 desa dan jumlah desa dengan kategori Berkembang sebanyak 41 desa. Hasil yang melebih target ini dapat terwujud dikarenakan di tahun 2024, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dan tim pendamping profesional desa kepada desa terkait penyamaan persepsi dan *input update assesment* dilakukan secara masif.

Capaian tersebut menjadikan persentase desa mandiri meningkat secara signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2020 sebanyak 3,07% desa berstatus Desa Mandiri dan menjadi 24,52% desa berstatus desa mandiri pada tahun 2024. Menjadikan desa-desa yang ada di Kabupaten Boyolali menjadi mandiri tentunya perlu komitmen bersama karena tidak hanya di atas kertas saja akan tetapi juga perlu dipastikan bagaimana dampak positifnya yang dirasakan oleh masyarakat terutama kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat. Untuk itu program ini perlu adanya sebuah keberlanjutan, karena masih cukup banyak desa yang dengan kategori maju dan berkembang yang berarti akses terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan ekologi masih belum memadai. Kedepannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, bahwa untuk mengukur capaian pembangunan desa mulai tahun 2025 tidak menggunakan Indek Desa Membangun, tetapi dengan menggunakan Indeks Desa.

Tabel II. 47
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Berkembang	163	117	97	64	41
Jumlah Desa Maju	90	129	142	169	156
Jumlah Desa Mandiri	8	15	22	28	64
Jumlah Desa	261	261	261	261	261
Persentase Desa Mandiri (%)	**3,07**	**5,75**	**8,43**	**10,73**	**24,52**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar daripada kapasitas perekonomian.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

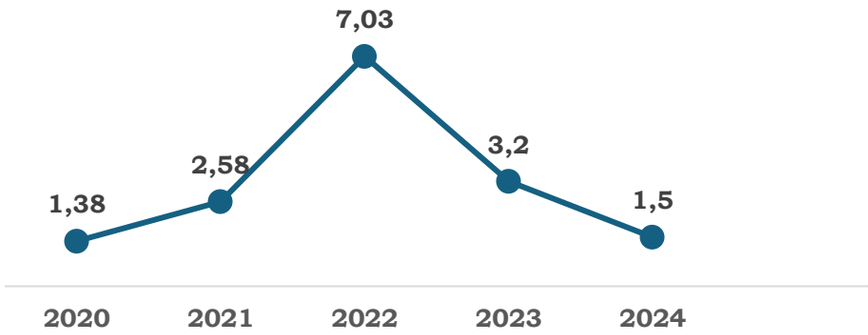

Gambar II. 33
Laju Inflasi Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Laju inflasi Kabupaten Boyolali berpacu pada laju inflasi di Kota Surakarta yang terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2019 hingga berada di titik puncak pada tahun 2022 dengan laju inflasi sebesar 7,03%. Namun di tahun 2024 tingkat inflasi mengalami penurunan hingga menjadi 1,5%.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan publik yang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah.

Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan bentuk indeks lain yang terus dikembangkan.

Indeks Reformasi Birokrasi IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatans setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai predikat A dengan nilai sebesar 83,35. Capaian ini tentu mengindikasikan semakin meningkatnya implementasi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah dan harus terus ditingkatkan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur atau menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Adapun capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Boyolali masih belum optimal yang terlihat masih belum optimalnya capaian Nilai SAKIP dengan besaran 68,96 pada tahun 2024. Masih minimnya capaian ini, maka perlunya akselerasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Boyolali, khususnya oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan dimana terlihat dari capaian Indeks SPBE yang meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 3,89 pada tahun 2024.

Capaian Survei Penilaian Integritas 75.98 pada Tahun 2024 yang masih perlu peningkatan lagi dan masih lebih tinggi dengan Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta. Serta Pencapaian Indeks Integritas Nasional yang dicapai oleh Kabupaten Boyolali yaitu 75,98 (dengan kategori waspada) rangking 19 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sehingga masih perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan lagi.

Tabel II. 48
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2020-2024

Tahun	Opini BPK	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Hukum
2020	WTP	B/61,72	B/68,75	NA	NA	NA
2021	WTP	B/63,60	B/69,39	2,82	NA	NA
2022	WTP	B/68,76	BB/71,44	2,82	4,15 /A-	72,65
2023	WTP	BB/76,94	B/68,28	3,65	4,01/A-	57,53
2024	WTP	A/83,35	B/68,96	3,89	4,51/A	99,32

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, 2025

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 (enam) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas). Capaian IPP di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan menjadi 4,01 pada tahun 2023. Meskipun masih berada pada kategori A-, namun penurunan ini harus diwaspadai agar tidak semakin menurun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian reformasi di bidang hukum juga terus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dimana pencapaian tahun 2024 sangat signifikan hingga mencapai Indeks Reformasi Hukum senilai 99,32. Pencapaian ini tentu memiliki berbagai faktor pendorong yakni meningkatnya koordinasi dan sinergi yang baik antara Perangkat Daerah dengan Bagian Hukum serta penyusunan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat pula evaluasi terhadap faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan Bagian Hukum, sehingga membuat perencanaan dan ketaatan prosedur dalam penyusunan produk hukum belum optimal serta adanya *over* regulasi tanpa diiringi efektivitas implementasinya.

Optimalisasi strategi pencapaian Indeks Reformasi Hukum yaitu dengan melakukan perencanaan dalam penyusunan produk hukum daerah baik peraturan daerah maupun peraturan bupati. Kemudian tertib administrasi, tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, dan tertib asas hukum yaitu dengan memenuhi data dukung dalam proses penyusunan produk hukum daerah dan proses pembentukan produk hukum daerah secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara baik perancang peraturan perundang-undangan maupun analis hukum melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, atau forum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Output* utama dari indeks reformasi hukum yaitu terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan terlaksananya monitoring dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung tata kelola yang terintegrasi dan adaptif didukung dengan adanya pengawasan dalam pemerintahan, seperti penerapan manajemen risiko. Gambaran manajemen risiko Kabupaten Boyolali terlihat pada Indeks Manajemen Risiko (IMR) atau Manajemen Resiko Indeks (MRI). MRI digunakan untuk evaluasi yang mengukur dan menilai sejauh mana suatu organisasi telah menerapkan praktik manajemen risiko secara efektif. Penilaian MRI dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah. Capaian MRI Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebesar 2,91. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Kabupaten Boyolali telah menyelenggarakan manajemen risiko dalam rangkaian pembangunan.

Tabel II. 49
Indeks Manajemen Risiko Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Manajemen Risiko
2020	NA
2021	NA
2022	2,67
2023	2,81
2024	2,91

Sumber: Inspektorat Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka kriminalitas di Kabupaten Boyolali tercatat stabil dalam periode 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2020-2024. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Boyolali memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi. Capaian jumlah demo yang tidak pernah naik juga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif puas terhadap kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali maupun Pemerintah Pusat yang berimplikasi ke daerah.

Tabel II. 50
Indikator Kondusifitas Wilayah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kriminalitas	%	80	80	80	80,06	80,06
2	Persentase Capaian Aksi HAM	%	86,79	Tidak ada penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (Covid-19)	Tidak mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM	97,60	Tidak mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM
3	Jumlah demo	Kali	2	2	2	2	2
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak Daerah	11	11	10	10	10
		Retribusi umum	7	7	7	7	7
		Retribusi usaha	10	10	8	7	7
		Retribusi Perizinan	1	1	1	2	2
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	1	1
6	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah, 2025

Angka kriminalitas adalah angka yang diperoleh berupa penanganan kasus tindak pidana murni yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun tahun 2023 dari angka yang masuk tertangani secara selesai 145 (seratus empat puluh lima) kasus. Tahun 2023 dari angka yang masuk tertangani secara selesai 145 (seratus empat puluh lima) kasus. Indikator Jumlah tindak kriminal tertangani pada tahun 2023 terealisasi 117 kasus dengan capaian (80,06%). Angka kriminalitas masih terlalu tinggi sekitar 80,06%, hal ini yang tidak diharapkan akan tetapi kenyataan yang ada bahwa kriminalitas yang tinggi bersinggungan dengan pendidikan yang rendah, kesenjangan sosial yang tinggi, kurangnya kegiatan patroli rutin dari pihak keamanan serta kurangnya pengawasan dari sosial dari masyarakat secara umum. Tuntutan gaya hidup yang tinggi mendorong seseorang berpikir praktis dan negatif untuk pemenuhan ekonomi tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Persentase capaian aksi HAM mengacu pada proporsi atau tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM). Di Kabupaten Boyolali persentase capaian aksi HAM pada tahun 2020 sebesar 86,79%, masih rendahnya angka persentase tersebut disebabkan oleh pelaporan yang rumit dan berjenjang menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan data dukung penilaian, riil pada perangkat daerah atau instansi sebenarnya sudah melaksanakan indikator namun dalam bentuk lain, tidak sesuai dengan bahasa indikator. Kebijakan peduli HAM di Kabupaten Boyolali bertujuan untuk memberikan motivasi bagi pemerintah daerah melaksanakan penghargaan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan sinergitas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka memenuhi perlindungan HAM bagi masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah adalah proses pelaksanaan dan pengawasan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun capaian persentase penegakan perda di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 100%. Penegakan hukum dalam menaati Peraturan Daerah ini, tentu menjadikan pemerintah daerah tegas dan konsisten dalam mengemban amanah mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan pembangunan ke depan, tetap diperlukan kegiatan pengawasan, pencegahan, hingga tindakan represif terhadap pelanggaran demi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Retribusi perizinan tahun 2016 dan tahun 2017 meliputi retribusi IMB dan HO, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 retribusi perizinan hanya retribusi IMB, sedangkan tahun 2022 menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dari banyaknya perijinan yang ditangani hanya PBG yang ada retribusinya. Hal ini menunjukkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boyolali, karena semua perizinan berusaha gratis kecuali PBG. Perda yang dihasilkan tiap tahun sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Boyolali. Perda tersebut menyesuaikan regulasi yang ada dari pusat mengingat berlakunya OSS RBA (OSS berbasis risiko). Peraturan Daerah yang dihasilkan mempermudah iklim investasi yang ada di Kabupaten Boyolali, yaitu Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dimana adanya kemudahan penanaman modal di Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman modal maka penguatan investasi melalui pengembangan potensi dan peluang penanaman modal serta kemudahan penanaman modal di Kabupaten Boyolali.

Bentuk kemudahan investasi diantaranya penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal, fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali dengan melalui pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam rangka kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali maka kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Secara keseluruhan daya saing suatu daerah tercermin melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menggambarkan derajat daya saing suatu daerah melalui 4 (empat) pilar utama yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi dengan total 12 (dua belas) pilar pendukung. Pembentuk daya saing pilar lingkungan terdiri dari 4 (empat) pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, serta kestabilan ekonomi makro); pembentuk pilar sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) pilar (kesehatan dan keterampilan); pembentuk pilar pasar terdiri dari 4 (empat) pilar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar); dan yang terakhir pembentuk pilar ekosistem inovasi terdiri dari 2 (dua) pilar (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi).

Nilai IDSD Kabupaten Boyolali adalah 3,74 pada tahun 2024 dengan skor terendah pada pilar sistem keuangan (pilar 9 dengan capaian 2,06) dan pilar kapabilitas inovasi (pilar 12 dengan capaian 2,88). Salah satu penyebab rendahnya pilar sistem keuangan adalah terkait literasi dan inklusi keuangan yang belum optimal di masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya daerah yang jauh dari perkotaan. Sedangkan pada rendahnya pilar kapabilitas inovasi, dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten pada inovasi, kurangnya kolaborasi dan ekosistem inovatif dan budaya organisasi yang kurang mendukung pada seluruh tingkatan.

Tabel II. 51
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	3,23	3,16	3,16	3,41	3,74

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Boyolali. Capaian pembangunan Kabupaten Boyolali berdasarkan indikator kinerja kunci pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II. 52
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94,35	86,51	89,68	87,39	89,96
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,70	92,02	92,72	89,69	90,99
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,76	82,89	84,72	93,74	105,20
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,88	7,97	0,92	87,47	48,85
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah Penduduk	%	0,11	0,12	1,13	1,14	1,25
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	90,90	83,33	88,33	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	93,19	95,45	92,61	97,12	98,47
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,71	99,44	94,58	99,83	99,78
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,74	98,15	95,70	97,98	99,82
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,58	95,91	91,55	97,62	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,92	86,49	73,88	94,62	99,79
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	59,84	86,85	100	99,04	100,13
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,78	99,73	92,68	99,67	100,19
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63,23	91,14	91,77	95,64	89,11
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,57	96,58	100	100	109,58
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	50,94	85,83	92,69	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	35,60	71,48	77,93	87,65	75,78
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	57,17	94,95	90,85	100	78,27
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	100	100	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	100	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	93,08	93,46	95,00	94,62	95,38
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,51	91,94	94,11	97,15	97,26
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,33	98,23	89,60	98,30	98,33
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	93,69	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	82,75	82,63	82,85	83,00	83,19
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	89,57	16,77	26,59	63,89	99,54
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	11,99	11,34	10,24	7,02	5,74
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum)	%	69,44	71,43	72,22	71,43	73,68
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	457.256	457.258	458.258	459.258
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	NA	49,950	50,950	51,950	52,950

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	95,696	0	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	21,16	12,37	27,8	19,76	22,79
f) Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	22,37	20,41	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	33,33	36,11	81,81	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,01	0,23	4,42	14,07	1,27
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5.180.097.244,5452	35.601,831 172	60.413,3	48.648,51448	30.767.026.930
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	84,01	83,73	87,53	100	49,51
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	44,58	55,75	52,38	77,97	95,50
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,43	16,50	30,51	57,85	58,53
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,01	0,01	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	8,08	4,83	4,38	3,98	6,59
h) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	2,14	1,47	1,03	5,63	21,95
i) Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi	%	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	49,50	81,15	73,60	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*	%	0,4	96,72	100	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	93,33	100
6	Penanganan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100
j) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	60,17	63,93	60,77	61,39	65,49
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	48,19	52,39	80,54	82,40	61,57
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	4,65	2,32	17,85	9,09	4,83
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,68	99,13	99,12	99,72	98,76
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	28,12	27,92	41,60	59,39	62,41
3	kepemilikan akta kelahiran	%	84,96	85,88	97,70	98,47	99,07
4	jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	24,52	35,84	75,47	83,01	91,48
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-0,38	2,68	2,68	2,30	13,79
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,87	1,88	1,80	2,15	2,09
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	%	71,19	61,55	64,23	62,44	65,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	13,21	15,78	19,54	12,51	11,4
n) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas wilayah	Angka	0,36	0,36	0,51	0,51	0,51
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	-	0,41	0,41	0,42	0,42	0,58
o) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	56,17	55,29	92,92	100	100
p) Koperasi, Usaha Mikro							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	65,98	10,97	42,78	48,83	37,45
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	80,08	35,19	2,14
q) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-42,28	18,66	57,19	-54,65	57,19
r) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,05	0,99	10,12	10,71	11,02
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,82	14,37	60,45	78,03	82,38
3	Peningkatan prestasi olahraga (Provinsi/Nasional/ Internasional)	medali	3	8	97	24	52
s) Statistik							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
t) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66,66	66,66	48,68	61,24	61,24
u) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	83,83	83,83	83,83	98,44	94,21
v) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	59,77	0	70,74	72,87	65
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	13,54	6,86	95,48	76,44	62,92
w) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	87,6	80,77	75	99,2	83,7
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	-	57	66,67	83,3	83,33	68,8
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	36.271	36.081	36.494	36.693	35.367
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-100	0	0	332,05	-3,85
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-43,32	32,77	69,42	67,07	35,33
3	Tingkat hunian akomodasi	%	22,31	21,99	31,94	35,29	36,03
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,48	2,44	2,86	2,76	2,87
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Juta (Rp)	1.109	1.486	1.625	1.847	7.827
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	47,20	56,16	57,35	55,61	56,45
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-48,07	-52,94	-150	-39,2	-24,39
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	0	0	0
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	19,73	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	49,19	50,69	98,95	87,99	90,48
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	171,34	169,69	100	100	100
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,00	1,23	3,42	2,08	25,12
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	114,81
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	7,06	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	80	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%	1,37	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota						
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	95	95	100	90	115
h) Transmigrasi							
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,29	12,42	11,12	11,53	9,58
2	Rasio PAD	%	18,95	21,19	18,76	20,22	21,97
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	3	2	3,03	3,03
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	3	3	3	3,02	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	%	48,69	52,74	50,02	51,33	65,48
6	Opini Laporan Keuangan	-	100	100	100	100	100
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	13,81	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	29,93	286,55	79,82	82,47	15,31
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35,94	78,96	90,77	89,36	33,37
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	151,85	162,80	64,05	68,16	69,03
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	5,92	15,33	17,94	16,23	20,52
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	53,79	25,35	34,10	38,50	20,61
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	6,20	17,29	8,40	13,50	0,51
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,24	43,53	13,71	16,37	15,46
3	Manajemen Aset	-	4 (Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD)	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	IKK *Outcome*	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,69	14,32	14,97	7,62	7,43
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	106,61	100	100	100	93,46
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Kabupaten Boyolali 2020-2024; LKJIP Kabupaten Boyolali 2020-2024

Tabel II. 53
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Rancangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024) Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
a. Pendidikan							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	94,35	86,51	89,68	87,39	89,96
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	N/A	N/A	N/A	99,04	99,53
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	12,88	7,97	0,92	87,47	48,85
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	N/A	N/A	N/A	78,92	86,14
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	N/A	N/A	N/A	67,11	81,61
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	N/A	N/A	N/A	78,27	85,35
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	N/A	N/A	N/A	62,15	83,23
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	N/A	N/A	N/A	N/A	84,36
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	N/A	N/A	N/A	72,3	77,91
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Angka	N/A	N/A	N/A	75,95	77,87
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Angka	N/A	N/A	N/A	70,04	72,44
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Angka	N/A	N/A	N/A	73,64	78,06
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Angka	N/A	N/A	N/A	69,21	75,82
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Angka	N/A	N/A	N/A	60,7	61,44
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Angka	N/A	N/A	N/A	57,6	61,38
b. Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Ibu	kasus	17	45	20	8	19
2	Prevalensi Stunting	%	NA	20,7	20	21,5	20,9
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	93,19	95,45	92,61	97,12	98,47
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	99,71	99,44	94,58	99,83	99,78
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,74	98,15	95,70	97,98	99,82
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,58	95,91	91,55	97,62	100
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	84,92	86,49	73,88	94,62	99,79
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	59,84	86,85	100	99,04	100,13
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,78	99,73	92,68	99,67	100,19

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	63,23	91,14	91,77	95,64	89,11
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	98,57	96,58	100	100	109,58
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	50,94	85,83	92,69	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	35,60	71,48	77,93	87,65	75,78
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	57,17	94,95	90,85	100	78,27
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	0	0	100	100	0
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	100	0	0
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	90,51	91,94	94,11	96,44	97,26
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	98,03	98,23	98,28	98,3	98,33
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	93,69	100	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	82,25	82,64	82,86	83,00	83,20
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	89,57	16,77	26,59	63,89	99,54
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	11,99	11,34	10,24	7,02	5,74
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	69,44	71,43	72,22	71,43	73,68
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	50	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	3	3	3	5	5
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	NA	NA	100	100	NA
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	70	89,74
f. Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan	%	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
	setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota						
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
a. Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	33,33	36,11	81,81	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,01	0,23	4,42	14,07	1,27
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	5.180.097.244,5452	35.601,831172	60.413,3	48.648,51448	30736141164,92
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	84,01	83,73	87,53	100	49,51
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	44,58	55,75	52,38	77,97	95,51
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,22	94,22	94,37	94,7	94,79
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,279	0,306	0,308	0,306	0,233
3	Persentase ARG Daerah	%	2,43	16,50	30,51	57,85	2,56
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan	%	NA	NA	75	75	75
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c. Pangan							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	2,31	0,89	2,40	4,53	21,95
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Angka	84,4	82,6	86,8	88,9	91,1
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	29,21	15,73	20,97	89,51	4,5
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	86,39	tidak ada pengujian karena Covid	93,1	86,91	87,80
d. Pertanahan							

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e. Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Angka	60,17	63,93	60,77	61,39	65,49
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	N/A	N/A	53,5	50,04	64,2
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4,65	2,32	17,85	9,09	4,83
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	84,96	85,88	97,70	98,47	99,07
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	27,19	27,92	41,60	59,39	62,41
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen			0,2	3,4	6,4
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	64,06
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	1,87	1,88	1,80	2,15	2,09
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71,19	61,55	64,23	62,44	65,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,21	15,78	19,54	12,51	11,4
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	19,6	NA	19,6	16,8	12,2
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	NA	56,24	58,22	62,79	63,78
i. Perhubungan							
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,36	0,36	0,51	0,51	0,51
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	88,66	88,79	88,92	89,06	89,19
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
j. Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,77%
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,31
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	100	100	80,08	35,19	2,14
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,86
l. Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-42,28	18,66	57,19	-54,65	57,19
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	N/A	145	131,34	54,07	136,18
m. Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	NA	NA	0,1	0,08	0,06
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	NA	NA	0,01	0,02	0,013
n. Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	2,63
o. Persandian							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	66,66	66,66	48,68	61,24	61,24
p. Kebudayaan							
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	6,74

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
q. Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	59,77	0	70,74	72,87	65,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	13,54	6,86	95,48	76,44	62,92
r. Kearsipan							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	89,00	55,52	70,88	83,02	81,44
3. Urusan Pilihan							
a. Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2223	1900	2840	2671	1217
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	34093	34181	33881	34022	34150
b. Pariwisata							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	-4,41	4,9	21,87	13,99	11,49
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	NA	NA	NA	NA	-3,86
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	NA	NA	NA	0,1
c. pertanian							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	17,88	- 13,23	- 1,30	- 7,29	8,73
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	- 29,44	11,83	- 7,34	20,59	- 17,99
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0,11	-2,24	2,00	-19,31	7,69
	Daging	%	2,49	-2,89	-1,31	-0,82	-2,71
	Telur	%	-0.40	-3.23	0.90	-17.48	4.39
	Susu	%	0.55	0.34	0.78	-25.21	13.11
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	-18.383	-6.039	-4.485	-5.115	6,49
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	0	48		8	42
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	-48,07	52,94	150	-39,2	-24,39
d. Kehutanan							
e. Energi dan Sumber Daya Mineral							
f. Perdagangan							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	171,34	169,69	100	100	100
g. Perindustrian							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:						
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	30,13	30,64	30,02	30,58	31,48
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	30,13	30,64	30,02	30,58	31,48
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	orang	78,427	66,449	90,697	110,671	85,653
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	US$	272560251,39	343503186,38	289468954,40	273765832,94	29293020000,00
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	NA	1.988.107,93	3.125.294,50	1.937.439,74	2.891.621,04
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	NA	42,00	24,00	78,00	83,00

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
	dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor						
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	80	80	80	80	80
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100
h. Transmigrasi							
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a. Perencanaan							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100
b. Keuangan							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	2,09	1,53	18,76	20,22	21,97
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,68	94,44	94,76	94,55	93,46
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	12,08	7,88	7,89	1,03	-0,13
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase Penurunan SILPA	%	28,73	111,24	-43,47	-6,88	20,09
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Angka	NA	NA	75,19	75,39	N/A
d. Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	95	100	100	95	95
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	100	100	100	100	100
e. Fungsi Pengawasan							
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	NA	2.863	2.897	3.038	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	3	3	3	3
4	Manajemen Risiko Indeks	Angka	1.440	2.488	2.672	2.810	2.919
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100%	95%	100%	100%	97,43%
f. Fungsi Pengadaan							
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Angka	NA	NA	NA	NA	NA
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Angka	NA	NA	NA	NA	NA
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	NA	NA	NA	NA	NA
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	Realisasi					
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
h. Pelayanan Publik							
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Angka	-	68,21	88,03	90,61	97,31

Sumber: Data Dioalah, 2025

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak setiap warga negara untuk dapat mendapatkan pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tabel II. 54
Rekapitulasi Capaian SPM Tahun 2020-2024

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		CAPAIAN SPM 2020	CAPAIAN SPM 2021	CAPAIAN SPM 2022	CAPAIAN SPM 2023	CAPAIAN SPM 2024
Kabupaten Boyolali		89,59	94,58	98,78	98,71	98,13
1	Pendidikan	64,67	80,54	92,70	94,68	93,50
2	Kesehatan	77,43	91,84	91,88	97,95	95,81
3	Pekerjaan Umum	98,50	95,09	96,51	100,00	100,00
4	Perumahan Rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Trantibumlinmas	96,92	100,00	100,00	100,00	99,47
6	Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Buku Laporan SPM Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Covid-19 menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8% di tahun 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *The Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspon dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 (empat puluh) tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4%, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4%. Lebih parah lagi dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2024, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4% di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di Tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV tahun 2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan tahun 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan *gradually* menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam lingkup lokal perekonomian Kabupaten Boyolali ekonomi Kabupaten Boyolali dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan dinamika yang berbeda-beda pada sektor-sektor tertentu. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, namun seiring dengan perkembangan zaman, sektor industri dan jasa juga mulai tumbuh. Itu artinya terjadi pergeseran struktur ekonomi dari yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor pertanian menuju diversifikasi ke sektor industri dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali beberapa tahun terakhir cenderung stabil, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti fluktuasi harga komoditas pertanian dan persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain itu terdapat peningkatan investasi baik dari pemerintah maupun swasta. Sektor yang paling menarik bagi investor termasuk pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Dengan kata lain potensi pengembangan sektor pariwisata, pertanian modern, dan industri

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pengolahan dan kreatif menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah juga aktif dalam memberikan insentif dan kemudahan perizinan untuk menarik lebih banyak investasi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai matriks keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan Pemerintahan Daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 55
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami tren positif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Pada tahun 2020 DOFD Kabupaten Boyolali mencapai 18,95% dan meningkat hingga mencapai 20,23% di tahun 2023 serta 21,94% di tahun 2024. Peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 serta kenaikan yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dengan kata lain,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kemandirian fiskal Kabupaten Boyolali bergerak positif dari kategori “Kurang” menjadi kategori “Sedang” pada tahun 2024. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Boyolali periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 56
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	451.543.582.894	2.382.403.220.150	18,95
2	2021	514.970.001.434	2.408.952.603.978	21,38
3	2022	444.693.170.145	2.372.372.551.015	18,74
4	2023	494.473.199.784	2.444.305.229.951	20,23
5	2024	538.701.689.777	2.455.462.406.252	21,94
	Rata-Rata	488.876.328.807	2.412.699.202.269	20,26

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa); dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan);
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022 yang sempat mengalami sedikit penurunan namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan mencapai 0,83% di mana pendapatan tahun 2020 mencapai Rp2.382.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua milyar rupiah) menjadi Rp2.455.000.000.000 (dua triliun empat ratus lima puluh lima milyar rupiah) di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya PAD dan Pendapatan Transfer.

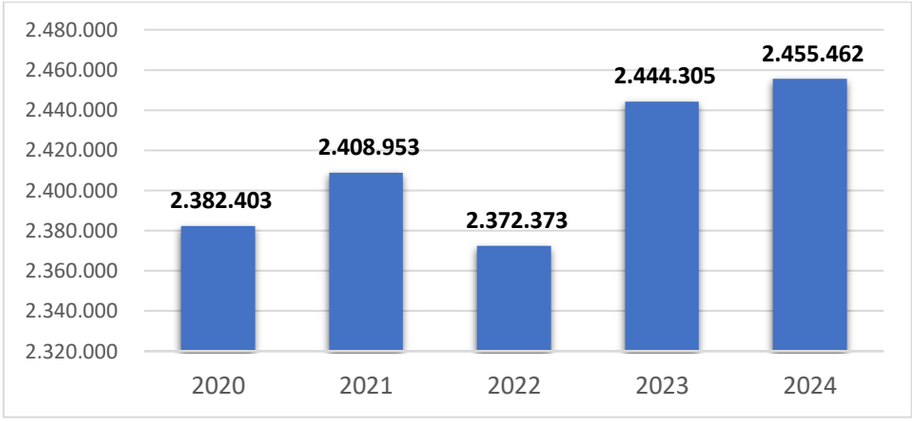

Gambar II. 34
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 5,75% dan 0,93%. Sementara lain-lain pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi dari Rp93.338.000.000 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah) yang disebabkan terutama turunnya sumber pendapatan hibah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

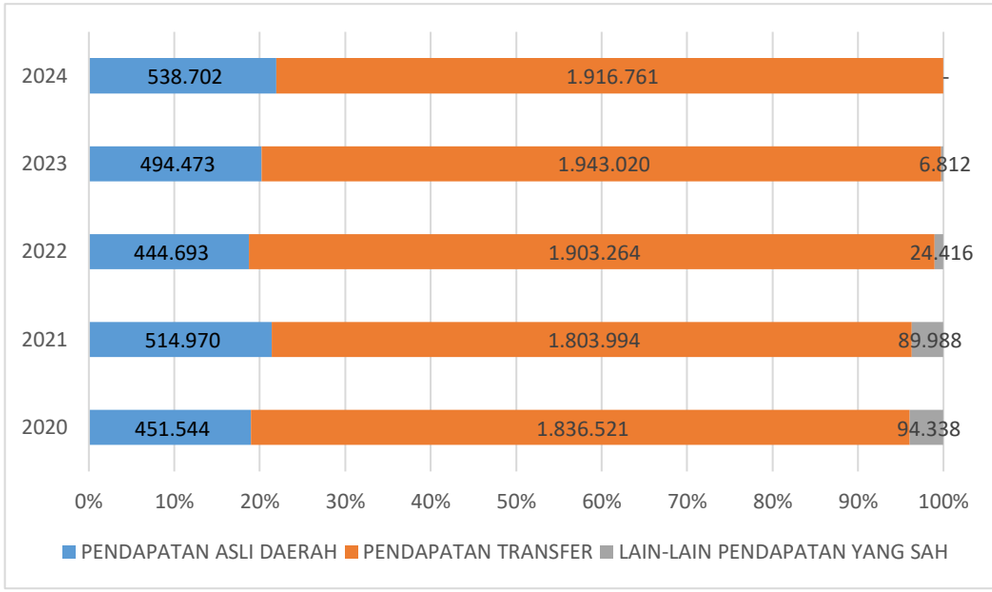

Gambar II. 35
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah.

a. pajak daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah mengalami perubahan, sebelum tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Per tahun 2024 dasar hukum pemungutan pajak Daerah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Daerah meliputi: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan mulai tahun 2025 dipungut opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Perkembangan pajak daerah mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,08% dari Rp149.667.000.000 (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) menjadi Rp182.484.000.000 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus delapan puluh

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

empat juta rupiah). Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari pajak daerah ke depan selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan opsen pajak yang telah dilaksanakan Kabupaten Boyolali diantaranya:

1) Pemasangan Baliho dan Spanduk oleh Pemkab Boyolali dengan materi berupa Sosialisasi program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2) Personel Pemkab Boyolali dan Personel Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama mengunjungi kelompok masyarakat dan mensosialisasikan Program Pemutihan PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3) Kegiatan Razia Kepatuhan Berkendara yang dilakukan bersama-sama dan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Satlantas, dan Jasa Raharja (Tim Pembina Samsat) secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap ke depan sinergi dalam bentuk integrasi data dapat dilakukan secara *online* untuk mendukung penguatan pendapatan daerah. Dengan adanya integrasi data tersebut, intensifikasi opsen, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta berbagai bentuk kerja sama lain akan lebih mudah dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan PAD yang berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB. Saat ini, sinergitas data dalam pelaksanaan opsen, terutama Opsen PKB, memang belum berjalan optimal, sehingga agenda penguatan sistem dan koordinasi ini akan menjadi bagian penting dalam pembangunan kedepan.

b. retribusi daerah

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah mengalami perubahan, sebelum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tersebar per jenis retribusinya misalkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Per tahun 2024 dasar hukum pemungutan retribusi daerah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kabupaten Boyolali memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar. Retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi perizinan bangunan gedung dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Pendapatan retribusi di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp318.455.000.000 (tiga ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah). Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan cukup signifikan dari Rp18.542.000.000 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp26.066.000.000 (dua puluh enam milyar enam puluh enam juta rupiah) di tahun 2024.

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dasar hukum yang mengatur pendapatan lain-lain PAD yang sah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi cukup signifikan, dari Rp275.166.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp271.233.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) di tahun 2023, kemudian turun menjadi Rp 12.300.000.000 (dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) di tahun 2024. Penurunan tersebut karena adanya regulasi mulai tahun 2024 Jasa Usaha Pelayanan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan puskesmas masuk kedalam retribusi daerah.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

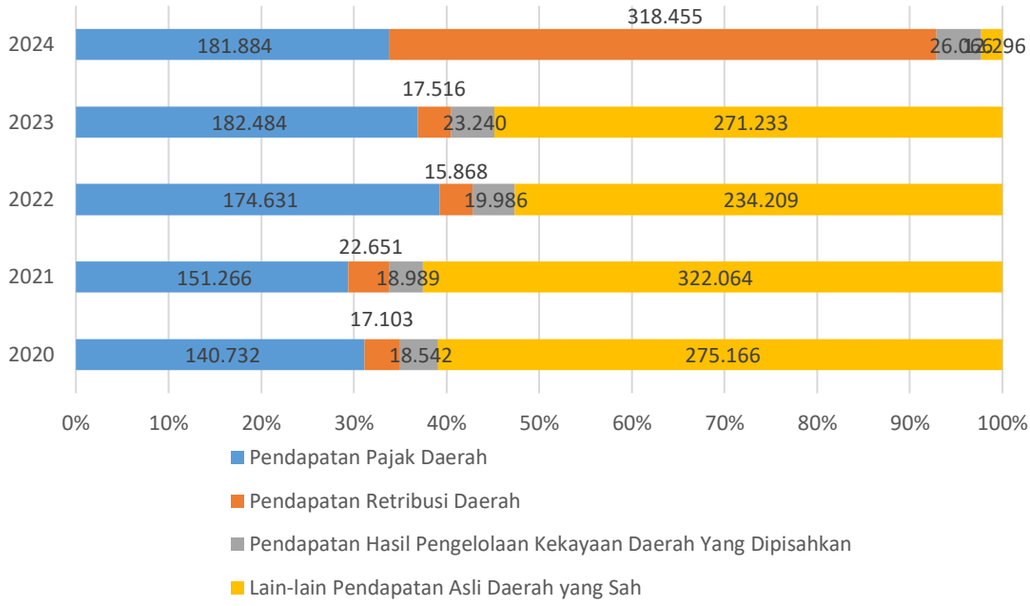

Gambar II. 36
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang sah dan pendapatan pajak daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Boyolali. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 57% per tahun terutama dari BLUD, kemudian pendapatan pajak daerah berkontribusi rata-rata 35% per tahun, berikutnya hasil retribusi daerah kontribusinya sebesar 4% per tahun, dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kontribusinya juga sebesar 4% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan lain-lain PAD yang Sah dan pendapatan pajak daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari hasil retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

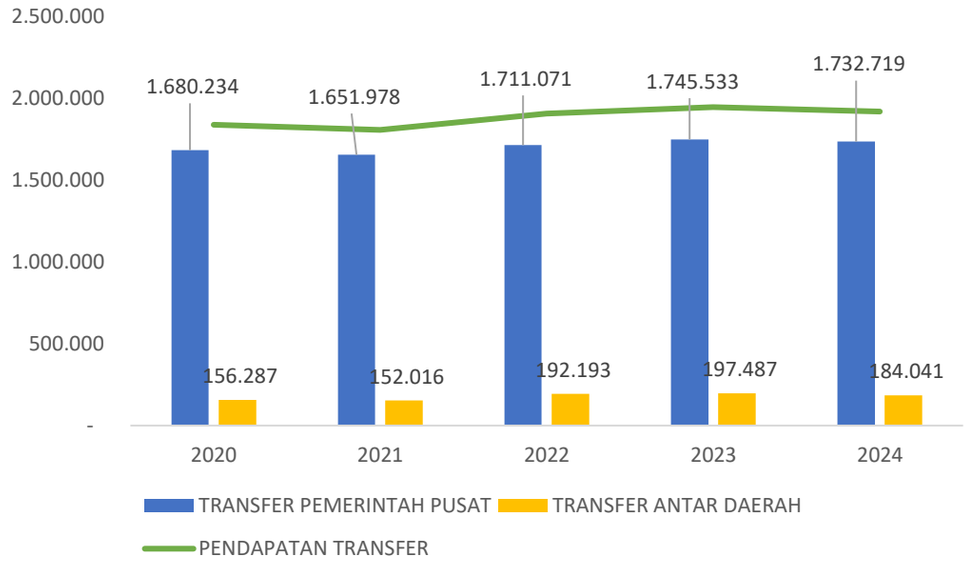

Gambar II. 37
Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Boyolali mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,07% dari Rp1.680.000.000.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh milyar rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp1.732.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh dua milyar rupiah) di tahun 2024. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 90,5% pendapatan transfer disumbang oleh transfer pemerintah pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan transfer pemerintah pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 83,7% adalah disumbang oleh dana perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos dana penyesuaian dan dana desa.

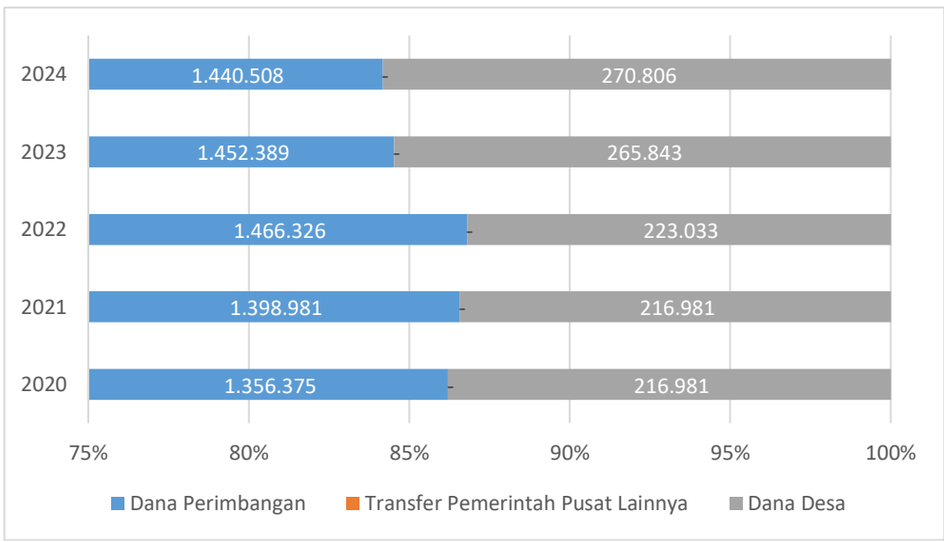

Gambar II. 38
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (juta rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Perkembangan dana perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52% dari Rp1.356.000.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam milyar rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp1.440.000.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh milyar rupiah) di

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak yang memiliki tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,17%, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,27%%. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami rata-rata tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,04%.

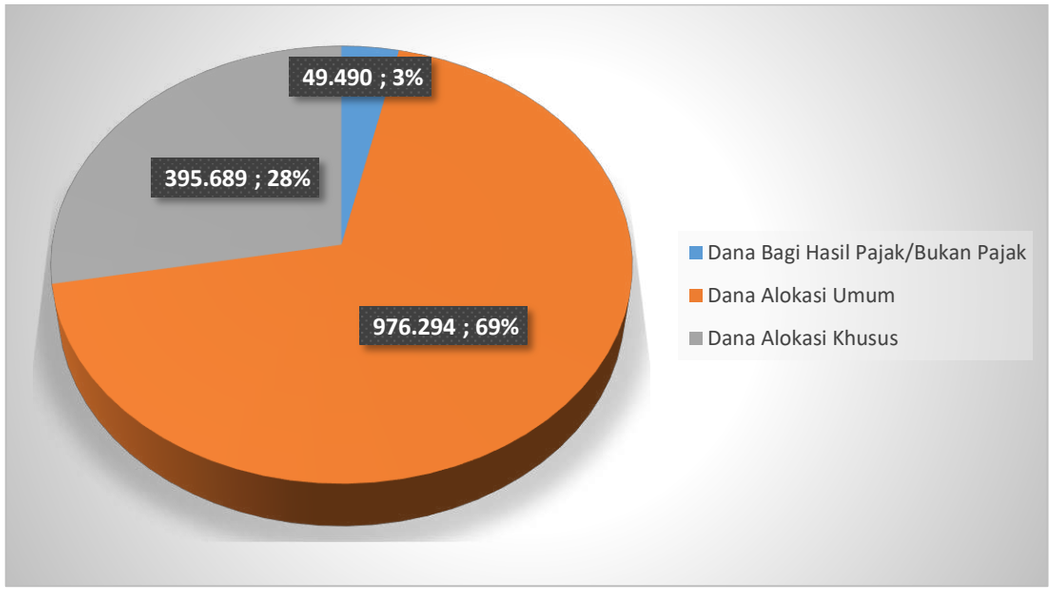

Gambar II. 39
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

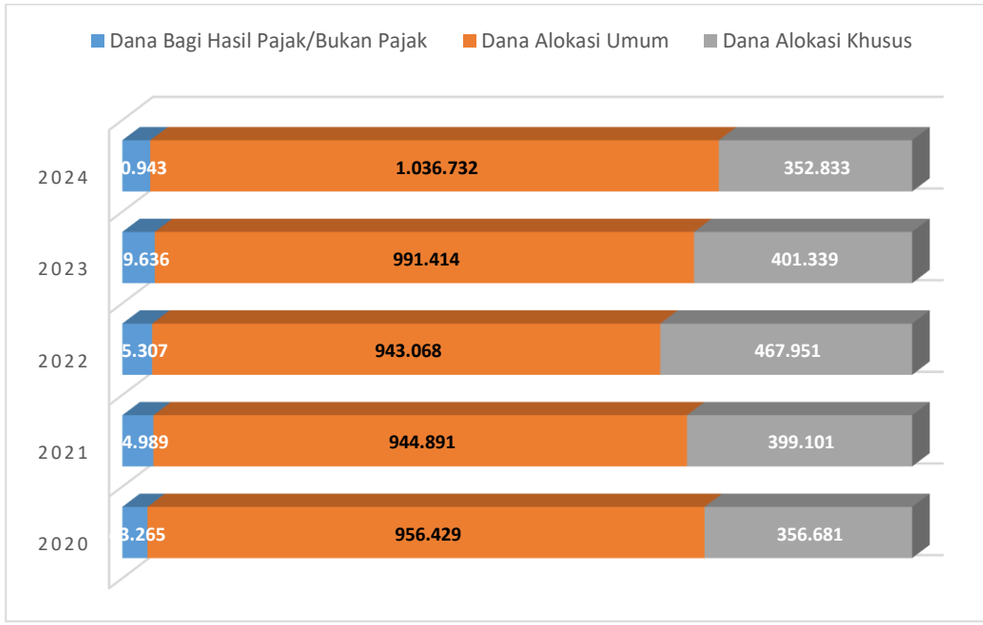

Gambar II. 40
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kontraksi cukup signifikan yaitu dari Rp94.338.000.000 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp 0,00 (nol rupiah) di tahun 2024. Pencapaian lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar Rp94.338.000.000 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

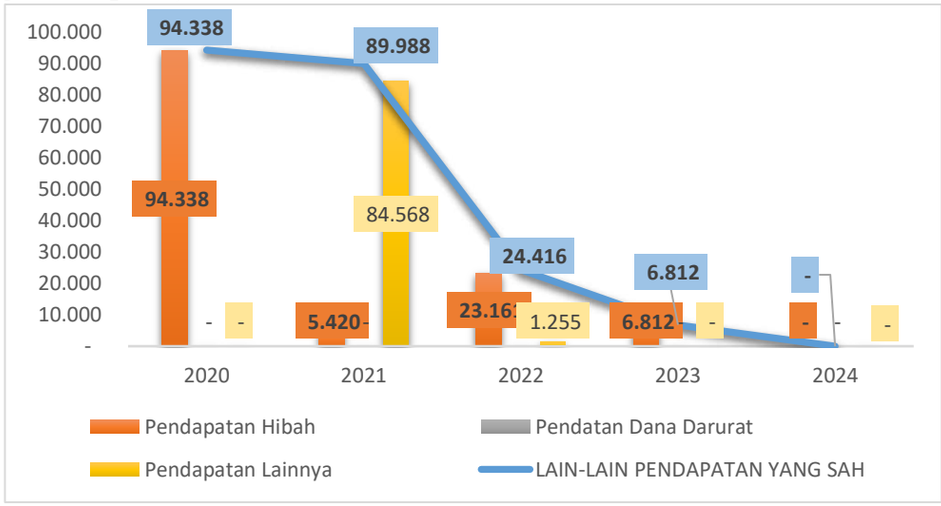

Gambar II. 41
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Jika dilihat dari perkembangan pendapat daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. peningkatan efisiensi: Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
b. diversifikasi pendapatan: upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
c. pembangunan infrastruktur: investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
d. pengelolaan utang: manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
e. optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
f. pengembangan sektor ekonomi: mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
g. transparansi dan akuntabilitas: memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

h. kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

2.2.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,94% pertahun. Fluktuasi belanja daerah terjadi di tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023 dimana realisasi belanja Kabupaten Boyolali di tahun 2020 mencapai Rp2.339.000.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) kemudian menurun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.268.000.000.000 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah) dan kemudian meningkat hingga mencapai Rp2.471.000.000.000 (dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar rupiah) di Tahun 2022 kemudian menurun kembali di Tahun 2023 menjadi Rp2.433.000.000.000 (dua triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar rupiah) dan di tahun 2024 Rp2.418.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan belas milyar rupiah). Adapun fluktuasi di tahun 2020

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan. Sementara fluktuasi tahun 2023 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah khususnya belanja publik lebih khusus yang berbentuk belanja modal.

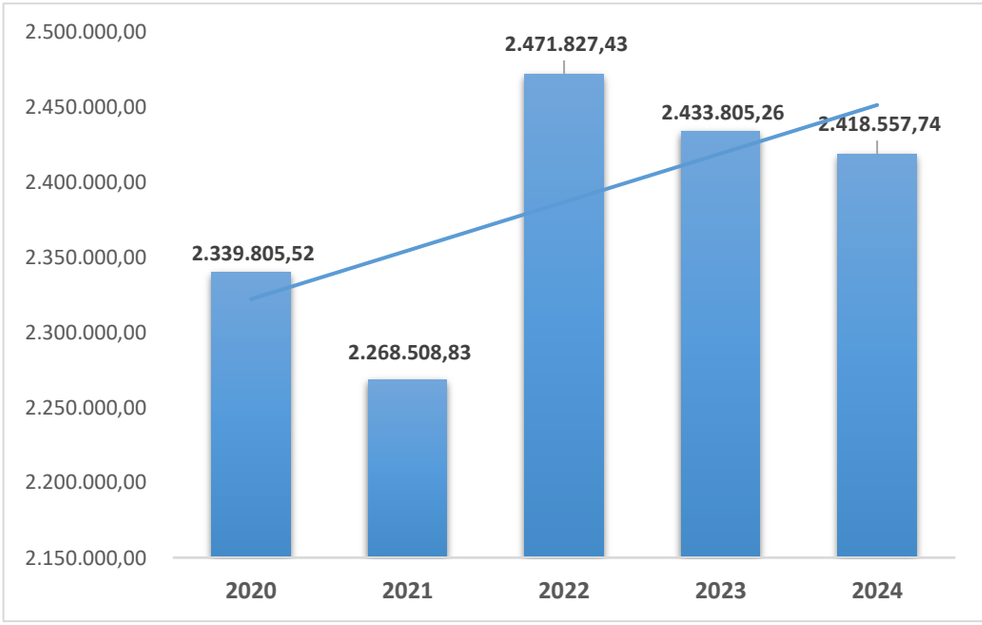

Gambar II. 42
Perkembangan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat dan hanya belanja modal yang trennya menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar -8,13% pertahun. Sementara belanja operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,55% pertahun, belanja tak terduga menurun cukup signifikan sebesar -71,35% pertahun, dan belanja transfer tumbuh sebesar 3,94% pertahun. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 62% belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 20% digunakan untuk belanja modal, dan 16% digunakan untuk belanja transfer dan sisanya sebesar 2% digunakan untuk belanja tidak terduga.

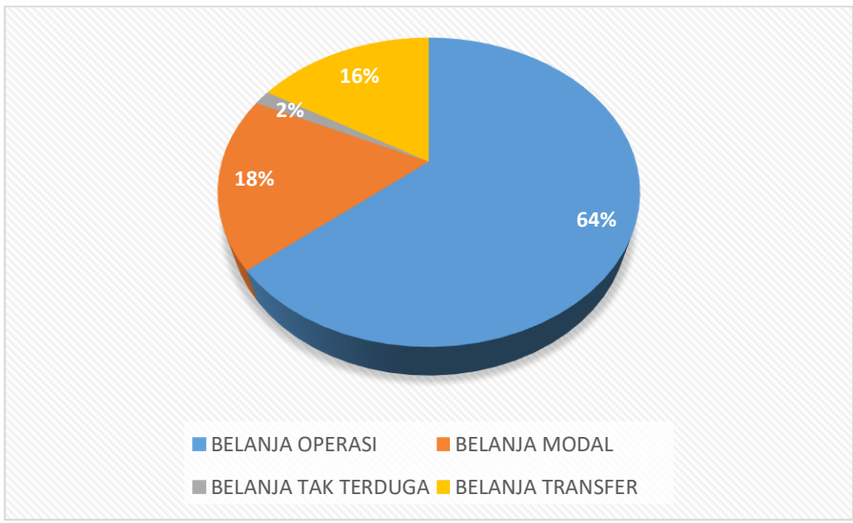

Gambar II. 43
Rata-Rata Struktur Belanja Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1. belanja operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Boyolali telah tumbuh 4,55% pertahun dari Rp1.423.000.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus milyar rupiah) di tahun 2024. Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 66,55% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 56,15% di tahun 2024. Untuk proporsi belanja barang dan jasa proporsinya sempat mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan sampai menjadi 29,97% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 36,84% pada tahun 2024. Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 8% dan mencapai 7,01% pada tahun 2024.

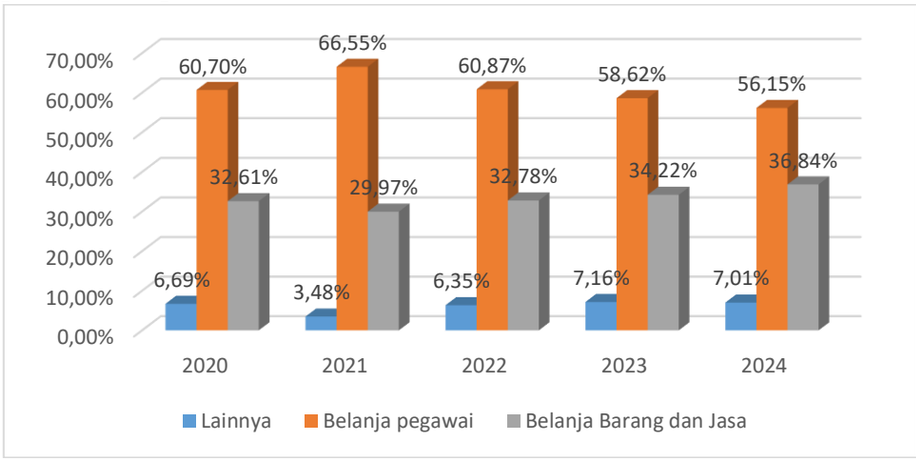

Gambar II. 44
Rata-rata Struktur Belanja Operasi
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (juta rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Belanja pegawai mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp954.885.000.000 (sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Secara terperinci, perkembangan struktur belanja operasi Kabupaten Boyolali ditunjukkan pada gambar berikut.

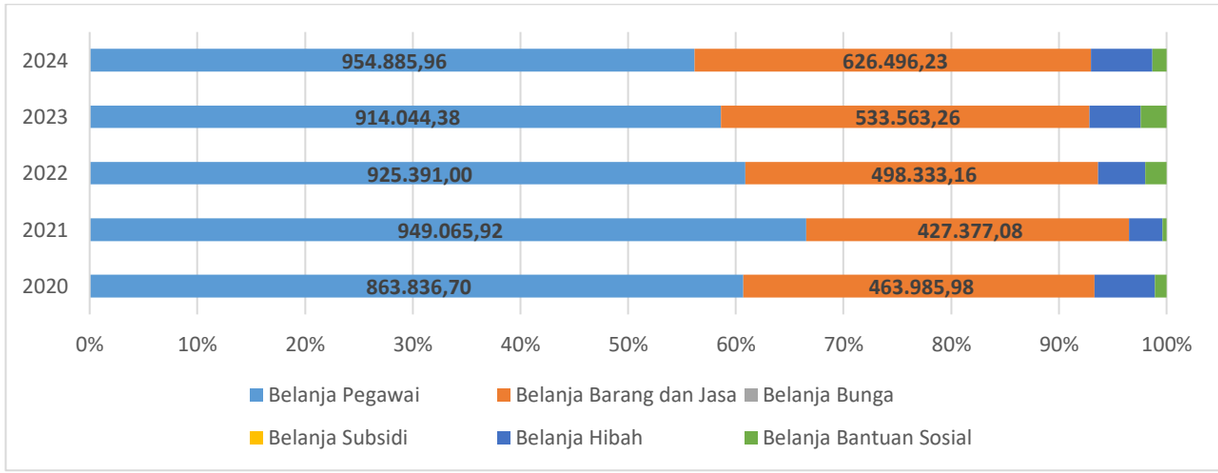

Gambar II. 45
Perkembangan Struktur Belanja Operasi
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2. belanja modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Boyolali mengalami tren menurun -8,13% per tahun. Menurunnya belanja modal tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya belanja tanah secara signifikan yaitu mencapai Rp0 (nol rupiah) pada Tahun 2024. Selain belanja tanah komponen belanja modal yang mengalami penurunan adalah belanja bangunan dan gedung sebesar -0,34% pertahun, belanja jalanan, irigasi dan gedung juga mengalami penurunan cukup signifikan yaitu -8,16% pertahun, belanja aset tetap lainnya sebesar -12,57% per tahun, dan belanja aset lainnya sebesar -47,17% per tahun.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

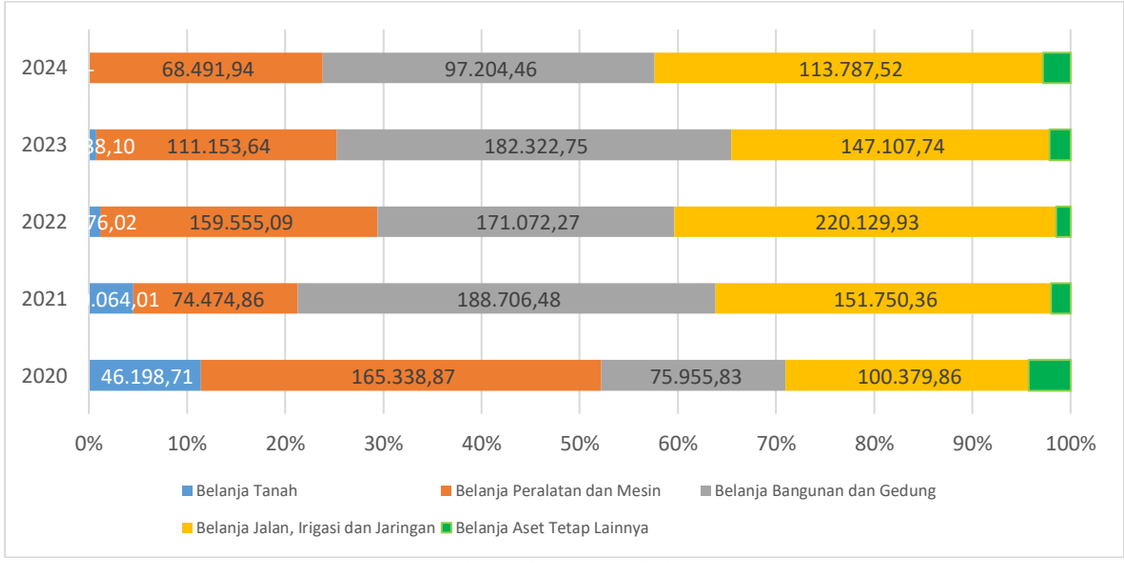

Gambar II. 46
Perkembangan Struktur Belanja Modal
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

3. belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah jenis pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya mendesak, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan tidak dapat dialokasikan dalam jenis belanja lain pada saat penyusunan anggaran. Belanja ini biasanya digunakan untuk menangani kejadian luar biasa seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan respon cepat dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara hati-hati serta akuntabel agar tidak disalahgunakan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4. belanja transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mentransfer dana dari satu entitas ke entitas lainnya tanpa disertai dengan imbalan langsung berupa barang atau jasa. Transfer ini umumnya dilakukan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa, guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau desa.

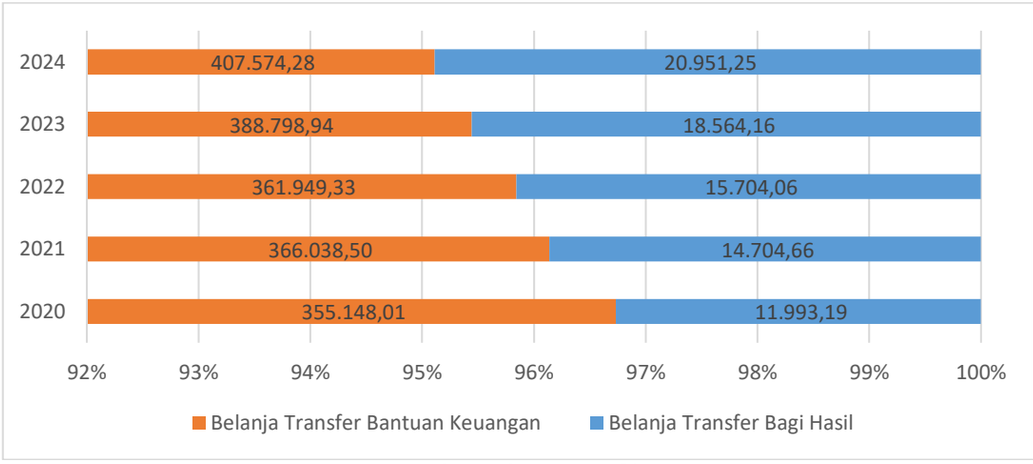

Gambar II. 47
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025)

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

a. perencanaan anggaran yang cermat: melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
b. transparansi dan akuntabilitas: meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
c. pengadaan barang dan jasa yang efisien: memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
d. pengelolaan utang yang bijaksana: mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
e. pengembangan pendapatan alternatif: mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

f. peningkatan efisiensi operasional: mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
g. pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

2.2.1.1.3 Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi naik 11,66%. Naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020-2022 relatif mengalami peningkatan dan mulai menurun signifikan di tahun 2023. Hal itu menunjukkan ada peningkatan efektifitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan yaitu -20,74% pertahun. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

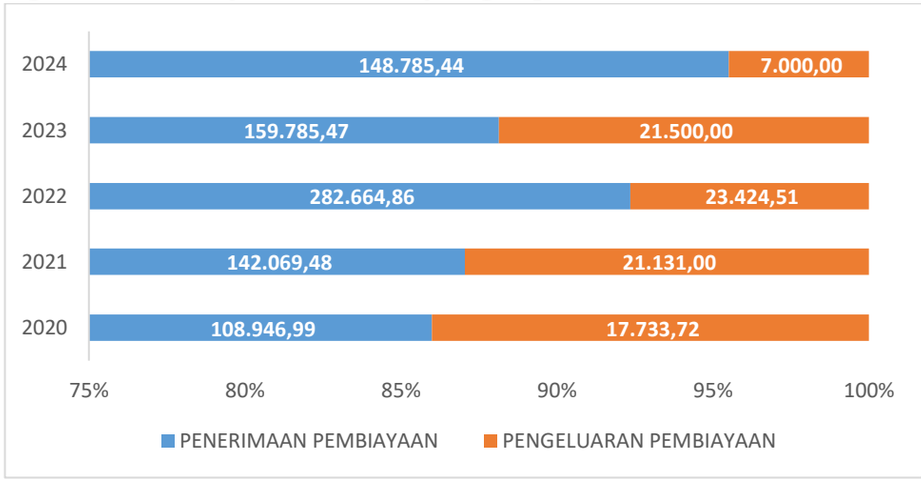

Gambar II. 48
Perkembangan Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Karena kapasitas APBD Kabupaten Boyolali terbatas, diperlukan pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan, salah satunya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemanfaatan CSR terbukti memberikan kontribusi nyata, dimana pada tahun 2023 tercatat 52 perusahaan berpartisipasi dengan total nilai sebesar Rp9.428.063.850 (sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kontribusi ini mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kapasitas pendanaan daerah, serta berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dapat diupayakan sumber pendanaan lainnya dengan:

1. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Upaya peningkatan sumber pendanaan dilakukan melalui optimalisasi PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah. Langkah ini diperkuat dengan penataan dan pemutakhiran basis data

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

potensi pendapatan secara lebih akurat sehingga pemungutan menjadi lebih adil, efisien, dan berkontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.

2. pemanfaatan dana transfer pusat dan provinsi
   Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan secara optimal berbagai dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Fiskal. Pemanfaatan dana ini dilakukan dengan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, sehingga Kabupaten Boyolali memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor strategis.
3. penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD)
   Peningkatan pendanaan juga dapat diperoleh melalui penguatan peran BUMD sebagai motor ekonomi daerah. BUMD diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif dioptimalkan agar mampu memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
4. kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
   Dukungan dunia usaha melalui program CSR menjadi salah satu alternatif penting dalam pembiayaan pembangunan. CSR diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur, sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta berkontribusi pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. kerja sama daerah dengan pihak ketiga
   Selain mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, dan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR), Kabupaten Boyolali juga mendorong kerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta, lembaga keuangan, maupun masyarakat. Kerja sama ini difokuskan pada pembiayaan pembangunan strategis yang sesuai regulasi dan saling menguntungkan, salah satunya melalui penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan keterlibatan badan usaha dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik. Dengan pola tersebut, kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat, beban APBD dapat lebih efisien, dan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan daerah semakin luas, sehingga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan produktif.

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 57
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**2.382.403.220.150,00**	**2.408.952.601.977,95**	**2.372.372.551.015,00**	**2.444.305.229.951,00**	**2.455.462.406.252,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**451.543.582.894,00**	**514.970.001.433,95**	**444.693.170.145,00**	**494.473.199.784,00**	**538.701.689.777,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	140.732.284.319,00	151.265.664.424,00	174.630.769.977,00	182.483.741.975,00	181.884.303.321
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.102.684.753,00	22.651.350.993,00	15.867.931.007,00	17.516.387.575,00	318.726.724.115
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.542.139.505,50	18.988.620.888,00	19.985.651.176,00	23.240.383.323,00	26.066.085.319
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	275.166.474.316,50	322.064.365.128,95	234.208.817.985,00	271.232.686.911,00	12.024.577.022
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.836.521.334.533,00**	**1.803.994.100.976,00**	**1.903.263.859.759,00**	**1.943.020.083.167,00**	**1.916.760.716.475,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.356.374.607.571,00	1.630.695.148.226,00	1.466.326.374.759,00	1.452.389.304.413,00	1.440.508.435.909,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	323.859.637.000,00	0,00	244.744.538.000,00	293.143.854.000,00	292.210.890.000
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	122.992.708.962,00	0,00	0,00	0,00	177.670.667.066
1.2.4	Bantuan Keuangan	33.294.381.000,00	173.298.952.750,00	192.192.947.000,00	197.486.924.754,00	6.370.723.500
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**94.338.302.723,00**	**89.988.499.568,00**	**24.415.521.111,00**	**6.811.947.000,00**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	94.338.302.723,00	5.420.000.000,00	23.160.680.702,00	6.811.947.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	84.568.499.568,00	1.254.840.409,00	0,00	0,00
2	**BELANJA**	**2.339.805.517.025**	**2.268.508.827.348**	**2.471.827.429.489**	**2.433.805.255.445**	**2.418.557.735.103**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.423.041.795.634**	**1.426.073.774.966**	**1.520.204.806.875**	**1.559.193.022.284**	**1.700.532.066.479**
2.1.1	Belanja Pegawai	863.836.702.593	949.065.921.038	925.391.001.017	914.044.381.109	954.885.960.879
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	463.985.975.237	427.377.076.509	498.333.163.989	533.563.259.960	626.496.234.909

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	80.007.467.804	44.267.700.501	66.486.299.443	74.351.638.715	96.933.680.691
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.211.650.000	5.363.076.918	29.994.342.426	37.233.742.500	22.216.190.000
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	
2.2	**BELANJA MODAL**	**405.110.958.145**	**443.846.199.415**	**567.084.220.580**	**453.924.865.491**	**288.527.089.841**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	46.198.714.373	20.064.010.607	6.776.019.956	3.438.098.494	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	165.338.874.253	74.474.859.526	159.555.094.215	111.153.641.092	68.491.943.141
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	75.955.828.116	188.706.482.618	171.072.270.699	182.322.750.909	97.204.458.497
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.379.862.388	151.750.358.426	220.129.933.908	147.107.737.578	113.787.519.573
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.229.979.015	8.850.488.238	8.368.947.302	9.731.632.918	8.158.189.680
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	77.000.000	-	1.181.954.500	171.004.500	884.978.950
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**144.511.572.525**	**17.845.685.967**	**6.885.016.034**	**13.324.273.670**	**973.047.000**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	144.511.572.525	17.845.685.967	6.885.016.034	13.324.273.670	973.047.000
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**367.141.190.721**	**380.743.167.000**	**377.653.386.000**	**407.363.094.000**	**428.525.531.783**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**11.993.185.240**	**14.704.663.000**	**15.704.056.000**	**18.564.156.000**	**20.951.252.783**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	10.948.287.463	13.389.920.000	14.699.705.000	15.974.007.000	18.837.209.790
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.044.897.777	1.314.743.000	1.004.351.000	2.590.149.000	2.114.042.993
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-			
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**355.148.005.481**	**366.038.504.000**	**361.949.330.000**	**388.798.938.000**	**407.574.279.000**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	354.131.002.000	366.038.504.000	361.949.330.000	388.798.938.000	407.574.279.000
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	1.017.003.481	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN DAERAH	**91.213.269.388**	**120.938.477.363**	**259.240.348.293**	**138.285.469.819**	**141.785.444.325**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**108.946.985.388**	**142.069.477.363**	**282.664.858.993**	**159.785.469.819**	**148.785.444.325**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.946.985.388	142.069.477.363	282.664.858.993	159.785.469.819	148.785.444.325
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada perusahan Daerah			-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**17.733.716.000**	**21.131.000.000**	**23.424.510.700**	**21.500.000.000**	**7.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.733.716.000	21.131.000.000	23.424.510.700	21.500.000.000	7.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang			-	-	-

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Bupati dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

2.2.1.2.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Boyolali dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,84% pertahun dari Rp4.227.000.000.000 (empat triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp4.916.000.000.000(empat triliun sembilan ratus enam belas milyar rupiah) di tahun 2024. Hampir semua jenis aset pertumbuhan rata-ratanya mengalami tren yang positif dalam 5 (lima) tahun terakhir diantaranya yaitu aset lancar tumbuh mencapai 0,86% pertahun, investasi jangka panjang tumbuh mencapai 4,39% pertahun, aset tetap tumbuh secara signifikan mencapai 4,14% per tahun. Adapun aset lainnya mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -5,16% pertahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 83,11% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2.2.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup fluktuatif namun relatif mengalami tren meningkat sebesar 3,3% pertahun dari Rp31.048.000.000 (tiga puluh satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp35.351.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) di tahun 2024. Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh Pendapatan Diterima Dimuka yang trennya relatif menurun rata-rata sebesar -11,74% pertahun dari Rp5.837.000.000 (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2020 menjadi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Rp5.314.000.000 (lima milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) di tahun 2024 dan utang beban yang hanya dialokasikan pada tahun 2020 sebesar Rp25.175.000.000 (dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2.2.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Boyolali mengalami rata-rata kenaikan sebesar 3,85% pertahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp4.196.000.000.000 (empat triliun seratus sembilan puluh enam milyar rupiah) menjadi Rp4.880.000.000.000 (empat triliun delapan ratus delapan puluh milyar rupiah) di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2024 secara konsisten nilainya terus mengalami peningkatan tanpa terjadi penurunan. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Boyolali disajikan pada tabel berikut ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 58
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Jumlah Aset Lancar	252.432.723.377,02	385.881.919.375,53	261.624.976.462,14	236.382.023.410,90	261.252.444.131,78	0,86
Jumlah Investasi Jangka Panjang	320.268.449.803,65	338.994.208.881,67	337.822.943.968,79	361.097.866.021,19	380.345.101.896,71	4,39
Jumlah Aset Tetap	3.588.841.811.037,37	3.871.672.644.899,52	4.138.560.660.542,18	4.220.559.434.634,32	4.221.222.317.728,25	4,14
Jumlah Aset Lainnya	66.148.005.516,91	62.048.198.529,40	68.273.572.904,23	75.435.407.642,67	53.509.309.307,32	(5,16)
JUMLAH ASET	4.227.690.989.734,95	4.658.596.971.686,12	4.827.609.963.385,89	4.914.610.084.873,63	4.916.329.173.064,06	3,84
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.247.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pendapatan Diterima Dimuka	5.837.761.418,59	7.372.572.342,70	6.727.181.476,96	5.314.226.548,53	2.519.768.238,72	(11,74)
Utang Belanja	-	22.125.258.453,80	20.750.688.486,00	35.804.081.615,00	32.831.296.628,00	8,39
Utang beban	25.175.544.122,57					0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	31.048.552.796,16	29.497.830.796,50	27.477.869.962,96	41.118.308.163,53	35.351.064.866,72	8,71
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	31.048.552.796,16	29.497.830.796,50	27.477.869.962,96	41.118.308.163,53	35.351.064.866,72	3,30
EKUITAS						
EKUITAS						
JUMLAH EKUITAS	4.196.642.436.938,79	4.629.099.889,62	4.838.804.283.914,39	4.873.491.776.710,10	4.880.978.505.033,34	3,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.227.690.989.734,95	34.126.930.686,12	4.866.282.153.877,35	4.914.610.084.873,63	4.916.329.569.900,06	3,84

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1. rasio keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Boyolali periode tahun 2020-2024 digunakan beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti keuangan pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti keuangan pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio *acid-test*. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 (dua) telah dianggap baik.

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024:

Tabel II. 59
Rasio Lancar Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	252.432.723.377	385.881.919.376	261.624.976.462	236.382.023.411	261.252.444.132
Kewajiban Lancar	31.048.552.796	29.497.830.797	27.477.869.963	41.118.308.164	35.351.064.867
RASIO LANCAR	8,13	13,08	9,52	5,75	7,39

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

b. rasio solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas Pemerintah Daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

(1) *total debt to equity ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Boyolali cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II. 60
Rasio Hutang Kabupaten Boyolali Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	31.048.552.796	29.497.830.797	27.477.869.963	41.118.308.164	35.351.064.867
Ekuitas	4.196.642.436.939	4.629.099.890	4.838.804.283.914	4.873.491.776.710	4.880.978.505.033
Total Debt To Equity Ratio	0,007	6,372	0,006	0,008	0,007

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

(2) *total debt to total asset ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Tabel II. 61
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kewajiban	31.048.552.796	29.497.830.797	27.477.869.963	41.118.308.164	35.351.064.867
Aktiva	4.227.690.989.735	4.658.596.971.686	4.827.609.963.386	4.914.610.084.874	4.916.329.173.064
Total Debt To Asset Ratio	0,0073	0,0063	0,0057	0,0084	0,0072

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

c. rasio aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

(1) perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Boyolali menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dan lain-lain. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk PAD. Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/penerimaan daerah.

Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 62
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Boyolali
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	451.543.582.894	514.970.001.434	444.693.170.145	494.473.199.784	538.701.689.777
Aktiva Tetap (Aset Tetap)	3.588.841.811.037	3.871.672.644.900	4.138.560.660.542	4.220.559.434.634	4.221.222.317.728
Trasio Perputaran Aktiva Tetap	0,126	0,133	0,107	0,117	0,128

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

(2) perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk PAD. Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya rasio perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin meningkat namun tetap perlu diperhatikan melalui beberapa strategi antara lain:

a) pengembangan aset komersial: menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
b) penyediaan infrastruktur: membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
c) pemanfaatan sumber daya alam: jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
d) pembangunan properti publik: membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
e) kemitraan publik-privat (KPP): melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
f) peningkatan efisiensi operasional: memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

g) pengembangan wisata: pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti waduk, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
h) pengelolaan aset digital: memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II. 63
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	451.543.582.894	514.970.001.434	444.693.170.145	494.473.199.784	538.701.689.777
Total Aktiva (Jumlah Aset)	4.227.690.989.735	4.658.596.971.686	4.827.609.963.386	4.914.610.084.874	4.916.329.173.064
Rasio Perputaran Total Aktiva	0,107	0,111	0,092	0,101	0,110

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2020-2024 tergambar pada 2 (dua) aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 37,90%. Proporsi belanja aparatur terbesar

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

terjadi di tahun 2021 yang mencapai 41,45% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 39,37%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 42% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 64
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	863.836,70	2.357.539,23	36,64%
2	2021	949.065,92	2.289.639,83	41,45%
3	2022	925.391,00	2.495.251,94	37,09%
4	2023	914.044,38	2.455.305,26	37,23%
5	2024	954.885,96	2.425.557,74	39,37%

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,37% pertahun dari Rp. 1.488.000.000.000 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan milyar rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp1.510.000.000.000 (satu triliun lima ratus sepuluh milyar rupiah) di tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp863.836.000.000 (delapan ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp954.855.000.000 (sembilan ratus lima puluh empat milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) di tahun 2024 dan belanja hibah dari Rp80.007.000.000 (delapan puluh milyar tujuh juta rupiah) di tahun 2020 menjadi Rp96.933.000.000,00 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tiga

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

puluh tiga juta rupiah) di tahun 2024. Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp2.404.658.000.000 (dua triliun empat ratus empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) maka rata-rata proporsi total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas mencapai 60,89%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 39,11%.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) evaluasi kebutuhan pegawai: melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2) optimalisasi produktivitas: mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3) pengendalian pengadaan pegawai baru: mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4) peningkatan efisiensi administrasi: mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan *online* dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5) pengendalian tunjangan dan insentif: mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6) penghapusan atau penyederhanaan jabatan: melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 65
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**959.055,82**	**998.696,70**	**1.021.871,64**	**1.025.629,76**	**1.074.035,83**	**2,87**
1.1	Belanja Pegawai	863.836,70	949.065,92	925.391,00	914.044,38	954.885,96	2,54
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	80.007,47	44.267,70	66.486,30	74.351,64	96.933,68	4,91
1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.211,65	5.363,08	29.994,34	37.233,74	22.216,19	9,93
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**367.141,19**	**380.743,17**	**377.653,39**	**407.363,09**	**428.525,53**	**4,02**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	11.993,19	14.704,66	15.704,06	18.564,16	20.951,25	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	355.148,01	366.038,50	361.949,33	388.798,94	407.574,28	3,65
3	**Belanja Tak Terduga**	**144.511,57**	**17.845,69**	**6.885,02**	**13.324,27**	**973,05**	**(62,08)**
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**17.733,72**	**21.131,00**	**23.424,51**	**21.500,00**	**7.000,00**	**(20,74)**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	3.550,00	-	-	-	-	
4.2	penyertaan modal daerah;	14.183,72	18.131,00	21.424,51	21.500,00	7.000,00	(21,17)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	3.000,00	2.000,00	-	-	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**1.488.442,30**	**1.418.416,55**	**1.429.834,56**	**1.467.817,13**	**1.510.534,41**	**0,37**

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Tabel II. 66
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.382.403,22	2.408.952,60	2.372.372,55	2.444.305,23	2.455.462,41
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.339.805,52	2.268.508,83	2.471.827,43	2.433.805,26	2.418.557,74
3	Pengeluaran Pembiayaan	17.733,72	21.131,00	23.424,51	21.500,00	7.000,00
	(Defisit/Surplus Riil)	24.863,99	119.312,78	-122.879,39	-11.000,03	29.904,67

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2022, dan 2023 dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun 2022 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp282.664.000.000 (dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Rp159.785.000.000 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel II. 67
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	108.946,98	142.069,48	282.664,86	159.785,47	148.785,44
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**108.946,98**	**142.069,48**	**282.664,86**	**159.785,47**	**148.785,44**

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Boyolali dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Boyolali.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi SiLPA, dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun pembangunan 2025-2029.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 68
Proyeksi APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Kode Rek	URAIAN	BASELINE		TARGET				
		2024	P-RKPD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PENDAPATAN							
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**538.701.689.777**	**615.554.065.000**	**628.898.864.000**	**660.343.806.000**	**666.947.244.000**	**673.616.717.000**	**680.352.884.000**
4.1.01	Pajak Daerah	181.884.303.321	257.164.000.000	259.400.000.000	272.369.999.000	275.093.700.000	277.844.636.000	280.623.083.000
4.1.02	Retribusi Daerah	318.455.004.290	320.514.584.000	332.563.452.000	349.191.624.000	352.683.540.000	356.210.376.000	359.772.479.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.066.085.319	27.550.235.000	26.470.000.000	27.793.499.000	28.071.435.000	28.352.150.000	28.635.671.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.296.296.847	10.325.246.000	10.465.412.000	10.988.684.000	11.098.569.000	11.209.555.000	11.321.651.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.916.760.716.475**	**1.825.764.030.000**	**1.829.230.884.000**	**1.822.367.238.000**	**1.840.590.910.000**	**1.858.996.819.000**	**1.877.586.787.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.732.719.325.909	1.718.337.144.000	1.723.090.998.000	1.716.227.352.000	1.734.451.024.000	1.752.856.933.000	1.771.446.901.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.041.390.566	107.426.886.000	106.139.886.000	106.139.886.000	106.139.886.000	106.139.886.000	106.139.886.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah Pendapatan	**2.455.462.406.252**	**2.441.318.095.000**	**2.458.129.748.000**	**2.482.711.044.000**	**2.507.538.154.000**	**2.532.613.536.000**	**2.557.939.671.000**
5.1	BELANJA OPERASI	**1.700.532.066.479**	**1.823.758.211.000**	**1.784.744.104.000**	**1.786.351.104.000**	**1.783.756.104.000**	**1.839.761.104.000**	**1.784.766.104.000**
5.1.01	Belanja Pegawai	954.885.960.879	1.061.488.584.000	999.272.690.000	999.272.690.000	999.272.690.000	999.272.690.000	999.272.690.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.496.234.909	663.031.901.000	700.924.599.000	702.524.599.000	700.924.599.000	700.924.599.000	700.924.599.000
5.1.05	Belanja Hibah	96.933.680.691	79.373.426.000	73.518.815.000	73.525.815.000	72.530.815.000	128.535.815.000	73.540.815.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.216.190.000	19.864.300.000,00	11.028.000.000	11.028.000.000	11.028.000.000	11.028.000.000	11.028.000.000
5.2	BELANJA MODAL	**288.527.089.841**	**306.547.614.000**	**245.747.018.000**	**268.143.314.000**	**295.565.424.000**	**264.635.806.000**	**344.956.941.000**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	29.955.000.000	-	2.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.491.943.141	58.616.638.000	33.994.364.000	37.007.680.000	43.270.250.000	36.165.763.000	47.142.643.000

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kode Rek	URAIAN	BASELINE		TARGET				
		2024	P-RKPD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.204.458.497	88.427.134.000	94.568.174.000	98.778.034.000	107.197.190.000	100.608.744.000	131.145.082.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.787.519.573	123.573.316.000	109.406.479.000	121.733.349.000	131.541.050.000	116.586.475.000	152.882.854.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.158.189.680	5.490.526.000	7.410.667.000	7.740.565.000	8.105.586.000	7.884.026.000	10.276.951.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	884.978.950	485.000.000	367.334.000	383.686.000	451.348.000	390.798.000	509.411.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	**973.047.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	973.047.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	**428.525.531.783**	**453.730.386.000**	**461.216.626.000**	**461.216.626.000**	**461.216.626.000**	**461.216.626.000**	**461.216.626.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.951.252.783	27.745.769.000	28.682.217.000	28.682.217.000	28.682.217.000	28.682.217.000	28.682.217.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	407.574.279.000	425.984.617.000	432.534.409.000	432.534.409.000	432.534.409.000	432.534.409.000	432.534.409.000
	Jumlah Belanja	**2.418.557.735.103**	**2.594.036.211.000**	**2.501.707.748.000**	**2.525.711.044.000**	**2.550.538.154.000**	**2.575.613.536.000**	**2.600.939.671.000**
6	PEMBIAYAAN DAERAH	**141.785.444.325**	**152.718.116.000**	**43.578.000.000**	**43.000.000.000**	**43.000.000.000**	**43.000.000.000**	**43.000.000.000**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**148.785.444.325**	**178.690.116.000**	**65.000.000.000**	**64.000.000.000**	**64.000.000.000**	**64.000.000.000**	**64.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	148.785.444.325	178.690.116.000	65.000.000.000	64.000.000.000	64.000.000.000	64.000.000.000	64.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.000.000.000**	**25.972.000.000**	**21.422.000.000**	**21.000.000.000**	**21.000.000.000**	**21.000.000.000**	**21.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	25.972.000.000	21.422.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	141.785.444.325	152.718.116.000	43.578.000.000	43.000.000.000	43.000.000.000	43.000.000.000	43.000.000.000
	TOTAL APBD	**2.425.557.735.103**	**2.620.008.211.000**	**2.523.129.748.000**	**2.546.711.044.000**	**2.571.538.154.000**	**2.596.613.536.000**	**2.621.939.671.000**

Sumber: BKD Kabupaten Boyolali, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.2.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan Kabupaten Boyolali periode 2025–2030 pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang dapat digunakan dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan prioritas. Dari sisi pendapatan, proyeksi menunjukkan tren peningkatan yang stabil sepanjang lima tahun. Jumlah pendapatan daerah pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp2,458,13 triliun dan terus meningkat hingga Rp2,557,94 triliun pada tahun 2029. Peningkatan rata-rata sekitar Rp25–30 triliun per tahun ini terutama ditopang oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar-daerah yang menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan. Sementara itu, PAD meskipun kontribusinya masih relatif kecil, tetap memperlihatkan tren positif, yakni dari Rp615,55 miliar pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp680,35 miliar pada tahun 2030. Hal ini menandakan adanya peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD.

Di sisi pengeluaran, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi yang bersifat rutin dan mengikat. Belanja operasi diproyeksikan berada pada kisaran Rp1,78–1,84 triliun per tahun, dengan komponen terbesar diarahkan untuk belanja pegawai, belanja operasional dasar, serta kewajiban rutin lainnya. Selama lima tahun, rata-rata pertumbuhan belanja periodik hanya sebesar 0,23% per tahun, yaitu dari Rp1,65 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,67 triliun pada 2030. Pola belanja seperti ini menunjukkan rigiditas struktur anggaran yang membuat fleksibilitas fiskal semakin terbatas.

Lebih jauh lagi, hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas riil belanja perangkat daerah hanya meningkat sebesar ±Rp169,15 miliar dalam periode 2025–2030. Peningkatan yang relatif kecil ini tentu tidak sebanding dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat secara nominal, sebagian besar anggaran terserap untuk pengeluaran rutin yang tidak dapat dikurangi. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan prioritas, strategis, dan produktif menjadi sangat sempit.

Kondisi tersebut memberikan implikasi langsung terhadap arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas layanan dasar masyarakat harus benar-benar diseleksi secara ketat. Tanpa adanya pendekatan yang berbasis prioritas, keterbatasan ruang fiskal dapat menjadi penghambat utama akselerasi pembangunan, apalagi di tengah tuntutan perubahan global dan nasional yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus diarahkan pada program yang paling mendesak, strategis, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas dalam menyusun kebijakan belanja perangkat daerah. Pendekatan alokasi anggaran berbasis kinerja menjadi kunci agar keterbatasan fiskal dapat dikelola secara optimal. Selain itu, upaya inovasi pembiayaan alternatif seperti kerja sama daerah, penguatan peran BUMD, maupun partisipasi investasi swasta perlu diperluas untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh APBD. Dengan strategi ini, keterbatasan fiskal tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan tantangan yang dapat dikelola untuk memastikan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pembangunan Kabupaten Boyolali berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali memiliki urgensi tinggi karena menjadi fondasi krusial yang menentukan arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Identifikasi masalah dan isu yang akurat dan komprehensif memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi dan program yang tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis, RPJMD berpotensi menjadi dokumen yang tidak relevan dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Permasalahan dan isu strategis menjadi *early warning system* yang efektif sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi masalah dan isu yang muncul, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat waktu. dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, dalam memberikan masukan dan perspektif yang beragam. Dengan demikian, RPJMD yang dihasilkan akan lebih inklusif, partisipatif, dan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi RPJMD.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, dengan 7 (tujuh) permasalahan pokok yaitu:

1. belum optimalnya kapasitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai;
2. meningkatnya potensi dan ancaman kebudayaan asing melalui media sosial;
3. belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
4. belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja menuju transformasi tata kelola;
5. belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata;
6. belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan daerah; dan
7. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara permasalahan utama dan permasalahan pokok dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Gambar II. 49
Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Boyolali
(Sumber: Data Diolah, 2025)

1. belum optimalnya kapasitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai

   Kabupaten Boyolali masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di kedua sektor ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Beberapa sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pengajar, tenaga medis, serta fasilitas yang memadai, yang menghambat optimalisasi pelayanan. Selain itu, kapasitas infrastruktur yang terbatas seringkali menyebabkan keterbatasan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk memperkuat kapasitas pelayanan serta memastikan pemerataan akses yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, sehingga setiap warga dapat menikmati hak masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kualitas SDM dapat dilihat pada nilai IPM Kabupaten Boyolali tahun 2024 yang mencapai 75,96 menduduki peringkat 5 (lima) di wilayah Subosukawonosraten, yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

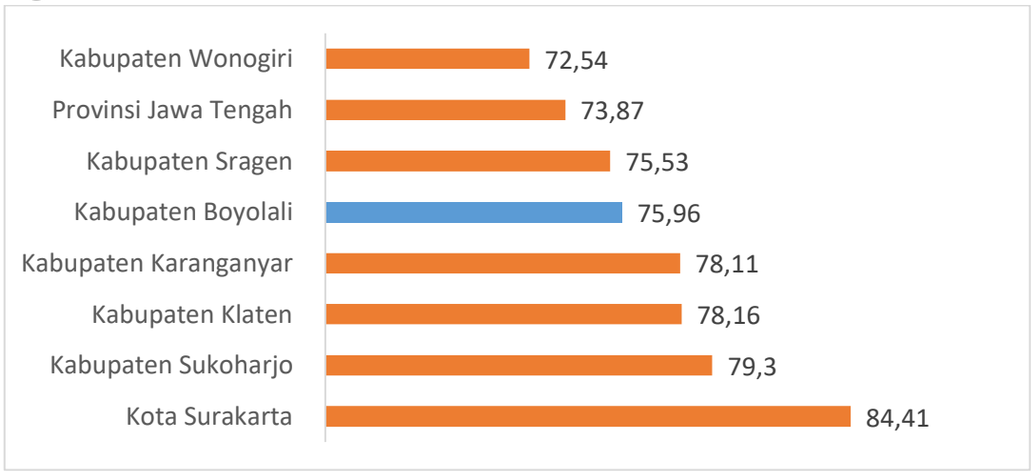

Gambar II. 50
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Berdasarkan gambar diatas, dalam perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan Subosukawonosraten, dengan nilai IPM sebesar 75,96 masih dibawah Kabupaten Karanganyar (78,11) dan Kabupaten Klaten (78,16). Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, Kabupaten Boyolali masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya. Pada sisi kesehatan, terlihat dari angka harapan hidup tahun 2024 Kabupaten Boyolali yang mencapai 76,44 tahun, menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya capaian indikator kesehatan pada persentase balita gizi kurang mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4%. Selain itu pada persentase balita stunting di tahun 2024 mencapai 11,9%, meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai sebesar 8,54%. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan/kendala dalam penjagaan dan penanganan kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya pada sisi pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah mencapai 8,17 tahun, setara dengan kelas VIII (SMP kelas 3 semester II), dan harapan lama sekolah mencapai 12,67 tahun. Kemudian dari skor kemampuan numerasi SMP yang di tahun 2024 mencapa 69,35 dan literasi 80,08. Kemudian pada tingkat SD, nilai numerasi mencapai 63,78 dan literasi SD mencapai 69,93. Dengan capaian ini terlihat masih perlu adanya peningkatan kualitas layanan Pendidikan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Dengan tingkat pendidikan pasti berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat yang mencerminkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp14.195.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per tahun. Dengan memahami kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponennya, jika dihubungkan dengan kualitas tenaga kerja, dapat dilihat dari angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan. Angkatan tenaga kerja Kabupaten Boyolali masih didominasi penduduk yang memiliki pendidikan SD ke bawah yang mencapai 126.000 (seratus dua puluh enam ribu) pekerja (36,21%).

Memahami penjabaran diatas, dapat disimpulkan kualitas pelayanan terkait pendidikan dan kesehatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Belum optimalnya capaian bidang pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dengan demikian diharapkan pembangunan SDM di Kabupaten Boyolali lebih merata kualitasnya, tidak hanya unggulan di beberapa wilayah saja, namun mampu merata di seluruh wilayah.

2. meningkatnya potensi dan ancaman kebudayaan asing melalui media sosial

Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, kini menghadapi tantangan besar dari perkembangan teknologi dan media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menawarkan potensi besar untuk mempromosikan kebudayaan lokal ke dunia luar. Tari-tarian tradisional, upacara adat, serta kuliner khas Boyolali dapat dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, dibalik potensi besar tersebut, ancaman dari pengaruh

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kebudayaan asing yang semakin kuat tidak bisa diabaikan. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2018 menuju tahun 2022, dari 60,05 menjadi 59,43. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam peningkatan pembangunan kebudayaan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, termasuk Boyolali.

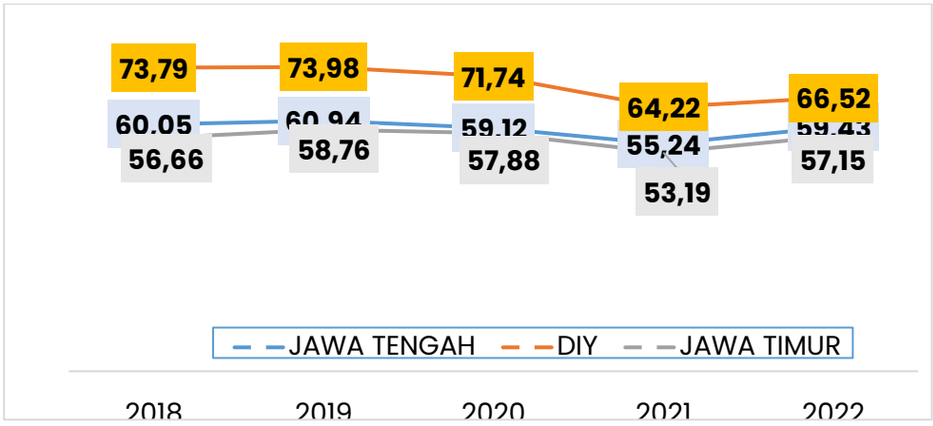

Gambar II. 51
Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Suku Jawa Tahun 2018-2022
(Sumber: Kemendikbud, 2024)

Di sisi lain, perkembangan media sosial membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok membuka peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya Kabupaten Boyolali ke khalayak luas, baik nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi dan budaya asing juga memberi pengaruh yang kuat terhadap gaya hidup generasi muda. Fenomena globalisasi budaya ini terlihat dari meningkatnya ketertarikan anak muda pada budaya populer global seperti musik, fashion, dan gaya hidup modern, yang tidak jarang berseberangan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Tantangan lain yang muncul adalah masih terbatasnya literasi budaya dan literasi digital di kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelestarian budaya, serta belum optimalnya kurikulum muatan lokal, membuat internalisasi nilai-nilai budaya tidak berlangsung secara merata. Sementara itu, minimnya edukasi literasi digital menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap konten asing yang mendominasi media sosial, dibandingkan dengan konten lokal yang berakar pada kearifan dan identitas daerah.

Selain itu, kelembagaan dan program pelestarian budaya di Kabupaten Boyolali masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Upaya pelestarian banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas lokal, namun dukungan kelembagaan formal dan ketersediaan infrastruktur budaya, seperti pusat kebudayaan, sanggar seni, maupun ruang kreatif, masih terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap daya dorong pembangunan kebudayaan agar lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan era globalisasi tanpa kehilangan jati diri lokal.

3. belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Di Kabupaten Boyolali, upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat masih

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun terdapat berbagai program dan inisiatif yang diluncurkan untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, tantangan besar masih tetap ada. Kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan, dengan banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketimpangan kesejahteraan juga terlihat jelas, dengan adanya perbedaan ketimpangan antara kelompok masyarakat yang lebih kaya dan masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit. Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali tahun 2024 mencapai 9,63%, tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat produktivitas masyarakat. Tingkat produktivitas masyarakat memiliki keterkaitan dengan kualitas angkatan kerja yang mana jika merujuk pada penjelasan sebelumnya angkatan kerja di Kabupaten Boyolali masih dominan SD ke bawah sehingga mayoritas masyarakat bekerja pada sektor yang rendah penghasilannya. Hal ini mengindikasikan kualitas tenaga kerja Kabupaten Boyolali masih rendah, perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dalam pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali sebesar 9,63% maka masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

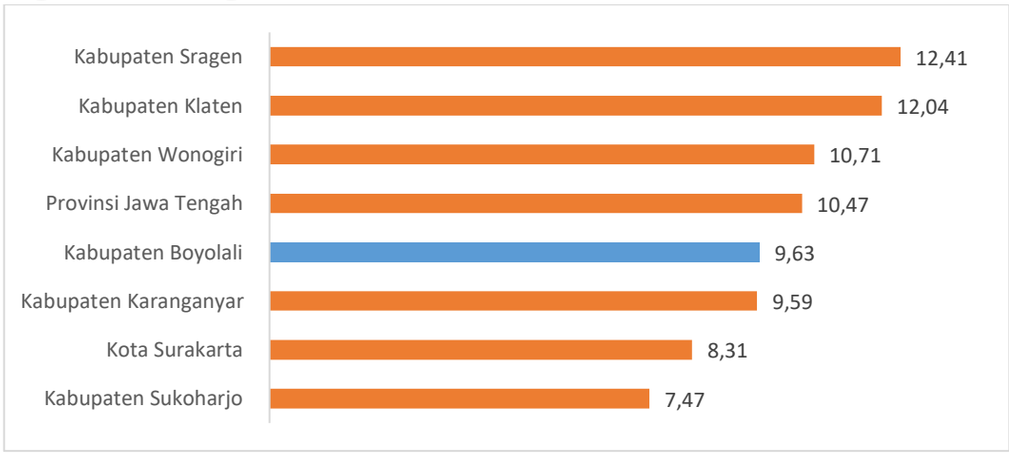

Gambar II. 52
Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Wilayah Subosukawonosraten
(Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2025)

Angka kemiskinan Kabupaten Boyolali terkait memiliki benang merah terhadap pemerataan pendapatan di suatu wilayah yang dapat dilihat pada rasio gini. Rasio gini merupakan nilai ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, semakin rendah nilai rasio gini maka semakin rendah tingkat ketimpangannya. Berdasarkan data rasio gini Kabupaten Boyolali mencapai 0,339 kategori "sedang/moderat". Dengan ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten maka rasio gini Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

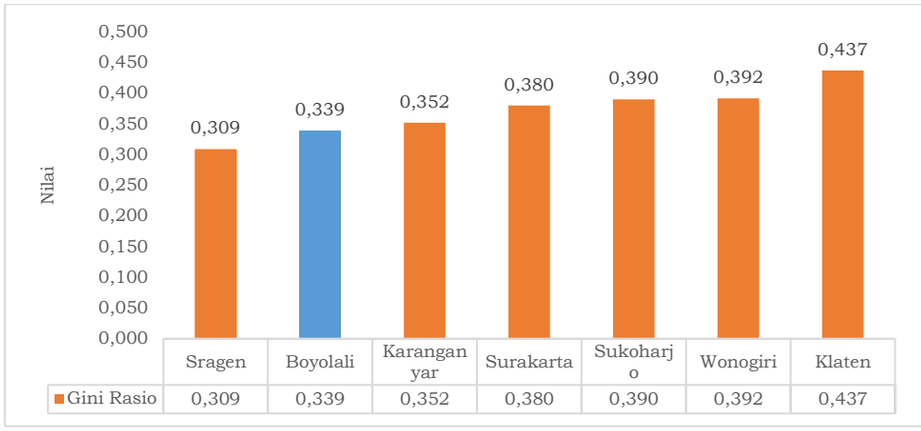

Gambar II. 53
Rasio Gini Kabupaten Boyolali
Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

4. belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja menuju transformasi tata kelola

Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Boyolali belum optimal dalam upaya menuju transformasi tata kelola yang lebih baik. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya transparansi dalam proses birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja yang efektif menghambat implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai transformasi tata kelola yang diharapkan, perlu adanya peningkatan dalam sistem pelayanan, pelatihan bagi aparat, serta penerapan teknologi yang mendukung akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu indikator penilaian reformasi dan akuntabilitas terkait tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP. Data terkait Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali tersaji secara mendetail pada gambar berikut:

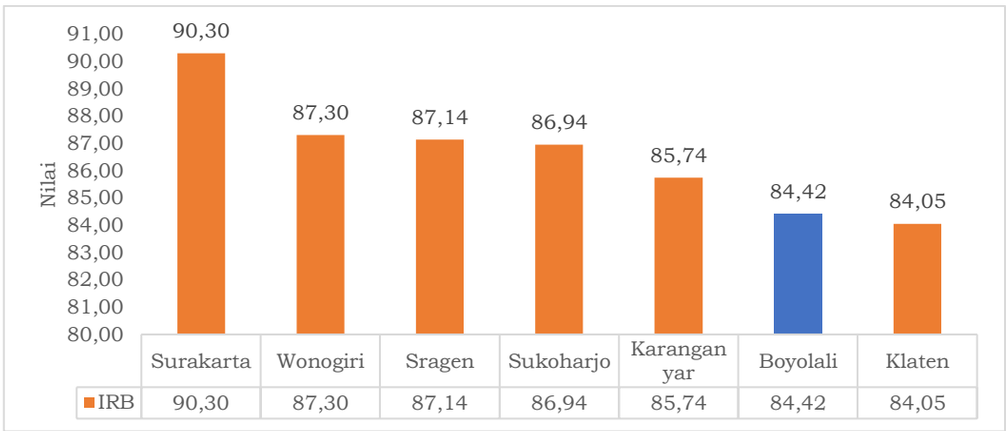

Gambar II. 54
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: Kemenpan-RB, 2025)

Berdasarkan gambar di atas, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 mencapai angka 84,42, yang menempatkannya di bawah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo dalam lingkup Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten. Mengenai akuntabilitas kinerja terlihat

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

adanya sedikit peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Boyolali, dari 68,28 pada tahun 2023 menjadi 68,96 di tahun 2024. Sementara itu, pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang mengacu pada PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020, Kabupaten Boyolali memperoleh nilai 3,89 dalam aspek layanan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan digital pemerintah masih belum optimal jika dibandingkan dengan rentang nilai SPBE 0–5. Salah satu aspek penting dalam pelayanan pemerintahan adalah pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun, pelayanan ini masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi internal, terdapat hambatan seperti sistem informasi yang belum terintegrasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan serta belum sinergisnya kebijakan antar lembaga, menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan menyeluruh.

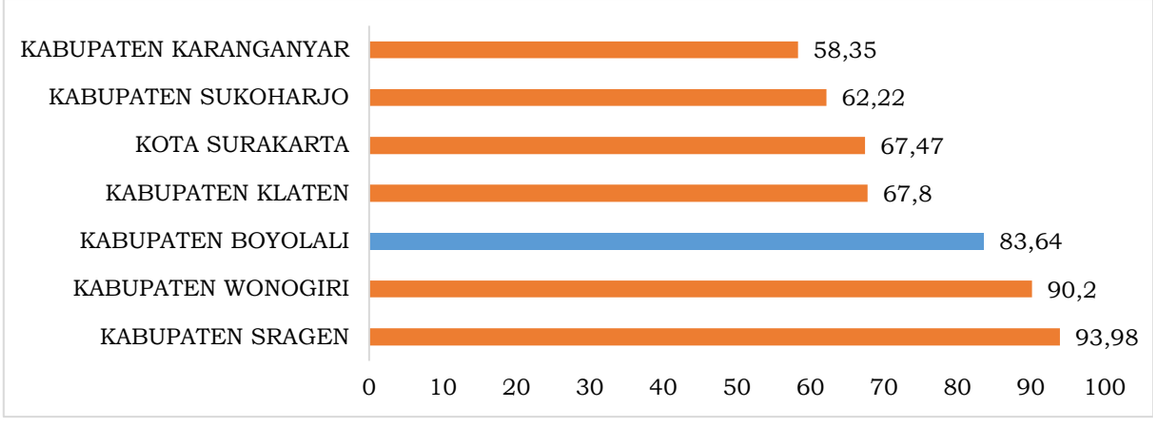

Gambar II. 55
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali dibandingkan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: BRIN, 2025)

Salah satu poin yang penting dalam pembangunan adalah menciptakan inovasi-inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, memperoleh nilai indeks inovasi sebesar 83,64 dengan kategori “Sangat Inovatif”. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitar di Kawasan Subosukawonosraten, maka Indeks inovasi Kabupaten Boyolali masih berada di bawah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pencapaian inovasi daerah di Kabupaten Boyolali.

5. belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata

   Di Kabupaten Boyolali, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pembangunan masih belum optimal dan merata. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, perbedaan signifikan dalam akses dan kualitas infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan besar. Beberapa daerah, terutama yang terletak di wilayah terpencil, masih menghadapi masalah seperti jalan yang rusak, akses terbatas ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dasar yang kurang memadai. Ketimpangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi potensi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

investasi, dan memperlambat proses pembangunan. Untuk mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, termasuk perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih efektif, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh. Kondisi jalan di Kabupaten Boyolali menunjukkan kualitas pembangunan infrastruktur. Jalan dengan kondisi mantap mencapai angka tertinggi sebesar 559,4 km, mencerminkan bagian infrastruktur yang telah diperbaiki dengan baik dan dalam kondisi yang dapat mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi secara optimal. Namun, terdapat juga kondisi jalan yang tidak mantap, dengan panjang mencapai 114,61 km, menunjukkan adanya area yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan lebih lanjut. Jalan-jalan dengan kondisi tidak mantap sering kali mengalami kerusakan, seperti permukaan yang berlubang atau retak, yang dapat menghambat akses dan berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan. Perbedaan ini menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan agar seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dapat menikmati manfaat dari jaringan transportasi yang efisien dan aman. Persentase akses sanitasi aman masih mencapai 29,21%. Hal ini mengindikasi adanya permasalahan terkait pembangunan infrastruktur yang masih belum optimal dan merata.

6. belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan daerah

   Peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan daerah masih belum optimal. Meskipun Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil, pemanfaatan sumber daya ini belum sepenuhnya maksimal. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Permasalahan mendasar meliputi keterbatasan adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi, rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama dalam keterampilan teknis dan manajemen, belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas dan rantai pasok, serta kurangnya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga penelitian. Akibatnya, potensi nilai tambah dari produk unggulan seperti pertanian, peternakan, dan industri pengolahan belum termaksimalkan, dan daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas menjadi terbatas, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

   Hal ini dapat dilihat pada data terkait perekonomian Kabupaten Boyolali masih cenderung fluktuatif, adanya perlambatan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 menjadi 4,64% yang sebelumya di tahun 2023 mencapai 5,63%. Perlambatan ini dikarenakan adanya penurunan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang di tahun 2023 mencapai 5,60 dan di tahun 2024 menjadi 1,78. Selain itu kontribusi sektor industri terhadap PDRB di tahun 2024 juga mengalami penurunan, yang mana tahun 2023 mencapai 7,09 dan 2024 menjadi 6,50. Hal ini dikuatkan adanya penurunan pertumbuhan industri di tahun 2024 yaitu 0,39 yang sebelumnya di tahun 2023 menjadi 2,08.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Menyikapi belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan di Kabupaten Boyolali terutama pada tahun 2024, kedepannya perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku usaha, fasilitasi akses terhadap teknologi dan inovasi yang relevan, perbaikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan logistik, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk menarik investasi dan mendorong pengembangan hilirisasi produk unggulan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan daerah secara berkelanjutan.

Kondisi perekonomian yang kurang baik ini, diperkuat dengan kondisi tingkat pengangguran yang mana di tahun 2024 yang mengalami penurunan mencapai 3,16. Namun jika melihat kualitas daya saing tenaga kerja dari Pendidikan yang ditamatkan maka pekerja pendidikan tamatan SD masih tinggi dari pada tamatan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan kabupaten di wilayah Subosukawonosraten, maka tingkat pengangguran Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

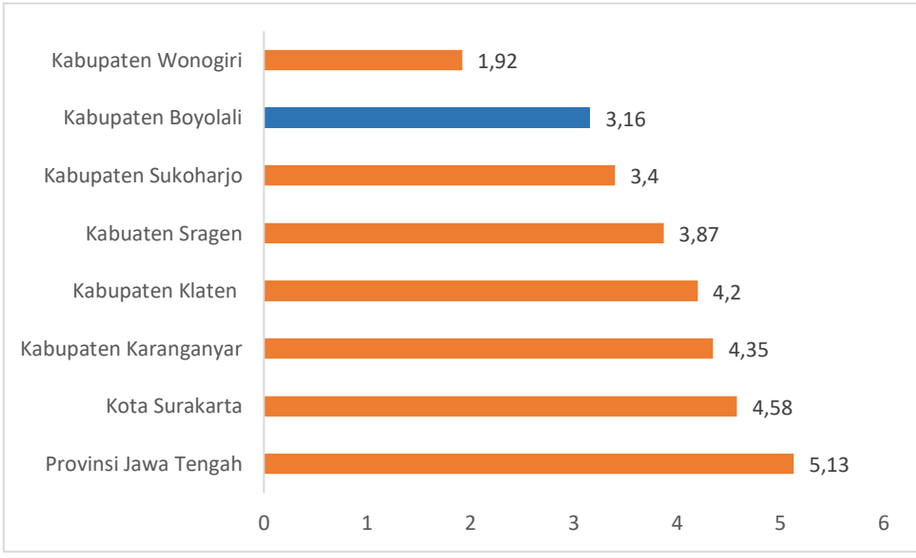

Gambar II. 56
Tingkat Pengangguran Terbuka
Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

Selanjutnya, memahami bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari PDRB, untuk mengetahui besarnya kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali di tahun 2024. Semakin tinggi nilai kontribusi PDRB mengindikasikan adanya peningkatan sektor-sektor PDRB yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian daerah. Dengan nilai PDRB Kabupaten Boyolali saat ini, maka memberikan kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,53 yang jika dibandingkan dengan wilayah Subosukawonosraten Kabupaten Boyolali masih di posisi terendah nomor 2 (dua), masih di bawah Kabupaten Sukoharjo, seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

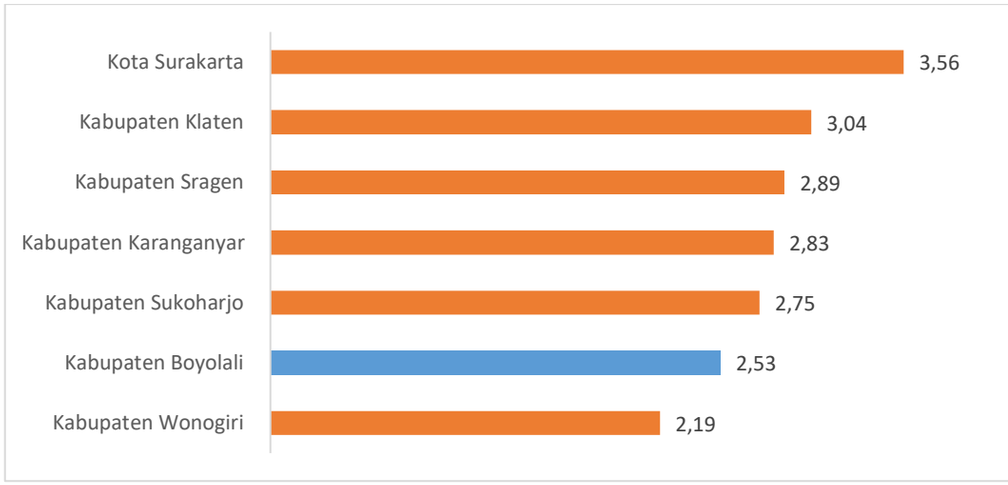

Gambar II. 57
Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025)

Memahami bahwa perekonomian sangat dipengaruhi oleh kondisi investasi, adanya investasi akan membuka berbagai peluang usaha dan mempercepat pergerakan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data terkait investasi, realisasi investasi PMA dalam perkembangan 5 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan di tahun 2020 dan tahun 2023. Jumlah proyek PMA mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan adanya penurunan jumlah proyek di tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk mendukung sektor unggulan, perlu investasi atau perbaikan nilai tambah sektor unggulan guna memperkuat investasi. Ke depan, pemerintah daerah Boyolali diharapkan meningkatkan promosi potensi daerah, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung sektor-sektor unggulan sehingga diharapkan dapat semakin memperkuat arus investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

7. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup

   Di Kabupaten Boyolali, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup masih menghadapi tantangan besar. Meskipun terdapat berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berfokus pada prinsip keberlanjutan. Praktik-praktik eksploitasi yang kurang ramah lingkungan, seperti penebangan hutan yang tidak terencana dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian, berpotensi merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup belum optimal, dengan beberapa daerah mengalami pencemaran dan kerusakan habitat. Ketiadaan kebijakan dan implementasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan menghambat upaya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berikut merupakan gambar diagram mengenai nilai dan target capaian IKLH Kabupaten Boyolali:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

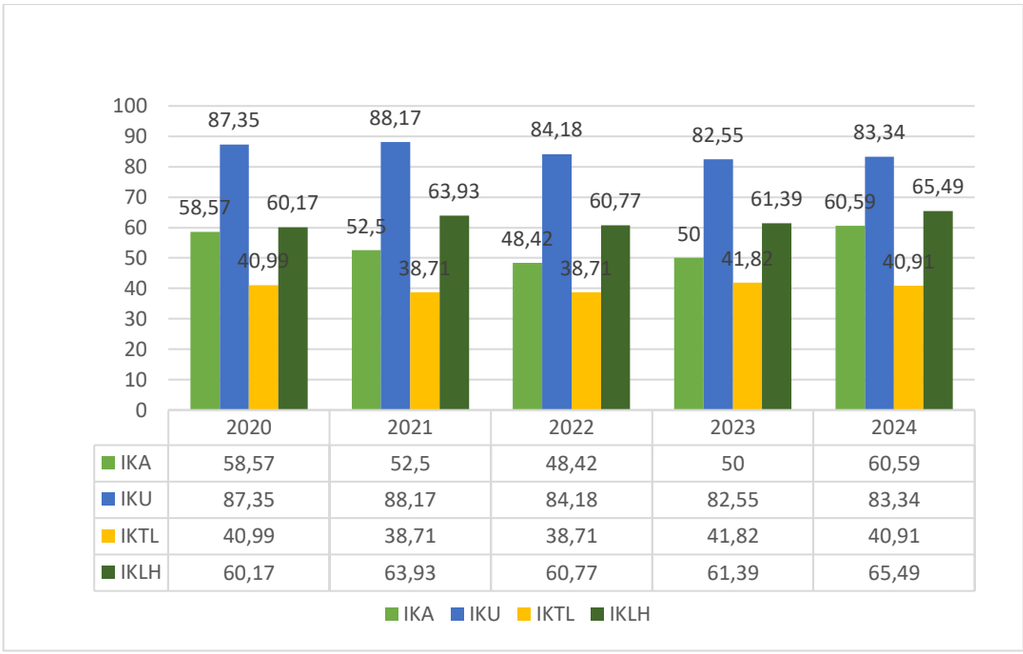

Gambar II. 58
Capaian IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2025)

Hasil IKLH Kabupaten Boyolali, nilai dan target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan variasi dalam kualitas lingkungan yang perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Udara (IKU) mencatat nilai tertinggi, menandakan bahwa kualitas udara di wilayah ini relatif baik dan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Ini menunjukkan upaya yang cukup efektif dalam mengelola polusi udara dan menjaga kualitas udara tetap pada tingkat yang sehat. Sebaliknya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mencatat nilai terendah, mengindikasikan adanya masalah dalam pelestarian dan pengelolaan vegetasi. Nilai IKTL yang rendah menunjukkan bahwa tutupan vegetasi di Kabupaten Boyolali masih perlu perhatian lebih, terutama dalam hal reforestasi dan perlindungan hutan. Untuk mencapai target capaian IKLH yang lebih baik, penting untuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan yang menyeluruh, termasuk upaya konservasi dan penanaman vegetasi, serta melanjutkan kebijakan yang mendukung kualitas udara yang baik.

Permasalahan lingkungan juga terlihat pada aktivitas pertanian, menyangkut ketersediaan dan perlindungan lahan yang berpotensi mengalami alih fungsi seiring perkembangan permukiman dan industri, serta risiko gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), bencana, dan perubahan iklim yang memengaruhi indeks tanam dan produktivitas. Ketersediaan air irigasi juga masih belum merata karena status daya dukung air di beberapa kecamatan seperti Juwangi, Kemusu, dan Wonosegoro sudah terlampaui, sementara koefisien limpasan cukup tinggi sehingga mengurangi efektivitas resapan. Meskipun produksi beras surplus dengan daya dukung lahan >1, distribusi pangan dan stabilitas harga antarwilayah belum sepenuhnya merata, sementara hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan masih terbatas. Selain itu, tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan pertanian, industri, dan permukiman menimbulkan tekanan terhadap lahan pangan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan juga memengaruhi sektor pertanian, seperti meningkatnya timbulan sampah yang berisiko mencemari lahan dan air, serta tren penurunan kualitas udara akibat aktivitas

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

transportasi, industri, dan pertanian intensif. Di sisi lain, aksi pembangunan rendah karbon telah menunjukkan capaian positif dalam menekan emisi, namun konsistensi penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya air masih perlu diperkuat agar ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian Kabupaten Boyolali tetap terjaga secara berkelanjutan.

Dengan penjabaran permasalahan pokok di atas, maka dijabarkan dalam beberapa permasalahan perurusan yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 69
Permasalahan Perurusan Kabupaten Boyolali

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah
	Belum optimalnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi
Kesehatan	Adanya kompleksitas penanganan kesehatan dari beberapa aspek penunjangnya
	Belum optimalnya kualitas dan akses layanan kesehatan
	Masih ditemukannya kasus *stunting* dan kekurangan gizi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar
	Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku
	Belum optimalnya akses sanitasi layak
	Masih adanya pelanggaran tata ruang wilayah
	Belum tersedianya kawasan untuk penunjang investasi terkait dengan kesiapan Kawasan Peruntukan Industri dan Pola Ruangnya
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya akses permukiman layak huni
	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penegakan produk hukum, khususnya peraturan daerah
	Terbatasnya kapasitas daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana dan penanganan bencana
Sosial	Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
	Belum optimalnya koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam validitas database rumah tangga sasaran
	Sebaran PMKS yang cukup luas, sehingga cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS belum optimal
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja
	Masih adanya perselisihan industrial antara perusahaan dan karyawan (upah, pesangon, cuti, dll)
	Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Urusan	Permasalahan
Pangan	Belum optimalnya aspek-aspek ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan
Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan administrasi pertanahan
Lingkungan Hidup	Belum optimalnya penanganan potensi degradasi kualitas lingkungan hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelaksanaan pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya kemandirian dan pemberdayaan desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya edukasi, akses dan pelayanan terkait program Keluarga Berencana
	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
Perhubungan	Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi
Koperasi, Usaha Mikro	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas koperasi
	Belum optimalnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah
Penanaman Modal	Belum optimalnya daya saing investasi dan pelayanan terpadu satu pintu
Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
	Belum optimalnya prestasi keolahragaan, khususnya pada tingkat provinsi atau nasional
Statistik	Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang valid, *up to date*, dan terintegrasi
Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan data dan informasi pemerintahan
Kebudayaan	Belum optimalnya peningkatan budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan
	Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan jawa sebagai dampak media sosial
Perpustakaan	Perlunya peningkatan layanan perpustakaan daerah yang inklusif
	Belum optimalnya minat baca masyarakat
Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Perikanan	Belum optimalnya produktivitas sektor perikanan
Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah, khususnya potensi SDA
	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelaku usaha industri kecil dan mikro untuk naik kelas
Pariwisata	Belum optimalnya pemeliharaan daya tarik wisata dengan optimal dalam mendongkrak kunjungan wisatawan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Urusan	Permasalahan
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
Pertanian	Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian
	Belum optimalnya produktivitas sektor peternakan
Perdagangan	Belum optimalnya pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok
	Belum optimalnya ekspor bersih perdagangan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
Perencanaan	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Keuangan	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
	Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Kepegawaian	Belum optimalnya kualitas kepegawaian
	Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi ASN
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya fungsi penelitian dan inovasi sebagai basis perumusan kebijakan
Pengawasan	Masih perlunya penguatan sistem dan aparatur pengendalian intern pemerintah
	Masih perlunya penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat
	Masih perlunya peningkatan kesadaran kehidupan berpolitik di masyarakat
Kesekretariatan DPRD	Belum optimalnya fasilitasi anggota dewan
Kesekretariatan Daerah	Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah
	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah
Kewilayahan	Belum optimalnya upaya peningkatan kepuasan masyarakat kecamatan

Sumber: Data Diolah, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi dan perihal yang menjadi urgensi dalam pembangunan, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai *warning action* dalam pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien. Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan memperhatikan isu-isu strategis, diharapkan dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2.3.2.1 Isu Strategis Internasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat berbagai isu strategis internasional (isu global) yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kabupaten Boyolali. Berikut penjabaran isu global:

Gambar II. 59
Isu Global
(Sumber: RPJMN 2025-2029)

1. **geopolitik dan geoekonomi**
   Kabupaten Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Ketergantungan terhadap impor bahan pakan ternak serta volatilitas harga komoditas pertanian akibat kebijakan dagang internasional menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Dengan memperkuat rantai pasok lokal, mendorong ekspor produk olahan susu, serta meningkatkan daya saing industri peternakan dan pertanian, Kabupaten Boyolali dapat berperan lebih besar dalam stabilitas ekonomi nasional di tengah perubahan ekonomi global.
2. **dampak perubahan iklim global**
   Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Kabupaten Boyolali rentan terhadap dampak perubahan iklim global seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan ancaman bencana alam. Untuk menghadapinya, diperlukan inovasi dalam sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan, seperti penerapan teknologi irigasi hemat air, pengembangan pakan ternak berbasis bahan lokal, serta diversifikasi usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Adaptasi dan mitigasi yang efektif akan memastikan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan sektor unggulan Kabupaten Boyolali.
3. **perkembangan teknologi industri 5.0**
   Era Industri 5.0 yang mengedepankan integrasi kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan otomatisasi dalam industri menuntut Kabupaten Boyolali untuk beradaptasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Pemanfaatan teknologi seperti sensor cerdas dalam pengelolaan peternakan sapi perah, digitalisasi rantai

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pasok, serta peningkatan industri pengolahan berbasis teknologi tinggi dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Dengan demikian, Kabupaten Boyolali dapat menjadi pusat inovasi agroindustri yang mampu bersaing di era digital.

4. **pergeseran budaya dampak dari teknologi informasi**
   Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi, komunikasi, dan gaya hidup masyarakat Boyolali, termasuk dalam cara mereka mengakses informasi dan memasarkan produk lokal. Digitalisasi membawa peluang besar bagi sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian budaya lokal. Arus informasi global yang cepat dapat menyebabkan lunturnya tradisi, menurunnya minat generasi muda terhadap kearifan lokal, serta pergeseran nilai sosial akibat masuknya budaya asing. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengancam identitas budaya Kabupaten Boyolali yang kaya akan kesenian, kuliner khas, dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu upaya strategis seperti digitalisasi warisan budaya, integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan, serta promosi aktif seni dan tradisi melalui media digital agar budaya Kabupaten Boyolali tetap lestari dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Boyolali. Berikut penjabaran isu strategis nasional:

Gambar II. 60
Isu Strategis Nasional
(Sumber: RPJMN 2025-2029)

1. **resiliensi dan prospek perekonomian yang positif**
   RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional melalui penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penguatan daya tahan ekonomi di tingkat

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar dalam mendukung resiliensi ekonomi nasional melalui penguatan sektor peternakan, khususnya produksi susu, yang telah menjadi komoditas unggulan. Dengan memperkuat hilirisasi produk susu dan pengolahan hasil pertanian, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar ekspor. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata alam dan industri pengolahan berbasis pertanian juga dapat meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam meningkatkan infrastruktur produksi dan distribusi akan mempercepat penguatan ekonomi Kabupaten Boyolali di tengah dinamika ekonomi global.

2. potensi sumber daya manusia dan modal manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendorong daya saing nasional. Peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas dalam memperkuat kapasitas manusia di era ekonomi digital dan industri 5.0. Pemerintah pusat juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan literasi teknologi untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi dan industri. Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar dalam pengembangan SDM melalui penguatan sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat di sektor unggulan. Pengembangan pendidikan vokasi berbasis pertanian dan peternakan, serta pelatihan teknologi pengolahan hasil pertanian, akan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan lokal akan memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan di sektor pertanian dan pariwisata juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

3. pergeseran struktur kelas masyarakat

RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia menciptakan peluang dalam pengembangan pasar domestik, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Penguatan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan inklusi keuangan menjadi strategi utama dalam mengatasi ketidaksetaraan ini. Sebagai daerah dengan sektor peternakan dan pertanian yang kuat, Kabupaten Boyolali dapat berperan dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha, penguatan koperasi, serta pelatihan kewirausahaan berbasis sektor unggulan akan memperkuat kelas ekonomi menengah di Kabupaten Boyolali. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemerataan akses terhadap

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Boyolali.

4. tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. Kabupaten Boyolali memiliki peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Penerapan sistem e-government untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik, akan mempercepat proses pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan.

5. rendahnya produktivitas

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi di Indonesia. Keterbatasan teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi produktivitas. Pemerintah pusat mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D), penerapan teknologi industri 5.0, serta pengembangan ekosistem inovasi di tingkat daerah. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan produktivitas dengan penerapan teknologi pertanian presisi, pengembangan sistem irigasi cerdas, serta penguatan rantai pasok berbasis teknologi. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan dengan teknologi modern juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah ekonomi. Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan kerja di sektor unggulan akan menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Boyolali di tingkat nasional dan internasional.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan asta cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, Kabupaten Boyolali dapat

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 (delapan) asta cita sebagai berikut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN menyebutkan terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas sebagai berikut:

1. mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. pemberantasan kemiskinan;
6. pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

16. memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun terdapat 8 (delapan) *quick wins* sebagai berikut:

1. memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara;
7. melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
8. mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Di dalam RPJMN, terdapat 2 (dua) arah pembangunan kewilayahan yang ditujukan untuk Kabupaten Boyolali. Arahan tersebut sebagai berikut:

1. kawasan pertumbuhan (Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo): Pengembangan koridor industri dengan fokus pada sektor industri prioritas, yaitu industri mesin dan peralatan, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki.
2. kawasan konservasi TN Merbabu-Merapi:
   a) perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem serta area bernilai keanekaragaman hayati tinggi;
   b) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi;
   c) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik;
   d) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui pendekatan agroforestri;
   e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan;
   f) perlindungan dan pengamanan hutan;
   g) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana;
   h) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; dan
   i) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana.

Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, 17 (tujuh belas) program prioritas, dan *quick wins* RPJMN 2025-2029 melalui kontribusi pada sektor unggulannya. Dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, Boyolali berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor pertanian dan peternakan. Terkait misi peningkatan SDM, Boyolali memperkuat pendidikan berbasis komoditas

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

unggulan untuk menjembatani kebutuhan industri. Pada program prioritas hilirisasi industri, kawasan Solo-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo menjadi koridor strategis pengembangan industri pengolahan. Selain itu, *quick wins* seperti penurunan angka *stunting* dan pengentasan kemiskinan dijalankan melalui program kesehatan dan ketahanan pangan lokal. Dengan peran tersebut, Boyolali tidak hanya menjadi pilar pembangunan regional, tetapi juga kontributor nyata terhadap target pembangunan nasional.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

2.3.2.3.1 Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD dengan melihat isu strategis sampai visi misi dan arah kebijakan kewilayahannya. Dalam kerangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis utama yang menjadi pijakan dalam perencanaan jangka menengah daerah. Ketujuh isu tersebut meliputi: (1) perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, (2) ketahanan pangan yang berkelanjutan, (3) penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, (4) keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, (5) kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, (6) kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat, serta (7) tata kelola pemerintahan yang dinamis. Dalam mendukung isu strategis tersebut, berikut Visi Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

"Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045"

Misi dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2. meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. mewujudkan pembangunan infrastruktur jawa tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan
6. menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Gambar II. 61
Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Jawa Tengah Tahun 2025-2030
(Sumber: Data Diolah, 2025)

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, mengusung visi "Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045" sebagai arah pembangunan provinsi Jawa Tengah ke depan. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi utama yang menjadi fokus utama kebijakan pembangunan, yaitu: (1) Stabilitas harga, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi agar kebutuhan pokok tetap terjangkau; (2) Peningkatan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan, yang diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi dan penciptaan peluang usaha; serta (3) Penciptaan lapangan kerja, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Kabupaten Boyolali memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi "Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas" melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan industri pengolahan yang menjadi keunggulan daerah. Dalam mendukung stabilitas harga, Kabupaten Boyolali berkontribusi sebagai salah satu lumbung pangan utama Jawa Tengah, khususnya dalam produksi susu, daging sapi, dan hasil pertanian lainnya, yang membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan, Kabupaten Boyolali dapat mengoptimalkan potensi sektor agrowisata, pengembangan UMKM, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, sejalan dengan misi penciptaan lapangan kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Boyolali memainkan peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang bertujuan menuju “Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045”. Sebagai salah satu wilayah dengan kekuatan di sektor pertanian, peternakan, pariwisata dan industri pengolahan, Kabupaten Boyolali berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas harga melalui pasokan bahan pangan strategis seperti susu, daging sapi, dan hasil pertanian lainnya. Selain itu, Kabupaten Boyolali berpotensi besar dalam mendukung misi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

peningkatan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan melalui pengembangan agrowisata, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Pengembangan kawasan industri dan sektor pariwisata di Kabupaten Boyolali juga sejalan dengan misi penciptaan lapangan kerja, karena mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah.

Adapun dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, telah dipetakan Kebijakan Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten, yang di dalamnya termasuk Kabupaten Boyolali. WP Subosukawonosraten didukung melalui Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II. 70
Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	Kebijakan
Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (tekstil dan alas kaki)	1. **Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian**, berupa: a. Pemantapan jaringan jalan nasional pada ruas Boyolali–Surakarta–Palur–Sragen sampai dengan batas Jawa Timur; b. Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi, di antaranya: - Ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); - Akses langsung ke jalan nasional (JJLS); dan - Penghubung antar jalan nasional (Boyolali–Klaten).
	2. **Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri**, berupa: a. Peningkatan kualitas dan kapasitas industri melalui: - Mendorong inovasi pengembangan produk baru; - Diferensiasi dan modifikasi produk agar lebih bervariasi dan memenuhi kebutuhan pasar (pengembangan ekspor produk unggulan utamanya tekstil dan alas kaki); - Pendampingan/fasilitasi pengembangan sistem manajemen kualitas (fasilitasi sertifikasi SNI dan merek); - Pengembangan SDM melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan yang relevan, serta magang di balai pelatihan; - Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja dengan membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri; - Mendorong pengembangan PLUT sebagai "Rumah Siap Kerja" untuk melatih SDM yang mendukung sektor industri; - Pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis potensi lokal; dan - Magang peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM sektor susu. b. Peningkatan investasi dan akses pasar, melalui: - Mendorong realisasi investasi dengan penyederhanaan proses perizinan usaha dan pemberian insentif investasi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	Kebijakan
	- Mendorong UMKM untuk mempromosikan produk dan meningkatkan akses ke pasar nasional dan internasional; - Mendorong kemitraan antara industri besar dan kecil, serta antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha; dan - Penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri dan perlindungan kekayaan intelektual.
Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu).	1. **Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:** a. Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; - Peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen; - Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu); - Penyediaan benih/bibit berkualitas; - Penjaminan kualitas pakan ternak; - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); - Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; - Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen); dan - Pengembangan broodstock center ikan nila di Klaten. b. Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (*urban farming*). c. Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, di antaranya: - Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Padas Klorot (Karanganyar), DI Klego (Boyolali), DI Bapang dan Catgawen (Sragen), DI Kwangsan (Karanganyar), serta DI Pundung dan Sidopangus (Klaten). d. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian, berupa: - Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian melalui rehabilitasi embung: Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur, dan Salam (di Kabupaten Wonogiri), serta Embung Guworejo (Sragen).
	2. **Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:** a. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, - Fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; - Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV); - Pemasaran dan branding produk; - Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; - Diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	Kebijakan
	- Fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan. b. Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, dan swasta. c. Pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis potensi lokal. d. Penguatan kelembagaan koperasi bagi kelompok masyarakat produktif, e. Magang peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM sektor susu. f. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran. g. Pemberdayaan aspek pemasaran koperasi dan aspek produksi koperasi

Sumber : Data diolah, 2025

Kabupaten Boyolali memiliki posisi strategis dalam Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Boyolali berperan sebagai simpul konektivitas dan pusat pertumbuhan industri, khususnya dalam pengembangan sektor tekstil dan alas kaki bersama Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Selain itu, Boyolali juga merupakan lumbung pangan dan sentra produksi susu serta perikanan air tawar, yang mendukung ketahanan pangan regional. Dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan nasional dan irigasi (DI Klego) semakin memperkuat peran Boyolali dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Subosukawonosraten.

2.3.2.3.2 Telaah RPJPD

Memahami bahwa pelaksanaan pembangunan jangka panjang dilakukan melalui pembangunan jangka menengah, maka perlu dalam penyusunan RPJMD memperhatikan poin-poin urgensi dan kebijakan yang tertuang pada dokumen RPJPD. Berikut beberapa hal dalam RPJPD yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

a) permasalahan pembangunan daerah
   1. belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
   2. belum optimalnya peningkatan SDM yang berkualitas menuju SDM unggul;
   3. tingginya potensi masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kearifan lokal;
   4. belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya dalam mengembangkan sektor unggulan daerah;
   5. masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
   6. belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas; dan
   7. belum optimalnya perwujudan ketahanan kualitas lingkungan hidup.

b) isu strategis daerah
   1. tata kelola pemerintahan yang dinamis;
   2. SDM yang berdaya saing dan berkarakter;
   3. *aging population* sebagai dampak bonus demografi;
   4. transformasi perekonomian daerah sebagai dampak restrukturisasi ekonomi;
   5. percepatan pengentasan kemiskinan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

6. pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
7. upaya adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan potensi kebencanaan;
9. peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat sejak dini; dan
10. ketimpangan pembangunan dan pendapatan.

c) visi RPJPD Kabupaten Boyolali

Berdasarkan dokumen rancangan akhir RPJPD Kabupaten Boyolali, maka untuk keberlanjutan daerah 2045 maka menghasilkan simpulan dari harapan masyarakat, serta memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Jawa Tengah serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka kerangka logis perumusan visi daerah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar II. 62
Kerangka Visi RPJPD 2025-2045
(Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025)

Dari gambar di atas didapatkan visi pembangunan jangka panjang Daerah 2025-2045 adalah:
"Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

Dengan penjabaran keunggulan dan potensi dikembangkan dalam perencanaan jangka panjang antara lain:

1. pertanian dan agribisnis: Kabupaten Boyolali terkenal sebagai daerah agraris yang subur. Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dengan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan unggulan di Kabupaten Boyolali adalah padi dan jagung. Tanaman hortikultura terdiri dari sayur, buah, biofarmaka, dan tanaman hias. Sedangkan tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Boyolali diantaranya tembakau dan kopi. Jika pertanian dilihat dalam arti luas, termasuk di dalamnya peternakan memiliki potensi sangat besar utamanya sapi yang selama ini menjadi ikon Kabupaten Boyolali, ruminansia lain dan unggas, serta sektor perikanan (lele, patin, nila dan produk olahannya). Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan Kabupaten Boyolali dan negara. Selain berperan dalam penyediaan bahan pangan, peran

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

strategis sektor pertanian dalam pembangunan ke depan adalah menopang perekonomian Kabupaten Boyolali, dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Boyolali cukup tinggi, serta berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk Kabupaten Boyolali.

2. pusat industri: Kabupaten Boyolali juga memiliki sektor industri yang berkembang, terutama dalam industri kreatif dalam pembuatan kerajinan tangan, seperti kerajinan tembaga, kuningan, batik, tenun, dan anyaman. Industri ini memberikan lapangan kerja bagi banyak penduduk setempat dan mempromosikan keahlian tradisional.
3. pariwisata: Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk gunung, mata air, dan air terjun, Kabupaten Boyolali menarik banyak wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya. Objek wisata alam seperti, objek wisata Waduk Cengklik, Waduk Kedung Ombo, Waduk Bade, Air Terjun Semuncar, Pemandian Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Taman Nasional Gunung Merapi, dan Taman Nasional Gunung Merbabu, serta objek wisata buatan seperti Wisata Edukasi Religi (WER) Qolbu Boyolali dan Kebun Raya Indrokilo serta wisata kuliner seperti susu segar, soto, dan sambel tumpang yang menambah daya tariknya.
4. infrastruktur: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus meningkatkan infrastruktur daerah, termasuk jaringan jalan dan transportasi, irigasi pertanian, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. keragaman budaya: Kabupaten Boyolali kaya akan warisan budaya dan tradisi, termasuk seni pertunjukan, musik, tarian, dan festival. Hal ini mencerminkan keragaman etnis dan budaya di wilayah tersebut, serta menciptakan identitas yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

Potensi di berbagai sektor yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Boyolali memerlukan investasi, karena investasi merupakan katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan meningkatkan pendapatan. Dengan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali serta didukung oleh komitmen pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan berbagai kemudahan perizinan dan insentif bagi investor, termasuk penyederhanaan proses birokrasi dan pemberian insentif pajak.

Tema khusus Kabupaten Boyolali dalam perencanaan jangka panjang adalah sebagai Kabupaten Ramah Investasi. Ramah investasi merupakan kondisi terjadinya kemudahan dan keamanan investasi di Kabupaten Boyolali dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas melalui pencapaian Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ramah investasi tidak hanya berfokus pada aspek perekonomian, tetapi juga dalam memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya, tata kelola pemerintahan, hingga kelestarian lingkungan. Ruang lingkup investasi ini melibatkan peran investor baik dalam maupun luar daerah, nasional maupun internasional, serta potensi unggulan Kabupaten Boyolali melalui UMKM.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Manfaat Ramah Investasi membawa dampak positif bagi masyarakat luas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja baru, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta dukungan dan pembinaan terhadap UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Misi RPJPD Kabupaten Boyolali

Sesuai rumusan misi RPJPD Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas;
2. mewujudkan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah;
3. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas;
4. mewujudkan transformasi sosial yang unggul dan berdaya saing;
5. mewujudkan ketahanan sosial budaya;
6. mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan
7. mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

e) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memahami bahwa RPJMD merupakan bagian dalam pelaksanaan RPJPD pada tahap I. Sesuai yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Boyolali, pada tahap I pembangunan Kabupaten Boyolali memiliki tema pembangunan, “Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Boyolali 2025-2029”. Pada tahap ini, Kabupaten Boyolali fokus untuk memperkuat fondasi atau dasar pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya ini melibatkan perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Penguatan fondasi bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat dan berkelanjutan bagi perkembangan wilayah, mencakup aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan;
2. penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah;
3. peningkatan digitalisasi pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional;
4. peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas;
5. pemenuhan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga Sejahtera;
6. pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak; dan
7. pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

2.3.2.3.3 Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali periode 2025-2029 berperan penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu lingkungan. KLHS ini mengidentifikasi beberapa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

isu krusial yang perlu diatasi guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2025-2029 dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Proses ini mencakup identifikasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup, serta pengintegrasian konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS juga memfasilitasi rangkaian forum dialog bersama kelompok masyarakat untuk menggali isu strategis pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan hasil analisis tersebut, KLHS memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali dapat terakomodir secara efektif dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali untuk RPJMD 2025-2029 meliputi:

a. penurunan ketersediaan dan kualitas air;
b. belum optimalnya adaptasi perubahan iklim;
c. alih fungsi lahan;
d. kurang optimalnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik;
e. kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana;
f. kurang optimalnya ketahanan pangan daerah; dan
g. kurang optimalnya pengelolaan persampahan.

Tabel II. 71
Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

ISU STRATEGIS KLHS	ISU STRATEGIS RPJMD 2025-2029
Penurunan ketersediaan dan kualitas air	• Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup; dan • Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan wilayah.
Belum optimalnya adaptasi perubahan iklim	• Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup; dan • Peningkatan kualitas SDM menghadapi tantangan global.
Alih fungsi lahan	• Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan wilayah; dan • Optimalisasi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah.
Kurang optimalnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik	• Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup; dan • Penguatan pemerintah yang efektif, transparan, dan melayani.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

ISU STRATEGIS KLHS	ISU STRATEGIS RPJMD 2025-2029
Kurang optimalnya pengurangan risiko bencana dan mitigasi	• Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan wilayah; dan • Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup.
Kurang optimalnya ketahanan pangan daerah	• Optimalisasi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah; dan • Penanganan kemiskinan dengan pendekatan kultural.
Kurang optimalnya pengelolaan persampahan	• Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup; dan • Penguatan pemerintah yang efektif, transparan, dan melayani.

Sumber: Data Diolah, 2025

Keterkaitan antara isu strategis KLHS dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Boyolali 2025-2029 menunjukkan integrasi yang komprehensif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Isu degradasi kualitas lingkungan hidup dalam RPJMD mencakup berbagai aspek KLHS, seperti penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, pengelolaan limbah, persampahan, dan mitigasi bencana. Pemerataan sarana prasarana wilayah terkait erat dengan isu alih fungsi lahan serta pengurangan risiko bencana. Optimalisasi hilirisasi industri mendukung ketahanan pangan, sejalan dengan penguatan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan kualitas SDM menghadapi tantangan global juga mencakup adaptasi perubahan iklim, sedangkan penguatan tata kelola pemerintahan mencakup pengelolaan limbah dan persampahan. Keterpaduan ini memastikan seluruh isu strategis RPJMD terakomodasi secara holistik melalui pendekatan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

2.3.2.3.4 Telaah RTRW

Penataan ruang wilayah memiliki tujuan untuk menciptakan keterpaduan, keterkaitan, serta keseimbangan dalam pembangunan antarwilayah maupun antar-sektor, sehingga dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan agar dapat digunakan secara optimal, efisien, dan memiliki daya saing, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam mendukung dan menampung aktivitas pembangunan. Melalui proses penataan ruang, diupayakan terbentuk struktur dan pola ruang yang fungsional, memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penataan ruang di Kabupaten Boyolali bertujuan untuk:

“Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata dan industri yang berkelanjutan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Boyolali menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian, pariwisata, serta industri yang berkelanjutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

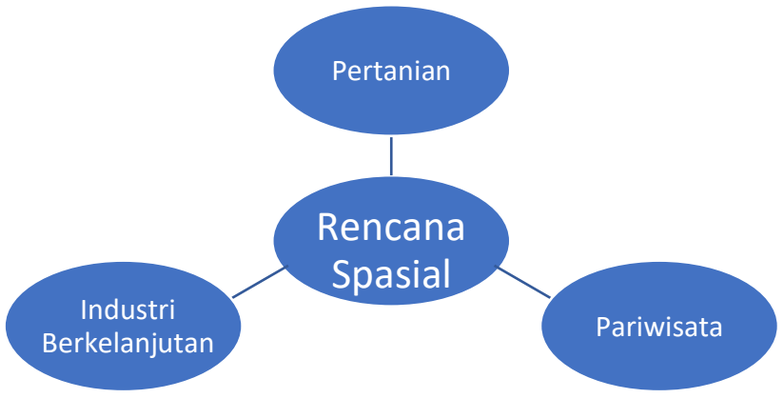

Gambar II. 63
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali
(Sumber: Tim Penyusun, 2025)

Guna mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang. Adapun kebijakan serta strategi penataan ruang Kabupaten Boyolali terdiri atas:

1. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah yang terdiri dari:
   a. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya dengan strategi:
      - meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sesuai dengan perkembangan wilayah;
      - meningkatkan keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan agar tercipta hubungan sosial, ekonomi, fisik yang lebih baik di tingkat regional dan nasional; dan
      - meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan.
   b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai kebutuhan secara terpadu dan merata di dan ke seluruh Wilayah dengan strategi:
      - mengembangkan sistem jaringan transportasi secara terpadu dan aksesibel ke seluruh Wilayah;
      - mengembangkan sistem jaringan energi berkelanjutan;
      - mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh Wilayah;
      - mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan;
      - meningkatkan sistem penyediaan air minum yang aman dan layak;
      - meningkatkan sistem pengelolaan air limbah yang aman dan layak;
      - meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
      - meningkatkan pengelolaan sistem jaringan persampahan dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle);
      - menetapkan sistem jaringan evakuasi bencana yang aman; dan
      - mengembangkan sistem drainase terpadu di Wilayah.
2. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari:
   a. Kebijakan pengembangan Kawasan lindung
      - pelestarian kawasan konservasi dengan strategi:
        - memelihara keanekaragaman hayati terutama ekosistem khas/spesifik;
        - mendukung kelestarian kawasan taman nasional melalui pembinaan dan pengendalian secara ketat di kawasan penyangga; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

- mendukung pemanfataan memanfaatkan kawasan taman nasional sebagai pusat kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata alam.

- pelestarian kawasan cagar budaya dengan strategi:
  - melindungi cagar budaya;
  - melindungi pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya; dan
  - meningkatkan nilai dan fungsi Kawasan Cagar Budaya.

b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya

- pengembangan kawasan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan strategi:
  - mengendalikan alih fungsi KP2B;
  - mengembangkan produktivitas pertanian dan keragaman komoditas pertanian;
  - pembinaan proses pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
  - menyediakan prasarana dan sarana pendukung pertanian; dan
  - mengembangkan kawasan agropolitan terpadu.
- pengembangan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dengan strategi:
  - menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi;
  - mengembangkan kegiatan industri berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan;
  - pengolahan atau daur ulang limbah industri;
  - mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri; dan
  - pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dengan strategi:
  - mengembangkan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu sesuai kebutuhan.
- pemanfaatan kawasan budi daya lain sesuai daya dukung, daya tampung dan kesesuaian lahan dengan strategi:
  - mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - optimalisasi kawasan perikanan berkelanjutan;
  - mengembangkan kawasan transportasi terpadu;
  - membatasi perkembangan Kegiatan Budi Daya terbangun di kawasan risiko bencana tinggi untuk meminimalkan dampak akibat bencana;
  - memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan produksi dan kawasan perkebunan rakyat secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
  - menyediakan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen), meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

3. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang terdiri dari:
   a. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing dengan strategi:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

- menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
- mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten;
- mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
- meningkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk penunjang kegiatan ekonomi.

b. pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi konservasi kawasan sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu untuk mendukung dan mempertahankan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup.

2.3.2.3.5 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah berbasis inovasi, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Dokumen ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kabupaten Boyolali 2025–2029, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi lokal, peningkatan daya saing, serta penguatan tata kelola inovasi daerah. Adapun tantangan dan peluang riset dan inovasi Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

tantangan:

1. keterbatasan finansial dan kapasitas keterampilan serta keahlian sumber daya manusia
   pengembangan riset dan inovasi memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, peralatan, dan tenaga kerja terampil, yang masih menjadi kendala akibat keterbatasan dana. Selain itu, akses terhadap pendidikan bermutu dan relevan masih terbatas, sehingga menghambat ketersediaan SDM yang kompeten di bidang riset dan inovasi.
2. kurangnya integrasi antar perangkat daerah
   kurangnya integrasi program antar perangkat daerah menyebabkan tidak efisiennya penggunaan sumber daya, lemahnya kolaborasi dan pertukaran informasi, serta hambatan dalam pengembangan infrastruktur riset dan regulasi pendukung inovasi.
3. kurangnya kerja sama dan kolaborasi
   Implementasi riset dan inovasi masih menghadapi hambatan dalam membangun sinergi lintas sektor, baik antara sektor publik, swasta, akademisi, maupun masyarakat, akibat perbedaan kepentingan, praktik kerja, serta komunikasi dan ekspektasi yang belum seragam.

peluang:

1. kemitraan dan kolaborasi
   Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak swasta dapat memperkuat sinergi dan pemanfaatan sumber daya, serta menghasilkan solusi inovatif sesuai kebutuhan daerah. Kabupaten Boyolali memiliki potensi untuk membangun kolaborasi berkelanjutan melalui kemitraan strategis.
2. pendanaan alternatif
   Pemerintah daerah dapat menjajaki skema pendanaan non-konvensional dengan melibatkan sektor swasta dan investor, serta menyusun program riset

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

bersama yang saling menguntungkan guna mengurangi ketergantungan pada APBD.

3. regulasi dan kebijakan
   Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi, seperti insentif pajak, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta inisiatif dana riset daerah, menjadi instrumen penting untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif dan kompetitif.

Dengan demikian, tantangan dan peluang tersebut memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk merumuskan isu strategis dalam RPJMD yang menekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan SDM inovatif, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penciptaan sistem pembiayaan dan regulasi yang mendukung ekosistem inovasi daerah secara menyeluruh.

2.3.2.3.6 Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Boyolali

Perencanaan struktur ruang kabupaten merupakan komponen penting dalam penyusunan rencana tata ruang, yang berfungsi membangun keterpaduan hubungan antarwilayah di dalam lingkup kabupaten secara efektif dan berkelanjutan. Struktur ruang dimaknai sebagai susunan pusat-pusat kegiatan yang terhubung melalui sistem jaringan prasarana meliputi jaringan jalan, moda transportasi, serta infrastruktur pendukung lainnya yang mengintegrasikan berbagai kawasan di wilayah kabupaten.

Melalui penataan struktur ruang, setiap kecamatan atau kawasan di kabupaten diarahkan untuk menjalankan fungsi yang saling mendukung dan melengkapi, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan wilayah kabupaten dilakukan secara sistematis dengan pembagian peran ruang yang jelas, termasuk penegasan peran pusat pemerintahan atau pusat pertumbuhan ekonomi sebagai simpul utama kegiatan, serta pengaturan kawasan lain seperti zona permukiman, sentra produksi, dan pusat pelayanan umum sesuai dengan hirarki dan fungsinya.

Adapun hirarki dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boyolali terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang terletak di Kawasan Perkotaan Boyolali.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang meliputi:
   a. kawasan perkotaan Banyudono
   b. kawasan perkotaan Ampel
   c. kawasan perkotaan Karanggede
   d. kawasan perkotaan Simo
3. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten
   a. Pusat Pelayanan Kawasan yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan yang terletak di:
      - kawasan perkotaan Mojosongo;
      - kawasan perkotaan Ngemplak;
      - kawasan perkotaan Cepogo;
      - kawasan perkotaan Kemusu;
      - kawasan perkotaan Klego;
      - kawasan perkotaan Musuk;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

- kawasan perkotaan Sawit; dan
- kawasan perkotaan Teras
- kawasan perkotaan Sambi

b. Pusat Pelayanan Lingkungan yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa yang meliputi:
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Andong;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Gladagsari;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Juwangi;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Nogosari;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Selo;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Tamansari;
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Wonosamodro; dan
   - pusat pelayanan lingkungan Kecamatan Wonosegoro.

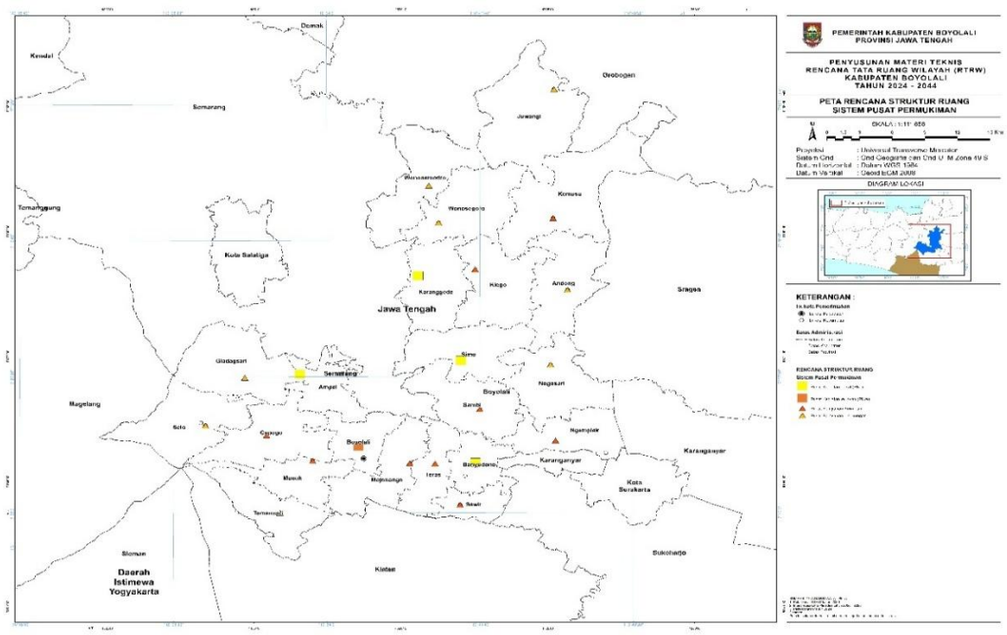

Gambar II. 64
Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Rencana ini memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Boyolali terdiri atas:

1. kawasan lindung meliputi:
   a. badan air;
   b. kawasan konservasi; dan
   c. kawasan cagar budaya.
2. kawasan budi daya meliputi:
   a. badan jalan;
   b. kawasan hutan produksi;
   c. kawasan perkebunan rakyat;
   d. kawasan pertanian;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

e. kawasan perikanan;
f. kawasan pertambangan dan energi;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan

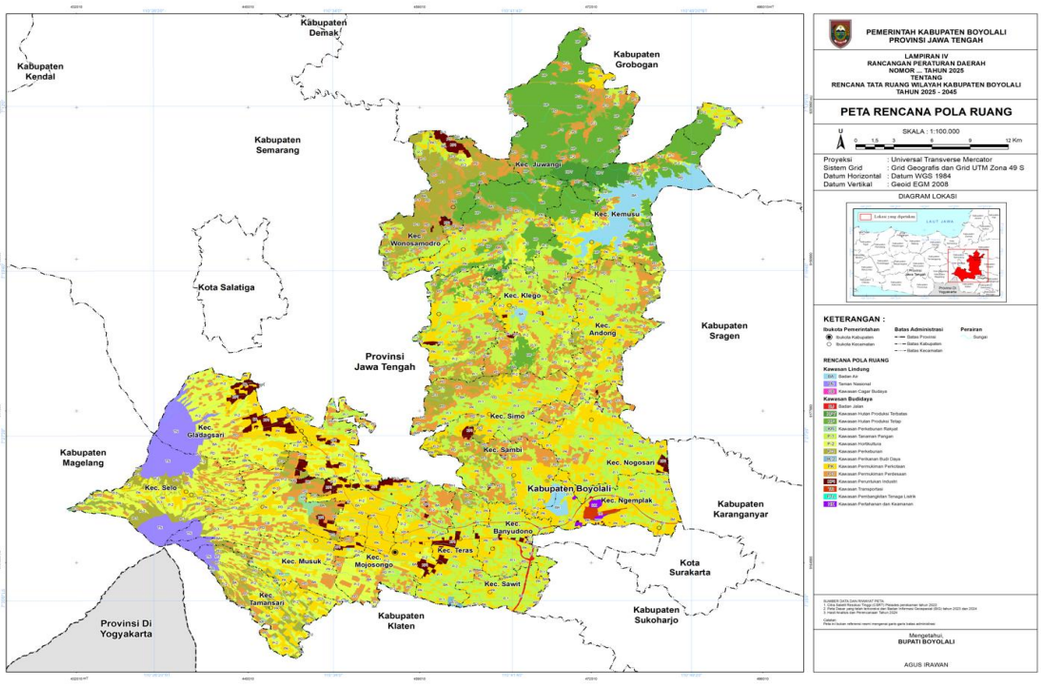

Gambar II. 65
Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Boyolali, terdiri atas:

1. kawasan strategis nasional di kabupaten berupa KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSN Taman Nasional Gunung Merapi.
2. kawasan strategis provinsi di kabupaten berupa KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.
3. kawasan strategis kabupaten meliputi:
   a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri:
      - koridor kawasan subosukawonosraten;
      - kawasan solo-selo-borobudur;
      - kawasan minapolitan;
      - kawasan agropolitan; dan
      - kawasan peningkatan ketahanan pangan
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

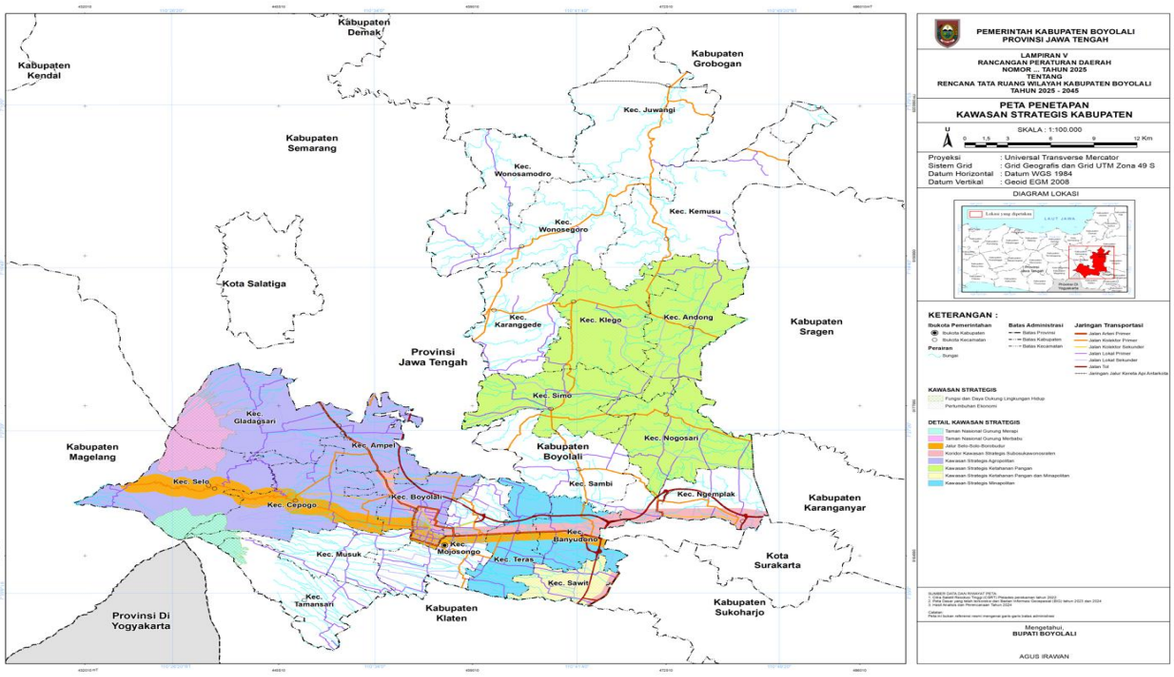

Gambar II. 66
Kawasan Strategis Kabupaten Boyolali
(Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2025)

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Boyolali

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Boyolali yang akan ditangani dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi tantangan global

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan global berdampak besar pada pembangunan Kabupaten Boyolali. Dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan keterampilan, Kabupaten Boyolali dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di pasar global. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor lokal seperti pertanian, industri, dan jasa, tetapi juga menarik investasi baru dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Peningkatan kualitas SDM memungkinkan Kabupaten Boyolali untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren ekonomi global, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dan pelatihan yang relevan akan membuka peluang kerja yang lebih baik dan mengurangi angka pengangguran. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil, warga Kabupaten Boyolali dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan persaingan pasar internasional, menjadikan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kabupaten Boyolali lebih resilien dan siap menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

2. antisipasi pengaruh media sosial pada pembentukan karakter generasi muda

Antisipasi pengaruh media sosial pada pembentukan karakter generasi muda memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Boyolali. Media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku generasi muda, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penurunan etika, kurangnya kesadaran sosial, atau penyebaran informasi yang salah. Dengan adanya inisiatif untuk mengantisipasi dan mengelola pengaruh media sosial, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program literasi digital dan pendidikan karakter. Ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan kritis dalam menggunakan media sosial, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan *platform* tersebut secara positif dan membangun karakter yang kuat dan produktif.

Selain itu, antisipasi pengaruh media sosial dapat mendukung pembangunan sosial dan budaya di Kabupaten Boyolali dengan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dan etika digital ke dalam kurikulum sekolah dan program komunitas, generasi muda dapat lebih memahami pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dan sosial di era digital. Ini tidak hanya membantu membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan beretika tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan terhubung. Dengan cara ini, Kabupaten Boyolali dapat memastikan bahwa dampak media sosial dapat dioptimalkan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

3. penanganan kemiskinan dengan pendekatan kultural

Penanganan kemiskinan dengan pendekatan kultural memiliki dampak signifikan pada pembangunan Kabupaten Boyolali dengan cara yang mendalam dan berkelanjutan. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lokal serta memanfaatkan kekuatan komunitas dalam menangani isu kemiskinan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat dalam program-program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Misalnya, program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan tradisi lokal dan melibatkan tokoh masyarakat atau adat dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program tersebut, karena masyarakat merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif.

Selain itu, pendekatan kultural membantu memperkuat solidaritas sosial dan jaringan komunitas, yang dapat meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan melibatkan unsur budaya lokal, seperti gotong royong atau sistem dukungan sosial tradisional, program penanganan kemiskinan dapat memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan cara-cara lokal dalam berbagi sumber daya dan informasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan dari kemiskinan tetapi juga memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Boyolali, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Pendekatan ini, dengan demikian, tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga membangun pondasi yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4. penguatan pemerintah yang efektif, transparan dan melayani

Isu Penguatan Pemerintah Yang Efektif, Transparan, dan Melayani memiliki dampak signifikan pada pembangunan Kabupaten Boyolali. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Efektivitas pemerintah yang baik akan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, mengurangi potensi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan hasil dari berbagai kebijakan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, prinsip melayani yang diusung akan memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Ketika pemerintah daerah berkomitmen untuk melayani dengan baik, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari program-program pemerintah, seperti akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Boyolali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kombinasi efektivitas, transparansi, dan orientasi pada pelayanan, Kabupaten Boyolali akan lebih mampu menghadapi tantangan pembangunan dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

5. pemerataan sarana dan prasarana pembangunan wilayah

Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan wilayah di Kabupaten Boyolali berdampak signifikan pada keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan distribusi yang adil dari fasilitas seperti jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan, pemerataan sarana dan prasarana dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini memungkinkan akses yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat ke layanan dasar dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kemiskinan di daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil di wilayah yang terpinggirkan.

Di sisi lain, pemerataan sarana dan prasarana berkontribusi pada stabilitas sosial dan kohesi komunitas. Dengan infrastruktur yang lebih merata, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dapat merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan di antara warga. Fasilitas yang setara mendukung mobilitas dan interaksi sosial yang lebih baik, memperkuat jaringan sosial dan komunitas lokal. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif, di mana semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kemajuan daerah.

6. optimalisasi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah

Optimalisasi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah membawa dampak besar terhadap pembangunan Kabupaten Boyolali. Hilirisasi, yang berarti pengolahan komoditas mentah menjadi produk akhir yang bernilai tambah, dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas pasar bagi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

komoditas unggulan Kabupaten Boyolali seperti tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, sapi, unggas, produk perikanan, serta kerajinan.

Dengan adanya fasilitas pengolahan yang lebih baik dan teknologi yang efisien, nilai ekonomi komoditas ini akan meningkat, memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha lokal. Selain itu, hilirisasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Di sisi lain, optimalisasi hilirisasi juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan memproses komoditas lokal di daerah sendiri, Kabupaten Boyolali dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan fluktuasi harga pasar global. Ini juga dapat mengurangi jejak karbon dari transportasi jarak jauh dan mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Dengan mendukung industri berbasis komoditas unggulan, Kabupaten Boyolali tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat daya saingnya di pasar regional dan nasional, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

7. ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan

Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pembangunan yang tidak diatur dengan baik, seperti alih fungsi lahan, pemanfaatan bahan bakar fosil, eksploitasi air tanah, peningkatan timbulan sampah dan air limbah domestik maupun non domestik dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dampak ini meliputi penurunan kualitas tanah, penurunan ketersediaan air bersih, dan penurunan biodiversitas. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi keseimbangan ekosistem tetapi juga mempengaruhi sumber daya alam yang krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti sumber mata pencaharian berbasis pertanian dan perikanan. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, degradasi lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana alam dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung. Kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan dan pencemaran, dapat memperburuk risiko banjir, tanah longsor, dan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Komunitas yang terkena dampak akan mengalami penurunan kualitas hidup, termasuk meningkatnya penyakit terkait lingkungan dan berkurangnya produktivitas kerja. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Kabupaten Boyolali untuk menerapkan praktik pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan, memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

Teknik perumusan strategi daerah disusun melalui pendekatan yang komprehensif dan integratif. Proses ini dimulai dari identifikasi potensi daerah, permasalahan, serta penelaahan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan berbagai isu dinamis yang berkembang, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Teknik tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel II. 72

Teknik Perumusan Isu Strategis Kabupaten Boyolali

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU RPJMN	ISU RPJMD PROVINSI	
Terdapat potensi sumber daya manusia yang tercermin dari tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahun, dengan skor IPM mencapai 75,96 pada tahun 2024, meskipun masih lebih rendah dibandingkan wilayah Subosukawonosraten. Telah tersedia perguruan tinggi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi masyarakat. Terdapat upaya peningkatan pada aspek-aspek pembentuk IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Angka ketergantungan yang relatif rendah menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, yang menjadi modal penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.	Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai			Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas SDM Untuk Menghadapi tantangan Global
Boyolali memiliki kekayaan budaya Jawa yang kental, dengan tradisi seperti Sedekah Gunung dan Sadranan (Nyadran) yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, mencerminkan kuatnya identitas budaya daerah. Boyolali memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi mendatang dan pengunjung luar daerah.	Meningkatnya potensi dan ancaman kebudayaan asing melalui media sosial		Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi		Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Antisipasi Pengaruh Media Sosial Pada Pembentukan Karakter Generasi Muda
Potensi tata kelola pemerintahan yang tercermin dari tren peningkatan indeks reformasi birokrasi dan pelayanan publik, mendukung efisiensi pemerintahan. Potensi kemudahan perizinan dan regulasi yang	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja menuju transformasi tata kelola		Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan Pemerintah Yang Efektif, Transparan dan Melayani

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU RPJMN	ISU RPJMD PROVINSI	
mendukung penanaman modal, dengan tingkat keamanan yang stabil.						
Kabupaten Boyolali memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam. Di sektor pertanian, daerah ini menghasilkan tanaman pangan seperti padi dan jagung, serta hortikultura seperti sayur, buah, dan biofarmaka. Selain itu, potensi perkebunan seperti tembakau, kopi, dan kelapa juga cukup signifikan. Sektor peternakan, khususnya sapi perah, menjadikan Boyolali sebagai kota susu dengan produk olahan seperti abon dan dendeng. Di bidang perikanan, Boyolali memanfaatkan sumber daya alam di waduk dan sungai, menghasilkan ikan lele, nila, gurame, dan patin, yang juga diolah menjadi produk turunan seperti abon dan keripik. Selain itu, potensi pariwisata di Boyolali sangat menarik dengan keindahan alam pegunungan dan waduk, serta peluang wisata agro dan alam di kawasan seperti Waduk Cengklik dan Kedung Ombo.	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas ekonomi pada sektor unggulan daerah			Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Optimalisasi Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
Adanya potensi upaya penanggulangan kemiskinan dengan diberlakukannya program rumah singgah, bantuan sosial, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi Adanya potensi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan Masyarakat			Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	Penanganan Kemiskinan dengan Pendekatan Kultural
Potensi untuk memperkuat resiliensi terhadap bencana, dengan Indeks Risiko Bencana yang menurun dari 130,32 pada tahun 2020-2022 menjadi 94,67 pada tahun 2024. Potensi untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, tercermin dalam kenaikan Indeks Ketahanan Daerah dari 0,82 pada tahun 2020-2023 menjadi 0,87 pada tahun 2024. Potensi terus mempertahankan akses sanitasi sehat yang telah mencapai 98,33% pada tahun 2024, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup	Kurang optimalnya ketahanan pangan daerah Penurunan Ketersediaan dan kualitas air Belum optimalnya adaptasi	Dampak Perubahan Iklim Global		Ketahanan pangan yang berkelanjutan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Sebagai Dampak Aktivitas Pembangunan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU RPJMN	ISU RPJMD PROVINSI	
		perubahan iklim				
		Kurang optimalnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik				
		Kurang optimalnya pengurangan risiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana				
		Kurang optimalnya pengelolaan persampahan				
Dengan 83,20% jalan dalam kondisi mantap pada 2024, ada potensi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan untuk mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan panjang jalan beton dari 139,793 km (2020) menjadi 194,86 km (2024) menunjukkan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada jalan kerikil dan tanah, serta meningkatkan ketahanan infrastruktur jalan. Dengan potensi optimalisasi terminal dan pengangkutan barang, perbaikan infrastruktur ini dapat mendukung distribusi barang dan mobilitas orang secara lebih efisien.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Alih fungsi lahan	Perkembangan Teknologi Industri 5.0		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Kabupaten Boyolali memiliki potensi unggulan bidang pertanian dan peternakan, selain itu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali adalah kawasan industri. Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang dimiliki. Visi dan misi dalam konteks ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana.

Kabupaten Boyolali dengan potensi sumber daya alamnya, diantaranya potensi industri, pertanian, dan pariwisata, memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Boyolali dalam mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dalam jangka waktu lima tahun. Dalam hal ini sasaran dicerminkan sebagai sesuatu yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja pada akhir periode perencanaan maupun breakdown di masing-masing tahun. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam perumusan Visi daerah Kabupaten Boyolali telah memperhatikan dan sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Asta Cita sendiri merupakan 8 (delapan) misi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Boyolali, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

“TERWUJUDNYA PERUBAHAN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Boyolali di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan jargon yang telah ditentukan untuk Kabupaten Boyolali yaitu **“BOYOLALI TERSENYUM” ("Tertib, Elok, Rapi, Sehat, dan Nyaman" untuk masyarakat).** Program ini berupaya menciptakan suasana yang tertib, elok, rapi, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga Kabupaten Boyolali dapat menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1
Uraian Pokok Visi

Pokok Visi	Uraian
Maju	Perwujudan Kabupaten Boyolali yang maju adalah Boyolali sebagai Kabupaten yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, infrastruktur yang merata dan teknologi informasi yang mutakhir. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali. Upaya pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dan peluang berusaha untuk masyarakat sehingga tercipta peningkatan ekonomi daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka menengah daerah. Dalam mewujudkan daerah yang maju pemerintah Kabupaten Boyolali harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pokok Visi	Uraian
	keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Nyaman Dihuni	Perwujudan Boyolali sebagai Kabupaten yang Nyaman Dihuni diwujudkan sebagai kabupaten ideal berdasarkan indikator-indikator yang diberikan, antara lain ketersediaan kebutuhan dasar seperti dukungan infrastruktur yang rapi dan lengkap, perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, penyediaan ruang terbuka hijau, ketercukupan pangan, dan pesona budaya alam serta produk unggulan daerah. Suasana nyaman juga ditunjang oleh masyarakat yang ramah yang mampu membuat suasana nyaman dan bisa saling menghargai kemajemukan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi warga dan juga wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Boyolali. Hal-hal lain yang memengaruhi kenyamanan masyarakat adalah fasilitas peribadatan serta pelayanan keagamaan sehingga masyarakat merasa nyaman tinggal di Kabupaten Boyolali.
Berdaya Saing	Kabupaten Boyolali yang berdaya saing diwujudkan dengan menetapkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kabupaten Boyolali harus mengoptimalkan potensi yang akan dikembangkan sehingga dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Kabupaten Boyolali harus dapat menciptakan iklim usaha kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, serta perbaikan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konsep ini, pembentukan daya saing mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.
Ramah Investasi	Perwujudan Boyolali ramah investasi adalah investasi yang masuk Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pokok Visi	Uraian
	sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, inovasi secara lebih terarah dan terpadu serta peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Sumber: Data Diolah, 2025

Visi Kabupaten Boyolali periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan yang maju dan berdaya saing yang dapat dicapai dengan memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi yang ramah investasi. Arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali yaitu memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sehingga kenyamanan dan kelestarian lingkungan dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali secara merata.

Gambar III. 1
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali dengan Visi RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Analisis Penyusun, 2025)

Visi ini selaras dan berkontribusi langsung terhadap visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung visi Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2025–2029, yakni "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Dengan keterpaduan arah pembangunan pusat, provinsi, dan Kabupaten Boyolali, visi "Terwujudnya Perubahan Boyolali Yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045" menjadi bagian integral dari upaya kolektif membangun Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi diterjemahkan ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Misi harus dapat menunjukkan dengan jelas upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan misi harus dapat menyelaraskan muatan atau pokok visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan. Dengan memperhatikan pokok visi yang terkandung di dalam Visi Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029, maka berikut ini dijabarkan keterkaitan Visi dengan Misi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029:

Gambar III. 2
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029
(Sumber: Visi Misi Bupati Boyolali 2025-2029)

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memerhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. mewujudkan pembangunan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. mewujudkan sumber daya manusia unggul, sehat, cerdas dan berjiwa Pancasila.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4. mewujudkan pemerintahan demokratis, dengan didukung aparatur profesional, berintegritas, responsif dan inovatif.
5. meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif, berbasis potensi unggulan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Misi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi prioritas, merupakan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana Kabupaten Boyolali harus mengintegrasikan misi pembangunan lima tahunan dengan hal tersebut. Mengingat Kabupaten Boyolali merupakan daerah penghasil komoditas unggulan yang potensial, maka pemerintah Kabupaten Boyolali harus menggali potensi tersebut agar visi Kabupaten Boyolali berdaya saing dan ramah investasi dapat tercapai. Berikut ini adalah keterkaitan antara Misi pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2025-2029 dengan Asta Cita.

Gambar III. 3
Keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Data Diolah, 2025)

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Masing-masing misi sebagai upaya pencapaian visi Kabupaten Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut:

MISI 1 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Boyolali dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan ramah lingkungan, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

MISI 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Boyolali berupaya mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten yang berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan kabupaten dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana.

MISI 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Boyolali. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas dan berjiwa Pancasila merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu meningkatkan daya saing, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pancasila dalam hal ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia dengan menjadi pedoman dalam pembentukan karakter, sikap, dan perilaku. Pancasila juga menjadi dasar dalam membangun SDM yang berkualitas dan berkompeten. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Indeks Modal Manusia (IMM). Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kabupaten Boyolali dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

yang adil dan sesuai standar. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

MISI 4 Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Boyolali. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan izin yang lainnya dengan senantiasa taat pada peraturan yang berlaku.

MISI 5 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama antara lain kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, serta mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, peternakan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kabupaten Boyolali yang Maju dan Ramah Investasi.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III. 2
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE		TARGET				
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: "TERWUJUDNYA PERUBAHAN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045"									
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,64	5,70-5,94	5,80-6,00	5,86-6,06	5,92-6,12	5,98-6,19	6,04-6,25
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan									
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan									
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9,63	9,63-9,27	9,27-9,09	8,68-8,51	8,07-7,92	7,47-7,32	6,89-6,74
Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, Dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali	Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	77,63	77,97	78,31	78,66	79,00	79,34

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Boyolali dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Bupati maka sasaran beserta indikator pada setiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **T1. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   ✓ Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
   ✓ Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat
   ✓ Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah
   ✓ Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana
   ✓ Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
   ✓ Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan
   ✓ Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan
   ✓ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas

2. **T2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   ✓ Peningkatan daya saing sumber daya manusia
   ✓ Penguatan pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender
   ✓ Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan

3. **T3. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional

Visi, misi, tujuan, sasaran serta targetnya disajikan pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 3

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
"TERWUJUDNYA PERUBAHAN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045"											
BOYOLALI MAJU **Misi 1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah**											
	Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,64**	**5,70-5,94**	**5,80-6,00**	**5,86-6,06**	**5,92-6,12**	**5,98-6,19**	**6,04-6,25**	**6,04-6,25**
	Sasaran 1.1. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Angka	80,71	80,97	81,32	81,50	81,64	81,79	81,94	81,94
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	94,25	94,50	94,75	95	95,25	95,50	95,75	95,75
	Sasaran 1.3. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Indeks Desa	%	0,7707	0,7515	0,7699	7.883	0,8067	0,8251	0,8435	0,8435
BOYOLALI NYAMAN DIHUNI **Misi 2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**											
	Sasaran 1.4. Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	94,67	92,49	91,41	89,23	88,14	87,05	85,96	85,96
	Sasaran 1.5 Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	n/a	1.335.975,00	1.496.777,00	1.680.913,00	1.892.658,00	2.137.234,00	2.421.045,00	2.421.045,00
BOYOLALI RAMAH INVESTASI **Misi 5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan**											
	Sasaran 1.6. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Pertumbuhan investasi	%	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	3,5	3,7	3,7
	Sasaran 1.7 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan	Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali	%	2,52	2,55	2,58	2,61	2,64	2,67	2,7	2,7

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terhadap Provinsi Jawa Tengah									
	Sasaran 1.8 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,16	3,09	3,02	2,95	2,88	2,81	2,74	2,74
BOYOLALI BERDAYA SAING **Msi 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila**											
	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**9,63**	**9,63-9,27**	**9,27-9,09**	**8,68-8,51**	**8,07-7,92**	**7,47-7,32**	**6,89-6,74**	**6,89-6,74**
	Sasaran 2.1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,96	76,7	77	77,3	77,61	77,91	78,21	78,21
	Sasaran 2.2. Penguatan pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,78	64,54-64,55	65,31 - 65,32	66,08 - 66,09	66,84 - 66,87	67,61 - 67,64	68,38 - 68,41	68,38 - 68,41
		2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,233	0,233-0,216	0,23 - 0,213	0,228 - 0,202	0,226 - 0,192	0,223 - 0,182	0,221 - 0,172	0,221 - 0,172
	Sasaran 2.3. Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan	Rasio Gini	Angka	0,370**	0,365	0,364	0,363	0,361	0,36	0,359	0,359
BOYOLALI MAJU **Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, Dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif**											
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**76,5**	**77,63**	**77,97**	**78,31**	**78,66**	**79**	**79,34**	**79,34**
	Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional	1. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	4,57	4,57
		2. Nilai SAKIP	Angka	68,96	70,2	71,16	72,12	73,08	74,04	75	75

Sumber: Data Diolah, 2025
*Keterangan: ** Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 4

Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	
Sasaran 1.1. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		**Indeks Infrastruktur**	
	Tujuan PD: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	**Persentase Infrastruktur Wilayah yang Terbangun**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Akses rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan daerah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya ketaatan pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang	
	Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam PBG	Persentase kepatuhan PBG	
	Meningkatnya sanitasi permukiman yang aman dan berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aman	
	Meningkatnya Fasilitasi Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Boyolali	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi	
	Tujuan PD: Meningkatkan kapasitas dan kualitas konektivitas wilayah	**Rasio konektivitas wilayah**	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya layanan transportasi darat yang aman	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	
Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat		**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	
	Tujuan PD: Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	**Pertumbuhan Rumah Layak Huni**	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase luasan kawasan kumuh	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh kabupaten/kota yang ditangani	
	Meningkatnya persentase rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	
Sasaran 1.3. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah		**Indeks Desa**	
	Meningkatkan Kemandirian Desa	**Persentase Desa Mandiri**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya status desa	Persentase kenaikan status desa	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
Sasaran 1.4. Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana		**Indeks Risiko Bencana**	
	Tujuan PD: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah	**Indeks Ketahanan Daerah**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana	
	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana dan melayani penanggulangan bencana	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	
		Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	
		Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	
		Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	
		Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	
		Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	
		Indeks Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Informasi Rawan Bencana	
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
Sasaran 1.5 Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	
	Tujuan PD: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
	Meningkatnya kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Udara	
		Indeks kualitas air	
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca sektor Limbah	Penurunan Emisi GRK sektor Limbah	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase desa/kelurahan yang menerapkan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat	
Sasaran 1.6. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan		**Pertumbuhan Investasi**	
	Tujuan PD: Meningkatnya hilirisasi ekonomi berbasis kerakyatan	**Rasio PDRB Sektor Perdagangan**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	
		Pengeluaran perkapita	
	Meningkatnya perekonomian sektor Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
	Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Pertumbuhan Angka neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok	Disparitas harga	
	Tujuan PD: Meningkatnya produktivitas sektor peternakan dan perikanan	**Peningkatan Ketersediaan Pangan Asal Hewan (Ternak dan Ikan)**	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Meningkatnya mutu dan produksi peternakan	Produktivitas Hasil Peternakan Daging	
		Produktivitas Hasil Peternakan Telur	
		Produktivitas Hasil Peternakan Susu	
	Meningkatnya mutu dan produksi perikanan	Produktivitas Hasil Perikanan Budidaya	
		Produktivitas Hasil Perikanan Tangkap	
		Produktivitas Pengolahan Ikan	
	Tujuan PD: Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	**Produktivitas Pertanian**	Dinas Pertanian
	Meningkatnya mutu dan produksi tanaman pangan	Produktivitas Tanaman Pangan	
	Meningkatnya mutu dan produksi hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura	
	Meningkatnya mutu dan produksi perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan	
	Tujuan PD: Meningkatkan Penanaman Modal	**Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai investasi tahunan berskala nasional PMA/PMDN	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Sasaran 1.7 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan		**Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap Provinsi Jawa Tengah**	
	Tujuan PD: Meningkatnya perekonomian kerakyatan dengan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB, usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha menuju usaha kecil, produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja	**Persentase usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menuju usaha kecil**	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	
	Meningkatnya usaha mikro binaan yang naik hasil penjualannya.	Persentase pertumbuhan usaha mikro binaan yang naik hasil penjualanya.	
	Tujuan PD: Meningkatnya daya saing pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan	**Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata**	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	
Sasaran 1.8. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas		**Tingkat Pengangguran Terbuka**	
	Tujuan PD: Meningkatnya perekonomian kerakyatan dengan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB, usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha menuju usaha kecil, produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** **Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi**	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	
	Menurunnya Pengangguran	Persentase penurunan pengangguran	
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh Melalui Upah Minimum yang Layak	Persentase Perusahaan Yang memiliki LKS Bipartit	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	
Sasaran 2.1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia**	
	Tujuan PD: Meningkatkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya	**Harapan Lama Sekolah** **Rata-rata Lama Sekolah** **Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik	Literasi membaca SD/Sederajat	
		Literasi Membaca SMP/Sederajat	
		Numerasi SD/Sederajat	
		Numerasi SMP/Sederajat	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kompetensi	
	Meningkatnya upaya internalisasi budaya dalam masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah	
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	
	Tujuan PD: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Keluhan Kesehatan Masyarakat	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan khususnya ibu dan anak	Jumlah Kematian Ibu	
		Jumlah kematian balita	
		Prevalensi Stunting	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	
	Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan Kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dinkes)	Indikator Mutu Prioritas pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memenuhi standar	
	Tujuan PD: Meningkatnya daya saing pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan	**Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		Indeks Pembangunan Pemuda	
	Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	
	Meningkatnya prestasi olahraga	Proporsi jumlah atlet yang berprestasi	
Sasaran 2.2. Penguatan pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender		**1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	
	Tujuan PD: Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perempuan, dan anak	**Presentase Kelompok Kegiatan Aktif**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Status Kabupaten Layak Anak	
	mempertahankan keseimbangan pengendalian penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	
	Meningkatnya perlindungan anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan	
		2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
	Tujuan PD: Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perempuan, dan anak	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
Sasaran 2.3. Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan		**Rasio Gini**	
	Tujuan PD: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	**Indeks Ketahanan Pangan**	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	
	Tujuan PD: Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Boyolali	**Angka PPKS**	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan keberdayaan PPKS	
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali		**Indeks Reformasi Birokrasi**	
Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional		**1. Indeks Pelayanan Publik**	
	Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**	**Kecamatan**
	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	
	Tujuan PD: Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang adaptif dan profesional	**Indeks Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks SPBE	
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (INMEN No. 2 Tahun 2025)	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
	Tujuan PD: Meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Boyolali	**Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD**	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase propemperda yang berhasil diselesaikan	
	Tujuan PD: Meningkatnya literasi dan tata kelola kearsipan	**Tingkat Pengelolaan/ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan	
	Meningkatnya literasi masyarakat	Tingkat kegemaran membaca Dinas Arpus	
	Tujuan PD: Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP elektronik	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	
	Meningkatnya administrasi catatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	
	Tujuan PD: Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	**Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)**	Satpol PP
		Cakupan pelayanan kebakaran	
	Menurunnya pelanggaran perda trantibum	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	
		2. Nilai SAKIP	
	Tujuan PD: Meningkatkan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	**Indeks Kualitas Perencanaan**	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Indeks Inovasi Daerah	
	Tercapainya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	
	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi	
	Tujuan PD: Meningkatnya kinerja pemerintah dan reformasi hukum	**Indeks Pencapaian SPM**	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	
	Meningkatnya capaian kinerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, dan administrasi umum	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
		Capaian Kinerja Bidang Administrasi Umum	
	Meningkatnya harmonisasi produk hukum daerah	Tingkat Harmonisasi Produk Hukum Daerah	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH
	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali	Angka ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	
	Tujuan PD: Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah dan pencegahan korupsi	**Indeks Maturitas SPIP**	Inspektorat
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	
	Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah	IPKD MCP	
	Tujuan PD: Meningkatnya Stabilitas Ipoleksosbudhankam Daerah	**Persentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselesaikan**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Menguatnya Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni	
	Tujuan PD: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	**Opini BPK**	Badan Keuangan Daerah
		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik daerah	Tingkat Pemanfaatan Barang Milik daerah	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	
	Tujuan PD: Meningkatnya manajemen ASN berbasis Merit Sistem	**Angka Merit Sistem**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	
	Menurunnya pelanggaran ASN terhadap peraturan kepegawaian	Persentase pelanggaran ASN terhadap peraturan kepegawaian	
	Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Jumlah ASN yang mendapat Angka Kinerja Minimal Baik	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui Digitalisasi ASN	Tingkat Keterpaduan Data ASN pada Sistem terkait	
	Meningkatnya kapabilitas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	
		Rasio pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi Bupati ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029 adalah **"Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045"** Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Bupati dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespon dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses *cascading* kinerja, dimulai dari visi hingga capaian *outcome*, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

Adapun arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi pengembangan SDM, pemberdayaan desa, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, pengelolaan SDA, dan peningkatan kualitas tata kelola. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Boyolali, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Gambar III. 4
Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali
(Sumber: Data Diolah, 2025)

Tema pembangunan Kabupaten Boyolali secara konsisten mendukung arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada setiap tahapan. Pada tahun 2026, penguatan Boyolali melalui penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi secara langsung menopang posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Tahun 2027, peningkatan daya saing SDM Boyolali diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Selanjutnya, pada tahun 2028, perluasan perekonomian Boyolali yang inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan, dan ramah lingkungan sejalan dengan upaya provinsi meningkatkan pemerataan ekonomi berbasis desa dan industri hijau. Tahun 2029, Boyolali memperkuat daya saing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pencapaian Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan. Pada akhirnya, di tahun 2030, perwujudan Boyolali yang maju, nyaman dihuni, berdaya saing, dan ramah investasi selaras dengan visi besar Jawa Tengah untuk mewujudkan provinsi yang maju dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 5
Arah Kebijakan Tahunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali
Tahun 2026-2030

Daerah	2026	2027	2028	2029	2030
Provinsi Jawa Tengah	Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai **lumbung pangan** nasional	Mengembangkan **pariwisata** berkelanjutan dan **ekonomi syariah** sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan **industri hijau**	Menumbuhkan **daya saing daerah menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan**	Perwujudan **Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan**
Kabupaten Boyolali	Penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi untuk **mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**	**Peningkatan daya saing SDM** yang sejahtera untuk mendukung pengembangan **pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah**	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis **hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan**	Perwujudan kemajuan pembangunan **Boyolali yang berdaya saing dan ramah investasi menuju kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera**	Perwujudan Kabupaten Boyolali yang **Maju, Nyaman dihuni, Berdaya Saing, Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045**

Sumber: Data Diolah, 2025

Adapun penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan isu-isu strategis daerah serta misi Kepala Daerah. Setiap tahapan pembangunan dirancang berdasarkan urgensi permasalahan yang dihadapi, kemampuan pendanaan daerah, serta target kinerja yang ingin dicapai secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel berikut menyajikan tahapan pembangunan lima tahunan yang menggambarkan keterpaduan antara strategi, arah kebijakan, dan prioritas tahunan sebagai upaya terencana dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 6
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Misi Kepala Daerah	Arah Kebijakan	Strategi	Tema RPJPD Tahap I Penguatan Fondasi Transformasi				
				Tema Tahap I Tahun 2026	**Tema Tahap II Tahun 2027**	**Tema Tahap III Tahun 2028**	**Tema Tahap IV Tahun 2029**	**Tema Tahap V Tahun 2030**
				Penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi untuk **mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**	**Peningkatan daya saing SDM** yang sejahtera untuk mendukung pengembangan **pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah**	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis **hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan**	Perwujudan kemajuan pembangunan **Boyolali yang berdaya saing dan ramah investasi menuju kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera**	Perwujudan Kabupaten Boyolali yang **Maju, Nyaman dihuni, Berdaya Saing, Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045**
Pemerataan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan	Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan yang terintegrasi	v	v			
		Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Boyolali	Pemerataan akses rumah layak huni dan sehat, serta kawasan permukiman yang memadai			v	v	v
		Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai				v	v	v
Ancaman Degrasi Kualitas Lingkungan Hidup Sebagai Dampak Aktivitas Pembangunan	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa	Pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan ekologis	v	v	v		
		Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan		v	v	v		
		Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang terkendali		v	v	v		
		Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim				v	v
		Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan serta penanggulangan dan tanggap bencana					v	v
Peningkatan Kualitas SDM Untuk	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul,	Penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Pemerataan pendidikan yang berkualitas dan pemenuhan	v	v	v		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isu Strategis	Misi Kepala Daerah	Arah Kebijakan	Strategi	Tema RPJPD Tahap I Penguatan Fondasi Transformasi				
				Tema Tahap I Tahun 2026	**Tema Tahap II Tahun 2027**	**Tema Tahap III Tahun 2028**	**Tema Tahap IV Tahun 2029**	**Tema Tahap V Tahun 2030**
				Penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi untuk **mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**	**Peningkatan daya saing SDM** yang sejahtera untuk mendukung pengembangan **pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah**	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis **hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan**	Perwujudan kemajuan pembangunan **Boyolali yang berdaya saing dan ramah investasi menuju kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera**	Perwujudan Kabupaten Boyolali yang **Maju, Nyaman dihuni, Berdaya Saing, Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045**
Menghadapi tantangan Global	Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila	Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) serta vokasi yang berkualitas	kompetensi standar angkatan kerja lokal	v	v	v		
		Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	v	v	v	v	v
		Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna		v	v	v	v	v
Antisipasi Pengaruh Media Sosial Pada Pembentukan Karakter Generasi Muda		Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya				v	v
		Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pemerintahan daerah				v	v
		Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif	Penuntasan kemiskinan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)dan perlindungan sosial adaptif integratif	v	v	v		
		Pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia		v	v	v		
Penanganan kemiskinan dengan pendekatan struktural		Pengurangan beban pengeluaran masyarakat		v	v	v		
		Peningkatan pendapatan masyarakat		v	v	v		
		Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan		v	v	v		
Penguatan Pemerintah Yang Efektif,	Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, Dengan	Peningkatan Pengawasan Proses Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi ASN, dan Manajemen Kinerja yang Berbasis Sistem Merit dengan Teknologi Informasi	Implementasi Reformasi Birokrasi yang profesional dan akuntabel	v	v	v		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isu Strategis	Misi Kepala Daerah	Arah Kebijakan	Strategi	Tema RPJPD Tahap I Penguatan Fondasi Transformasi				
				Tema Tahap I Tahun 2026	**Tema Tahap II Tahun 2027**	**Tema Tahap III Tahun 2028**	**Tema Tahap IV Tahun 2029**	**Tema Tahap V Tahun 2030**
				Penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi untuk **mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**	**Peningkatan daya saing SDM** yang sejahtera untuk mendukung pengembangan **pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah**	Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis **hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan**	Perwujudan kemajuan pembangunan **Boyolali yang berdaya saing dan ramah investasi menuju kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera**	Perwujudan Kabupaten Boyolali yang **Maju, Nyaman dihuni, Berdaya Saing, Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045**
Transparan dan Melayani	Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah		v	v	v		
		Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi		v	v	v		
		Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik	Pemenuhan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses dan terjangkau				v	v
Optimalisasi Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan	Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran	Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif	v	v	v		
		Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millenial		v	v	v		
		Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai local advantage		v	v	v		
		Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan hilirisasi sektor unggulan berbasis kawasan ekonomi				v	v
		Peningkatan kemandirian, produktivitas dan pemberdayaan perdesaan dalam pembangunan ekonomi wilayah					v	v

Sumber: Data diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.1.2 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah manusia adalah sebagai berikut:

a. keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan sinkronisasi pengembangan kawasan yang terintegrasi

Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan sinkronisasi pengembangan kawasan yang terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Boyolali. Sebagai salah satu kabupaten dengan posisi strategis di Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar sebagai penghubung antara wilayah Solo Raya dan kawasan sekitarnya. Namun, tantangan utama terletak pada upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan antara sektor-sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tidak terjadi fragmentasi atau tumpang tindih yang menghambat efektivitas pembangunan.

Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah dengan strategi dan arah kebijakannya meliputi lingkup pemberdayaan, lingkungan, pelayanan dasar, ekonomi, aksesibilitas desa, dan tata kelola pemerintahan desa. Di Kabupaten Boyolali, keterpaduan ini perlu diterapkan melalui sinergi antarprogram pembangunan, seperti optimalisasi infrastruktur transportasi, akses energi, dan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Misalnya, pengembangan infrastruktur jalan harus diintegrasikan dengan kawasan pertanian dan sentra industri kecil-menengah, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pasar bagi produk lokal. Selain itu, pembangunan jaringan air bersih yang terintegrasi juga dapat mendukung sektor pariwisata, terutama di daerah dengan potensi wisata alam yang terus berkembang.

Sebagai landasan hukum dan pengendalian pembangunan, Kabupaten Boyolali juga akan mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada). RDTR berperan penting dalam memastikan pemanfaatan ruang lebih terarah dan terukur, mempercepat perizinan investasi melalui integrasi dengan OSS, serta menjadi instrumen sinkronisasi program lintas sektor agar pembangunan berjalan konsisten dengan rencana tata ruang.

Namun, tantangan terbesar adalah memastikan sinkronisasi antarlevel pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Tanpa kerangka perencanaan yang jelas dan inklusif, pembangunan berpotensi hanya

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

menguntungkan sebagian wilayah atau kelompok. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan pendekatan yang kritis dan inklusif, Kabupaten Boyolali dapat memaksimalkan potensi infrastrukturnya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan yaitu penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan

b. pemerataan akses rumah layak huni dan sehat, serta kawasan permukiman yang memadai

Strategi pemerataan akses terhadap rumah layak huni dan sehat serta kawasan permukiman yang memadai merupakan elemen krusial dalam agenda pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif. Ketimpangan akses terhadap hunian yang layak masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pemerataan akses tersebut. Intervensi pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan regulasi dan kolaborasi multipihak, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan mikro.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, strategi ini memiliki keterkaitan erat dengan misi daerah untuk mendorong konektivitas dan produktivitas kawasan. Penyediaan rumah layak dan permukiman yang sehat tidak hanya memenuhi hak dasar warga, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja, peningkatan kualitas hidup, dan efisiensi aktivitas ekonomi. Akses ke infrastruktur permukiman yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, jaringan jalan lingkungan, dan sistem drainase, akan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi serta memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Lebih lanjut, pembangunan permukiman yang terencana dan inklusif menjadi instrumen strategis dalam pengendalian urbanisasi yang tidak terkendali dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru. Upaya ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan strategi pemerataan akses rumah dan permukiman ke dalam kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah, pemerintah daerah dapat memperkuat struktur spasial yang produktif dan resilien, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah secara menyeluruh.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Kabupaten Boyolali.
2) penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

MISI 2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ialah sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya krusial untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Pendekatan ini harus berorientasi pada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan guna mendukung keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, pembangunan yang tidak terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan berisiko merusak ekosistem lokal, mempercepat degradasi lahan, dan memicu bencana ekologis, seperti banjir atau tanah longsor.

Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di tingkat kabupaten memerlukan pengintegrasian antara perencanaan tata ruang dengan kebijakan lingkungan. Misalnya, kebijakan pengembangan industri harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan setempat, termasuk pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan. Selain itu, aktivitas pertanian, yang sering menjadi sektor andalan di daerah pedesaan, perlu didorong ke arah praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan metode agroforestri. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya air, termasuk perlindungan daerah resapan air dan pengelolaan aliran sungai.

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila terdapat komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan akan menciptakan beban ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi bagian integral dari upaya pembangunan, tidak hanya sebagai wacana, tetapi sebagai praktik nyata yang berkontribusi pada kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa;
2) penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan;
3) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang terkendali.

b. penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim

Penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan langkah strategis untuk menghadapi dampak signifikan dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam serta perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan masyarakat dan ekosistem. Langkah ini mencakup upaya mitigasi, adaptasi, dan pengelolaan risiko bencana berbasis

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

komunitas serta teknologi. Peningkatan ketahanan wilayah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah yang rentan. Program ini harus berfokus pada integrasi kebijakan lingkungan dengan tata ruang wilayah yang mendukung perlindungan ekosistem.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, penguatan ketahanan wilayah menjadi pilar penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti deforestasi, eksploitasi tambang berlebihan, atau perusakan habitat, sering kali menjadi faktor utama yang memperburuk kerentanan wilayah terhadap bencana. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan menjadi esensial untuk menciptakan sistem sosial-ekologis yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan bencana harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Kegagalan untuk mengimplementasikan pengelolaan yang berwawasan lingkungan akan memicu kerusakan lebih lanjut pada ekosistem, memperbesar risiko bencana, dan mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Sebaliknya, dengan memperkuat sinergi antara perlindungan lingkungan dan ketahanan wilayah, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan produktif. Transformasi ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, dan komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana melalui upaya mitigasi bencana.
2) peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan dan pelayanan penanggulangan bencana.

MISI 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul, sehat, cerdas dan berjiwa Pancasila ialah sebagai berikut:

a. pemerataan pendidikan yang berkualitas dan pemenuhan kompetensi standar angkatan kerja lokal

Pemerataan pendidikan yang berkualitas dan pemenuhan kompetensi standar angkatan kerja lokal adalah fondasi utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Dalam era persaingan global, ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang setara, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan vokasi, menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif sekaligus berintegritas.

Pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

yang dinamis dan berbasis teknologi. Ini mencakup kurikulum yang relevan dengan tren industri, pelatihan keterampilan teknis, serta penguatan kemampuan *soft skills* seperti kreativitas, kepemimpinan, dan komunikasi. Di sisi lain, perhatian terhadap nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam pendidikan formal dan informal, untuk membentuk individu yang tidak hanya terampil secara profesional tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai warga negara yang bermoral dan beretika.

Namun, tantangan terbesar adalah mengatasi disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Tanpa intervensi yang signifikan, daerah tertinggal akan terus menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar berkualitas, dan program pelatihan kerja yang memadai. Pemerintah harus mengambil langkah proaktif dengan mengalokasikan sumber daya secara adil, menyediakan insentif bagi tenaga pengajar di daerah terpencil, dan menggandeng sektor swasta untuk mendukung program peningkatan kompetensi lokal. Dengan pendekatan ini, pemerataan pendidikan yang berkualitas akan menjadi katalisator untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya produktif secara ekonomi tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
2) peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) serta vokasi yang berkualitas.

b. pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan

Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan adalah komponen esensial dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Tanpa akses yang setara terhadap layanan kesehatan, banyak individu, terutama di daerah terpencil, terjebak dalam siklus kemiskinan dan penyakit yang menghambat potensi mereka. Oleh karena itu, memastikan bahwa pelayanan dasar kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi manusia yang sehat dan berkualitas.

Dalam konteks pemerataan, tantangan utama adalah mengatasi disparitas akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil yang minim infrastruktur dan tenaga kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan klinik, harus disertai dengan distribusi tenaga medis yang memadai dan peningkatan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, program kesehatan preventif, seperti imunisasi, gizi anak, dan edukasi tentang kebersihan, perlu diperkuat untuk mengurangi beban penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Ini juga harus diintegrasikan dengan upaya promosi pola hidup sehat yang berbasis komunitas.

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga perlu mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan kesehatan secara holistik, masyarakat dapat berkembang menjadi individu yang cerdas dan berdaya saing tanpa kehilangan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong dan solidaritas sosial. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bersinergi untuk memastikan bahwa kesehatan tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi motor penggerak bagi terwujudnya generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan *stunting* dan kecukupan gizi;
2) peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna.

c. penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya

Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Dalam era globalisasi yang semakin mendominasi, identitas budaya sering kali terancam oleh arus homogenisasi nilai-nilai asing. Oleh karena itu, penguatan karakter berbasis budaya lokal menjadi penting untuk menjaga integritas masyarakat sekaligus memberikan fondasi moral yang kokoh bagi setiap individu. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan kejujuran yang terintegrasi dalam budaya Indonesia dapat menjadi pedoman hidup yang relevan di tengah kompleksitas tantangan modern.

Namun, mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kehidupan sehari-hari bukan tanpa tantangan. Masyarakat sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi dan mengejar kemajuan modern. Oleh karena itu, pendekatan kritis yang diperlukan adalah membangun narasi bahwa budaya lokal tidak bertentangan dengan kemajuan, melainkan dapat menjadi basis inovasi dan keunggulan kompetitif. Misalnya, penguatan norma kebersamaan dalam budaya lokal dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan berbasis komunitas, seperti koperasi atau inisiatif sosial lainnya, yang mendukung kesejahteraan kolektif.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk karakter yang berakar pada nilai-nilai budaya sekaligus relevan dengan tantangan zaman. Sistem pendidikan harus mengintegrasikan pengajaran nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal dengan pendekatan yang interaktif dan kontekstual. Ini tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual tetapi juga berwawasan kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya mampu bersaing secara global tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan yaitu optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia.

d. Penguatan Kelembagaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pemerintahan Daerah

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pemerintahan daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Pemerintahan daerah yang responsif gender dan inklusif sosial mampu memberikan ruang yang setara bagi semua individu, tanpa memandang gender, disabilitas, atau latar belakang sosial. Kesetaraan dan inklusi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, tetapi juga

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Namun, di tingkat implementasi, kelembagaan kesetaraan gender dan inklusi sosial sering kali hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan pada kebijakan publik. Misalnya, meskipun ada regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan atau kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaannya masih sering terbatas pada simbolisme. Pendekatan kritis yang diperlukan adalah memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, seperti alokasi anggaran responsif gender, aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas, dan perlindungan hak-hak kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan daerah.

Lebih jauh, penguatan kelembagaan ini harus melibatkan pendidikan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan inklusi perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan nonformal yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Aparatur pemerintah juga harus dilatih untuk memahami dan menerapkan kebijakan yang inklusif dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan inklusi ke dalam struktur kelembagaan, pemerintahan daerah dapat menciptakan ekosistem yang memberdayakan semua individu untuk berkontribusi secara optimal, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang unggul dan berkeadilan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan yaitu, pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.

e. penuntasan kemiskinan dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan perlindungan sosial adaptif integratif.

Penuntasan kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial adaptif integratif di tingkat daerah merupakan strategi inovatif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. DTSEN memberikan basis data terpadu dan akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini, kebijakan tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan yang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat perubahan ekonomi, bencana, atau krisis lainnya. Pendekatan ini selaras dengan nilai keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Namun, keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga serta tingkat akurasi data yang dikelola. Data yang diperbarui secara berkala harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, integrasi program perlindungan sosial perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup bantuan langsung, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, agar kebijakan tidak parsial dan kehilangan efektivitasnya.

Sejalan dengan itu, strategi penanggulangan kemiskinan juga harus mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menekankan empat langkah utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan serta keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor. Untuk mengoordinasikan langkah tersebut, di Kabupaten Boyolali dibentuk Tim

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan. TKPK berperan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program penanggulangan kemiskinan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya. Strategi dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan:

1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2) peningkatan pendapatan masyarakat;
3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
4) pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative;
5) pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

MISI 4. Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, Dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Demokratis, Dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif ialah sebagai berikut:

a. implementasi reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel

Implementasi reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel menjadi fondasi utama terciptanya pemerintahan yang efektif, terpercaya, dan demokratis. Reformasi ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga menuntut perubahan mentalitas, budaya kerja, dan tata kelola aparatur agar lebih profesional, berintegritas, responsif, dan inovatif. Akuntabilitas memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menekan potensi korupsi sekaligus membangun kepercayaan publik. Meski menghadapi tantangan seperti resistensi perubahan, korupsi sistemik, dan keterbatasan SDM, langkah berani diperlukan melalui evaluasi kinerja yang transparan, pelibatan masyarakat, serta peningkatan kompetensi aparatur. Dalam kerangka ini, reformasi birokrasi juga menjadi landasan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, pemanfaatan dana transfer pusat dan provinsi, penguatan BUMD, kemitraan CSR, dan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga tata kelola yang transparan mampu memperkuat daya saing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan teknologi informasi;
2) penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
3) pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

b. Pemenuhan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses dan terjangkau

Pemenuhan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses, dan terjangkau adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan. Untuk mencapai hal tersebut, inovasi dalam pelayanan publik harus didasarkan pada pemanfaatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

teknologi digital, penguatan sistem data terintegrasi, serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Namun, inovasi ini harus tetap memperhatikan inklusivitas, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses ke teknologi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan. Dalam kerangka ini, peningkatan kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting agar inovasi layanan dapat berjalan efektif, karena stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses layanan dengan nyaman dan tanpa hambatan.

Dalam kaitannya dengan mewujudkan pemerintahan demokratis, pelayanan publik yang mudah diakses dan terjangkau menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Aparatur yang profesional, berintegritas, responsif, dan inovatif memainkan peran vital dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pelayanan yang adil. Responsivitas mencakup kemampuan untuk mendengar dan menanggapi masukan masyarakat dengan cepat, sementara integritas memastikan bahwa pelayanan bebas dari praktik korupsi dan nepotisme. Kondusivitas wilayah yang terjaga juga memperkuat responsivitas ini, karena dengan lingkungan yang aman dan tertib, komunikasi serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif. Tanpa kedua hal tersebut, inovasi pelayanan publik hanya akan menjadi proyek kosmetik yang tidak menyelesaikan akar masalah, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kesenjangan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai “Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik”.

MISI 5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif, berbasis potensi unggulan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan ialah sebagai berikut:

a. Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif

Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan inovatif merupakan fondasi strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan, yang berakar pada partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal, harus dikembangkan bukan hanya sebagai simbol pemberdayaan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat transformasi ekonomi kerakyatan dari sektor informal dan tradisional menjadi entitas yang mampu bersaing di pasar modern, seperti keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan pemasaran. Untuk itu, daya saing ekonomi daerah perlu ditopang oleh inovasi dan kreativitas dalam produksi dan pemasaran produk lokal, penguatan kapasitas pelaku melalui pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan produk bernilai tambah. Pendekatan pembangunan juga harus lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal, serta membuka ruang partisipasi masyarakat agar tumbuh rasa kepemilikan yang mampu menjamin keberlanjutan ekonomi kerakyatan.

Sejalan dengan itu, penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Boyolali. Pemerintah daerah telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UMKM,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

yang tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk regional dan internasional. Selain itu, pengembangan pariwisata religi seperti Wisata Edukasi Religi "Qolbu" Boyolali yang merupakan miniatur Ka'bah menjadi wujud diversifikasi sektor ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung. Kehadiran ekosistem halal dalam produk dan jasa pariwisata tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi dengan menciptakan nilai tambah, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang usaha baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran;
2) pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai *local advantage*.

b. pengembangan hilirisasi sektor unggulan berbasis kawasan ekonomi

Pengembangan hilirisasi sektor unggulan berbasis kawasan ekonomi adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hilirisasi mendorong transformasi dari eksploitasi bahan mentah ke proses pengolahan dan produksi yang lebih kompleks, sehingga menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi. Dengan memanfaatkan kawasan ekonomi sebagai pusat kegiatan industri terpadu, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi, dan kolaborasi antara berbagai pelaku ekonomi. Namun, implementasi ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks meningkatkan daya saing ekonomi daerah, hilirisasi berbasis kawasan ekonomi harus berorientasi pada inklusivitas dan ekonomi kerakyatan. Artinya, sektor unggulan yang dikembangkan harus sejalan dengan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM dan petani, dilibatkan secara aktif dalam rantai nilai industri yang terbentuk. Hal ini bisa dilakukan melalui program pelatihan, akses ke pembiayaan, dan penyediaan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan kapasitas mereka. Jika tidak, hilirisasi berisiko memperluas kesenjangan ekonomi dan merusak kearifan lokal.

Keberhasilan hilirisasi juga bergantung pada kemampuan daerah untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Hambatan seperti lemahnya regulasi, kurangnya investasi, atau keterbatasan teknologi sering menjadi penghalang utama dalam proses ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan lembaga riset untuk membangun kawasan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan. Pengembangan hilirisasi sektor unggulan bukan hanya tentang meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih adil, di mana seluruh masyarakat daerah dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1) penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
2) peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millenial;
3) peningkatan kemandirian, produktivitas dan pemberdayaan perdesaan dalam pembangunan ekonomi wilayah.

3.2.1.3 Kebijakan Pertahapan Pembangunan

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara bertahap, diperlukan penjabaran arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke dalam kebijakan tahunan yang lebih operasional. Kebijakan pertahapan pembangunan disusun sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menguraikan strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan secara terstruktur berdasarkan dinamika isu strategis daerah, visi–misi kepala daerah, dan kemampuan pendanaan yang tersedia. Penahapan ini menjadi pedoman utama dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sehingga kesinambungan antara dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan tetap terjaga. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan adaptif terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal daerah.

A. TAHAP I (2026): Penyediaan infrastruktur terintegratif dan pengembangan kawasan ekonomi untuk mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional

Tabel III. 7
Tahap I RPJMD 2025-2029

TAHAP I (2026)	
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRATIF DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG JAWA TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
	Mengembangkan infrastruktur pengolahan limbah yang terpadu dan ramah lingkungan
Peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa	Meningkatkan kapasitas angkut sampah secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan, dan keberlanjutan kawasan lindung.
Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang terkendali	Melindungi ekosistem hutan dan spesies yang dilindungi dalam penyusunan kebijakan penggunaan lahan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP I (2026)	
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRATIF DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG JAWA TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) serta vokasi yang berkualitas	Menjamin distribusi tenaga pendidik secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kurang terjangkau
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Mewujudkan pemerataan infrastruktur kesehatan yang layak dan berstandar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna	Menjamin distribusi tenaga kesehatan yang merata dan proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah
Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif	Meningkatkan pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak melalui kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh.
Pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia	Mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial universal yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	
Peningkatan pendapatan masyarakat	
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Menyediakan layanan jaminan sosial yang komprehensif untuk meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan Pengawasan Proses Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi ASN, dan Manajemen Kinerja yang Berbasis Sistem Merit dengan Teknologi Informasi	Meningkatkan pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional berbasis digital.
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja berbasis sistem merit dan teknologi informasi.
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	Mendorong penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik melalui sistem merit
Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran	Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengolahan produk kerajinan lokal.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP I (2026)	
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRATIF DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG JAWA TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millenial	Membangun sistem logistik pangan lokal yang efisien dan terintegrasi.
Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai *local advantage*	Memberikan dukungan fasilitas dan pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) lokal

Sumber: Data Diolah, 2025

B. TAHAP II (2027): Peningkatan daya saing SDM yang sejahtera untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah

Tabel III. 8
Tahap II RPJMD 2025-2029

TAHAP II (2027): PENINGKATAN DAYA SAING SDM YANG SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI SYARIAH	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan	Menyusun rencana terpadu transportasi publik, logistik, dan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan wilayah.
	Memulai peningkatan kualitas sarana transportasi publik dan jaringan jalan lokal.
	Memperkuat penyediaan layanan dasar di wilayah dengan aksesibilitas rendah.
Peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa	Memperluas penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) hingga ke tingkat desa.
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan	Mengoptimalkan pemanfaatan aliran sungai dan waduk untuk mendukung ketahanan air dan kemandirian pangan.
Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang terkendali	Memperkuat pengawasan dan regulasi aktivitas di sekitar daerah aliran sungai untuk menjaga ekosistem dan kualitas lingkungan
Penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Meningkatkan pelayanan pendidikan menuju masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) serta vokasi yang berkualitas	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas berkelanjutan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP II (2027): PENINGKATAN DAYA SAING SDM YANG SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI SYARIAH	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas menuju masyarakat yang sehat dan produktif.
Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis terkini
Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif	Mengurangi angka kemiskinan melalui perluasan akses terhadap program perlindungan sosial.
Pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia	Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar melalui posyandu lansia dan pendampingan keluarga
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan
Peningkatan pendapatan masyarakat	
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	
Peningkatan Pengawasan Proses Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi ASN, dan Manajemen Kinerja yang Berbasis Sistem Merit dengan Teknologi Informasi	Mendorong penguatan pemanfaatan teknologi, riset, dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan daerah.
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Mendukung pelaksanaan proyek-proyek penelitian dan pengembangan dalam rangka memperkuat kapasitas inovasi daerah
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik untuk memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik
Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran	Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan koperasi daerah
Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millenial	Mendorong adopsi teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan.
	Mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan agroforestri.
	Mengembangkan varietas unggul melalui perbaikan dan pengelolaan tanah secara efektif.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP II (2027): PENINGKATAN DAYA SAING SDM YANG SEJAHTERA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI SYARIAH	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
	Meningkatkan kompetensi petani melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
	Mendorong regenerasi petani milenial melalui program khusus untuk keterlibatan generasi muda di sektor pertanian.
	Mewujudkan sistem pertanian yang mendukung ekonomi berkelanjutan dan ketahanan pangan jangka panjang.
	Mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal untuk mendukung ketahanan pangan.
	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan akses pembiayaan.
Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai *local advantage*	Membangun sistem logistik pangan lokal yang efisien dan terintegrasi

Sumber: Data Diolah, 2025

C. TAHAP III (2028): Perluasan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif berbasis hilirisasi SDA, ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan

Tabel III. 9
Tahap III RPJMD 2025-2029

TAHAP III (2028): PERLUASAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TUMBUH DAN INKLUSIF BERBASIS HILIRISASI SDA, EKONOMI KERAKYATAN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Boyolali	Memperluas akses layanan listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah pelosok.
Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai	Menyediakan perumahan yang memastikan seluruh penduduk memperoleh rumah layak huni dengan prasarana dan sarana utilitas yang memadai
Peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa	Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sampah berkelanjutan
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan	Meningkatkan akses energi terjangkau bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP III (2028): PERLUASAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TUMBUH DAN INKLUSIF BERBASIS HILIRISASI SDA, EKONOMI KERAKYATAN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang terkendali	Mengembangkan infrastruktur energi yang mendukung ketersediaan listrik secara merata dan berkelanjutan
Penguatan pengelolaan, kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Menguatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong kesadaran partisipatif
Peningkatan keterjangkauan pendidikan masyarakat pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) serta vokasi yang berkualitas	Memperluas akses dan beasiswa pendidikan STEAM
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Mengoptimalkan layanan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna untuk menjamin akses layanan medis bagi seluruh warga.
Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna	Memastikan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau
Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif	Menjamin akses yang adil terhadap perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
Pemenuhan hak-hak lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia	
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	
Peningkatan pendapatan masyarakat	
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	
Peningkatan Pengawasan Proses Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi ASN, dan Manajemen Kinerja yang Berbasis Sistem Merit dengan Teknologi Informasi	Memperkuat manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Mengembangkan sistem pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi aparatur berbasis kompetensi
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pencegahan korupsi
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung di kawasan wisata.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP III (2028): PERLUASAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TUMBUH DAN INKLUSIF BERBASIS HILIRISASI SDA, EKONOMI KERAKYATAN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam permodalan dan pemasaran	Memperkuat tata kelola destinasi wisata melalui peran serta masyarakat.
Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan secara berkelanjutan serta regenerasi petani millenial	Memperluas akses pasar dan rantai distribusi hasil pertanian melalui digitalisasi pemasaran serta kemitraan dengan sektor swasta dan koperasi
Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkelanjutan, dan berkualitas, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai local advantage	Mendorong pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata sebagai pelaku utama pariwisata

Sumber: Data Diolah, 2025

D. TAHAP IV (2029): Perwujudan kemajuan pembangunan Boyolali yang berdaya saing dan ramah investasi menuju kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera

Tabel III. 10
Tahap IV RPJMD 2025-2029

TAHAP IV (2029): PERWUJUDAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN BOYOLALI YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Boyolali	Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai dasar pengembangan wilayah.
Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai	Menyediakan perumahan yang memastikan seluruh penduduk memperoleh rumah layak huni dengan prasarana dan sarana utilitas yang memadai
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Meningkatkan informasi, edukasi, dan literasi kebencanaan kepada masyarakat.
	Mengembangkan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kebencanaan melalui sosialisasi, pelatihan masyarakat, dan pemanfaatan media lokal
Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan serta penanggulangan dan tanggap bencana	Memperkuat sistem komunikasi risiko dan respons cepat bencana berbasis komunitas
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Meningkatnya program pemenuhan gizi terpadu melalui layanan kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP IV (2029): PERWUJUDAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN BOYOLALI YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna	Memperluas cakupan layanan kesehatan digital (telemedicine) dan memperkuat jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan
Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	Mendorong pembangunan kebudayaan sebagai upaya pelestarian warisan budaya lokal dan penguatan identitas masyarakat.
	Mengembangkan kreativitas dan ekspresi seni sebagai bagian dari penguatan karakter dan nilai budaya masyarakat.
	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang positif.
	Mengoptimalkan peran keluarga dalam pembentukan karakter dan pembangunan manusia yang berbudaya
Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
	Memperluas partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik	Meningkatkan digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan memperluas akses pelayanan kepada masyarakat
Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya lokal dengan prinsip ramah lingkungan
Peningkatan kemandirian, produktivitas dan pemberdayaan perdesaan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Mengembangkan desa produktif berbasis potensi lokal melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan akses pembiayaan

Sumber: Data Diolah, 2025

E. TAHAP V (2030): Perwujudan Kabupaten Boyolali yang Maju, Nyaman dihuni, Berdaya Saing, Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

Tabel III. 11

Tahap V RPJMD 2025-2029

TAHAP V (2030): PERWUJUDAN KABUPATEN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING, RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Boyolali	Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi) ke seluruh pelosok Kabupaten Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

TAHAP V (2030): PERWUJUDAN KABUPATEN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING, RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045	
ARAH KEBIJAKAN	**KEBIJAKAN PERTAHAPAN**
Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai	Menyediakan perumahan yang memastikan seluruh penduduk memperoleh rumah layak huni dengan prasarana dan sarana utilitas yang memadai
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Memperkuat sistem penanggulangan dan tanggap bencana dengan membentuk tim siaga desa/kelurahan
Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan serta penanggulangan dan tanggap bencana	Menyusun perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana untuk menciptakan wilayah yang aman dan tangguh terhadap bencana
Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi	Memantapkan pemberian makan bergizi gratis secara menyeluruh
Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna	Mengembangkan layanan kesehatan paripurna berbasis digital dengan rekam medis elektronik terpadu
Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera melalui pemenuhan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keharmonisan keluarga.
	Mendorong pemenuhan hak anak melalui peningkatan perlindungan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan anak.
Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Meningkatkan inklusi sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik	Melaksanakan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memperkuat kualitas layanan publik berbasis digital.
	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem SPBE
Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal	Menerapkan program akselerasi sertifikasi ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan investasi.
	Menyesuaikan kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri dan pasar kerja yang berkembang.
	Menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk sektor strategis, termasuk pertanian, industri, dan pariwisata

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.2 Program Unggulan Bupati dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Boyolali 2025-2029

A. program unggulan dan prioritas

Visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029 adalah "Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing, dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah; (2) mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (3) mewujudkan sumber daya manusia unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila; (4) mewujudkan pemerintahan demokratis dengan aparatur profesional, berintegritas, responsif dan inovatif; serta (5) meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif, berbasis potensi unggulan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 17 Program Unggulan berikut merupakan instrumen implementasi visi dan misi tersebut, sekaligus menjawab isu strategis pembangunan daerah Boyolali.

1. peningkatan reformasi birokrasi Boyolali

   Reformasi birokrasi merupakan pondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten Boyolali masih menghadapi tantangan berupa pelayanan publik dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya efisien, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Dengan perubahan zaman yang menuntut kecepatan dan transparansi, reformasi birokrasi mutlak dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan. Melalui program kepegawaian daerah, pengelolaan administrasi kependudukan, komunikasi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya meningkatkan kualitas aparatur sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan publik dan meminimalkan praktik korupsi. Kebijakan ini selaras dengan Misi 4: Mewujudkan pemerintahan demokratis dengan aparatur profesional, berintegritas, responsif, dan inovatif. Reformasi birokrasi bukan hanya memperbaiki citra pemerintah, tetapi juga menjadi daya tarik investasi karena menjamin kepastian hukum dan kecepatan layanan.

2. ramah investasi, kemudahan perizinan, dan insentif sektor usaha

   Potensi ekonomi Kabupaten Boyolali meliputi pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Namun, daya tarik investasi masih menghadapi kendala seperti proses perizinan, pembiayaan, dan keterbatasan insentif. Banyak pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum, kecepatan layanan, dan dukungan fiskal agar usahanya berkembang. Untuk itu, Kabupaten Boyolali harus menjadi daerah yang ramah investasi. Melalui program pelayanan penanaman modal, pemerintah menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kepastian hukum. Digitalisasi layanan perizinan juga dihadirkan untuk meminimalisasi birokrasi yang berbelit. Investor strategis yang mendukung hilirisasi produk lokal diberi prioritas karena mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi rakyat. Program ini mendukung Misi 5: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang inklusif, berbasis potensi unggulan, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dengan investasi yang berkembang, lapangan kerja baru tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan Kabupaten Boyolali semakin berdaya saing serta ramah investasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3. percepatan pembangunan infrastruktur desa melalui Bankeu Desa
   Desa merupakan ujung tombak pembangunan Kabupaten Boyolali, namun masih banyak yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Jalan yang belum mantap, rigasi yang masih perlu penguatan agar lebih merata dan efektif, serta minimnya sarana sosial-ekonomi menjadi penghambat utama pengembangan potensi desa. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi desa tidak akan optimal. Melalui bantuan keuangan desa (Bankeu Desa), pemerintah mempercepat pembangunan desa. Pendekatan partisipatif diterapkan agar pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa memiliki warga terhadap hasil pembangunan. Program ini sejalan dengan Misi 1: Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Infrastruktur desa yang baik akan membuka akses pasar, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.
4. menaikkan penghasilan tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa
   Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat penghasilan tetap yang diterima belum sepenuhnya seimbang dengan beban kerja yang dijalankan. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi kerja dan kualitas pelayanan. Pemerintah Kabupaten Boyolali mendorong peningkatan penghasilan tetap (Siltap) sebagai bentuk penghargaan dan jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa. Dengan kepastian ekonomi yang lebih baik, perangkat desa diharapkan mampu meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Program ini juga diperkuat dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Kebijakan ini mendukung Misi 4 dan Misi 5, yakni pemerintahan yang profesional dan ekonomi kerakyatan yang kuat. Dengan perangkat desa yang sejahtera dan berintegritas, pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat, pelayanan publik lebih berkualitas, dan Kabupaten Boyolali tumbuh menuju kabupaten yang lebih Maju.
5. beasiswa 1 Desa 2 sarjana bagi warga miskin
   Pendidikan tinggi masih menjadi kendala bagi warga miskin di Kabupaten Boyolali. Tingginya biaya pendidikan tinggi berpotensi menghambat generasi muda dalam memperoleh kesempatan melanjutkan studi. Akibatnya, potensi sumber daya manusia belum tergali secara optimal. Program Beasiswa 1 Desa 2 Sarjana hadir untuk menjamin setiap desa memiliki minimal dua lulusan sarjana dari keluarga tidak mampu. Program ini mampu mencetak agen perubahan dari desa untuk desa. Kebijakan ini sejalan dengan Misi 3: Mewujudkan SDM unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Dengan akses pendidikan tinggi yang lebih luas, Kabupaten Boyolali dapat memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi kesenjangan pendidikan, serta mencetak generasi emas yang siap bersaing di era Indonesia Emas 2045.
6. tuntas rumah layak huni
   Rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, di Kabupaten Boyolali masih dijumpai masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi belum memenuhi standar kelayakan huni. Situasi ini berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas hidup rendah, serta menciptakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Melalui program Tuntas Rumah Layak Huni, pemerintah daerah memberikan bantuan renovasi, perbaikan rumah, dan pembangunan rumah baru bagi keluarga miskin. Tidak hanya memperhatikan aspek fisik,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

program ini juga memperhatikan ketersediaan sanitasi, akses air bersih, serta lingkungan permukiman yang sehat. Program ini sejalan dengan Misi 1 dan Misi 2: pembangunan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah rumah layak huni, Kabupaten Boyolali akan semakin Nyaman Dihuni, masyarakat lebih sehat dan produktif, serta kesenjangan sosial dapat ditekan.

7. pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan tertinggal infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih
   Wilayah perbatasan dan tertinggal di Kabupaten Boyolali masih menghadapi keterbatasan akses jalan, sarana air bersih, serta infrastruktur pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan potensi ekonomi sekaligus mengakses layanan publik secara optimal. Melalui program pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, transportasi publik, dan distribusi perdagangan, pemerintah ingin memperkuat konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan infrastruktur yang merata akan mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan hasil pertanian, dan membuka akses pasar. Kabupaten Boyolali akan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan memiliki fondasi pembangunan ekonomi yang kuat.
8. pupuk gampang, insentif PBB, hilirisasi produk pertanian dan peternakan
   Pertanian dan peternakan adalah sektor unggulan Kabupaten Boyolali. Namun, petani masih mengalami keterbatasan akses terhadap pupuk, serta hilirisasi produk yang belum sepenuhnya berkembang. Kondisi ini membuat pendapatan petani dan peternak tidak maksimal. Melalui program ini, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk terjangkau, memberikan insentif PBB untuk meringankan beban petani, serta memperkuat hilirisasi produk pertanian dan peternakan. Hilirisasi diarahkan agar produk lokal memiliki nilai tambah tinggi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Kebijakan ini mendukung Misi 5: daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan. Dengan pupuk mudah diakses, beban pajak ringan, dan hilirisasi produk berjalan baik, Kabupaten Boyolali akan kokoh sebagai lumbung pangan dan pusat agribisnis.
9. pemberdayaan perempuan melalui insentif Kader PKK Desa insentif Kader Posyandu dan bantuan organisasi keagamaan
   Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali ditempuh dengan memperkuat peran kelembagaan di tingkat desa, meningkatkan kiprah kader perempuan dalam pembangunan, serta memperluas dukungan terhadap kegiatan sosial-keagamaan. Insentif bagi para kader dan dukungan bagi organisasi kemasyarakatan menjadi bentuk nyata apresiasi pemerintah daerah sekaligus dorongan agar partisipasi masyarakat semakin aktif. Dengan penguatan ini, diharapkan tumbuh kelembagaan masyarakat yang lebih berdaya, pelayanan kesehatan dasar yang lebih merata, serta kehidupan sosial yang harmonis. Pada akhirnya, langkah tersebut tidak hanya mempertegas komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
10. penciptaan generasi unggul Boyolali
    Generasi muda adalah penentu masa depan Kabupaten Boyolali. Namun, masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan, rendahnya minat baca, keterbatasan akses olahraga, dan kurangnya ruang kreatif bagi pemuda. Hal

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

ini berpotensi menghambat lahirnya SDM unggul. Program ini mencakup pembinaan perpustakaan, pengelolaan pendidikan, pengembangan kepemudaan, pembinaan olahraga, serta penguatan kepramukaan. Selain itu, pendidikan politik dan penguatan etika demokrasi juga diberikan agar generasi muda memahami pentingnya peran mereka dalam kehidupan berbangsa. Kebijakan ini sejalan dengan Misi 3: SDM unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Dengan meningkatnya literasi, kreativitas, serta prestasi pemuda dan olahraga, Kabupaten Boyolali akan melahirkan generasi emas yang siap menghadapi tantangan global.

11. layanan Puskesmas rawat inap dan ambulans gratis 24 Jam
    Akses kesehatan yang cepat dan merata merupakan kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Boyolali. Namun, sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya untuk layanan rawat inap dan transportasi medis darurat. Kondisi ini sering menyulitkan masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil, karena mereka harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan medis. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali meluncurkan layanan puskesmas rawat inap di berbagai kecamatan serta ambulans gratis 24 jam. Program ini memastikan masyarakat memperoleh akses transportasi medis cepat dan aman, terutama pada situasi gawat darurat. Program ini mendukung perwujudan SDM unggul, sehat, cerdas, dan berjiwa Pancasila, serta pemerintahan responsif dan inovatif.
12. layanan pemadam kebakaran di 5 eks Kawedanan
    Kebakaran menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun fasilitas umum di Kabupaten Boyolali. Namun demikian, upaya penanggulangan kebakaran masih terkendala oleh terbatasnya unit pemadam, jangkauan layanan yang belum sepenuhnya merata, serta respon yang belum optimal terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan. Akibatnya, kebakaran yang seharusnya bisa ditangani dengan cepat kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali menghadirkan layanan pemadam kebakaran di lima eks kawedanan. Penempatan unit di eks kawedanan dipilih agar jangkauan layanan lebih merata, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dapat segera mendapatkan pertolongan saat terjadi musibah kebakaran. Dengan adanya layanan pemadam kebakaran yang terdistribusi di lima eks kawedanan, rasa aman masyarakat meningkat, risiko kerugian akibat bencana berkurang, dan Kabupaten Boyolali semakin layak disebut sebagai daerah yang nyaman dihuni serta tangguh menghadapi berbagai ancaman.
13. pemberian insentif guru madin, TPA, PAUD dan sekolah minggu serta pelatihan santri
    Guru non-formal seperti guru Madin, TPA, PAUD, dan sekolah minggu memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda Kabupaten Boyolali. Kendati demikian, kesejahteraan mereka masih belum memadai sehingga membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah. Melalui program ini, pemerintah memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan, serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan, moral, dan sosial. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga disediakan agar metode pembelajaran adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan kesejahteraan guru meningkat, kualitas pendidikan non-formal semakin baik, sehingga Kabupaten

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Boyolali mampu membangun generasi yang berakhlak, bermoral, dan berkarakter kuat.

14. KUR tanpa bunga untuk difabel, kelompok tani dan UMKM hingga 10 Juta
    Akses modal menjadi tantangan besar bagi UMKM, kelompok tani, dan difabel. Tingginya bunga pinjaman membuat mereka sulit mengembangkan usaha. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga hingga Rp10 juta memberikan kesempatan modal usaha ringan bagi kelompok sasaran. Kebijakan ini mendukung peningkatan ekonomi, memperkuat kelompok tani, Kabupaten Boyolali akan semakin inklusif, ramah investasi, serta mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
15. *creative hub* dan pariwisata berbasis industri kreatif event budaya berskala internasional
    Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar dalam pariwisata dan budaya. Namun, industri kreatif dan event budaya masih membutuhkan dukungan wadah serta strategi promosi internasional. Program ini mengembangkan *creative hub* sebagai pusat kolaborasi seniman, pelaku usaha kreatif, dan komunitas lokal. Pemerintah juga meningkatkan daya tarik destinasi wisata, menggelar event budaya, dan memperkuat ekonomi kreatif. Kemajuan industri kreatif dan pariwisata membawa dampak positif bagi Kabupaten Boyolali, antara lain meningkatnya popularitas daerah, bertambahnya devisa, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
16. pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di setiap kecamatan
    Permasalahan sampah merupakan tantangan penting yang berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, volume sampah juga cenderung bertambah. Apabila tidak dikelola secara tepat, kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan banjir. Untuk itu, melalui program ini dikembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di setiap kecamatan. Upaya edukasi mengenai pemilahan sampah, daur ulang, hingga pengembangan bank sampah terus digalakkan guna menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan pengelolaan sampah yang lebih baik, diharapkan Kabupaten Boyolali menjadi daerah yang semakin nyaman dihuni, lingkungan lebih bersih, serta kualitas hidup masyarakat meningkat.
17. dukungan maksimal program makan bergizi gratis Pemerintah Prabowo-Gibran melalui peningkatan ketahanan pangan
    Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi perhatian penting di Kabupaten Boyolali. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Pemerintah Pusat memerlukan dukungan daerah agar dapat berjalan secara efektif. Melalui penguatan program farmasi, pengawasan pangan, serta distribusi bahan makanan bergizi, Kabupaten Boyolali berkomitmen mendukung program tersebut dengan memastikan ketersediaan pangan sehat bagi anak sekolah maupun masyarakat. Dengan ketahanan pangan yang terjaga dan kualitas gizi masyarakat yang semakin baik, Kabupaten Boyolali diharapkan mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

17 Program Unggulan Bupati Boyolali dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Bupati terpilih mengusung serangkaian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Bupati terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan 17 Program Unggulan yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel III. 12
Program Unggulan Bupati dan Program Prioritas Kabupaten Boyolali

17 Program Unggulan	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
Peningkatan Reformasi Birokrasi Boyolali	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
		Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
	Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
Ramah Investasi Kemudahan Perizinan dan Insentif Sektor Usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Bankeu Desa	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
	Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menaikkan Penghasilan Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Beasiswa 1 Desa 2 Sarjana Bagi Warga Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
Tuntas Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dan Tertinggal Infrastruktur Pertanian dan Ketersediaan Air Bersih	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubugan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

17 Program Unggulan	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
Pupuk Gampang, Insentif Pbb Hilirisasi Produk Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peternakan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan
Pemberdayaan Perempuan Melalui Insentif Kader Pkk Desa Insentif Kader Posyandu Dan Bantuan Organisasi Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat
Penciptaan Generasi Unggul Boyolali	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pemuda Dan Olahraga
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
Layanan Puskesmas Rawat Inap dan Ambulans Gratis 24 Jam	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
Layanan Pemadam Kebakaran di 5 Eks Kawedanan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Keamanan dan Ketertiban
Pemberian Insentif Guru Madin, Tpa, Paud Sekolah Minggu Serta Pelatihan Santri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat
KUR Tanpa Bunga Untuk Difabel, Kelompok Tani dan UMKM Hingga 10 Juta	Program Pengembangan UMKM	Koperasi dan UMKM
Creative Hub dan Pariwisata Berbasis Industri Kreatif Event Budaya Berskala Internasional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan di Setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
Dukungan Maksimal Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Prabowo-Gibran Melalui Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program prioritas merupakan bentuk operasional dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratik untuk mendukung pencapaian outcome prioritas. Program ini tidak berdiri sejajar dengan tujuan dan sasaran, tetapi berada pada posisi hierarkis yang lebih teknis sebagai turunan langsung dari outcome, yang sebelumnya diturunkan dari sasaran dan tujuan. Konsep penyusunan *outcome* dalam hal ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya *outcome* sebagai jembatan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program. Dengan demikian, program prioritas disusun berdasarkan arah capaian yang telah ditetapkan melalui *outcome* prioritas, memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki dasar yang jelas, terarah, dan terukur. Penyusunan program prioritas yang berbasis pada *outcome* juga memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih fokus, efisien, dan mudah dievaluasi, serta menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program prioritas disusun adalah sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 13
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Visi Kabupaten Boyolali Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045 Misi 1 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Misi 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan Misi 3 Mewujudkan Sumberdaya Manusia Unggul, Sehat, Cerdas dan Berjiwa Pancasila Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan Demokratis, dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif	**1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan**			Indikator Tujuan 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		1.1. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		Indikator Sasaran 1.1. Indeks Infrastruktur	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Pengolahan Air Minum yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
		1.2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Masyarakat		Indikator Sasaran 1.2. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	
			Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah yang aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		1.3. Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, Berkualitas, dan Merata dalam Upaya Mendukung Pengembangan Wilayah		Indikator Sasaran 1.3. Indeks Desa	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa
		1.4. Penguatan Wilayah yang Tangguh dan Responsif Terhadap Bencana		Indikator sasaran 1.4 Indeks Risiko Bencana	
			Tercapainya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
		1.5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indikator Sasaran 1.5 Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola	Program Pengelolaan Persampahan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Misi 5 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan		1.6. Penguatan Kualitas Produksi Sektor Unggulan dan Hilirisasi Produk Daerah Berbasis Investasi yang Berkeadilan		Indikator Sasaran 1.6. Pertumbuhan Investasi	
			Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Ikan	Produksi Pengolahan Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Cakupan Luas LP2B yang Dipertahankan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (KU)	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	
			Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pembinaan Pra NKV Atau NKV Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Mengajukan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Penanganan Penyakit Hewan yang Terlaporkan	
		1.7 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan		Indikator Sasaran 1.7. Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali terhadap Provinsi Jawa Tengah	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		1.8 Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Berkualitas		Indikator Sasaran 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat			Indikator Tujuan 2. Tingkat Kemiskinan	
		2.1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		Indikator Sasaran 2.1. Indeks Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	
				Angka Partisipasi Kasar SMP	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
				Angka Partisipasi APK PAUD	
				Persentase Kepala Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Kejar Paket A	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	SKM Layanan Perpustakaan	
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya Prestasi Atlet	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Meningkatnya Kelompok Kesenian yang Mendapat Pembinaan	Persentase Kelompok Seni yang Dibina	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase PKK Aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		2.2. Penguatan Pembangunan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender		Indikator Sasaran 2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	
				Indikator Sasaran 2.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		2.3. Pemenuhan Kehidupan Masyarakat Yang Layak Dan Berkeadilan		Indikator Sasaran 2.3. Rasio Gini	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Terkelolanya Bantuan Keuangan, Dana Darurat Mendesak dan DBH dengan Baik	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana Darurat dan Mendesak dan DBH	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pangan Aman	Persentase Pangan yang Aman	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Kesejahteraan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Boyolali			Indikator Tujuan 3. Indeks Reformasi Birokrasi	
		3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pemberdayaan Kinerja ASN yang Adaptif dan Profesional		Indikator Sasaran 3.1. Indeks Pelayanan Publik	
				Indikator Sasaran 3.2 Nilai SAKIP	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Data Kependudukan yang Diupdate	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Tersalurkannya Pengaduan oleh Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah	Presentase Aduan Masyarakat yang Tersalurkan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya Pelaksanaan Riset dan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi Sesuai Target	Program Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya capaian indikator program	Persentase capaian indikator program	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Ketercapaian Penerimaan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Paham Tentang Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan	Program Kepegawaian Daerah
			Terkelolanya Bantuan Keuangan, Dana Darurat Mendesak dan DBH dengan Baik	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana Darurat Dan Mendesak dan DBH	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Persentase Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	
			Meningkatnya Perumusan Kebijakan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD Sesuai Standar	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.3 Dukungan Kabupaten Boyolali terhadap Arahan Nasional dan Provinsi

3.2.3.1 Arahan Nasional

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN 2025-2029

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, RPJMN 2025–2029 menetapkan dua arah pengembangan strategis wilayah yang melibatkan Kabupaten Boyolali, yaitu Kawasan Pengembangan Industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo, Kawasan Konservasi Taman Nasional Merbabu–Merapi, dan Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi arah ini sejalan dengan fokus pembangunan daerah yang tercermin dalam 17 Program Unggulan Bupati Boyolali.

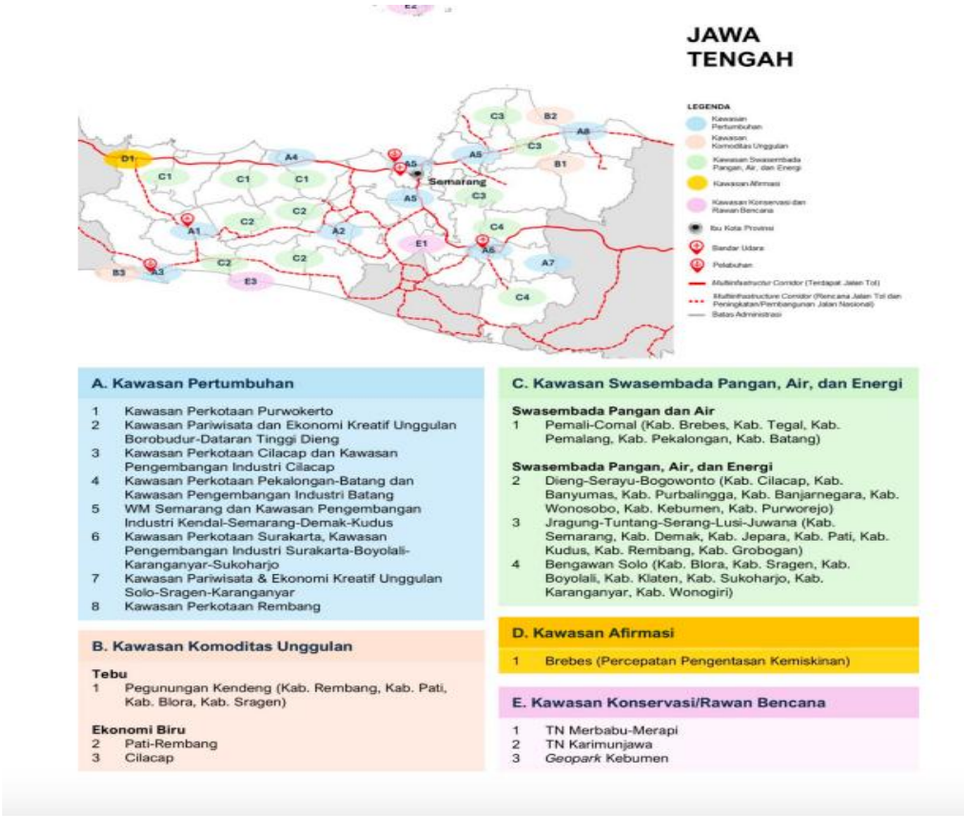

Gambar III. 5
Pengembangan Kawasan di Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Data Diolah, 2025)

Dukungan terhadap pengembangan kawasan industri tercermin kuat dalam program seperti Ramah Investasi, Kemudahan Perizinan dan Insentif Sektor Usaha, Creative Hub dan Pariwisata Berbasis Industri Kreatif, serta Pupuk Gampang, Insentif PBB Hilirisasi Produk Pertanian dan Peternakan. Program-program ini sejalan dengan penguatan sektor industri makanan dan minuman, tekstil, serta pengolahan hasil pertanian yang menjadi prioritas nasional di koridor industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo. 17 Program Unggulan ini diperkuat melalui penataan kawasan usaha, dukungan UMKM, dan peningkatan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan yang mendukung aktivitas logistik dan investasi.

Sementara itu, keterkaitan dengan Kawasan Konservasi TN Merbabu–Merapi tampak dalam program-program seperti Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan di Setiap Kecamatan, Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dan Tertinggal, dan Layanan Pemadam Kebakaran di 5 (lima) Eks Kawedanan. Program ini relevan dengan kebijakan perlindungan dan pemulihan ekosistem, peningkatan mitigasi bencana, serta penguatan layanan peringatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dini, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat seperti Beasiswa 1 Desa 2 Sarjana, Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, dan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda mendukung aspek sosial dan resiliensi masyarakat yang menjadi perhatian utama pengembangan bioekonomi dan fungsi sosial kawasan hutan.

Lebih jauh lagi, 17 Program Unggulan seperti Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Ketersediaan Air Bersih, Program Desa Mandiri Energi, serta KUR Tanpa Bunga untuk Petani dan UMKM menunjukkan kesesuaian yang erat dengan arah pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Hal ini mendukung upaya ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, keberlanjutan sistem irigasi, dan pengelolaan sumber daya air, serta transformasi menuju energi terbarukan berbasis komunitas, seperti biogas dan tenaga surya. Strategi ini memperkuat daya dukung wilayah dalam menyediakan kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, 17 Program Unggulan Bupati Boyolali tidak hanya menjawab kebutuhan lokal tetapi juga telah disusun selaras dengan prioritas pembangunan wilayah dalam RPJMN. Keselarasan ini memperkuat posisi strategis Kabupaten Boyolali sebagai simpul penting dalam pengembangan ekonomi industri, ketahanan lingkungan hidup, dan swasembada sumber daya strategis di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Berikut merupakan penjabaran terkait tabel dukungan program daerah Kabupaten Boyolali terhadap *highlight* intervensi RPJMN.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 14

Tabel Dukungan Program Daerah Kabupaten Boyolali terhadap *Highlight* Intervensi RPJMN

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN		DUKUNGAN DAERAH	
Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	**Kebijakan**	**PROGRAM NOMENKLATUR**	**PERANGKAT DAERAH**
Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (tekstil dan alas kaki)	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:		
	a. Pemantapan jaringan jalan nasional pada ruas Boyolali–Surakarta–Palur–Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi, di antaranya:	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Penghubung antar jalan nasional (Boyolali–Klaten).	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, berupa:		
	a. Peningkatan kualitas dan kapasitas industri melalui:		
	- Mendorong inovasi pengembangan produk baru;	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
	- Diferensiasi dan modifikasi produk agar lebih bervariasi dan memenuhi kebutuhan pasar (pengembangan ekspor produk unggulan utamanya tekstil dan alas kaki);	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	- Pendampingan/fasilitasi pengembangan sistem manajemen kualitas (fasilitasi sertifikasi SNI dan merek);	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	- Pengembangan SDM melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan yang relevan, serta magang di balai pelatihan;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	- Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja dengan membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	- Mendorong pengembangan PLUT sebagai “Rumah Siap Kerja” untuk melatih SDM yang mendukung sektor industri;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	- Pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis potensi lokal; dan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	- Magang peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM sektor susu.	Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	b. Peningkatan investasi dan akses pasar, melalui:		
	- Mendorong realisasi investasi dengan penyederhanaan proses perizinan usaha dan pemberian insentif investasi;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	- Mendorong UMKM untuk mempromosikan produk dan meningkatkan akses ke pasar nasional dan internasional;	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN		DUKUNGAN DAERAH	
Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	**Kebijakan**	**PROGRAM NOMENKLATUR**	**PERANGKAT DAERAH**
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja
	- Mendorong kemitraan antara industri besar dan kecil, serta antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha;	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	- Penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri dan perlindungan kekayaan intelektual.	Program Riset Dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu).	1. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:		
	a. Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;		
	- Penyediaan benih/bibit berkualitas;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan
	- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan
	- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
	- Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	b. Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (*urban farming*).	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN
	Rehabilitasi Daerah Irigasi DI Klego (Boyolali)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	d. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian, berupa:	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian melalui rehabilitasi embung		
	2. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN		DUKUNGAN DAERAH	
Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	**Kebijakan**	**PROGRAM NOMENKLATUR**	**PERANGKAT DAERAH**
	a. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi,	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	- Fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;	Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	- Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan
	- Pemasaran dan branding produk;	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	- Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	- Diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); dan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan
	- Fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	b. Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, dan swasta.	Program Pemberdayaan Umkm	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	c. Pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis potensi lokal.	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	d. Penguatan kelembagaan koperasi bagi kelompok masyarakat produktif.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	e. Magang peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM sektor susu.	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	f. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	g. Pemberdayaan aspek pemasaran koperasi dan aspek produksi koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.3.2 Arahan Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dukungan Kabupaten Boyolali pada arahan ini sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 15

Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN BOYOLALI	
Program Strategis Nasional	**Proyek/Kegiatan**	**Program (Nomenklatur)**	**Urusan**
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Pengendalian Jumlah Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana
	Sekolah rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Pembangunan 3 (tiga) juta rumah	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
Ketahanan pangan	Pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
	Makan bergizi gratis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
Perluasan akses pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan ekonomi	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal

Sumber : Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

3.2.3.3.1 Dukungan Kabupaten Boyolali terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 35 Program Delegasi yang menjadi prioritas pembangunan lintas kabupaten/kota. Kabupaten Boyolali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam program prioritas daerah serta inisiatif unggulan Bupati Boyolali. Dukungan ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur desa, peningkatan layanan sosial dan kesehatan, hingga reformasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan inklusif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 16
Dukungan Kabupaten Boyolali terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

FOKUS	NO	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM NOMENKLATUR	Perangkat Daerah
Ekonomi	1	Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Sport Center dengan Memanfaatkan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	2	Pengembangan 10 (sepuluh) Titik Aglomerasi Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru.	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	3	Ekosistem Ekonomi Syariah: Penguatan Regulasi dan Pengembangan Wisata Ramah Muslim.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	4	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM (Satu RT Satu Kelompok UMKM).	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	5	Hilirisasi Produk Unggulan dengan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

FOKUS	NO	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM NOMENKLATUR	Perangkat Daerah
		Semangat Ekonomi Hijau.	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	6	Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Pengembangan Perekonomian Desa.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	7	Bumdes Berdaya: Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha Bagi Setiap Bumdes di Jawa Tengah.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Infrastruktur	8	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program "Satu KK Satu Rumah Layak Huni", Pengembangan Pusat Rekreasi, Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi Menjadi 30% Kewenangan Kabupaten/Kota dan 20% Desa.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	9	Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas: dibangun di Setiap Kecamatan.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	10	Pengembangan Wisata: Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru.	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	11	Desa Mandiri Energi: Pengembangan Bio Gas, Hydro, dan Tenaga Surya.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Pelayanan Kesehatan: Layanan Kesehatan Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Layanan Kesehatan di Setiap Desa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Lingkungan	13	Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

FOKUS	NO	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM NOMENKLATUR	Perangkat Daerah
		Baik di Kawasan Perkotaan Maupun Wilayah Desa.		
	14	Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk Penanganan Bencana Berbasis Kelompok Masyarakat.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	15	Monitoring dan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Teknologi Seluruh Wilayah Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Sumber Daya Manusia	16	Sekolah Unggulan: Mendorong Sekolah Unggulan di Setiap Kecamatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	17	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan Berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa, Bekerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, Dan KPK).	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPKPSDM
	18	Cek Kesehatan Gratis.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	19	Pelindungan dan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Fakir Miskin.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	20	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan Tambak Ikan Nila.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan
	21	Pengembangan Sekolah Inklusif di Setiap Kecamatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	22	Peningkatan Pelatihan Sertifikasi Juru Sembelih Halal dan Standar Rumah Pemotongan Hewan.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	23	Pelatihan Pengolahan dan Manajemen Keuangan Bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	24	Pelatihan 1.000 (seribu) Konten Kreator Desa Wisata.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
	25	Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan Melalui Penguatan Regulasi, Pendidikan, dan Pelatihan.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

FOKUS	NO	35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI	PROGRAM NOMENKLATUR	Perangkat Daerah
	26	Mendorong Penguatan Forum Kerukunan Antarumat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	27	Penyediaan Minimal 1 (satu) Dokter dan 1 (satu) Bidan di Setiap Puskesmas Pembantu.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	28	Peningkatan Kualitas Hidup Lansia.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	29	Taruna Karya Mandiri: Program Kartu Zilenial untuk Membuka Lapangan Kerja.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	30	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Tata Kelola Pemerintahan	31	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance Melalui Peningkatan Kesejahteraan Serta Profesionalitas ASN dan Perangkat Desa.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	32	Bantuan Hukum Bagi Guru, Disabilitas, Perempuan, dan Anak.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
	33	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI, dan P-IRT Secara Gratis.	Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	34	Desa Maju dan Berdaya: Pengembangan Lumbung Kesejahteraan, Produk Unggulan Go Internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	35	Peningkatan Operasional Kader Posyandu.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Dengan memadukan 35 Program Delegasi Provinsi, program prioritas sektoral, serta inovasi khas daerah, Kabupaten Boyolali membuktikan peran aktifnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten tidak hanya mendorong efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakat terakomodasi melalui kebijakan dan layanan yang lebih responsif. Ke depan, keberhasilan implementasi program-program ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan.

3.2.3.3.2 Keselarasan Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029. Salah satu fokus utama provinsi adalah Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yang menekankan pada pengembangan koridor industri serta penguatan sektor pertanian dan hilirisasinya. Pemerintah Kabupaten Boyolali merespon kebijakan ini dengan merumuskan sejumlah 17 Program Unggulan Bupati yang secara langsung mendukung penguatan sektor industri, pertanian, serta pengembangan UMKM dan SDM lokal. Keselarasan program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel III. 17
Keselarasan Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029

Program Strategis Provinsi	Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur	OPD
Pengembangan Industri Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Klaten (Tekstil dan Alas Kaki)	Pemantapan Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM Industri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Pengembangan PLUT dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Promosi dan Perluasan Pasar Produk Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Sektor Pertanian (Padi, Ubi, Susu, Perikanan, Tebu)	Fasilitasi Alsintan dan Bibit Unggul	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Kampung Tematik Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program Strategis Provinsi	Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur	OPD
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kewilayahan
	Rehabilitasi Irigasi (DI Klego)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Hilirisasi Produk Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Promosi Produk Agro dan Penguatan Koperasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
	Urban Farming dan Pengelolaan Air Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari pemetaan di atas, terlihat jelas bahwa 17 Program Unggulan Bupati Boyolali dirancang secara sinergis dengan arah kebijakan strategis Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Keselarasan ini tidak hanya memperkuat kontribusi Boyolali dalam pengembangan kawasan industri tekstil dan agroindustri, tetapi juga memperkokoh peran daerah dalam menjawab isu ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, dan hilirisasi produk lokal. Dengan fondasi kolaboratif ini, Kabupaten Boyolali diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan regional secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2.3.4 Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Boyolali

Kebijakan kewilayahan kecamatan di Kabupaten Boyolali merupakan instrumen strategis yang memegang peranan penting dalam perencanaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan secara spesifik dan terarah sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan pengembangan wilayah yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Prinsip kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal di setiap kecamatan dengan kepentingan pembangunan kabupaten secara umum.

Dalam perumusan kebijakan kewilayahan, berbagai faktor menjadi pertimbangan, seperti potensi sumber daya alam dan manusia, tantangan pembangunan yang dihadapi, kondisi fisik dan sosial wilayah, serta posisi dan fungsi strategis tiap kecamatan dalam struktur ruang Kabupaten Boyolali. Ruang lingkup kebijakan meliputi penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan keterhubungan antarwilayah, pengelolaan kawasan rawan bencana, hingga pelestarian kawasan lindung dan budidaya. Dengan demikian, arah pembangunan setiap kecamatan dapat dirancang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Berikut pembagian peruntukan wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel III. 18
Arah Rencana Pola Ruang Peruntukan Budidaya dan Lindung

Kecamatan	LINDUNG	BUDIDAYA	
	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Boyolali	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Perkebunan Rakyat	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan
		Kawasan Transportasi	
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
Banyudono	Badan Air Kawasan Cagar Budaya	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan
		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Ampel	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Karanggede	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	· Kawasan Hutan Produksi Terbatas
			· Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Simo	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kecamatan	LINDUNG	BUDIDAYA	
	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
Mojosongo	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya
		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
Ngemplak	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan
		Kawasan Transportasi	
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
Cepogo	Badan Air Kawasan Konservasi (Taman Nasional Gunung Merapi) Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Perkebunan Rakyat	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Kemusu	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	· Kawasan Hutan Produksi Terbatas
			· Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Klego	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	· Kawasan Hutan Produksi Terbatas
			· Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Musuk	Badan Air Kawasan Konservasi (Taman Nasional Gunung Merapi)	Badan Jalan	
		Kawasan Perkebunan Rakyat	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kecamatan	LINDUNG	BUDIDAYA	
	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Sawit	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan
		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Teras	Badan Air	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Andong	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Gladagsari	Badan Air Kawasan Konservasi (Taman Nasional Gunung Merbabu)	Badan Jalan	
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Juwangi	Badan Air	Hutan Produksi	· Hutan Produksi Terbatas
			· Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Tanaman Pangan
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Nogosari	Badan Air	Badan Jalan	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kecamatan	LINDUNG	BUDIDAYA	
	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Jenis
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Tanaman Pangan
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
Sambi	Badan Air	Kawasan Pertanian	· Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Selo	Badan Air Kawasan Konservasi (Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu)	Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Tamansari	Badan Air	Kawasan Perkebunan	Kawasan Perkebunan Rakyat
	Kawasan Konservasi (Pelestarian Alam Taman Nasional Gunung Merapi)	Kawasan Pertanian	· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Wonosamodro	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	· Kawasan Tanaman Pangan
			· Kawasan Hortikultura
			· Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	· Kawasan Permukiman Perkotaan
			· Kawasan Permukiman Perdesaan
Wonosegoro	Badan Air	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi terbatas
			Kawasan Hutan Produksi Tetap
		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan
			Kawasan Hortikultura
			Kawasan Perkebunan
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri
		Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan
			Kawasan Permukiman Perdesaan

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.3.4.1 Kecamatan Boyolali

Kecamatan Boyolali adalah salah satu dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang membentuk wilayah administratif Kabupaten Boyolali, sekaligus menjadi pusat kegiatan utama yang memegang peranan strategis sehingga menjadikan Kecamatan Boyolali berperan sebagai simpul utama interaksi antarwilayah, baik dalam lingkup internal kabupaten maupun dengan wilayah sekitarnya.

Secara geografis, Kecamatan Boyolali memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Ampel dan wilayah Kabupaten Semarang; di sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Mojosongo; di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Musuk; sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cepogo. Letak ini memberikan keuntungan strategis, karena Kecamatan Boyolali berada di jalur konektivitas antarwilayah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pelayanan di Kabupaten Boyolali dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Dalam rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Boyolali ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Penetapan ini menempatkan Kecamatan Boyolali pada posisi strategis dalam sistem perkotaan kabupaten, sekaligus memberikan peran penting dalam mendukung konektivitas dan integrasi wilayah di tingkat yang lebih luas.

Sebagai PKW, Kecamatan Boyolali tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan skala kabupaten, tetapi juga memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melayani kegiatan dengan lingkup yang lebih besar, yaitu skala provinsi maupun beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang menjadi simpul interaksi antarwilayah.

Selain itu, peran Kecamatan Boyolali sebagai PKW mendorong pengembangan infrastruktur strategis, seperti jaringan jalan utama, terminal tipe A, pusat distribusi logistik, serta fasilitas publik berskala besar yang dapat menunjang aktivitas ekonomi dan sosial.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Boyolali, sebagaimana diatur dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, disusun untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai perannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pola ruang ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

3. rencana kawasan strategis

Rencana kawasan strategis di Kecamatan Boyolali diarahkan untuk memaksimalkan potensi wilayah sekaligus mengelola fungsi-fungsi penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian, sosial, budaya, dan lingkungan di tingkat kabupaten maupun regional.

Dalam konteks perencanaan ruang di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Boyolali merupakan merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dan masuk

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

ke dalam perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. KSK ini meliputi:

a. koridor kawasan Subosukawonosraten
b. kwasan Solo-Selo-Borobudur
c. kawasan agropolitan

Kecamatan Boyolali, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan bagian dari kawasan strategis Kabupaten Boyolali, memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedudukannya yang strategis menjadikannya sebagai pusat pelayanan skala kabupaten sekaligus simpul konektivitas bagi aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Peran ini diperkuat dengan fungsi Kecamatan Boyolali sebagai penggerak utama interaksi antarwilayah, baik di dalam lingkup Kabupaten Boyolali maupun dengan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Semarang dan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kecamatan Boyolali diarahkan untuk memaksimalkan potensi sektoral yang dimilikinya. Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan industri tetap menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh lapisan masyarakat, mengingat Boyolali juga dikenal sebagai sentra produksi pangan dan komoditas hortikultura.

Alokasi pola ruang di Kecamatan Boyolali dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Dengan pengaturan pola ruang yang terencana ini, Kecamatan Boyolali diharapkan dapat mengembangkan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada sektor jasa dan perdagangan, tetapi juga memperkuat basis sektor produktif seperti pertanian dan industri, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3.4.2 Kecamatan Banyudono

Kecamatan Banyudono adalah salah satu dari wilayah administratif di Kabupaten Boyolali yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Secara geografis, kecamatan ini berada di antara koordinat 110º39'58" – 110º43'34" Bujur Timur dan 7º30'23" – 7º33'56" Lintang Selatan. Berdasarkan batas administratifnya, Kecamatan Banyudono di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambi dan Kecamatan Ngemplak, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sawit, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teras.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Banyudono menempati peran penting sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang memiliki fungsi strategis untuk melayani berbagai aktivitas dengan cakupan skala kabupaten atau lintas beberapa kecamatan. Kedudukan ini menjadikan Banyudono sebagai simpul pelayanan dan distribusi, baik dalam bidang perdagangan, jasa, maupun aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Sebagai PKL, kecamatan ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar, memfasilitasi interaksi antar-wilayah, serta memperkuat konektivitas antara pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Banyudono diarahkan untuk mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sekaligus memperkuat fungsi wilayah sebagai simpul pelayanan skala kabupaten. Pola ruang wilayah ini dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

Pada kawasan peruntukan lindung, diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan badan air yang berfungsi sebagai sumber daya lingkungan penting bagi ketersediaan air bersih, pengendalian banjir, dan penyangga ekosistem. Sementara itu, kawasan peruntukan budidaya mencakup berbagai zona pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

3. rencana kawasan strategis

Rencana kawasan strategis Kecamatan Banyudono disusun sebagai upaya mengoptimalkan potensi wilayah yang memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun ekonomi. Kecamatan ini berada pada jalur penghubung antardaerah yang memudahkan akses transportasi dan distribusi barang serta jasa.

Telah diamanatkan di dalam raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025 – 2045 bahwa dalam perencanaan kawasan strategis kabupaten, Kecamatan Banyudono masuk menjadi salah satu bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berupa:

a. koridor kawasan Subosukawonosraten yang bertujuan mendukung pengembangan WP Subosukawonosraten.
b. kawasan Solo-Selo-Borobudur yang bertujuan mendukung kawasan pariwisata.
c. kawasan minapolitan yang bertujuan mewujudkan kawasan minapolitan yang berkelanjutan.

Kecamatan Banyudono memiliki kedudukan strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali. Secara spasial, Banyudono menjadi simpul penghubung dalam Koridor Kawasan Subosukawonosraten yang mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, serta berada dalam jalur pengembangan Kawasan Solo–Selo–Borobudur yang menjadi koridor pariwisata dan budaya berskala nasional. Selain itu, Banyudono juga berperan dalam mendukung Kawasan Minapolitan melalui penguatan sektor perikanan dan pengolahan hasil perairan. Keterpaduan peran ini menjadikan Banyudono sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang memiliki konektivitas kuat dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan Kecamatan Banyudono lebih difokuskan pada pengembangan:

a. sektor pertanian dan pangan – fokus pada penguatan produksi tanaman pangan sebagai penopang ketahanan pangan daerah dan dukungan terhadap Kawasan Minapolitan.
b. sektor industri dan perdagangan – pengembangan industri kecil-menengah, sentra produksi, serta perdagangan dan jasa yang memanfaatkan posisi strategis Banyudono dalam koridor ekonomi Subosukawonosraten.
c. sektor pariwisata dan budaya – pelestarian kawasan cagar budaya serta pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan konektivitas dengan Kawasan Solo–Selo–Borobudur.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3.2.3.4.3 Kecamatan Ampel

Kecamatan Ampel merupakan salah satu wilayah kecamatan terluar di Kabupaten Boyolali yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Secara geografis, Kecamatan Ampel terletak diantara 110º 26' 21" hingga 110º 36' 17" Bujur Timur dan 7º 24' 8" hingga 7º 29' 53" Lintang Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar

Secara administrasi, Kecamatan Ampel berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang di bagian utara dan timur, Kecamatan Boyolali dan Cepogo di bagian Selatan, serta dan Kecamatan Gladagsari di bagian barat.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Ampel memiliki kedudukan strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Posisi ini menempatkan Ampel sebagai salah satu kawasan perkotaan yang berperan penting dalam mendukung sistem pelayanan permukiman di wilayah Kabupaten Boyolali. Sebagai PKL, Kecamatan Ampel berfungsi melayani berbagai aktivitas dan kebutuhan masyarakat dengan cakupan pelayanan yang menjangkau skala kabupaten hingga lintas kecamatan. Fungsi ini mencakup penyediaan pusat pelayanan perdagangan, jasa, pemerintahan, sosial, serta fasilitas umum lainnya yang mampu menjadi simpul pertumbuhan dan penggerak ekonomi wilayah sekitarnya. Kedudukan tersebut juga mengharuskan pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang terintegrasi, sehingga Ampel dapat berperan optimal sebagai pusat pelayanan dan pengembangan wilayah sesuai arah kebijakan pembangunan.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Ampel diarahkan untuk mendukung fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sekaligus memperkuat perannya dalam jaringan pelayanan permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali. Pola ruang wilayah ini dirancang dengan mengintegrasikan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara seimbang, guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Ampel ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki peran strategis dalam memperkuat jaringan pusat pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Lokasinya yang berada pada jalur penghubung antara kawasan perkotaan Boyolali dengan wilayah pegunungan Selo menjadikan Ampel sebagai simpul penting dalam distribusi barang, jasa, serta pergerakan penduduk antarwilayah.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Ampel juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pengembangan sebagai Kawasan Agropolitan. Penetapan ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Ditinjau berdasarkan kedudukannya sebagai PKL di Kabupaten Boyolali serta alokasi pola ruang di wilayah Kecamatan Ampel, pengembangan wilayah difokuskan pada sektor:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

a. Sektor pertanian terpadu – mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan produktivitas, serta pengolahan pascapanen.
b. sektor industri pengolahan hasil pertanian – penguatan industri kecil dan menengah yang berbasis pada komoditas unggulan lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk.
c. sektor perdagangan dan jasa pendukung – pengembangan sentra distribusi, logistik, dan layanan pendukung yang memanfaatkan posisi strategis Ampel dalam koridor transportasi.

3.2.3.4.4 Kecamatan Karanggede

Kecamatan Karanggede merupakan salahsatu wilayah kecamatan yang berada di bagian utara Kabupaten Boyolali. Secara geografis, Kecamatan Karanggede terletak diantara 110º37'29" - 110º41'21" Bujur Timur dan 7º19'18" - 7º24'54" Lintang Selatan. Ditinjau dari sisi adaministrasi wilayah, Kecamatan Karanggede berbatasan dengan Kecamatan Wonosegoro di bagian utara, Kecamatan Klego di sebelah timur, Kecamatan Simo di bagian Selatan, serta Kabupaten Semarang di sebelah barat.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Karanggede memiliki kedudukan strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Status ini menempatkan Karanggede sebagai salah satu kawasan perkotaan yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas untuk mendukung aktivitas masyarakat dengan cakupan skala kabupaten maupun lintas kecamatan.

Sebagai PKL, Kecamatan Karanggede diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan yang mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti pusat perdagangan dan jasa, pelayanan pemerintahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kedudukan tersebut juga memberikan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendukung pemerataan pembangunan.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Karanggede diarahkan untuk mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani aktivitas berskala kabupaten maupun lintas kecamatan. Penataan ruang wilayah ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi.

Ditinjau berdasarkan kedudukannya sebagai PKL di Kabupaten Boyolali serta alokasi pola ruang di wilayah Kecamatan Karanggede, pengembangan wilayah difokuskan pada Sektor Pertanian Terpadu dengan penguatan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan teknologi modern, diversifikasi komoditas, dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil. Selain itu, konsentrasi pengembangan juga dapat dilakukan pada Sektor Industri Pengolahan dengan melakukan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis hasil pertanian dan kehutanan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

3.2.3.4.5 Kecamatan Simo

Kecamatan Simo merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Boyolali yang memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun administratif.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat antara 110°37'7" hingga 110°44'31" Bujur Timur dan 7°24'9" hingga 7°27'4" Lintang Selatan. Adapun secara administratif, Kecamatan Simo berbatasan dengan Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego di sebelah utara, Kecamatan Andong dan Kecamatan Nogosari di sebelah timur, Kecamatan Sambi di sebelah selatan, serta berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Semarang di sebelah barat. Posisi ini menjadikan Simo sebagai simpul penghubung antar-kecamatan di Kabupaten Boyolali sekaligus sebagai pintu gerbang interaksi wilayah dengan kabupaten lain.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Kecamatan Simo, sebagaimana tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, ditetapkan memiliki kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Status ini menempatkan Simo sebagai salah satu kawasan perkotaan yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan bagi kegiatan berskala kabupaten maupun lintas kecamatan. Dengan peran tersebut, Kecamatan Simo diarahkan untuk menjadi pusat distribusi pelayanan, perdagangan, dan aktivitas sosial-ekonomi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya serta memperkuat keterkaitan antar-pusat pertumbuhan di Kabupaten Boyolali.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Simo diarahkan untuk mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani aktivitas berskala kabupaten maupun lintas kecamatan. Penataan ruang di wilayah ini mengedepankan keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

3. rencana kawasan strategis

Berdasarkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Simo ditetapkan memiliki peran strategis dalam penataan ruang kabupaten, khususnya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Kecamatan ini termasuk dalam kategori Kawasan Peningkatan Ketahanan Pangan, yang diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Perwujudan kawasan ini dikembangkan dengan:

a. peningkatan produktivitas pertanian;
b. perlindungan KP2B;
c. peningkatan infrastruktur pertanian; dan
d. peningkatan pengolahan komoditas pertanian.

Berdasarkan tinjauan alokasi pola ruang serta rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di wilayah Kecamatan Simo, telaah mengenai arah pengembangan wilayah difokuskan pada sektor pertanian. Pengembangan ini dilakukan dengan penguatan terutama tanaman pangan dan hortikultura, dengan penerapan teknologi budidaya modern, pengelolaan berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pascapanen.

3.2.3.4.6 Kecamatan Mojosongo

Kecamatan Mojosongo merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali. Secara geografis, kecamatan ini terletak pada koordinat antara 110°39'49" hingga 110°39'13" Bujur Timur dan 7°29'29" hingga 7°35'18" Lintang Selatan. Lokasi ini menempatkan Mojosongo pada jalur strategis yang menghubungkan wilayah Kabupaten Boyolali dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Secara administratif, Kecamatan Mojosongo berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang di sebelah utara, Kecamatan Teras di sebelah timur, Kabupaten Klaten di sebelah selatan, serta Kecamatan Musuk dan Kecamatan Boyolali di sebelah barat.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Mojosongo ditetapkan memiliki kedudukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kedudukan ini menempatkan Mojosongo sebagai pusat permukiman yang berfungsi memberikan layanan terhadap berbagai aktivitas masyarakat pada skala kecamatan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan umum.

Sebagai PPK, Mojosongo diarahkan untuk memperkuat perannya dalam menyediakan fasilitas pelayanan dasar, pusat perdagangan dan jasa lokal, serta sarana pendukung pemerintahan yang efektif dan terintegrasi. Penetapan ini sejalan dengan posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali sekaligus simpul konektivitas antarwilayah di sekitarnya.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Mojosongo diarahkan untuk mendukung kedudukannya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali. Penataan ruang di wilayah ini difokuskan pada pengembangan kawasan permukiman, fasilitas pelayanan, pusat kegiatan pemerintahan, serta kawasan pendukung ekonomi dan infrastruktur, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi lahan. Komposisi polar uang di wilayah Kecamatan Mojosongo terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. rencana kawasan strategis

Berdasarkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Mojosongo termasuk dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Penetapan ini mencakup dua lingkup pengembangan utama, yaitu:

a. koridor kawasan Subosukawonosraten

   Kecamatan Mojosongo menjadi bagian dari koridor strategis ini yang diarahkan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Perkotaan (WP) Subosukawonosraten. Peran Mojosongo dalam koridor ini mencakup penguatan pusat layanan pemerintahan, penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat ekonomi dan jasa yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan lain di dalam koridor.

b. kawasan Solo–Selo–Borobudur

   Sebagai bagian dari jalur strategis pariwisata kabupaten, Mojosongo berfungsi mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan kualitas infrastruktur akses, penyediaan fasilitas pendukung wisata, serta promosi kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Posisi Mojosongo yang berada di jalur penghubung utama menjadikannya sebagai pintu masuk strategis menuju kawasan wisata pegunungan Selo dan kawasan lintas kabupaten lainnya dalam koridor ini.

Arah pengembangan wilayah Kecamatan Mojosongo diarahkan untuk mengoptimalkan perannya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali. Fokus pengembangan wilayah meliputi penguatan fungsi pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas infrastruktur

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

perkotaan, dan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, serta sektor pendukung pariwisata.

Dengan arah pengembangan ini, Kecamatan Mojosongo diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, simpul ekonomi, sekaligus pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Boyolali.

3.2.3.4.7 Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Boyolali yang memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun administratif. Secara geografis, kecamatan ini terletak pada koordinat antara 110°42′40,04″ hingga 110°48′59,36″ Bujur Timur dan 7°28′55,63″ hingga 7°32′05,29″ Lintang Selatan.

Secara administratif, Kecamatan Ngemplak berbatasan dengan Kecamatan Nogosari di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah timur, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan, serta Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sambi di sebelah barat. Letak ini menempatkan Ngemplak sebagai kawasan penghubung penting antara wilayah perkotaan di Kota Surakarta dan daerah sekitarnya di Kabupaten Boyolali.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Dalam Raperda Kabupaten Boyolali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2045, Kecamatan Ngemplak ditetapkan memiliki kedudukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kedudukan ini menempatkan Kecamatan Ngemplak sebagai pusat permukiman yang memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan terhadap berbagai aktivitas masyarakat pada skala kecamatan, termasuk pelayanan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan fasilitas umum.

Peran ini tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan dasar bagi penduduk setempat, tetapi juga mengoptimalkan potensi Ngemplak sebagai simpul strategis yang menghubungkan wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta dan kabupaten/kota di sekitarnya. Dengan demikian, pengembangan Kecamatan Ngemplak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah sekitarnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi lokal.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Ngemplak sebagaimana diatur dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya, dengan mempertimbangkan potensi wilayah, keberlanjutan lingkungan, serta kebutuhan pengembangan ekonomi lokal. Pada fungsi lindung, alokasi ruang difokuskan pada kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, pada fungsi budidaya, pola ruang Kecamatan Ngemplak mencakup pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, serta fasilitas umum dan sosial.

3. rencana kawasan strategis

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Ngemplak ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Koridor Kawasan Subosukawonosraten. Penetapan ini didasarkan pada posisi strategis Ngemplak yang berada dalam jalur konektivitas utama menuju Kota Surakarta dan wilayah perkotaan di sekitarnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pengembangan Koridor Kawasan Subosukawonosraten di Kecamatan Ngemplak diarahkan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Perkotaan (WP) Subosukawonosraten. Upaya ini mencakup penguatan peran Ngemplak sebagai simpul perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan utilitas, serta pengembangan fasilitas publik yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian mengenai struktur dan polar uang serta rencana kawasan strategis Kecamatan Ngemplak di atas, maka Fokus pengembangan diarahkan pada:

a. industri dan manufaktur melalui optimalisasi kawasan industri berdaya saing.
b. transportasi dan logistik yang memanfaatkan bandara sebagai pusat distribusi barang dan mobilitas orang.
c. perdagangan dan jasa yang tumbuh dari peningkatan arus ekonomi kawasan.

Pengembangan sektor-sektor tersebut didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan keterhubungan antarwilayah, serta pengelolaan ruang yang seimbang antara fungsi ekonomi, permukiman, dan pelestarian lingkungan.

3.2.3.4.8 Kecamatan Cepogo

Kecamatan Cepogo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali yang memiliki karakter geografis khas, karena sebagian areanya berada di lereng Gunung Merapi. Posisi geografisnya terletak pada koordinat 110°25'45" hingga 110°34'31" Bujur Timur dan 7°28'6" hingga 7°32'36" Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Cepogo berbatasan dengan Kecamatan Gladagsari dan Ampel di sebelah utara, Kecamatan Selo di sebelah barat, Kecamatan Boyolali di sebelah timur, serta Kecamatan Musuk di sebelah selatan.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Dalam konteks tata ruang Kabupaten Boyolali, Kecamatan Cepogo ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yakni pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan pada skala kecamatan. Penetapan ini tercantum dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, yang mengarahkan pengembangan Cepogo untuk memperkuat perannya sebagai pusat aktivitas pelayanan masyarakat, perdagangan lokal, dan penghubung antarwilayah di sekitarnya.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Cepogo dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai potensi wilayah lereng Gunung Merapi serta fungsi pelayanan kawasan. Pola ruang di Kecamatan Cepogo diklasifikasikan ke dalam fungsi lindung dan fungsi budidaya.

3. rencana kawasan strategis

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Cepogo memiliki peran penting dalam pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. Dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, wilayah ini termasuk dalam dua kawasan prioritas, yaitu Kawasan Solo–Selo–Borobudur yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berskala nasional, serta Kawasan Agropolitan yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dari hulu hingga hilir.

Selain itu, dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Cepogo menjadi bagian dari kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi–Merbabu. Peran ini mengharuskan adanya pengelolaan ruang yang seimbang antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, melalui penguatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kawasan lindung, konservasi, dan pengembangan pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan kedudukan Kecamatan Cepogo sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan penetapannya dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 sebagai bagian dari beberapa Kawasan Strategis Kabupaten, arah pengembangan wilayah ini diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sekaligus mendukung kebijakan pembangunan kabupaten. Dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, serta fungsi lindung dan budidaya yang dimilikinya, maka sektor utama pengembangan wilayah Kecamatan Cepogo dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) sektor pertanian dan agropolitan
   a. pengembangan pertanian hortikultura dataran tinggi (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan.
   b. peningkatan pengolahan hasil pertanian untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir.
2) sektor pariwisata alam dan budaya
   a. pengembangan destinasi wisata di koridor Solo–Selo–Borobudur, termasuk agrowisata, wisata alam lereng Merapi–Merbabu, serta wisata budaya dan kuliner lokal.

3.2.3.4.9 Kecamatan Kemusu

Kecamatan Kemusu merupakan salah satu wilayah di bagian utara Kabupaten Boyolali yang memiliki peran strategis dalam konektivitas antarwilayah kabupaten. Secara geografis, Kecamatan Kemusu terletak di antara 110°41'2" hingga 110°50'0" Bujur Timur dan 7°13'0" hingga 7°20'45" Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Juwangi dan Kabupaten Grobogan di bagian utara, Kabupaten Sragen di bagian timur, Kecamatan Andong dan Klego di bagian selatan, serta Kecamatan Wonosegoro di bagian barat. Kondisi wilayahnya yang didominasi lahan perbukitan dan kawasan waduk menjadikan Kemusu memiliki potensi pada sektor perikanan, pertanian lahan kering, serta pariwisata alam.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Kemusu ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yakni pusat permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan dasar, fasilitas umum, serta pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di wilayah kecamatan dan sekitarnya. Kedudukan ini menjadikan Kecamatan Kemusu sebagai simpul penting dalam pemerataan pembangunan wilayah utara Boyolali, sekaligus sebagai penggerak interaksi sosial-ekonomi antarwilayah perdesaan di sekitarnya.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Kemusu dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Kemusu diarahkan untuk mengembangkan fungsi pelayanan dasar dan mendukung kegiatan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata berbasis sumber daya alam. Adapun fokus pengembangan kewilayah kecamatan kemusu dapat dilakukan pada sektor:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1) sektor pertanian dan ketahanan pangan
   a. optimalisasi produksi tanaman pangan (padi, palawija) dan hortikultura.
   b. pengembangan perkebunan yang sesuai dengan karakter lahan.
   c. peningkatan irigasi dan pemanfaatan Waduk Kedung Ombo untuk menunjang produktivitas.
2) sektor perikanan dan perairan
   a. pengembangan perikanan darat berbasis perairan Waduk Kedung Ombo.
   b. pemanfaatan waduk untuk wisata air dan kegiatan ekonomi kreatif terkait.
3) sektor pariwisata alam dan buatan
   a. pengembangan destinasi wisata berbasis potensi Waduk Kedung Ombo.
   b. integrasi pariwisata dengan kegiatan pertanian dan perikanan sebagai agrowisata.

3.2.3.4.10 Kecamatan Klego

Kecamatan Klego merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat antara 110° 40' 20" hingga 110° 45' 21" Bujur Timur, serta berada pada lintang 7° 19' 21" hingga 7° 24' 39" Lintang Selatan. Posisi geografis tersebut menempatkan Kecamatan Klego pada kawasan yang strategis di bagian utara Kabupaten Boyolali.

Dari sisi batas wilayah, secara administratif Kecamatan Klego berbatasan dengan Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan Kemusu di sebelah utara, Kecamatan Andong di sebelah timur, Kecamatan Simo di bagian selatan, serta Kecamatan Karanggede di sebelah barat. Letak ini menjadikan Kecamatan Klego memiliki keterhubungan langsung dengan beberapa kecamatan di sekitarnya, yang berpotensi memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, posisi Kecamatan Klego telah ditetapkan secara jelas dalam struktur ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Kecamatan Klego ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu kawasan permukiman yang memiliki peran strategis untuk menyediakan berbagai layanan dan fasilitas bagi masyarakat di tingkat kecamatan.

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, Kecamatan Klego diharapkan mampu menjadi titik konsentrasi pelayanan publik, pusat kegiatan sosial-ekonomi, serta penggerak interaksi antarwilayah di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan administrasi yang dapat menjangkau seluruh desa di dalam kecamatan.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Klego sebagaimana diatur dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 menempatkan wilayah ini dalam dua kategori utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang Kecamatan Klego mencakup zonasi lingkungan yang mendukung konservasi serta strategi pengembangan desa meliputi produksi, pengolahan, dan distribusi.

3. rencana kawasan strategis

Dalam konteks rencana pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali, Kecamatan Klego termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini terkait dengan perannya sebagai Kawasan Peningkatan Ketahanan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pangan, yang diarahkan untuk mendukung dan memperkuat sektor pertanian. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada pencapaian tujuan mewujudkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu suatu wilayah yang dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan untuk memproduksi komoditas pangan utama, khususnya tanaman pangan strategis. Dengan status ini, Kecamatan Klego diharapkan mampu menjadi salah satu sentra produksi pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pasokan pangan Kabupaten Boyolali secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap komposisi pola ruang serta penetapan Kecamatan Klego sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dalam pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Peningkatan Ketahanan Pangan, fokus utama pengembangan wilayah kecamatan ini ditujukan pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan rencana pola ruang yang mengalokasikan sebagian besar wilayah Klego untuk kegiatan pertanian, meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pengembangan diarahkan pada optimalisasi produksi pangan strategis serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan, guna memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi Kabupaten Boyolali dan daerah sekitarnya.

3.2.3.4.11 Kecamatan Musuk

Kecamatan Musuk merupakan salah satu wilayah administratif yang termasuk dalam Kabupaten Boyolali. Dari segi geografis, kecamatan ini terletak pada koordinat antara 110°26′46,60″ hingga 110°35′37,27″ Bujur Timur dan 7°31′43,80″ hingga 7°38′07,79″ Lintang Selatan, yang menunjukkan posisi strategisnya di bagian tengah Kabupaten Boyolali. Secara administratif, Kecamatan Musuk berbatasan dengan Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Boyolali di sebelah utara, Kecamatan Mojosongo di sebelah timur, Kecamatan Tamansari di sebelah selatan, serta Kecamatan Selo di sebelah barat.

1. kedudukam hirarki struktur ruang

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, ditetapkan bahwa Kecamatan Musuk berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan. Sebagai pusat permukiman, Kecamatan Musuk memiliki fungsi strategis untuk menyediakan berbagai layanan bagi kegiatan skala kecamatan, sehingga menjadi salah satu komponen penting dalam struktur ruang Kabupaten Boyolali. Kedudukan ini menegaskan peran Musuk sebagai penghubung antara permukiman dan fasilitas publik, sekaligus sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan administratif bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

2. rencana pola ruang

Kecamatan Musuk, sebagai salah satu wilayah strategis di Kabupaten Boyolali, memiliki rencana pola ruang yang disusun berdasarkan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Pola ruang ini mengatur fungsi dan pemanfaatan lahan secara terstruktur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antar sektor. Pola ruang Kecamatan Musuk terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. rencana kawasan strategis

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, wilayah Kecamatan Musuk termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten yang ditentukan dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Secara spesifik, wilayah ini masuk dalam Kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada upaya konservasi,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dengan tujuan utama menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati Taman Nasional, sekaligus mengontrol pemanfaatan lahan agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penetapan ini menegaskan pentingnya Musuk sebagai wilayah yang memiliki peran strategis dalam pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil telaah pengembangan wilayah Kecamatan Musuk, arah pengembangan wilayah difokuskan pada integrasi antara konservasi lingkungan, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan ekonomi lokal, dengan tujuan membentuk kawasan yang berkelanjutan serta mendukung ketahanan ekologis dan sosial-ekonomi di Kabupaten Boyolali.

3.2.3.4.12 Kecamatan Sawit

Kecamatan Sawit merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Boyolali yang memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara geografis, Kecamatan Sawit terletak di koordinat 110º 38' 58" hingga 110º 43' 17" Bujur Timur dan 7º 33' 12" hingga 7º 35' 37" Lintang Selatan, yang menunjukkan posisi wilayahnya yang relatif strategis di tengah Kabupaten Boyolali dan berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kecamatan sekitarnya. Secara administratif, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Banyudono di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur, Kabupaten Klaten di selatan, serta Kecamatan Teras di barat, sehingga menjadikan Kecamatan Sawit sebagai salah satu simpul penting dalam interaksi sosial, ekonomi, dan pembangunan wilayah di kawasan tersebut.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Sebagai bagian penting dari Kabupaten Boyolali, Kecamatan Sawit menempati posisi strategis sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu pusat permukiman yang berperan melayani berbagai kegiatan administratif, sosial, dan ekonomi tingkat kecamatan. Fungsi strategis ini tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pengembangan sosial-ekonomi wilayah. Penetapan peran tersebut telah diatur secara resmi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Sawit disusun berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam rencana tata ruang Kecamatan Sawit, wilayahnya dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola ruang ini menekankan pada keseimbangan antara pembangunan permukiman, kawasan pertanian, kawasan konservasi, dan fasilitas publik.

Berikut merupakan pembagian proporsi pola ruang yang ada di Kecamatan Sawit.

3. rencana kawasan strategis

Rencana kawasan strategis di Kabupaten Boyolali telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Dalam dokumen tersebut, Kecamatan Sawit ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dengan rincian sebagai berikut:

a. koridor kawasan Subosukawonosraten

   Kecamatan Sawit termasuk dalam koridor ini yang difokuskan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Subosukawonosraten, baik dari sisi infrastruktur, layanan publik, maupun pertumbuhan ekonomi.

b. kawasan minapolitan
Kecamatan Sawit juga termasuk dalam Kawasan Minapolitan, dengan fokus pada pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

c. kawasan peningkatan ketahanan pangan
Kecamatan Sawit masuk dalam kawasan ini yang difokuskan untuk mewujudkan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat kecamatan maupun kabupaten secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil telaah di atas, wilayah kecamatan sawit dapat diarahkan untuk fokus pada pengembangan sektor minapolitan yang difokuskan pada perikanan budi daya sebagai pengembangan ekonomi lokal, sektor pertanian khususnya tanaman pangan, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta berperan sebagai salah satu pusat pelayanan dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali.

3.2.3.4.13 Kecamatan Teras

Kecamatan Teras merupakan salah satu wilayah administratif yang termasuk dalam Kabupaten Boyolali. Dari sisi geografis, Kecamatan Teras terletak di koordinat antara 110º 37' 28" hingga 110º 40' 43" Bujur Timur dan 7º 29' 28" hingga 7º 35' 15" Lintang Selatan, menjadikannya bagian strategis yang menghubungkan beberapa daerah di sekitarnya. Secara administratif, Kecamatan Teras berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang serta Kecamatan Sambi di arah utara, Kecamatan Banyudono dan Sawit di arah timur, Kabupaten Klaten di arah selatan, serta Kecamatan Mojosongo di arah barat. Posisi ini menjadikan Teras sebagai salah satu kecamatan yang penting dari segi mobilitas, interaksi sosial, dan kegiatan ekonomi antarwilayah.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Teras berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu sebagai pusat permukiman yang memiliki fungsi strategis dalam menyediakan berbagai layanan dan fasilitas bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Peran ini mencakup penyediaan sarana administrasi, sosial, dan ekonomi yang mendukung kegiatan masyarakat setempat. Status tersebut telah secara resmi diatur dan ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali untuk periode 2025–2045, yang menegaskan pentingnya Kecamatan Teras sebagai pusat pelayanan dan pengembangan kawasan di wilayah tersebut.

2. rencana pola ruang

Rencana pola ruang Kecamatan Teras membagi wilayahnya ke dalam dua fungsi utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan terhadap sumber daya alam, hutan, dan daerah resapan air. Kawasan ini berperan penting dalam mencegah kerusakan ekologis. Sementara itu, kawasan budidaya difokuskan untuk aktivitas pemanfaatan lahan secara produktif, meliputi pertanian, perkebunan, pemukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkelanjutan.

Berikut merupakan pembagian proporsi pola ruang yang ada di Kecamatan Teras.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

3. rencana kawasan strategis

Rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Boyolali tercantum dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Dalam dokumen tersebut, Kecamatan Teras dikategorikan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dengan fokus pada kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Teras termasuk dalam beberapa koridor dan zona ekonomi penting, yaitu:

a. koridor kawasan Subosukawonosraten, yang berperan sebagai jalur penghubung antarwilayah strategis untuk mendorong mobilitas, perdagangan, dan investasi.
b. kawasan Solo–Selo–Borobudur, yang memiliki potensi pengembangan pariwisata dan industri kreatif, sekaligus memperkuat konektivitas antarpusat ekonomi di sekitarnya.
c. kawasan minapolitan, yang fokus pada pengembangan sektor perikanan dan budidaya air, mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Kecamatan Teras, sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten Boyolali, memiliki peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, pengembangan wilayah ini diarahkan pada sektor utama yang selaras dengan penetapan kawasan strategis dan komposisi pola ruang:

1) sektor pertanian dan ketahanan pangan
   a. kawasan pertanian dalam pola ruang budidaya mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pengembangan ini didukung oleh integrasi dengan Koridor Subosukawonosraten, yang memfasilitasi distribusi hasil pertanian dan akses pasar.
   b. kawasan minapolitan memperkuat sektor perikanan budidaya, mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
2) sektor pariwisata

   Kecamatan Teras termasuk dalam Kawasan Solo–Selo–Borobudur, yang menitikberatkan pada pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Pola ruang lindung seperti Badan Air dan kawasan budidaya seperti permukiman (perkotaan dan perdesaan) dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung aktivitas pariwisata.

3.2.3.4.14 Kecamatan Andong

Kecamatan Andong, Boyolali terletak di jalur antara Klego dan Salam/Gemolong, sekitar 40 km dari pusat kota Boyolali. Ketinggian wilayahnya sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Andong terdiri dari 16 desa/ kelurahan berikut: Andong, Beji, Gondang Rawe, Kacangan, Kadipaten, Kedungdowo, Kunti, Mojo, Munggur, Pakang, Pakel, Pelemrejo, Pranggong, Semawung, Sempu dan Senggrong.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Andong ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Rencana Pola Ruang Kecamatan Andong dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, Kecamatan Andong diarahkan sebagai wilayah dengan struktur ruang yang seimbang antara konservasi, produksi, dan permukiman. Kawasan Hutan Produksi Tetap difungsikan untuk menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus sumber daya hutan. Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menjadi basis ekonomi agraris dengan pengembangan komoditas unggulan. Kawasan Peruntukkan Industri diarahkan untuk mendukung pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan nilai tambah produk lokal. Sementara itu, Kawasan Permukiman Perdesaan ditata dengan penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas sosial, sehingga masyarakat dapat tinggal layak tanpa mengganggu fungsi produksi dan konservasi. Dengan demikian, penataan ruang Andong menekankan integrasi fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Andong memiliki potensi strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Peningkatan Ketahanan Pangan. Kecamatan Andong memiliki peran penting sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Boyolali, terutama melalui sektor pertanian yang menjadi tulang punggung peningkatan ketahanan pangan daerah. Lahan pertanian yang luas dan produktif di Andong diarahkan untuk pengembangan komoditas pangan pokok seperti padi, jagung, dan kedelai, yang mampu menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Dari sisi penataan ruang, kawasan ini berfungsi sebagai sentra produksi pangan yang terhubung dengan jaringan distribusi regional, sehingga tidak hanya mendukung kebutuhan lokal tetapi juga memperkuat cadangan pangan kabupaten. Penguatan infrastruktur irigasi, penerapan teknologi pertanian modern, serta pengembangan kelembagaan tani menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

3.2.3.4.15 Kecamatan Gladagsari

Kecamatan Gladagsari, Boyolali, adalah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Ampel, terletak di lereng Gunung Merbabu. Luas wilayahnya 60,010 km² dengan ketinggian antara 520 hingga 1.840 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum di kecamatan ini mencapai 30°C, sedangkan suhu minimumnya 26°C. Secara administratif, Gladagsari terdiri dari 10 desa, dengan Desa Sampetan sebagai yang terluas dan Desa Gladagsari sebagai yang terkecil.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berlandaskan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Gladagsari ditetapkan sebagai bagian dari struktur ruang kabupaten dengan fungsi strategis sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penetapan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pengembangannya, PPL Kecamatan Gladagsari diarahkan untuk mengoptimalkan penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, serta utilitas umum yang mendukung kegiatan masyarakat. Selain itu, pengembangan aksesibilitas wilayah menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempermudah distribusi barang, jasa, maupun mobilitas penduduk. Upaya ini juga diintegrasikan dengan pembangunan desa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

terpadu, yang menggabungkan potensi sumber daya lokal, kearifan masyarakat, dan inovasi pembangunan guna menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Gladagsari dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, Kecamatan Gladagsari diarahkan untuk pengembangan hortikultura dan perkebunan yang sesuai dengan karakter lereng Gunung Merbabu, sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung ekonomi lokal. Kawasan peruntukan industri difokuskan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar tercipta nilai tambah tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Sementara itu, kawasan permukiman perdesaan ditata agar ramah lingkungan, terintegrasi dengan lanskap alam, dan mendukung daya tarik wisata. Sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Merbabu, penataan ruang Gladagsari menekankan keseimbangan antara fungsi konservasi dan fungsi budidaya, sehingga pengembangan wilayah berjalan berkelanjutan serta mendukung peran kawasan sebagai penyangga taman nasional.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Gladagsari memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penetapannya sebagai Kawasan Agropolitan. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian secara terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat hulu hingga hilir. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas lahan dan hasil pertanian, optimalisasi pengolahan pascapanen untuk menghasilkan produk bernilai tambah, serta penguatan sistem distribusi dan pemasaran yang efisien. Melalui pendekatan ini, Gladagsari tidak hanya berperan sebagai pusat produksi komoditas pertanian, tetapi juga menjadi penggerak terciptanya nilai tambah ekonomi, penyedia lapangan kerja baru, dan peningkatan daya saing wilayah. Dengan demikian, peranannya sebagai kawasan strategis agropolitan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta memperkokoh struktur perekonomian daerah.

Selain nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kecamatan Gladagsari juga termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Wilayah ini mencakup kawasan konservasi yang berada di sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu, dengan tujuan utama menjaga kelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, serta fungsi lindung lingkungan. Penetapan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan sumber daya alam.

Berdasarkan komposisi pola ruang serta arahan pengembangan kawasan strategis di Kecamatan Gladagsari, arah pengembangan wilayah difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, konservasi, dan ekowisata.

Pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk memperkuat peran Gladagsari sebagai Kawasan Agropolitan, dengan pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir. Hal ini meliputi peningkatan produktivitas lahan, penerapan teknologi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

budidaya berkelanjutan, pengolahan pascapanen untuk menghasilkan produk bernilai tambah, serta penguatan sistem distribusi dan pemasaran.

Pada sektor konservasi, fokus diarahkan pada pelestarian kawasan lindung, terutama Taman Nasional Gunung Merbabu, guna menjaga fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, serta daya dukung lingkungan. Kegiatan konservasi ini diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem.

Sementara itu, sektor ekowisata dikembangkan sebagai penghubung antara upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Potensi wisata alam, seperti pegunungan, jalur pendakian, dan lanskap pertanian, dioptimalkan untuk menarik wisatawan dengan konsep ramah lingkungan, melibatkan komunitas lokal, dan mendukung perekonomian berbasis jasa wisata.

3.2.3.4.16 Kecamatan Juwangi

Kecamatan Juwangi, Boyolali, terletak di bagian utara Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa kecamatan lain dan didominasi oleh lahan kering tadah hujan. Juwangi juga dikenal memiliki wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Juwangi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 63 meter di atas permukaan laut.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Juwangi ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Juwangi dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, Kecamatan Juwangi diarahkan sebagai wilayah dengan fungsi beragam yang saling mendukung. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Tetap berperan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjadi penyangga kegiatan budidaya. Lahan pertanian dialokasikan untuk hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan sebagai basis ekonomi lokal. Disediakan pula kawasan industri untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta permukiman perdesaan yang ditata selaras dengan daya dukung lingkungan.

Yang menjadi penekanan, Juwangi memiliki peran strategis sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Boyolali. Kehadiran PLTMH tidak hanya memperkuat penyediaan energi terbarukan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan potensi sumber daya air setempat tanpa merusak fungsi ekologis kawasan.

3.2.3.4.17 Kecamatan Nogosari

Kecamatan Nogosari, yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memiliki profil geografis yang khas. Wilayah ini berada di jalan antara Simo dan Kalioso, dengan topografi yang umumnya dataran rendah antara 100-400 meter di atas permukaan laut. Sungai Cemoro menjadi sungai terbesar yang membatasi kecamatan ini dengan Kecamatan Andong, dan berperan penting dalam pengairan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

lahan pertanian di Desa Rembun dan Ketitang. Selain itu, saluran irigasi dari Waduk Cengklik juga mendukung pengairan di beberapa desa lainnya.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Nogosari ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Nogosari dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, arah penataan ruang Kecamatan Nogosari diarahkan untuk menjaga lahan pertanian sebagai basis ketahanan pangan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, menata permukiman perdesaan dengan infrastruktur memadai tanpa mengurangi lahan produktif, serta menyediakan ruang bagi kepentingan pertahanan dan keamanan secara seimbang dengan fungsi ruang lainnya.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Nogosari juga memiliki peran sebagai Kawasan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Peningkatan Ketahanan Pangan. Oleh karenanya Kecamatan Nogosari perlu diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Hal ini ditopang oleh ketersediaan lahan pertanian produktif yang luas dan sesuai untuk tanaman pangan.

Penguatan infrastruktur antara lain seperti irigasi, jalan usaha tani, dan jaringan logistik untuk menjamin efisiensi produksi dan distribusi hasil pangan sangat diperlukan. Integrasi dengan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, sehingga memberikan nilai tambah dan memperluas pasar.

Penataan permukiman perdesaan yang mendukung pusat-pusat produksi pangan tanpa mengganggu lahan produktif. Dengan demikian, Kecamatan Nogosari bukan hanya berfungsi sebagai lumbung pangan Boyolali, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada sektor pertanian berkelanjutan dan terintegrasi.

3.2.3.4.18 Kecamatan Sambi

Kecamatan Sambi, yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memiliki profil geografis yang khas dengan luas wilayah sekitar 4.649,4935 hektar dan terdiri dari 16 desa. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Sambi, sekitar 16 km dari pusat kota Boyolali. Di bagian timur kecamatan ini, terdapat waduk Cengklik yang sedang dikembangkan menjadi objek wisata.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Sambi ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Sambi dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, Kecamatan Sambi diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi ruang produktif dan permukiman. Lahan subur dimanfaatkan sebagai kawasan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan guna memperkuat basis ekonomi agraris. Di sisi lain, disiapkan kawasan peruntukkan industri berbasis agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Sementara itu, kawasan permukiman perdesaan ditata agar tumbuh selaras dengan fungsi budidaya, dilengkapi infrastruktur dasar, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ruang wilayah.

3.2.3.4.19 Kecamatan Selo

Kecamatan Selo, Boyolali terletak di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di sisi utara dan timur lereng tersebut. Ketinggian wilayahnya antara 1.200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, mencapai 4.232 mm pada tahun 2011 dengan 229 hari hujan, menurut data dari PPID Boyolali. Selo juga dikenal sebagai daerah penghasil sayuran, terutama kubis/kol dan adas, serta memiliki potensi peternakan sapi perah.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Selo ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Selo dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang penataan ruang, Kecamatan Selo memiliki peranan sentral sebagai koridor konservasi yang menghubungkan dan melindungi ekosistem Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu. Wilayah ini berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan ruang agar selaras dengan perlindungan alam, serta menjadi simpul pengembangan ekowisata berbasis konservasi yang mendukung ekonomi lokal tanpa mengurangi fungsi lindung kawasan.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Selo memiliki peranan sentral sebagai salah satu Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Solo-Selo-Borobudur. Selain itu Kecamatan Selo juga termasuk dalam Kawasan Kawasan Agropolitan.

Sebagai bagian dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka pengembangan Kecamatan Selo harus memiliki unsur tujuan pengembangan Kawasan Solo-Selo-Borobudur dengan mewujudkan Kawasan Solo-Selo-Borobudur sebagai pendukung kawasan pariwisata.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Adapun arah pengembangan Kawasan Solo-Selo-Borobudur yaitu:

a. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
c. pemasaran pariwisata; dan
d. pengembangan ekonomi kreatif.

Lebih lanjut Kecamatan Selo juga termasuk dalam Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup berupa kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu. Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu mewujudkan konservasi Taman Nasional. Sedangkan arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa:

a. penyerap dan penyimpanan karbon;
b. perlindungan keanekaragaman hayati;
c. konservasi air tanah; dan
d. keindahan bentang alam.

3.2.3.4.20 Kecamatan Tamansari

Kecamatan Tamansari adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Tamansari merupakan satu dari tiga kecamatan baru yang ada di Kabupaten Boyolali yang resmi dibentuk pada tahun 2019. Kecamatan baru yang lain adalah Gladagsari dan Wonosamodro. Kecamatan Tamansari merupakan pemekaran dari Kecamatan Musuk. Saat ini Kecamatan Tamansari terdiri dari 10 Desa yaitu Dragan, Jemowo, Karang Kendal, Karanganyar, Keposong, Lanjaran, Mriyan, Lampar, Sangup dan Sumur.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Tamansari ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Tamansari dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Kecamatan Tamansari memiliki peran strategis sebagai Kawasan Konservasi Pelestarian Alam Taman Nasional Gunung Merapi, yang menjadi aset ekologi dan wisata alam penting. Potensi konservasi ini dapat dikembangkan melalui ekowisata, pendidikan lingkungan, penelitian, serta pelestarian keanekaragaman hayati yang selaras dengan perlindungan kawasan.

Pada Kawasan Peruntukan Budidaya, wilayah perkebunan rakyat berpotensi dikembangkan untuk komoditas unggulan atau tanaman tahunan lainnya yang sesuai kondisi agroklimat lereng Merapi. Pengelolaan berbasis masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lahan.

Di sektor Kawasan Pertanian Hortikultura, kondisi tanah subur dan iklim sejuk mendukung pengembangan sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

bernilai ekonomi tinggi. Penguatan rantai pasok dan pemasaran, termasuk agrowisata, akan memberi nilai tambah signifikan.

Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pelayanan sosial, dan penataan lingkungan yang harmonis dengan lanskap alam. Hal ini memastikan masyarakat dapat hidup layak sekaligus menjadi pelaku aktif dalam menjaga kawasan konservasi dan mengembangkan ekonomi lokal.

3. rencana kawasan strategis

Kecamatan Tamansari juga termasuk dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu.

Kawasan konservasi sekitar Taman Nasional Merapi-Merbabu secara kesluruhan mencakup beberapa wilayah lainnya yaitu:

a. Kecamatan Cepogo;
b. Kecamatan Gladagsari;
c. Kecamatan Tamansari;
d. Kecamatan Selo; dan
e. Kecamatan Musuk.

Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu mewujudkan konservasi Taman Nasional. Adapun Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa: penyerap dan penyimpanan karbon; perlindungan keanekaragaman hayati; konservasi air tanah; dan keindahan bentang alam.

3.2.3.4.21 Kecamatan Wonosamodro

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Wonosamodro ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Wonosamodro ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni dengan arahan pemanfatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Wonosamodro dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman Perdesaan.

Arah Pengembangan Kecamatan Wonosamodro diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kawasan Hutan Produksi Tetap dikelola dengan prinsip kelestarian untuk menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu sekaligus menjaga fungsi ekologis. Kawasan Pertanian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dikembangkan melalui intensifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai potensi lahan, dengan dukungan teknologi dan infrastruktur pertanian.

Kawasan Peruntukkan Industri difokuskan pada pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sehingga memberikan nilai tambah dan lapangan kerja. Kawasan Permukiman Perdesaan dibangun dengan fasilitas dasar dan infrastruktur memadai, menjaga karakter pedesaan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Integrasi keempat kawasan ini diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

3.2.3.4.22 Kecamatan Wonosegoro

Kecamatan Wonosegoro terdidri dari 18 desa. Kecamatan Wonosegoro dengan luas wilayah 92.998 Km^2 terletak pada ketinggian 100 – 400 m dari permukaan air laut.

1. kedudukan hirarki struktur ruang

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045, Kecamatan Wonosegoro ditetapkan dalam struktur ruang kabupaten sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni pusat pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; pengembangan aksesibilitas wilayah; dan pembangunan desa terpadu.

2. rencana pola ruang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Wonosegoro dalam Raperda RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045 mencakup pengaturan kawasan berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Wonosegoro diarahkan untuk mengembangkan fungsi:

a. pelayanan dasar
b. kegiatan di sektor pertanian,
c. kehutanan,
d. perkebunan dan
e. Peruntukkan industri

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, dengan menetapkan target indikasi program serta pagu indikatif yang disusun sesuai periodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan riil Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk periode 2025-2029, sementara belanja daerah menggambarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna mendukung pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada berbagai program yang dirancang untuk mendukung pembangunan tahun 2025-2029, sedangkan pagu indikatif merupakan estimasi kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah dirancang beserta kebutuhan anggarannya akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Target kinerja setiap program dalam berbagai bidang pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

4.1.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi.

4.1.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah yang direncanakan untuk mendukung visi misi Bupati Boyolali adalah sebagai berikut:

4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. urusan pemerintahan bidang pendidikan

   Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. program pengelolaan pendidikan

      Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, Pendidikan Anak Usia Dini

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

(PAUD), dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalisasikan dalam bentuk pembangunan unit sekolah baru, perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana utilitas sekolah, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa, mebel sekolah alat peraga siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pengelolaa dana BOS, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD, persentasae sekolah SD dan SMP yang terakreditasi serta beberapa indikator lain yang merupakan standar pelayanan minimum dalam urusan pendidikan.

b. program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan untuk melakukan pemerataan dari segi kuantitas maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalisasikan dengan melakukan pemetaan dan perhitungan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan baik di satuan pendidikan dasar, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi.

2. urusan pemerintahan bidang kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Layanan tersebut difokuskan pada penyediaan fasilitas kesehatan puskesmas menuju Integrasi Layanan Primer (ILP), serta ketersediaan obat dan alat kesehatan. Program ini juga untuk pelaksanaan kegiatan untuk ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, penurunan stunting, penurunan kasus kematian ibu anak dan balita. Program ini juga untuk meningkatkan cakupan jaminan kesehatan warga miskin guna ketercapaian UHC, peningkatan kesehatan lingkungan serta memberikan layanan screening kesehatan kepada warga negara sesuai sikus hidup yang diprogramkan melalui cek kesehatan gratis, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.

b. program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan melalui berbagai kegiatan diantaranya pemenuhan maupun distribusi tenaga kesehatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

c. program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

Program ini diarahkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar sudah lolos uji sesuai standar kesehatan serta terpantau keamanannya. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu memastikan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan memenuhi standar dan syarat perijinan, Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi, serta fasilitasi pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan syarat perijinan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

d. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan baik kesehatan personal maupun lingkungan sekitar. Upaya yang akan dilakukan yaitu membentuk partsipasi aktif masyarakat dalam peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

3. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya Kinerja irigasi kewenangan Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu priritas nasional yaitu tercapainya mencapai swasembada pangan, energi, dan air.

b. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya rumah tangga yang terlayani air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Boyolali. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

c. program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi individu maupun komunal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan dalam kondisi baik serta banyaknya rumah tangga yang telah memiliki septitank individu. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

d. program penataan bangunan gedung

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya gedung yang dibangun di Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

e. program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini bertujuan untuk meningmelakukan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung fasilitas publik di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya lingkungan gedung perkantoran di Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

f. program pengembangan jasa konstruksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

g. program penyelenggaraan penataan ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Boyolali. Pada aspek perencanaan, program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR), sedangkan pada aspek pemanfaatan dan pengendalian dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

h. program penyelenggaraan jalan

Program ini bertujuan untuk mengingkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan kewenangan Kabupaten. Indikator keberhasilan dari Program ini adalah meningkatnya jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Boyolali. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kinerja Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi mantap.

i. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah regional yang memadai di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah kapasitas sampah yang dapat dikelola tiap hari.

4. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun korban relokasi program pemerintah kabupaten. Program dilaksanakan untuk mendukung tercapainya SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman dan indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

b. program kawasan permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha serta perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

c. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

d. program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

Program ini merupakan bagian penting dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas lingkungan hunian masyarakat. Salah satu aspek utama dalam kegiatan ini adalah proses serah terima aset PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah (Pemda).

Serah terima aset PSU mencakup penyerahan berbagai fasilitas umum yang telah dibangun oleh pengembang, seperti jalan, drainase, taman,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

penerangan jalan, tempat ibadah, dan fasilitas sosial lainnya, kepada Pemda agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Proses ini menjadi tahapan krusial dalam mewujudkan pengelolaan kawasan perumahan yang tertib, legal, dan berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh pengembang dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah, baik dalam aspek pemeliharaan maupun pengembangan ke depan. Dengan demikian, keberadaan PSU tidak hanya mendukung fungsi hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Langkah-langkah dalam kegiatan serah terima ini mencakup inventarisasi aset PSU, verifikasi dokumen dan kondisi fisik lapangan, penilaian kelayakan, serta penyusunan berita acara serah terima yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pengembang dan pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, tertata, dan berfungsi secara optimal untuk mendukung kehidupan masyarakat di masa depan.

5. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut dioperasionalisasikan ke dalam aktivitas-aktivitas yang tidak terpisahkan dalam satu rangkaian yang dimulai dari prabencana, saat bencana dan pascabencana. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana.

b. program peningkatan ketenteraman, ketertiban umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten/kota, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan keramaian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, membangun kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan, sosialisasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, serta pengembangan kapasitas dan karir PPNS. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan).

c. program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, penanganan bahan beracun dan berbahaya kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran, pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaporkan.

6. urusan pemerintahan bidang sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program rehabilitasi sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. Pelayanan dasar tersebut terdiri dari penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, penyediaan alat bantu, peningkatan kemitraan rehabilitasi sosial, serta pemberian bimbingan sosial kepada keluarga ODGJ.

b. program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan PSKS melalui berbagai pelatihan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

c. program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial dan fasilitasi pengembangan ekonomi bagi fakir miskin. Salah satu kunci keberhasilan program tersebut yaitu tersedianya data fakir miskin yang akurat dan update. Selanjutnya dibutuhkan fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran pada masyarakat.

d. program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sesuai standar. Standar tersebut cukup membantu dalam implementasi proses pengelolaan TMP.

e. program penanganan bencana

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat bencana. Bantuan sosial yang diberikan diantaranya penyediaan sandang, penanganan khusus kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, serta koordinasi pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Rencana program prioritas yang akan dilakasanakan adalah sebagai berikut:

a. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja melalui berbagai pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini serta memberi perhatian lebih kepada masyarakat usia produktif yang kurang mampu. Dengan adanya program ini diharapkan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali memiliki kompetensi (yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pengadaan sarana pelatihan kerja, pembinaan LPK swasta, serta penyediaan sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dan persentase peningkatan fasilitasi pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu.

b. program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan untuk lebih fokus pada penempatan tenaga kerja secara langsung melalui upaya-upaya yang berjenjang mulai dari pemutakhiran database pencari kerja, penyuluhan, penyediaan bursa kerja online maupun offline, pengawasan terhadap LPTKS, hingga memberikan pelatihan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI), dan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (PMI/TKI). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

c. program hubungan industrial

Program ini dimaksudkan untuk menjamin hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja (perusahaan) serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Kabupaten Boyolali. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui upaya pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja oleh perusahaan dan untuk mencegah adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, serta melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha melalui sidang mediasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang etenagakerjaan, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja.

d. program perencanaan tenaga kerja (PTK)

Program ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program Pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi tentang: persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja, dan arah kebijakan, strategi, dan program

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pembangunan ketenagakerjaan. RTK Makro disusun 5 (tahun) dengan periodesasi sama dengan RPJMD, lima tahun sekali. RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikit memuat informasi tentang: persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai, dan program kepegawaian. Penyusunan PTK Mikro diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. PTK Mikro penyusunannya dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

2. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan. Program tersebut dibagi menjadi dua aspek yakni aspek pencegahan dan penanganan. Aspek pencegahan dilakukan melalui sosialisasi adanya layanan perlindungan korban kekerasan, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. Pada aspek penanganan akan ada penambahan jumlah layanan rujukan, peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait serta peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan.

b. program pemenuhan hak anak

Program ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi diantaranya meningkatkan area publik yang layak anak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat). Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu sosialisasi dan advokasi kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta untuk mendukung area/desa layak anak. Selain itu, perlu untuk meningkatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

c. program perlindungan khusus anak

Program ini ditujukan untuk meningkatkan upaya perlindungan khusus pada anak. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan upaya advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan pada anak, pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus serta peningkatan kualitas SDM penyelenggaran layanan perlindungan anak.

d. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan praktek dalam mewujudkan kesetaraan gender baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Dilingkungan pemerintah, program ini diarahkan pada peningkatan penggunaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sedangkan pada lingkungan non pemerintah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya.

3. urusan pemerintahan bidang pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

kemandirian pangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase kelompok lumbung pangan yang aktif. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik menjadi fokus utama dalam pengembangan dan penumbuhan kelompok lumbung pangan.

b. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase cadangan pangan, persentase ketersediaan informasi distribusi pangan yang dapat diakses masyarakat, dan persentase peningkatan kelompok UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan. Stok cadangan pangan utama, seperti beras, media informasi distribusi pangan dan pembinaan kelompok UMKM menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. program penanganan kerawanan pangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan dan keamanan pangan sehingga cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase penanganan desa rawan pangan. Pendataan dan penanganan desa rawan pangan dengan melibatkan kolaborasi multi aktor di Kabupaten Boyolali menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

d. program pengawasan keamanan pangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan keamanan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase pangan yang aman (layak konsumsi). Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana laboratorium pengujian pangan dan pengembangan sertifikasi pangan yang aman (layak konsumsi) menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

4. urusan pemerintahan bidang pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah: program penyelesaian sengketa tanah garapan.

Program ini dirancang untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah banyaknya kasus sengketa tanah yang difasilitasi untuk diselesaikan.

5. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan lingkungan hidup

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan lingkungan hidup sehingga terwujud perencanaan yang sistematis dan terpadu untuk mengelola lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan utaman menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup, sehingga tercapai kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini diarahkan untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam, serta memperkuat kapasitas pengawasan, pemulihan dan edukasi masyarakat. Program ini mencakup pengawasan/pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, dan tanah), pengelolaan limbah, serta pemulihan ekosistem yang rusak, dengan adanya program ini diharapkan dapat mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Boyolali.

c. program pengelolaan keanekaragaman hayati

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti kebun raya, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya dan bertujuan menjaga kelangsungan spesies flora, fauna, dan ekosistemnya, serta memastikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dari keanekaragaman hayati dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan untuk mengendalikan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini mencakup seluruh siklus pengelolaan bahan dan limbah B3, mulai dari produksi, pemanfaatan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang baik sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan dan prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan, program ini menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta mendorong perbaikan kinerja lingkungan secara berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan secara sinergis antara Dinas Lingkungan Hidup, instansi teknis terkait, serta aparat penegak hukum lingkungan. Dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang optimal, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di daerah.

f. program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini bertujuan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, dan transparan terhadap laporan atau keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pelanggaran ketentuan lingkungan hidup lainnya. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

lingkungan serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya mekanisme pengaduan yang terstruktur dan responsif, pemerintah daerah dapat lebih cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

g. program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pengelolaan sampah, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah secara berkelanjutan melalui sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis pada pengurangan serta penanganan sampah.

Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan warga, guna menciptakan sistem persampahan yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan perubahan lingkungan dan pertumbuhan penduduk dan dengan dilaksanakan secara konsisten dan terukur diharapkan dapat menurunkan volume sampah yang dibuang ke TPA, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

h. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini bertujuan untuk mendorong peran aktif, inisiatif, inovasi, kesadaran dan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, lembaga, atau komunitas yang telah menunjukkan kinerja atau kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan. Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap peran serta aktif dan inisiatif masyarakat/dunia usaha/komunitas dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

i. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini bertujuan untuk membentuk perilaku ramah lingkungan, meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif, serta menciptakan agen-agen perubahan di tingkat lokal yang mampu mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari strategi peningkatan partisipasi publik dan penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

6. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pendaftaran penduduk

Dokumen kependudukan memegang peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan berupa e-KTP, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dan Identitas Kependudukan (IKD). Fokus intervensi dari program pendaftaran penduduk antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, serta peningkatan penataan pedaftaran penduduk.

b. program pencatatan sipil

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, terutama berupa akta kelahiran dan pengurusan akta kematian. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pencatatan sipil menjadi kerangka kegiatan di dalam program ini.

c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemutakhiran data kependudukan. Kerangka kegiatan yang menjadi prioritas berupa penataan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan.

d. program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan untk meningkatkan ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan. Adapun kerangka kegiatan yang direncanakan berupa penyusunan profil kependudukan.

7. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penataan desa

Seiring dengan kewenangan desa yang semakin besar di dalam UU No 6 Tahun 2014, maka diperlukan peningkatan fasilitasi bagi pemerintah desa dalam melakukan penataan desa. Oleh karena itu, program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa fasilitasi perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Tidak kalah penting dalam program ini akan memfasilitasi tata ruang desa dan sarana prasarana desa.

b. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan desa dilakukan melalui proses identifikasi potensi, fasilitasi pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Sedangkan peningkatan swadaya masyarakat melalui peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan bantuan bulanan bhakti gotong royong, dan fasilitasi kegiatan PKK.

c. program peningkatan kerjasama desa

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Kabupaten Boyolali telah memiliki modal kebijakan berupa Perda No. 15 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Fasilitasi kerjasama kawasan perdesaan diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi antar desa dalam mengoptimalkan potensi kawasan.

d. program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun langkah yang ditempuh melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penataan desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui fasilitasi penyusunan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

perencanaan dan pelaporan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan penataan desa melalui fasilitasi penyusunan profil desa, penegasan batas desa, pengelolaa aset desa, peningkatan sarana prasarana desa serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

8. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

   Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

      Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL), UPPKS dan PIK Remaja dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Adapun langkah yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pembinaan kepada kelompok terkait melalui berbagai pelatihan, serta membentuk dan menguatkan PIK Remaja berbasis masyarakat/sekolah.

   b. program pembinaan Keluarga Berencana (KB)

      Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KB aktif pada masyarakat. Peningkatan tersebut dalam rangka mendukung upaya pengendalian jumlah penduduk. Adapun upaya yang akan dilakukan melalui pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, meningkatkan tenaga penyuluh KB lapangan serta mengurangi kasus kegagalan atau komplikasi berat pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

   c. program pengendalian penduduk

      Program ini diarahkan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin agar jumlah penduduk tidak meningkat secara signifikan. Untuk itu, diperlukan data basis keluarga dan data hasil pelayanan KB modern untuk memetakan perkiraan pengendalian penduduk. Selain itu, perlu peningkatan pemanfaatan dokumen kajian pengendalian penduduk pada setiap PD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing perangkat daerah memperhatikan aspek dampak kependudukan pada setiap keputusan yang diambil.

9. urusan pemerintahan bidang perhubungan

   Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

   Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap moda transportasi, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan parkir, pengelolaan terminal tipe C, pelayanan andalalin, pelayanan rekomendasi ijin trayek terhadap kendaraan angkutan umum pedesaan dan perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja rasio konektivitas kabupaten.

10. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

    Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a. program pengelolaan aplikasi informatika

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program ini dirancang untuk mengembangkan layanan publik secara online sebagai salah satu program yang mendukung inovasi smart city Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah meningkatnya perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi e-goverment yang akan mendukung smart city kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja layanan publik dan pengaduan online yang aktif.

b. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Program ini diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Kinerja yang diharapkan tercapai melalui program ini adalah persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah, serta persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi. Informasi publik melalui program ini diharapkan tidak hanya satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mampu membangun inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. Berbagai rencana teknis di dalam program ini antara lain fasilitasi kelompok informasi masyarakat dan penguatan peran PPID.

11. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

Rencana program prioritas yang akan dilakasanakan adalah sebagai berikut:

a. program pelayanan izin usaha simpan pinjam

Program ini diarahkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam secara sah dan profesional. Program ini mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi koperasi. Dengan izin resmi, koperasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Program ini juga diharapkan meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan jumlah koperasi berizin.

b. program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan untuk memastikan koperasi beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai aturan. Melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan menyeluruh, program ini membantu mencegah penyimpangan serta mendorong perbaikan tata kelola. Dengan demikian, koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan berkontribusi lebih kuat terhadap perekonomian. Program ini juga mendukung peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi standar kepatuhan dan kelayakan usaha.

c. program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program ini diarahkan untuk mengetahui dan meningkatkan kesehatan koperasi yang diharapkan akan berdampak pada rasa aman dan nyaman bagi anggota koperasi. Selain itu, koperasi yang sehat juga diharapkan dapat membantu perekonomian khususnya perekonomian lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya.

d. program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program ini diarahkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi. Hal tersebut dilakukan karena cukup banyak koperasi di Kabupaten Boyolali yang tidak sehat atau nonaktif akibat dari kualitas SDM

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

yang rendah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih.

e. program pemberdayaan UMKM

Program ini berfokus pada pemberdayaan usaha mikro melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mikro, meningkatkan daya saing, produktivitas dan kontribusi terhadap ekonomi lokal, dan meningkatkan jiwa wirausaha/dan jumlah pelaku usaha baru.

f. program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fasilitasi usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan , Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.program ini laksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan SDM pelaku UMKM yang terlatih, persentase pelaku UMKM yang menerapkan metode produksi sesuai standar,persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan,persentase pelaku usaha mikro yang terfasilitasi,serta untuk mencapai indikator persentase rata-rata peningkatan omset penjualan pelaku usaha mikro.

12. urusan pemerintahan bidang penanaman modal

Rencana program prioritas yang akan dilakasanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Boyolali melalui identifikasi potensi investasi. Hal ini dilakukan dengan upaya pembuatan peta potensi investasi, profil investasi, hingga yang bersifat mempermudah investasi melalui kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi.

b. program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Boyolali melalui promosi potensi investasi secara langsung melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya program ini diharapkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Boyolali meningkat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi, serta persentase realisasi investasi di kawasan utara Boyolali. Pada indikator kedua disebutkan secara eksplisit kawasan utara Boyolali karena diharapkan pembangunan di kawasan utara Boyolali akan merata dengan kawasan lainnya melalui adanya aktivitas investasi.

c. progam pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai standar bagi kegiatan investasi sehingga diharapkan aktivitas investasi di Kabupaten Boyolali tidak terhalang oleh regulasi dan prosedur yang menyulitkan bagi investor. Keberhasilan dari program ini akan diukur melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan indikator yang ingin dicapai dari program ini yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM dalam hal ini calon investor) perizinan investasi.

d. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program ini diarahkan untuk monitoring pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan pelaksanaan penanaman modal (perusahaan) dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (pelaku usaha). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LPKM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

e. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini diarahkan untuk menyediakan data dan sistem informasi yang berkaitan langsung dengan penanaman modal sehingga seluruh aktivitas investasi baik penyediaan database untuk keperluan pendataan jumlah investor/realiasi investasi, maupun untuk keperluan pelayanan investasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutukan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

13. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk penguatan Koordinasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan dan single event Tingkat Kabupaten/Kota, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga serta Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik, pelatih yang berprestasi serta pembinaan terhadap atlet muda.

b. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/kota, serta Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatnya Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

c. program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. kegiatan ini dioperasionalisasikan dengan melakukan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah dan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase kelompok pramuka aktif.

14. urusan pemerintahan bidang statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan statistik sektoral

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/instansi pemerintah dalam rangka menghasilkan, menyajikan, dan memanfaatkan data statistik sektoral sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya. Program ini berfokus pada penyediaan data yang akurat, mutakhir, berkesinambungan, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, hingga diseminasi data yang bersumber dari kegiatan survei, sensus, registrasi administrasi, maupun kompilasi produk administrasi.

Tujuan utama dari penyelenggaraan statistik sektoral adalah untuk mendukung terwujudnya satu data Indonesia, meningkatkan ketersediaan data statistik yang berkualitas, serta memperkuat basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor. Melalui program ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan data sektoral yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong sinkronisasi dan integrasi data antar instansi, mengurangi duplikasi pengumpulan data, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi statistik. Dengan demikian, penyelenggaraan statistik sektoral menjadi pilar penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik.

Data statistik yang akurat dan mutakhir memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja berupa persentase penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Data statistik yang berkualitas diperoleh melalui rangkaian proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral. Harapannya, setiap sektor atau perangkat daerah mampu menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas dan bermanfaat bagi efektivitas pembangunan.

15. urusan pemerintahan bidang persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Di tengah revolusi digital yang makin masif, perlu disertai dengan tingkat keamanan informasi. Program ini diarahkan untuk mencapai kinerja persentase tingkat keamanan informasi pemerintah guna melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pusat. Program ini mencakup kegiatan pengelolaan sistem persandian, penerapan teknologi keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur pengamanan informasi yang andal.

Dalam implementasinya, program persandian bertujuan untuk mengantisipasi serta meminimalisasi potensi ancaman dan serangan siber, kebocoran data, penyalahgunaan informasi, maupun gangguan yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi pengembangan sistem keamanan siber, pengawasan lalu lintas informasi, penerapan standar keamanan informasi, pelatihan pejabat fungsional sandiman, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait dalam bidang keamanan siber dan persandian.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan informasi pemerintah yang aman, terpercaya, dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Melalui penyelenggaraan program persandian, pemerintah berupaya menjaga kedaulatan dan integritas informasi, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memberikan jaminan perlindungan data dan informasi strategis yang dimiliki negara maupun daerah.

16. urusan pemerintahan bidang kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten/kota yang dioperasionalisasikan dengan melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan pengembangan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase cagar budaya yang teregistrasi.

b. program pengembangan kesenian tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kesenian masyarakat yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Mengingat pula eksistensi kesenian tradisional masih sangat kuat dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Boyolali. Operasionalisasi program ini dalam bentuk peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional, standarisasi dan sertifikasi SDM kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase kelompok seni yang dibina.

c. program pengelolaan museum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan museum. kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, pembinaan dan peningkatan mutu serta kapasitas SDM permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, dan revitalisasi sarana dan prasarana museum. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase koleksi museum dalam kondisi baik.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

d. program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan, serta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah pemajuan kebudayaan yang dilindungi.

17. urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pembinaan perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan, pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten, pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota, pengembangan layanan perpustakaan rujukan, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, serta Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase perpustakaan sesuai standar nasional dan SKM layanan perpustakaan.

b. program pelestarian naskah kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan untuk melestarikan Naskah Kuno Milik daerah Kabupaten/Kota. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno, dan pengembangan, pengelolaan, pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestariakan dan didayagunakan.

18. urusan pemerintahan bidang kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai audit kearsipan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa pengelolaan arsip dinamis, statis, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

b. program perlindungan dan penyelamatan arsip

Arsip memiliki peran penting dalam menopang akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan. Beberapa kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten, autentifikasi arsip statis dan arsip alih media, pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang, penyelamatan arsip

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

perangkat daerah yang digabung, dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah, kecamatan, desa/kelurahan.

4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan perikanan tangkap.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar serta persentase nelayan kecil yang diberdayakan. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode penangkapan ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. program pengelolaan perikanan budidaya.

Program ini diarahkan untuk meningkakan produksi perikanan budidaya. Program ini memiliki indikator persentase kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik, persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan, dan persentase peningkatan ketersediaan benih. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode budidaya ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan. Program ini memiliki indikator persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan metode promosi langsung dan tidak langsung menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

2. urusan pemerintahan bidang pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan untuk Meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang merupakan komponen inti dalam aktivitas pariwisata yang dapat menarik wisatawan. Kabupaten Boyolali dengan potensi dan peluang dalam pengembangan objek daya tarik wisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. Kegiatan tersebut dioperasionalkan dengan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata kabupaten/kota, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota serta fasilitasi dan standardisasi industri usaha pariwisata. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan, persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

b. program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata atas potensi pariwisata yang dipasarkan. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

c. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan melakukan operasionalisasi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang menyasar kelompok masyarakat atau kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan.

d. program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual guna melindungi karya, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Program ini dilakukan melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan operasionalisasi Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual.

3. urusan pemerintahan bidang pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, produksi hasil peternakan dan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil), persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan, dan persentase sampel obat hewan yang diperiksa. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan produksi hasil peternakan. Program ini memiliki indikator persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik, dan persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk hasil peternakan dan meningkatkan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, persentase susu yang memenuhi standar mutu dan persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Program ini diarahkan untuk menjaga produksi pertanian melalui upaya penurunan resiko dampak bencana pertanian. Program ini memiliki indikator persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani, persentase fasilitasi penanggulangan bencana yang tertangani, serangan organisme pengganggu tanaman dan persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian. Pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

e. program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani meliputi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih baik dan menguntungkan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini diarahkan pula untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani bidang pertanaman maupun peternakan yang terdiri atas kelompok tani, gabungaan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani serta regenerasi petani.

4. urusan pemerintahan bidang perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program bertujuan untuk penerbitan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan). Program ini dilakukan untuk mencapai Indikator rekomendasi perizinan yang diterbitkan (Dokumen).

b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui pemeliharaan dan rehabilitasi pasar. Dengan adanya sarana distribusi perdagangan (pasar) yang baik maka diharapkan lalu lintas barang dapat terjamin. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pasar dalam kondisi baik (%), persentase Persentase pasar dalam kondisi baik (%).

c. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini bertujuan untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Program tersebut juga untuk mengetahui daya beli masyarakat tidak turun dan memastikan barang kebutuhan pokok dan barang penting tercukupi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem yang terintegrasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase jumlah barang pokok dalam kondisi stabil.

d. program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan melalui penyelenggaraan promosi dagang melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali serta pembinaan dan pengembangan usaha ekspor unggulan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu jumlah kegiatan promosi usaha unggulan daerah yang diikuti (Kegiatan).

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

e. program standardisasi perlindungan konsumen

Program ini dilakukan untuk memberikan perlindungan konsumen melalui Verifikasi alat standar yang dipergunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan agar konsumen/masyarakat maupun produsen tidak dirugikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur (%).

f. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Program ini diarahkan melalui pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Media dan metode promosi pemasaran menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah IKM yang difasilitasi pelatihan pemasaran (IKM).

5. urusan pemerintahan bidang perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program perencanaan dan pembangunan industri.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan industri di tingkat kabupaten khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Kabupaten Boyolali. Kualitas sumber daya manusia menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan perindustrian (IKM).

6. urusan pemerintahan bidang transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi.

Program ini bukan hanya soal memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk hidup yang lebih baik. Tujuan Transmigrasi antara lain: 1) Pemerataan Pembangunan karena mendistribusikan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk, yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini sesuai dengan semangat Asta Cita untuk menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif, 2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat karena dengan mengalihkan sebagian penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang lebih luas dan memiliki potensi sumber daya alam, transmigrasi bisa menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah yang lebih terisolasi, 3) Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah karena salah satu poin penting dalam Asta Cita adalah pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Program transmigrasi seringkali disertai dengan pembangunan infrastruktur dasar (seperti jalan, listrik, air bersih) di daerah tujuan transmigrasi, yang bisa mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.1.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. sekretariat daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Peran Sekretariat Daerah dalam hal ini tidak hanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, sekaligus pengendalian terkait tindak lanjut kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Program ini juga terkait kualitas produk hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan serta proses harmonisasi produk hukum daerah selaras dengan produk hukum provinsi dan nasional agar saling bersinergi dan tidak bertentangan, baik dalam hierarki yang sama maupun dalam hierarki yang berbeda sehingga tercipta kepastian hukum serta terhindar tumpang tindih aturan dan kepastian peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Program ini juga sebagai upaya meningkatkan efektifitas program kesejahteraan rakyat yang tidak terwadahi dalam program di perangkat daerah, terutama terkait bantuan sosial, fasilitasi kegiatan keagamaan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan pada lingkup pendidikan usia dini,

b. program perekonomian dan pembangunan

Program ini juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan tindak lanjut kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan. Penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program ini. Selain itu, program ini juga diarahkan mampu mengawal kinerja BUMD sehingga dapat berkontribusi pada PAD, Return On Asset (ROA) serta efektivitas dan efisiensi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa dengan tujuan meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa. Tidak kalah penting, program perekonomian dan pembangunan juga berupaya meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan daerah, terutama melalui koordinasi dan sinkronisasi implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

c. program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program ini selain memiliki peran fasilitasi administrasi rutin perkantoran, layanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah, juga memiliki peran strategis dalam rangka penguatan reformasi birokrasi. Program ini menjadi instrumen dalam pengelolaan implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya terkait pembangunan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas tata laksana dan pelayanan publik. Program ini memiliki peran penting untuk mencapai target kinerja indikator makro tata kelola pemerintahan berupa Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, dan IKM.

2. sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar. Tugas dan fungsi DPRD berupa legislasi, pengawasan,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

dan penganggaran, kemudian dioperasionalisasi melalui kerangka kegiatan yang akan difasilitasi berupa fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, fasilitasi tugas dan peningkatan kapasitas DPRD.

4.1.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

Program ini diarahkan untuk untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Target kinerja yang akan dicapai adalah persentase capaian indikator program. Kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya forum-forum partisipatif seperti Musrenbang dan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pada tahap pengendalian, dilakukan monitoring serta pelaporan capaian pembangunan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap evaluasi pembangunan, pemerintah daerah menyusun laporan kinerja serta melakukan analisis capaian indikator pembangunan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan perbaikan program pada periode berikutnya.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pembangunan. Program ini, oleh karena itu diarahkan agar berbagai dokumen perencanaan dapat sinkron. Sinkronisasi, terutama terkait perencanaan jangka menengah dengan tahunan, dan perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah. Koordinasi dan sinkronisasi direncanakan mulai dari setiap bidang, yaitu pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. Kerangka kegiatan teknis yang dijalankan mulai dari koordinasi penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan, serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan.

2. keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Indikator kinerja di dalam program ini terkait Realisasi Belanja Daerah, Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Penyajian APBD yang transparan dan akuntabel, Ketepatan waktu penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Penyajian Pertanggung jawaban APBD yang transparan, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan, Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana darurat dan mendesak dan DBH, dan Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kerangka kegiatan di dalam program ini mulai dari proses koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

b. program pengelolaan pendapatan Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dari komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah. Kerangka kegiatan direncanakan mulai dari penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, penagihan pajak, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

c. program pengelolaan barang milik Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan inventarisasi aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah. Kerangka kegiatan di dalam program ini, antara lain terkait penyusunan standar harga, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan penilaian barang milik daerah. Program ini tidak kalah penting juga terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

3. kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian Daerah.

Program ini memiliki peran penting untuk menopang pelaksanaan manajemen ASN. Kinerja yang diarahkan program ini yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan, persentase pegawai yang memenuhi target SKP, dan persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan mulai dari pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, hingga penilaian dan evaluasi kinerja ASN.

4. pendidikan dan pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan SDM.

Program ini diarahkan, terutama untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator kinerja yang akan dicapai di dalam program ini yaitu rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), rasio pegawai berpendidikan tinggi, serta persentase PD yang terpenuhi kebutuhan diklat.

5. penelitian dan pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penelitian dan pengembangan Daerah

Penelitian dan pengembangan daerah tidak lepas dari mandat Permendagri No. 17 Tahun 2016, terutama terkait bentuk kelitbangan utama berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Indikator kinerja program diarahkan berorientasi hasil, yakni terkait tindak lanjut kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dan hasil penelitian yang telah diolah dalam bentuk policy brief yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penelitian dan pengembangan yang akan dijalankan sebagai basis evidence based policy terkait berbagai bidang pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Inovasi daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan.

b. program riset dan inovasi Daerah

Program ini akan menjadi pilar utama untuk mendorong penciptaan dan penerapan ide-ide baru yang memberikan solusi atas permasalahan daerah. Fokus utama program ini adalah memfasilitasi dan menginkubasi inovasi yang lahir dari kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat (penta helix). Upaya yang akan dilakukan meliputi:

1) penguatan ekosistem inovasi: membangun wadah atau forum komunikasi yang berkelanjutan bagi para inovator di berbagai sektor.
2) inkubasi inovasi: memberikan pendampingan, bimbingan teknis, dan dukungan finansial awal (seed funding) bagi gagasan-gagasan inovasi yang berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3) apresiasi dan promosi: mengadakan kompetisi inovasi daerah dan memberikan penghargaan kepada inovator terbaik untuk memotivasi penciptaan inovasi. Hasil-hasil inovasi yang berhasil akan dipromosikan secara luas agar dapat direplikasi dan diimplementasikan secara masif di seluruh wilayah Boyolali.
4) pemanfaatan teknologi: mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi digital, untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan ekonomi lokal.

4.1.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. inspektorat daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan pengawasan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, sehingga mampu mencapai nilai kapabilitas APIP minimal level 3 yang selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat mencapai kematangan dalam menjalankan tugas pengawasan internal dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mewadahi fungsi kontrol masyarakat, program ini juga memiliki target kinerja berupa persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Beberapa kerangka kegiatan teknis berupa pengawasan kinerja pemerintah daerah, review laporan kinerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi TLHP, pengawasan desa dan pengawasan untuk tujuan tertentu.

b. program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

Program ini diarahkan untuk menopang kinerja outcome berupa maturitas SPIP, WBK/WBBM, IPKD MCP (Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention), Survey Penilaian Integritas, unit pengendali gratifikasi, LHKPN, Desa Anti Korupsi. Indikator kinerja di dalam program ini berupa capaian nilai IPKD MCP. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan terkait Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformsi birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan dan assistensi Urusan pemerintah Daerah, serta Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.1.1.7 Unsur Kewilayahan

1. kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan sarana dan prasarana umum, dengan orientasi hasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. Indikator kinerja di dalam program ini juga terkait tindak lanjut hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Program ini terkait salah satu peran Kecamatan di dalam koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan, antara lain terkait sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

d. program penyelenggaran urusan pemerintahan umum

Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

e. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai intermediary antara pemerintah daerah dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.1.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. kesatuan bangsa dan politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, pembentukan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta pembentukan paskibraka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

b. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Program ini bertujuan untuk menurunkan potensi konflik keagamaan.

c. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas.

d. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham tentang politik.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**746.891.205.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**746.891.205.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		**734.399.010.000**		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						601.220.722.000		593.536.655.000		593.536.655.000		593.536.655.000		593.536.655.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	601.220.722.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						132.213.745.000		132.444.445.000		132.444.445.000		132.444.445.000		132.444.445.000		
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	90,6	90,7	90,8	62.477.192.000	90,9	61.191.106.000	91	61.191.106.000	91,1	61.191.106.000	91,2	61.191.106.000	91,2	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	85,75	85,85	85,95	4.131.497.000	86,05	3.228.897.000	86,15	3.228.897.000	86,25	3.228.897.000	86,35	3.228.897.000	86,35	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	89,75	89,85	89,95	40.485.129.000	90,05	38.781.000.000	90,15	38.781.000.000	90,25	38.781.000.000	90,35	38.781.000.000	90,35	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	80,26	80,36	80,46	3.451.027.000	80,56	3.678.842.000	80,66	3.678.842.000	80,76	3.678.842.000	80,86	3.678.842.000	80,86	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	89,93	90,03	90,13	18.222.800.000	90,23	22.620.400.000	90,33	22.620.400.000	90,43	22.620.400.000	90,53	22.620.400.000	90,53	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A	%	100	100	100	3.446.100.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						13.456.738.000		8.417.910.000		8.417.910.000		8.417.910.000		8.417.910.000		
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,8	96	96,4	13.456.738.000	96,9	8.417.910.000	97,3	8.417.910.000	97,6	8.417.910.000	98	8.417.910.000	98	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**583.897.600.000**		**575.004.899.000**		**592.892.585.000**		**617.269.089.000**		**641.656.682.000**		
DINAS KESEHATAN						**583.897.600.000**		**575.004.899.000**		**592.892.585.000**		**617.269.089.000**		**641.656.682.000**		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						436.851.024.618		440.171.922.000		464.231.734.000		488.290.584.000		512.350.413.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	188.926.202.618	100	184.071.922.000	100	185.131.734.000	100	186.190.584.000	100	187.250.413.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD PA)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD PA	%	100	100	100	172.136.622.000	100	181.000.000.000	100	201.000.000.000	100	221.000.000.000	100	241.000.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD SIMO)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD SIMO	%	100	100	100	37.100.000.000	100	38.000.000.000	100	40.000.000.000	100	42.000.000.000	100	44.000.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD Waras Wiris)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD WARAS WIRIS	%	100	100	100	38.688.200.000	100	37.100.000.000	100	38.100.000.000	100	39.100.000.000	100	40.100.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						145.098.623.382		133.092.856.000		126.920.730.000		127.238.384.000		127.566.148.000		
Meningkatnya cakupan imunisasi bayi	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97	97	97	697.815.000	98,00	680.808.000	99,00	680.891.000	99,00	680.974.000	99,00	681.057.000	99,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	%	40,98	40,98	40,98	55.439.862.775	40,98	47.553.838.000	50,82	41.342.357.000	50,82	41.620.656.000	60,66	41.909.065.000	60,66	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Kab/Kota Sehat	%	100	100	100	3.234.126.300	100,00	2.957.042.000	100,00	2.957.042.000	100,00	2.957.042.000	100,00	2.957.042.000	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya kasus stunting pada balita	Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	3	3	2,3	6.202.242.000	1,7	6.218.781.000	1,5	6.219.770.000	1,3	6.220.759.000	1,00	6.221.748.000	1,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gratis	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	30	40	2.361.113.200	50,00	2.129.987.200	60,00	2.138.012.200	70,00	2.146.037.200	80,00	2.154.062.200	80,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD Pandanarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (RSUD PA)	%	100	100	100	1.850.000.000	100,00	1.850.000.000	100,00	1.850.000.000	100,00	1.850.000.000	100,00	1.850.000.000	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD Simo	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (RSUD SIMO)	%	100	100	100	1.196.749.000	100,00	1.196.749.000	100,00	1.196.749.000	100,00	1.196.749.000	100,00	1.196.749.000	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD WARAS WIRIS	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai	%	100	100	100	1.763.000.000	100,00	1.763.000.000	100,00	1.763.000.000	100,00	1.763.000.000	100,00	1.763.000.000	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	standar (RSUD Waras Wiris)															
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	10	10	20	19.750.000	35,00	20.007.000	45,00	20.264.000	50,00	20.521.000	55,00	20.778.000	55,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	98	98,48	64.600.592.307	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Angka	15	15	14,5	3.506.551.300	14,00	3.496.490.800	13,5	3.526.491.800	13,00	3.556.492.800	12,5	3.586.493.800	12,5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penanganan TB	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	88	90	90	2.615.580.800	90,00	2.451.970.800	90,00	2.451.970.800	90,00	2.451.970.800	90,00	2.451.970.800	90,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	62	62	64	10.000.000	67,00	196.075.000	69,00	196.075.000	71,00	196.075.000	73,00	196.075.000	73,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penanganan HIV	ODHIV (orang dengan HIV) baru yang ditemukan memulai minum obat ARV	%	90	90	91	1.601.240.700	92,00	1.579.255.200	93,00	1.579.255.200	94,00	1.579.255.200	95,00	1.579.255.200	95,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.321.224.000		1.215.055.000		1.215.055.000		1.215.055.000		1.215.055.000		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,42	2,42	2,44	1.321.224.000	2,48	1.215.055.000	2,52	1.215.055.000	2,56	1.215.055.000	2,6	1.215.055.000	2,6	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						414.772.000		341.030.000		341.030.000		341.030.000		341.030.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	83,5	83,5	84	270.580.000	84,5	196.838.000	85	196.838.000	85,5	196.838.000	86	196.838.000	86	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya keamanan pangan	Persentase pangan industri rumah	%	75	75	76	144.192.000	77	144.192.000	78	144.192.000	79	144.192.000	80	144.192.000	80	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	tangga aman dan bermutu															
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						211.956.000		184.036.000		184.036.000		184.036.000		184.036.000		
Meningkatnya jumlah desa yang memiliki minimal 4 jenis UKBM	Persentase desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	%	87,64	87,64	90,26	211.956.000	92,88	184.036.000	95,50	184.036.000	98,12	184.036.000	100	184.036.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**181.027.609.500**		**168.921.700.520**		**195.353.366.800**		**171.247.921.550**		**162.977.696.550**		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**181.027.609.500**		**168.921.700.520**		**195.353.366.800**		**171.247.921.550**		**162.977.696.550**		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.458.690.000		17.981.830.000		19.826.830.000		18.084.830.000		18.094.830.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	18.458.690.000	100	17.981.830.000	100	19.826.830.000	100	18.084.830.000	100	18.094.830.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						16.749.325.000		12.847.375.000		14.865.000.000		15.605.000.000		17.845.000.000		
Meningkatnya daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kinerja irigasi kewenangan Kabupaten	Angka	64,88	65	65,25	16.749.325.000	65,5	12.847.375.000	65,75	14.865.000.000	66	15.605.000.000	66,25	17.845.000.000	66,25	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						9.780.289.000		9.645.000.000		9.720.000.000		9.835.000.000		9.835.000.000		
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air minum yang layak	%	97,56	100	100	9.780.289.000	100	9.645.000.000	100	9.720.000.000	100	9.835.000.000	100	9.835.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN						450.000.000		1.040.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PERSAMPAHAN REGIONAL																
Meningkatnya layanan persampahan regional	Kapasitas sampah yang dapat dikelola tiap hari	Ton/hari	0	0	0,4	450.000.000	0,4	1.040.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						3.379.700.000		3.347.500.000		3.370.000.000		3.470.000.000		3.570.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah yang aman	%	29,24	29,28	29,3	3.379.700.000	29,33	3.347.500.000	29,37	3.370.000.000	29,4	3.470.000.000	29,42	3.570.000.000	29,42	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						42.430.000.000		16.720.500.000		17.565.000.000		17.640.000.000		17.650.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan bangunan Gedung sesuai dengan geruntukannya	Persentase pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan peruntukannya	%	93,25	93,4	93,7	42.430.000.000	94	16.720.500.000	94,25	17.565.000.000	94,5	17.640.000.000	94,6	17.650.000.000	94,6	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						1.200.000.000		1.200.000.000		1.323.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan gedung dan lingkungannya sesuai kewenangan kabupaten	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.323.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						86.327.516.500		103.366.495.520		124.983.536.800		101.553.091.550		90.912.866.550		
Meningkatnya kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,2	83,32	83,52	86.327.516.500	83,72	103.366.495.520	83,92	124.983.536.800	84,12	101.553.091.550	84,32	90.912.866.550	84,32	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						384.589.000		440.000.000		450.000.000		460.000.000		470.000.000		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang tidak mengalami kecelakaan kerja	%	0	100	100	384.589.000	100	440.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	470.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.867.500.000		2.333.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang terhadap total Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dalam suatu wilayah kabupaten dalam periode tertentu	%	0	96,8	97	1.867.500.000	97,25	2.333.000.000	97,5	2.170.000.000	97,75	2.170.000.000	98	2.170.000.000	98	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**10.046.767.000**		**14.420.968.000**		**14.240.968.000**		**14.260.968.000**		**14.240.968.000**		
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**10.046.767.000**		**14.420.968.000**		**14.240.968.000**		**14.260.968.000**		**14.240.968.000**		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.918.281.000		3.419.598.000		3.339.598.000		3.359.598.000		3.339.598.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	2.918.281.000	100	3.419.598.000	100	3.339.598.000	100	3.359.598.000	100	3.339.598.000	100	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						299.156.000		1.788.370.000		1.688.370.000		1.688.370.000		1.688.370.000		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	%	100	100	100	299.156.000	100	1.788.370.000	100	1.688.370.000	100	1.688.370.000	100	1.688.370.000	100	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						562.370.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		
Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	0	3,49	4,02	562.370.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	26,83	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN						6.245.320.000		8.088.000.000		8.088.000.000		8.088.000.000		8.088.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,64	4,28	2,24	6.245.320.000	2,29	8.088.000.000	2,34	8.088.000.000	2,4	8.088.000.000	2,46	8.088.000.000	2,46	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						21.640.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya Penyediaan (PSU) Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0	2,67	2,75	21.640.000	2,82	450.000.000	2,91	450.000.000	2,99	450.000.000	3,09	450.000.000	3,09	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**19.174.729.000**		**19.491.571.000**		**18.736.057.000**		**22.305.037.000**		**22.193.757.000**		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**12.292.478.000**		**12.504.772.000**		**11.749.258.000**		**15.318.238.000**		**15.206.958.000**		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.843.490.000		9.312.504.000		9.317.504.000		9.322.504.000		9.322.504.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	9.843.490.000	100	9.312.504.000	100	9.317.504.000	100	9.322.504.000	100	9.322.504.000	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.959.888.000		2.650.768.000		1.990.254.000		3.354.234.000		5.442.954.000		
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	196.500.000	100	910.000.000	100	249.486.000	100	299.486.000	100	3.702.186.000	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	59.000.000	100	213.980.000	100	213.980.000	100	1.527.960.000	100	213.980.000	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	1.704.388.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya peningkatan Kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN						489.100.000		541.500.000		441.500.000		2.641.500.000		441.500.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
Tercapainya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	489.100.000	100	541.500.000	100	441.500.000	100	2.641.500.000	100	441.500.000	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.882.251.000**		**6.986.799.000**		**6.986.799.000**		**6.986.799.000**		**6.986.799.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.421.507.000		5.070.639.000		5.102.139.000		4.852.139.000		5.082.139.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.421.507.000	100	5.070.639.000	100	5.102.139.000	100	4.852.139.000	100	5.082.139.000	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.460.744.000		1.916.160.000		1.884.660.000		2.134.660.000		1.904.660.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Bencana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100	4,47	232.150.000	4,88	80.000.000	5,28	140.000.000	5,68	120.000.000	6,07	130.000.000	6,07	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	0,49	527.594.000	0,50	814.860.000	0,51	699.860.000	0,53	919.860.000	0,54	679.860.000	0,54	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	226.015.000	100	302.800.000	100	325.800.000	100	375.800.000	100	375.800.000	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatkan Daya Lenting Masyarakat Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Indeks Pemulihan Pascabencana	Nilai	0,74	0,78	0,82	376.685.000	0,86	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Persentase lembaga yang terlibat dalam	%	100	100	100	98.300.000	100	18.500.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
dalam menghadapi bencana	menghadapi bencana															Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**13.468.216.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		
DINAS SOSIAL						**13.468.216.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		**14.193.001.000**		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.951.225.000		5.579.910.000		5.579.910.000		5.579.910.000		5.579.910.000		
Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.951.225.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						166.410.000		142.710.000		142.710.000		142.710.000		142.710.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	166.410.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.812.090.000		1.655.640.000		1.655.640.000		1.655.640.000		1.655.640.000		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS yang ditangani	%	100	100	100	1.812.090.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						5.803.250.000		5.995.450.000		5.995.450.000		5.995.450.000		5.995.450.000		
Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	5.803.250.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA						651.100.000		585.150.000		585.150.000		585.150.000		585.150.000		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	651.100.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						84.141.000		234.141.000		234.141.000		234.141.000		234.141.000		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan TMP sesuai standar	%	100	100	100	84.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		
DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA						**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		**5.712.400.000**		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase jumlah Instansi/Lembaga/ Perusahaan yang menyusun RTK	%	0	0	20	50.000.000	40	50.000.000	60	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,87	71	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	94,13	94	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						212.400.000		212.400.000		212.400.000		212.400.000		212.400.000		
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,45	55,55	59,36	212.400.000	62,40	212.400.000	65,60	212.400.000	68,96	212.400.000	72,31	212.400.000	72,31	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**476.163.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**476.163.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		**186.133.000**		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						118.363.000		38.233.000		38.233.000		38.233.000		38.233.000		
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	%	2,56	2,56	2,58	70.000.000	2,6	2.000.000	2,62	2.000.000	2,64	2.000.000	2,68	2.000.000	2,68	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pejabat Publik Perempuan	%	6,67	6,67	6,76	48.363.000	6,85	36.233.000	6,94	36.233.000	7,03	36.233.000	7,12	36.233.000	7,12	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						21.600.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penanganan kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Korban Kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prevalensi kasus kekerasan pada Perempuan	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	%	7	7	6,59	21.600.000	6,50	14.000.000	6,40	14.000.000	6,30	14.000.000	6,20	14.000.000	6,20	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						111.100.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	%	85	90	92	111.100.000	94	18.500.000	96	18.500.000	98	18.500.000	100	18.500.000	100	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						225.100.000		115.400.000		115.400.000		115.400.000		115.400.000		
Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Mendapat Layanan	%	100	100	100	225.100.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**4.385.419.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		
DINAS KETAHANAN PANGAN						**4.385.419.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		**4.711.080.000**		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.019.967.000		3.224.080.000		3.224.080.000		3.224.080.000		3.224.080.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang	%	100	100	100	3.019.967.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	terpenuhi sesuai standar															
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase kelompok lumbung pangan yang aktif	%	25,32	26	27	0	28	10.000.000	29	10.000.000	30	10.000.000	31	10.000.000	31	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.104.672.000		1.165.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan oleh masyarakat	Persentase Kelompok/UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan	%	40,51	42	43	480.772.000	44	700.000.000	45	700.000.000	46	700.000.000	47	700.000.000	47	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Distribusi Pangan yang Dapat diakses Masyarakat	%	100	100	100	378.300.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	%	21,95	31,73	50	245.600.000	75	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						149.780.000		222.000.000		222.000.000		222.000.000		222.000.000		
Meningkatnya upaya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,5	4,1	3,7	149.780.000	3,4	222.000.000	3,0	222.000.000	2,6	222.000.000	2,2	222.000.000	2,2	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						111.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Meningkatnya pengawasan kualitas pangan aman	Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi)	%	87,80	88	88,5	111.000.000	89	90.000.000	89,5	90.000.000	90	90.000.000	90,5	90.000.000	90,5	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**24.241.566.000**		**27.880.000.000**		**27.905.000.000**		**27.920.000.000**		**27.945.000.000**		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**24.241.566.000**		**27.880.000.000**		**27.905.000.000**		**27.920.000.000**		**27.945.000.000**		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.454.430.000		16.900.000.000		16.900.000.000		16.900.000.000		16.900.000.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	16.454.430.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						239.950.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia	%	100	100	100	239.950.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						892.996.000		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		
Telaksanannya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau badan air dengan kategori minimal sedang	%	0	71	74	892.996.000	77	1.650.000.000	80	1.650.000.000	83	1.650.000.000	85	1.650.000.000	85	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						3.100.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase pemenuhan RTH Publik	%	34,56	34,59	34,62	3.100.000.000	34,66	5.650.000.000	34,69	5.650.000.000	34,73	5.650.000.000	34,76	5.650.000.000	34,76	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						42.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya pengendalian Limbah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	90,31	90,33	90,34	42.500.000	90,36	50.000.000	90,38	50.000.000	90,39	50.000.000	90,41	50.000.000	90,41	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)																
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						105.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan sesuai izin lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	90	90	91	105.000.000	92	150.000.000	93	150.000.000	94	150.000.000	95	150.000.000	95	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						0		110.000.000		135.000.000		150.000.000		175.000.000		
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelola Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga di desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0	100	0	100	110.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi entitas/masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0	0	30	0	35	150.000.000	35	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						5.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Optimalisasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	%	0	100	100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3.401.690.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	61,6	65	69	3.401.690.000	73	2.950.000.000	77	2.950.000.000	80	2.950.000.000	82	2.950.000.000	82	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.283.098.000**		**11.155.564.000**		**10.488.303.000**		**11.313.303.000**		**10.513.303.000**		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.283.098.000**		**11.155.564.000**		**10.488.303.000**		**11.313.303.000**		**10.513.303.000**		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.933.098.000		10.577.364.000		9.910.103.000		10.735.103.000		9.935.103.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.933.098.000	100	10.577.364.000	100	9.910.103.000	100	10.735.103.000	100	9.935.103.000	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						28.800.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP Elektronik	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	%	98,7	98,8	98,8	28.800.000	98,9	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL						8.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%	99,07	67,9	99,10	8.000.000	99,15	0	99,20	0	99,25	0	99,30	0	99,30	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kematian	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	%	25	50	50	0	60	40.000.000	61	40.000.000	62	40.000.000	63	40.000.000	63	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						313.200.000		488.200.000		488.200.000		488.200.000		488.200.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	%	85	85	86	313.200.000	87	488.200.000	88	488.200.000	89	488.200.000	90	488.200.000	90	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0		0		0		0		0		
Meningkatnya ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**10.754.093.000**		**29.797.499.200**		**20.144.086.700**		**19.537.930.450**		**19.995.576.950**		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						**10.754.093.000**		**29.797.499.200**		**20.144.086.700**		**19.537.930.450**		**19.995.576.950**		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.856.070.000		5.847.499.200		5.847.499.200		5.847.499.200		5.847.499.200		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.856.070.000	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA						190.175.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	190.175.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						5.300.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	5.300.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						3.379.555.000		19.880.000.000		10.226.587.500		9.620.431.250		10.078.077.750		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100	2.990.000.000	100	3.350.000.000	100	541.062.500	100	970.431.250	100	159.168.750	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	389.555.000	100	16.530.000.000	100	9.685.525.000	100	8.650.000.000	100	9.918.909.000	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						322.993.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100	100	100.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	3,83	3,83	3,83	0	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	92.993.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Peningkatan Klasifikasi BUMDes (Lembaga)	%	10	10	10	60.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Lembaga)	%	10	10	10	70.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**21.046.826.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**21.046.826.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		**21.153.047.000**		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.090.826.000		3.767.250.000		3.767.250.000		3.767.250.000		3.767.250.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.090.826.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						575.200.000		505.200.000		505.200.000		505.200.000		505.200.000		
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	27	33	40	575.200.000	47	505.200.000	53	505.200.000	60	505.200.000	67	505.200.000	67	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	21,4	21,5	21,6	0	21,7	0	21,8	0	22	0	22,2	0	22,2	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	31,3	33,3	35,3	10.320.800.000	37,3	10.320.800.000	39,3	10.320.800.000	41,3	10.320.800.000	43,3	10.320.800.000	43,3	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						6.060.000.000		6.559.797.000		6.559.797.000		6.559.797.000		6.559.797.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	39	48	52	6.060.000.000	55	6.559.797.000	58	6.559.797.000	60	6.559.797.000	65	6.559.797.000	65	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**39.851.576.500**		**60.572.056.780**		**52.178.976.000**		**53.895.676.000**		**53.683.476.000**		
DINAS PERHUBUNGAN						**39.851.576.500**		**60.572.056.780**		**52.178.976.000**		**53.895.676.000**		**53.683.476.000**		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.826.326.500,00		11.746.076.000,00		12.353.976.000,00		12.700.676.000,00		12.988.476.000,00		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.826.326.500	100	11.746.076.000	100	12.353.976.000	100	12.700.676.000	100	12.988.476.000	100	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						31.025.250.000		48.825.980.780		39.825.000.000		41.195.000.000		40.695.000.000		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lalu lintas angkutan	Persentase penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan	%	100	100	100	27.010.000.000	100	42.755.980.780	100	32.625.000.000	100	32.855.000.000	100	32.075.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	%	100	100	100	1.025.250.000	100	920.000.000	100	980.000.000	100	1.040.000.000	100	250.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	%	100	100	100	2.990.000.000	100	5.150.000.000	100	6.220.000.000	100	7.300.000.000	100	8.370.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**9.103.304.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**9.103.304.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		**9.336.198.000**		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.401.339.000		6.239.398.000		6.239.398.000		6.239.398.000		6.239.398.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.401.339.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						716.965.000		596.800.000		596.800.000		596.800.000		596.800.000		
Tersalurkannya pengaduan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah	Presentase aduan masyarakat yang tersalurkan	%	100	100	100	716.965.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						1.985.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		
Meningkatnya layanan pemerintah berbasis digital	Persentase tercapainya pemerintahan berbasis digital	%	100	100	100	235.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya akses internet di Desa Mandiri	Persentase OPD dan Desa Mandiri yang terhubung dengan internet dari Diskominfo	%	100	100	100	1.750.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**6.343.792.000**		**7.822.163.000**		**7.997.163.000**		**8.097.163.000**		**8.197.163.000**		
DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA						**6.343.792.000**		**7.822.163.000**		**7.997.163.000**		**8.097.163.000**		**8.197.163.000**		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.843.792.000		6.501.463.000		6.501.463.000		6.501.463.000		6.501.463.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.843.792.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						0		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	0	0	5,6	0	5,8	185.000.000	6,0	185.000.000	6,2	185.000.000	6,4	185.000.000	6,4	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN						0		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERIKSAAN KOPERASI																
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	40,21	0	40,3	135.000.000	40,5	135.000.000	40,75	135.000.000	40,9	135.000.000	40,9	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						150.000.000		80.700.000		80.700.000		80.700.000		80.700.000		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang meningkat nilai kesehatannya	%	0,28	0,28	0,3	150.000.000	0,3	80.700.000	0,3	80.700.000	0,35	80.700.000	0,36	80.700.000	0,36	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						250.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	40	45	50	250.000.000	55	70.000.000	60	70.000.000	65	70.000.000	70	70.000.000	70	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						100.000.000		700.000.000		825.000.000		900.000.000		975.000.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	0,27	0,27	0,27	100.000.000	0,31	700.000.000	0,31	825.000.000	0,39	900.000.000	0,39	975.000.000	0,39	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						0		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		
Meningkatnya daya saing UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0	0	3,04	0	3,22	150.000.000	3,41	200.000.000	3,50	225.000.000	3,63	250.000.000	3,63	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**5.154.321.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.154.321.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		**4.781.020.000**		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.509.121.000		4.301.020.000		4.301.020.000		4.301.020.000		4.301.020.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.509.121.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						52.150.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		
Tercapainya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	52.150.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						81.900.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	10	10	10,5	81.900.000	11	105.000.000	11,5	105.000.000	12	105.000.000	12,5	105.000.000	12,5	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						155.800.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97	97	97	155.800.000	98	65.000.000	98	65.000.000	98	65.000.000	99	65.000.000	99	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						49.350.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi LKPM	%	12	12	12,5	49.350.000	13	154.000.000	13,5	154.000.000	14	154.000.000	14,5	154.000.000	14,5	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						306.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	306.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**11.406.433.136**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						**11.406.433.136**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		**14.056.361.000**		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.781.984.736		8.225.411.000		8.225.411.000		8.225.411.000		8.225.411.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.781.984.736	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						116.700.000		142.550.000		142.550.000		142.550.000		142.550.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	80	80	81	116.700.000	82	142.550.000	83	142.550.000	84	142.550.000	85	142.550.000	85	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4.257.748.400		5.388.400.000		5.388.400.000		5.388.400.000		5.388.400.000		
Meningkatnya prestasi atlet	Persentase pembinaan cabang olahraga	%	87,5	87,5	89	4.257.748.400	91	5.388.400.000	92,5	5.388.400.000	94	5.388.400.000	95	5.388.400.000	95	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	%	100	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						-		-		-		-		-		
Meningkatnya statistik sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase statistik sektoral yang terselenggara sesuai standar	%	52,6	65,75	66	0	66	0	66,25	0	66,25	0	67,5	0	67,5	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya rumah tangga yang terhubung internet	Persentase rumah tangga yang terhubung dengan internet	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						0		0		0		0		0		
Meningkatnya keamanan informasi sesuai standar	Persentase keamanan informasi sesuai standar	%	61	61	62	0	63	0	63	0	65	0	65	0	65	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**5.389.214.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**5.389.214.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		**3.037.355.000**		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		
Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Obyek	0	0	21	1.420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						2.564.859.000		1.419.000.000		1.419.000.000		1.419.000.000		1.419.000.000		
Meningkatnya kelompok kesenian yang mendapat pembinaan	Persentase kelompok seni yang dibina	%	29	29	30	2.564.859.000	30,02	1.419.000.000	30,05	1.419.000.000	30,06	1.419.000.000	30,07	1.419.000.000	30,07	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						596.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	85	85	85,01	596.000.000	85,03	390.000.000	85,05	390.000.000	85,06	390.000.000	85,07	390.000.000	85,07	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						808.355.000		808.355.000		808.355.000		808.355.000		808.355.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Koleksi Museum dengan Baik	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	%	95,25	95,25	95,27	808.355.000	95,28	808.355.000	95,29	808.355.000	95,3	808.355.000	95,31	808.355.000	95,31	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**1.372.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**1.372.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		**587.700.000**		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.369.200.000		567.700.000		567.700.000		567.700.000		567.700.000		
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	%	7,17	8,67	9,5	193.500.000	10,33	387.700.000	11,17	387.700.000	12	387.700.000	12,8	387.700.000	12,8	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	SKM Layanan Perpustakaan	Angka	86,38	86,4	86,5	1.175.700.000	86,7	180.000.000	86,8	180.000.000	86,9	180.000.000	87	180.000.000	87	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						3.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno yang terlindungi melalui digitalisasi	%	0	0	100	3.500.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**4.886.818.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**4.886.818.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		**5.413.924.000**		
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.670.318.000		5.339.824.000		5.339.824.000		5.339.824.000		5.339.824.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.670.318.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						86.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		
Meningkatnya tata kelola arsip yang dinamis dan statis	Nilai Audit Kearsipan	Angka	81,44	81,50	81,60	86.500.000	81,70	22.500.000	81,80	22.500.000	81,90	22.500.000	82	22.500.000	82	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						130.000.000		51.600.000		51.600.000		51.600.000		51.600.000		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	50	55	60	130.000.000	65	51.600.000	70	51.600.000	75	51.600.000	80	51.600.000	80	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**547.990.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**547.990.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		**579.000.000**		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	1217	1218	1219	50.000.000	1220	50.000.000	1221	50.000.000	1222	50.000.000	1223	50.000.000	1223	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						432.990.000		464.000.000		464.000.000		464.000.000		464.000.000		
Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	34150	34174	34198	432.990.000	34222	464.000.000	34246	464.000.000	34270	464.000.000	34294	464.000.000	34294	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Jumlah produksi pengolahan ikan	Produksi pengolahan ikan	Ton	242	244	246	65.000.000	248	65.000.000	250	65.000.000	252	65.000.000	254	65.000.000	254	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						**3.507.001.864**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						**3.507.001.864**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		**4.105.562.000**		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.717.176.864		2.344.477.000		2.344.477.000		2.344.477.000		2.344.477.000		
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	%	70	70	70,5	1.717.176.864	71	2.344.477.000	71,5	2.344.477.000	72	2.344.477.000	72,5	2.344.477.000	72,5	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						417.825.000		1.473.375.000		1.473.375.000		1.473.375.000		1.473.375.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Promosi potensi pariwisata yang dipasarkan	%	87,5	87,5	89	417.825.000	91	1.473.375.000	92,5	1.473.375.000	94	1.473.375.000	95	1.473.375.000	95	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	NA	0,01	0,02	0	0,05	25.000.000	0,07	25.000.000	0,08	25.000.000	0,1	25.000.000	0,1	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.372.000.000		262.710.000		262.710.000		262.710.000		262.710.000		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	2,5	2,5	5	1.372.000.000	7,5	262.710.000	10	262.710.000	12,5	262.710.000	15	262.710.000	15	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**39.500.516.000**		**41.262.275.000**		**41.359.375.000**		**41.507.475.000**		**41.649.575.000**		
DINAS PERTANIAN						**27.400.114.000**		**29.152.975.000**		**29.152.975.000**		**29.152.975.000**		**29.152.975.000**		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.083.560.000		16.072.877.000		16.072.877.000		16.072.877.000		16.072.877.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	%	100	100	100	16.083.560.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						6.359.314.000		6.899.858.000		6.899.858.000		6.899.858.000		6.899.858.000		
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan produksi Tanaman Pangan	%	8,74	0,02	0,04	268.500.000	0,06	700.000.000	0,08	700.000.000	0,1	700.000.000	0,12	700.000.000	0,12	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura	%	-22,77	0,019	0,038	431.500.000	0,057	390.544.000	0,076	390.544.000	0,095	390.544.000	0,144	390.544.000	0,144	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan	%	8,77	0,35	0,7	5.659.314.000	1,05	5.809.314.000	1,41	5.809.314.000	1,77	5.809.314.000	2,13	5.809.314.000	2,13	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN						4.029.000.000		4.467.000.000		4.467.000.000		4.467.000.000		4.467.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PRASARANA PERTANIAN																
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase cakupan luas LP2B yang dipertahankan	%	100	100	100	100.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	%	30,77	31,23	31,71	3.929.000.000	32,19	2.942.000.000	32,67	2.942.000.000	33,16	2.942.000.000	33,64	2.942.000.000	33,64	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						90.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kejadian Bencana di Sektor pertanian yang tertangani	%	80,65	80,73	80,81	90.000.000	80,89	500.000.000,00	80,97	500.000.000,00	81,06	500.000.000,00	81,14	500.000.000,00	81,14	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						838.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		
Terlaksananya pembinaan kelompok tani	Persentase kelompok tani yang memperoleh pembinaan	%	100	100	100	838.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**12.100.402.000**		**12.109.300.000**		**12.206.400.000**		**12.354.500.000**		**12.496.600.000**		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.520.898.000		9.105.408.000		9.164.400.000		9.327.500.000		9.481.600.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.520.898.000	100	9.105.408.000	100	9.164.400.000	100	9.327.500.000	100	9.481.600.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.569.000.000		2.018.892.000		2.057.000.000		2.042.000.000		2.030.000.000		
Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	7,6	0,7	0,7	1.400.000.000	0,7	1.849.892.000	0,7	1.888.000.000	0,7	1.873.000.000	0,7	1.861.000.000	0,7	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						169.000.000		169.000.000		169.000.000		169.000.000		169.000.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	%	50	50	60,00	169.000.000	70,00	169.000.000	80	169.000.000	90	169.000.000	100	169.000.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						2.010.504.000		985.000.000		985.000.000		985.000.000		985.000.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	Persentase Penanganan Penyakit Hewan yang terlaporkan	%	100	100	100	979.504.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pembinaan Pra NKV atau NKV Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang mengajukan	%	32	40	48	1.031.000.000	56	501.000.000	64	501.000.000	72	501.000.000	80	501.000.000	80	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**14.965.487.000**		**17.500.836.000**		**17.700.836.000**		**17.900.836.000**		**18.100.836.000**		
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**14.965.487.000**		**17.500.836.000**		**17.700.836.000**		**17.900.836.000**		**18.100.836.000**		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.333.385.000		15.670.836.000		15.670.836.000		15.670.836.000		15.670.836.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	14.333.385.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						0		0		0		0		0		
Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan yang diterbitkan	Rekomendasi perijinan yang diterbitkan	Dokumen	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						443.102.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		
Meningkatnya jumlah pasar dalam kondisi baik	Persentase pasar dalam kondisi baik	%	63,64	63,64	65,91	443.102.000	68,18	1.200.000.000	70,45	1.400.000.000	72,73	1.600.000.000	75	1.800.000.000	75	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						0		0		0		0		0		
Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jumlah barang pokok dalam kondisi stabil	%	56,25	58,82	60,00	0	62,00	0	64,00	0	66,00	0	68,00	0	68,00	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						125.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Meningkatnya kegiatan promosi usaha unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi usaha unggulan daerah yang diikuti	Kegiatan	0	4	4	125.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya alat ukur UTTP yang sudah terstandarisasi	Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	%	75	76	77	0	78	10.000.000	79	10.000.000	80	10.000.000	81	10.000.000	81	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						64.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya IKM yang mendapatkan fasilitasi pemasaran	Jumlah IKM yang difasilitasi pelatihan pemasaran	IKM	0	50	50	64.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						**163.860.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**163.860.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		**151.760.000**		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						163.860.000		151.760.000		151.760.000		151.760.000		151.760.000		
Meningkatnya IKM yang mengikuti pelatihan perindustrian	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan perindustrian	IKM	0	40	40	163.860.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		
DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA						**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya penempatan transmigran	Jumlah penempatan transmigran asal Kabupaten Boyolali	KK	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.0000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						**31.970.263.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		
SEKRETARIAT DAERAH						**31.970.263.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		**32.606.877.000**		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.404.297.000		23.400.842.000		23.400.842.000		23.400.842.000		23.400.842.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang	%	100	100	100	24.404.297.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	terpenuhi sesuai standar															
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						7.002.360.000		8.208.304.000		8.208.304.000		8.208.304.000		8.208.304.000		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase capaian kinerja tata kelola pemerintahan (Rata-rata capaian masing-masing kegiatan)	%	100	100	100	304.538.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kesejahteraan rakyat	Persentase Capaian kinerja Kesejahteraan Rakyat (Rata-rata capaian masing-masing kegiatan)	%	100	100	100	6.450.120.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase Rancangan Produk Hukum daerah yang diharmonisasi	%	100	100	100	247.702.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						563.606.000		997.731.000		997.731.000		997.731.000		997.731.000		
Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi daerah	Persentase capaian kinerja monev daerah	%	100	100	100	29.500.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,31	20	25	241.375.000	30	370.000.000	35	370.000.000	40	370.000.000	42	370.000.000	42	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah	Return On Asset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,09	15.000.000	2,09	350.000.000	2,09	350.000.000	2,1	350.000.000	2,1	350.000.000	2,1	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah	Persentase capaian kinerja kebijakan sumber daya alam	%	100	100	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
4.02 - SEKRETARIAT DPRD						**86.717.729.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		
SEKRETARIAT DPRD						**86.717.729.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		**82.759.378.000**		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41.657.318.000		41.321.591.000		41.321.591.000		41.416.591.000		41.321.591.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	41.657.318.000	100	41.321.591.000	100	41.321.591.000	100	41.416.591.000	100	41.321.591.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN						45.060.411.000		41.437.787.000		41.437.787.000		41.342.787.000		41.437.787.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	%	100	100	100	43.453.411.000	100	39.830.787.000	100	39.830.787.000	100	39.735.787.000	100	39.830.787.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5.01 - PERENCANAAN						**5.883.248.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**5.883.248.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		**6.017.708.000**		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.110.748.000		5.170.208.000		5.170.208.000		5.170.208.000		5.170.208.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.110.748.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						445.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000		
Meningkatnya capaian indikator program	Persentase capaian indikator program	%	100	100	100	445.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						327.000.000		327.000.000		327.000.000		327.000.000		327.000.000		
Meningkatnya keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN						**499.839.543.000**		**511.571.046.000**		**511.660.046.000**		**512.039.046.000**		**512.069.046.000**		
BADAN KEUANGAN DAERAH						**499.839.543.000**		**511.571.046.000**		**511.660.046.000**		**512.039.046.000**		**512.069.046.000**		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.122.917.000		38.203.790.000		38.292.790.000		38.371.790.000		38.401.790.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang	%	100	100	100	19.122.917.000	100	38.203.790.000	100	38.292.790.000	100	38.371.790.000	100	38.401.790.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	terpenuhi sesuai standar															
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						471.555.576.000		463.539.206.000		463.539.206.000		463.539.206.000		463.539.206.000		
Meningkatnya persentase realisasi belanja daerah	Persentase Realisasi Belanja Daerah	%	92	92	92,2	0	92,4	0	92,6	0	92,8	0	93	0	93	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD tepat waktu	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan Penyajian APBD yang transparan dan akuntabel	%	100	100	100	130.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terselenggaranya Penyusunan dan Penyanjian pertanggungjawaban APBD yang transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Penyajian Pertanggung jawaban APBD yang transparan, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan	%	100	100	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terkelolanya Bantuan Keuangan, Dana darurat mendesak dan DBH dengan baik	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana darurat dan mendesak dan DBH	%	100	100	100	471.216.626.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terintegrasinya sistem informasi keuangan	Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	%	100	100	100	39.150.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						907.900.000		939.900.000		939.900.000		939.900.000		939.900.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	98,65	98,65	98,70	907.900.000	98,75	939.900.000	98,80	939.900.000	98,85	939.900.000	98,90	939.900.000	98,90	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						8.253.150.000		8.888.150.000		8.888.150.000		9.188.150.000		9.188.150.000		
Meningkatnya Ketercapaian Penerimaan PAD	Ketercapaian Penerimaan PAD	Rupiah	538.701.689.777	603.023.969.000	628.898.864.000	25.000.000	660.343.806.000	25.000.000	666.947.244.000	25.000.000	673.616.717.000	25.000.000	680.352.884.000	25.000.000	680.352.884.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Ketercapaian Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	181.884.303.321	250.863.463.000	259.400.000.000	8.228.150.000	272.369.999.505	8.863.150.000	275.093.699.500	8.863.150.000	277.844.636.495	9.163.150.000	280.623.082.860	9.163.150.000	280.623.082.860	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03 - KEPEGAWAIAN						**22.536.343.500**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**22.536.343.500**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		**6.945.930.000**		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.414.503.500		5.750.030.000		5.750.030.000		5.750.030.000		5.750.030.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	21.414.503.500	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.121.840.000		1.195.900.000		1.195.900.000		1.195.900.000		1.195.900.000		
Terpenuhinya kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	%	80	80	81	890.920.000	82	1.061.000.000	83	1.061.000.000	84	1.061.000.000	85	1.061.000.000	85	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tingkat disiplin ASN	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	0,0008	0,0008	0,0008	130.920.000	0,0075	94.900.000	0,0007	94.900.000	0,0065	94.900.000	0,0006	94.900.000	0,0006	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Jumlah ASN yang memenuhi target SKP minimal Baik	%	99,90	99,90	99,90	0	99,90	0	99,90	0	99,90	0	99,90	0	99,90	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kompetensi ASN yang adaptif digital	Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	%	90	90	90,5	100.000.000	91	40.000.000	91,5	40.000.000	92	40.000.000	92,5	40.000.000	92,5	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**977.083.500**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**977.083.500**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		**1.340.920.000**		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						977.083.500		1.340.920.000		1.340.920.000		1.340.920.000		1.340.920.000		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	62,05	62,05	63,25	777.083.500	64,5	1.120.920.000	65,25	1.090.920.000,00	66,25	1.070.920.000	66,75	1.040.920.000	66,75	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan pengembangan jabatan fungsional	Persentase jabatan fungsional	%	5,16	5,16	5,3	200.000.000	5,52	220.000.000	5,75	250.000.000	6	270.000.000	6,14	300.000.000	6,14	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**720.210.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**720.210.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		**818.500.000**		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						276.960.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan kajian bidang penelitian dan	Persentase kajian bidang penelitian dan pengembangan	%	75	75	80	276.960.000	85	450.000.000	90	450.000.000	92	450.000.000	95	450.000.000	95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
pengembangan dalam perumusan kebijakan	yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan															Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						443.250.000		368.500.000		368.500.000		368.500.000		368.500.000		
Meningkatnya pelaksanaan riset dan inovasi	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	%	75	75	80	443.250.000	85	368.500.000	90	368.500.000	92	368.500.000	95	368.500.000	95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						**10.164.742.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						**10.164.742.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		**12.760.204.000**		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.228.469.000		11.655.896.000		11.655.896.000		11.655.896.000		11.655.896.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	9.228.469.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						77.313.000		71.513.000		71.513.000		71.513.000		71.513.000		
Meningkatnya penyelesaian laporan hasil pemeriksaan inspektorat	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	90	90	91	77.313.000	92	71.513.000	93	71.513.000	94	71.513.000	95	71.513.000	95	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Terselesaikannya aduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	94	94	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	98	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						858.960.000		1.032.795.000		1.032.795.000		1.032.795.000		1.032.795.000		
Meningkatnya perumusan kebijakan dan asistensi	Persentase Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	858.960.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN						**63.616.349.000**		**66.540.007.500**		**66.110.933.500**		**65.748.633.500**		**65.746.133.500**		
7.01 - KECAMATAN						**63.616.349.000**		**66.540.007.500**		**66.110.933.500**		**65.748.633.500**		**65.746.133.500**		
KECAMATAN BOYOLALI						**7.381.431.000**		**8.044.965.000**		**7.996.891.000**		**7.885.091.000**		**7.887.091.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.478.173.500		5.534.787.500		5.486.713.500		5.474.913.500		5.476.913.500		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang	%	100	100	100	5.478.173.500	100	5.534.787.500	100	5.486.713.500	100	5.474.913.500	100	5.476.913.500	100	Kecamatan Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Terpenuhi Sesuai Standar															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Kecamatan Boyolali
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.601.900.000		2.301.900.000		2.301.900.000		2.201.900.000		2.201.900.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1.601.900.000	100	2.301.900.000	100	2.301.900.000	100	2.201.900.000	100	2.201.900.000	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						50.580.000		44.900.000		44.900.000		44.900.000		44.900.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	50.580.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						50.777.500		63.377.500		63.377.500		63.377.500		63.377.500		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	50.777.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Boyolali
KECAMATAN MUSUK						**2.551.252.000**		**2.517.918.000**		**2.512.918.000**		**2.492.918.000**		**2.512.918.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN						2.414.252.000		2.382.918.000		2.377.918.000		2.357.918.000		2.377.918.000		Kecamatan Musuk

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.414.252.000	100	2.382.918.000	100	2.377.918.000	100	2.357.918.000	100	2.377.918.000	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Pembinaan Dan	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti															
KECAMATAN MOJOSONGO						**5.501.358.000**		**6.006.271.500**		**5.926.271.500**		**5.946.271.500**		**5.896.271.500**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.075.168.000		4.341.252.500		4.261.252.500		4.281.252.500		4.231.252.500		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	4.075.168.000	100	4.341.252.500	100	4.261.252.500	100	4.281.252.500	100	4.231.252.500	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						265.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	265.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	Kecamatan Mojosongo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.065.000.000		822.800.000		822.800.000		822.800.000		822.800.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1.065.000.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		57.050.000		57.050.000		57.050.000		57.050.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	57.050.000	100	57.050.000	100	57.050.000	100	57.050.000	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						96.190.000		110.169.000		110.169.000		110.169.000		110.169.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	96.190.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	Kecamatan Mojosongo

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Mojosongo
KECAMATAN TERAS						**2.243.107.000**		**2.414.799.000**		**2.389.799.000**		**2.389.799.000**		**2.389.799.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.106.107.000		2.270.299.000		2.245.299.000		2.245.299.000		2.245.299.000		Kecamatan Teras
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.106.107.000	100	2.270.299.000	100	2.245.299.000	100	2.245.299.000	100	2.245.299.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Teras
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000		Kecamatan Teras

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras
KECAMATAN BANYUDONO						**2.618.808.000**		**2.843.957.000**		**2.843.957.000**		**2.843.957.000**		**2.843.957.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.481.808.000		2.622.957.000		2.622.957.000		2.622.957.000		2.622.957.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.481.808.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	Kecamatan Banyudono
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Banyudono

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	yang ditindaklanjuti															
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Banyudono
KECAMATAN SAWIT						**2.411.396.000**		**2.307.358.000**		**2.302.358.000**		**2.282.358.000**		**2.302.358.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.274.396.000		2.172.358.000		2.167.358.000		2.147.358.000		2.167.358.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.274.396.000	100	2.172.358.000	100	2.167.358.000	100	2.147.358.000	100	2.167.358.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM KOORDINASI						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit
KECAMATAN SAMBI						**2.360.852.000**		**2.370.402.000**		**2.370.402.000**		**2.370.402.000**		**2.370.402.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.223.852.000		2.235.686.000		2.235.686.000		2.235.686.000		2.235.686.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.223.852.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Pemberdayaan	Persentase Hasil Pemberdayaan	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Sambi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti															
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		59.716.000		59.716.000		59.716.000		59.716.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi
KECAMATAN NGEMPLAK						**2.687.585.000**		**2.688.368.000**		**2.665.368.000**		**2.663.368.000**		**2.665.368.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.550.585.000		2.554.368.000		2.531.368.000		2.529.368.000		2.531.368.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.550.585.000	100	2.554.368.000	100	2.531.368.000	100	2.529.368.000	100	2.531.368.000	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak
KECAMATAN SIMO						**2.212.476.000**		**2.305.015.000**		**2.305.015.000**		**2.305.015.000**		**2.305.015.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.075.476.000		2.189.475.000		2.189.475.000		2.189.475.000		2.189.475.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.075.476.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PENYELENGGARAAN						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		40.540.000		40.540.000		40.540.000		40.540.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo
KECAMATAN NOGOSARI						**2.684.827.000**		**2.719.188.000**		**2.719.188.000**		**2.719.188.000**		**2.719.188.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.547.827.000		2.573.348.000		2.573.348.000		2.573.348.000		2.573.348.000		Kecamatan Nogosari

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.547.827.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		70.840.000		70.840.000		70.840.000		70.840.000		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KECAMATAN KLEGO						**3.086.127.000**		**3.146.745.000**		**3.116.745.000**		**3.096.745.000**		**3.116.745.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.949.127.000		2.981.745.000		2.951.745.000		2.931.745.000		2.951.745.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.949.127.000	100	2.981.745.000	100	2.951.745.000	100	2.931.745.000	100	2.951.745.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego
KECAMATAN ANDONG						**2.367.000.000**		**2.497.880.000**		**2.497.880.000**		**2.497.880.000**		**2.497.880.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.230.000.000		2.356.955.000		2.356.955.000		2.356.955.000		2.356.955.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.230.000.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	Kecamatan Andong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	Kecamatan Andong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		70.925.000		70.925.000		70.925.000		70.925.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	100	100	100	62.000.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	Kecamatan Andong

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Umum yang ditindaklanjuti															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong
KECAMATAN WONOSEGORO						**2.241.709.000**		**2.684.394.000**		**2.684.394.000**		**2.610.894.000**		**2.610.894.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.104.709.000		2.544.894.000		2.544.894.000		2.471.394.000		2.471.394.000		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.104.709.000	100	2.544.894.000	100	2.544.894.000	100	2.471.394.000	100	2.471.394.000	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN						62.000.000		64.500.000		64.500.000		64.500.000		64.500.000		Kecamatan Wonosegoro

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN UMUM																
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
KECAMATAN KARANGGEDE						**2.529.391.000**		**2.465.775.000**		**2.435.775.000**		**2.405.775.000**		**2.425.775.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.392.391.000		2.396.775.000		2.366.775.000		2.336.775.000		2.356.775.000		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.392.391.000	100	2.396.775.000	100	2.366.775.000	100	2.336.775.000	100	2.356.775.000	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kualitas Koordinasi	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti															
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
KECAMATAN KEMUSU						**2.649.013.000**		**2.653.356.000**		**2.648.356.000**		**2.628.356.000**		**2.648.356.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.512.013.000		2.517.756.000		2.512.756.000		2.492.756.000		2.512.756.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.512.013.000	100	2.517.756.000	100	2.512.756.000	100	2.492.756.000	100	2.512.756.000	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Kemusu

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.600.000		60.600.000		60.600.000		60.600.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
KECAMATAN JUWANGI						**3.309.842.000**		**3.380.386.000**		**3.300.386.000**		**3.320.386.000**		**3.270.386.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.840.174.000		2.799.230.000		2.719.230.000		2.739.230.000		2.689.230.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.840.174.000	100	2.799.230.000	100	2.719.230.000	100	2.739.230.000	100	2.689.230.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	Kecamatan Juwangi
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						397.668.000		178.156.000		178.156.000		178.156.000		178.156.000		Kecamatan Juwangi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	397.668.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						72.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	72.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Juwangi
KECAMATAN AMPEL						**2.342.157.000**		**2.492.652.000**		**2.487.652.000**		**2.467.652.000**		**2.487.652.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.205.157.000		2.354.102.000		2.349.102.000		2.329.102.000		2.349.102.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.205.157.000	100	2.354.102.000	100	2.349.102.000	100	2.329.102.000	100	2.349.102.000	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan	Persentase Layanan Publik	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan yang Tepat Waktu															
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		63.550.000		63.550.000		63.550.000		63.550.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel
KECAMATAN CEPOGO						**2.728.891.000**		**2.800.981.000**		**2.795.981.000**		**2.775.981.000**		**2.674.481.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.591.891.000		2.695.081.000		2.690.081.000		2.670.081.000		2.568.581.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.591.891.000	100	2.695.081.000	100	2.690.081.000	100	2.670.081.000	100	2.568.581.000	100	Kecamatan Cepogo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
KECAMATAN SELO						**2.791.337.000**		**2.765.875.000**		**2.760.875.000**		**2.740.875.000**		**2.775.875.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.654.337.000		2.617.775.000		2.612.775.000		2.592.775.000		2.627.775.000		Kecamatan Selo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.654.337.000	100	2.617.775.000	100	2.612.775.000	100	2.592.775.000	100	2.627.775.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Selo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		73.100.000		73.100.000		73.100.000		73.100.000		Kecamatan Selo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	yang ditindaklanjuti															
KECAMATAN GLADAGSARI						**2.198.142.000**		**2.441.865.000**		**2.436.865.000**		**2.416.865.000**		**2.436.865.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.061.142.000		2.307.540.000		2.302.540.000		2.282.540.000		2.302.540.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.061.142.000	100	2.307.540.000	100	2.302.540.000	100	2.282.540.000	100	2.302.540.000	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.325.000		69.325.000		69.325.000		69.325.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PEMBINAAN DAN						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
KECAMATAN TAMANSARI						**2.324.809.000**		**2.359.961.000**		**2.354.961.000**		**2.334.961.000**		**2.354.961.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.187.809.000		2.224.035.000		2.219.035.000		2.199.035.000		2.219.035.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.187.809.000	100	2.224.035.000	100	2.219.035.000	100	2.199.035.000	100	2.219.035.000	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.926.000		60.926.000		60.926.000		60.926.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Menyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan	%	100	100	100	62.000.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	Kecamatan Tamansari

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari
KECAMATAN WONOSAMODRO						**2.394.839.000**		**2.631.896.000**		**2.558.896.000**		**2.553.896.000**		**2.553.896.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.257.839.000		2.504.246.000		2.431.246.000		2.426.246.000		2.426.246.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.257.839.000	100	2.504.246.000	100	2.431.246.000	100	2.426.246.000	100	2.426.246.000	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		52.650.000		52.650.000		52.650.000		52.650.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						**6.433.532.000**		**7.867.390.000**		**7.867.390.000**		**26.667.390.000**		**36.067.390.000**		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.433.532.000**		**7.867.390.000**		**7.867.390.000**		**26.667.390.000**		**36.067.390.000**		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.433.532.000**		**7.867.390.000**		**7.867.390.000**		**26.667.390.000**		**36.067.390.000**		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.088.837.000		3.630.320.000		3.630.320.000		3.630.320.000		3.630.320.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	%	100	100	100	3.088.837.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						958.300.000		735.670.000		735.670.000		735.670.000		735.670.000		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	70	70	73	958.300.000	76	735.670.000	79	735.670.000	82	735.670.000	85	735.670.000	85	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.179.695.000		1.215.000.000		1.215.000.000		20.015.000.000		29.415.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Masyarakat yang paham tentang politik	%	70	70	73	1.179.695.000	76	1.215.000.000	79	1.215.000.000	82	20.015.000.000	85	29.415.000.000	85	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						1.100.000.000		1.779.600.000		1.779.600.000		1.779.600.000		1.779.600.000		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas	%	70	70	73	1.100.000.000	76	1.779.600.000	79	1.779.600.000	82	1.779.600.000	85	1.779.600.000	85	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						0		385.000.000		385.000.000		385.000.000		385.000.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Konflik SARA yang diselesaikan	%	100	100	100	0	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						106.700.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	106.700.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				TOTAL:	**2.501.707.748.000**		**2.525.711.044.000**		**2.550.538.154.000**		**2.575.613.536.000**		**2.600.939.671.000**			

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 2
Penjabaran Cascading Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
BOYOLALI MAJU																
Misi 1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah																
Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,64**	**5,70-5,94**	**5,80-6,00**		**5,86-6,06**		**5,92-6,12**		**5,98-6,19**		**6,04-6,25**		**6,04-6,25**	
Sasaran 1.1. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**80,71**	**80,97**	**81,32**		**81,50**		**81,64**		**81,79**		**81,94**		**81,94**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.458.690.000		17.981.830.000		19.826.830.000		18.084.830.000		18.094.830.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	18.458.690.000	100	17.981.830.000	100	19.826.830.000	100	18.084.830.000	100	18.094.830.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						16.749.325.000		12.847.375.000		14.865.000.000		15.605.000.000		17.845.000.000		
Meningkatnya daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kinerja irigasi kewenangan Kabupaten	Angka	64,88	65	65,25	16.749.325.000	65,5	12.847.375.000	65,75	14.865.000.000	66	15.605.000.000	66,25	17.845.000.000	66,25	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						9.780.289.000		9.645.000.000		9.720.000.000		9.835.000.000		9.835.000.000		
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air minum yang layak	%	97,56	100	100	9.780.289.000	100	9.645.000.000	100	9.720.000.000	100	9.835.000.000	100	9.835.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						450.000.000		1.040.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Kapasitas sampah yang dapat dikelola tiap hari	Ton/hari	0	0	0,4	450.000.000	0,4	1.040.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.080.000.000	0,4	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						3.379.700.000		3.347.500.000		3.370.000.000		3.470.000.000		3.570.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah yang aman	%	29,24	29,28	29,3	3.379.700.000	29,33	3.347.500.000	29,37	3.370.000.000	29,4	3.470.000.000	29,42	3.570.000.000	29,42	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						42.430.000.000		16.720.500.000		17.565.000.000		17.640.000.000		17.650.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan peruntukannya	Persentase pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan peruntukannya	%	93,25	93,4	93,7	42.430.000.000	94	16.720.500.000	94,25	17.565.000.000	94,5	17.640.000.000	94,6	17.650.000.000	94,6	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						1.200.000.000		1.200.000.000		1.323.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan gedung dan lingkungannya sesuai kewenangan kabupaten	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.323.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						89.645.015.000		105.740.804.520		127.302.845.800		103.667.400.050		92.567.175.550		
Meningkatnya kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,2	83,32	83,52	89.645.015.000	83,72	105.740.804.520	83,92	127.302.845.800	84,12	103.667.400.050	84,32	92.567.175.550	84,32	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						384.589.000		440.000.000		450.000.000		460.000.000		470.000.000		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang tidak mengalami kecelakaan kerja	%	0	100	100	384.589.000	100	440.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	470.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.867.500.000		2.333.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		2.170.000.000		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang terhadap total Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dalam suatu wilayah kabupaten dalam periode tertentu	%	0	96,8	97	1.867.500.000	97,25	2.333.000.000	97,5	2.170.000.000	97,75	2.170.000.000	98	2.170.000.000	98	1.03.2.10.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Menyelesaikan sengketa tanah garapan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.03.2.10.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.826.326.500		11.746.076.000		12.353.976.000		12.700.676.000		12.988.476.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.826.326.500	100	11.746.076.000	100	12.353.976.000	100	12.700.676.000	100	12.988.476.000	100	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						31.025.250.000		48.825.980.780		39.825.000.000		41.195.000.000		40.695.000.000		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lalu lintas angkutan	Persentase penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan	%	100	100	100	27.010.000.000	100	42.755.980.780	100	32.625.000.000	100	32.855.000.000	100	32.075.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	%	100	100	100	1.025.250.000	100	920.000.000	100	980.000.000	100	1.040.000.000	100	250.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	%	100	100	100	2.990.000.000	100	5.150.000.000	100	6.220.000.000	100	7.300.000.000	100	8.370.000.000	100	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	**%**	**94,25**	**94,5**	**94,75**		**95**		**95,25**		**95,5**		**95,75**		**95,75**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.918.281.000		3.419.598.000		3.339.598.000		3.359.598.000		3.339.598.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	2.918.281.000	100	3.419.598.000	100	3.339.598.000	100	3.359.598.000	100	3.339.598.000	100	1.04.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						299.156.000		1.788.370.000		1.688.370.000		1.688.370.000		1.688.370.000		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	%	100	100	100	299.156.000	100	1.788.370.000	100	1.688.370.000	100	1.688.370.000	100	1.688.370.000	100	1.04.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						562.370.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		
Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	0	3,49	4,02	562.370.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	4,83	675.000.000	26,83	1.04.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						6.245.320.000		8.088.000.000		8.088.000.000		8.088.000.000		8.088.000.000		
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,64	4,28	2,24	6.245.320.000	2,29	8.088.000.000	2,34	8.088.000.000	2,4	8.088.000.000	2,46	8.088.000.000	2,46	1.04.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						21.640.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya Penyediaan (PSU) Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0	2,67	2,75	21.640.000	2,82	450.000.000	2,91	450.000.000	2,99	450.000.000	3,09	450.000.000	3,09	1.04.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 1.3. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	**Indeks Desa**	**Angka**	**0,7707**	**0,7515**	**0,7699**		**0,7883**		**0,8067**		**0,8251**		**0,8435**		**0,8435**	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.856.070.000		5.847.499.200		5.847.499.200		5.847.499.200		5.847.499.200		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.856.070.000	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	5.847.499.200	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA						190.175.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	190.175.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						5.300.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	5.300.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						3.379.555.000		19.880.000.000		10.226.587.500		9.620.431.250		10.078.077.750		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100	2.990.000.000	100	3.350.000.000	100	541.062.500	100	970.431.250	100	159.168.750	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	389.555.000	100	16.530.000.000	100	9.685.525.000	100	8.650.000.000	100	9.918.909.000	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						322.993.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	%	100	100	100	100.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Kemasyarakatan Desa (LKD)															
	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	3,83	3,83	3,83	0	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	500.000.000	3,83	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	92.993.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Peningkatan Klasifikasi BUMDes (Lembaga)	%	10	10	10	60.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Lembaga)	%	10	10	10	70.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	2.13.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BOYOLALI NYAMAN DIHUNI																
Misi 2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan																
Sasaran 1.4. Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana	**Indeks Risiko Bencana**	**Angka**	**94,67**	**92,49**	**91,41**		**89,23**		**88,14**		**87,05**		**85,96**		**85,96**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.421.507.000		5.070.639.000		5.102.139.000		4.852.139.000		5.082.139.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.421.507.000	100	5.070.639.000	100	5.102.139.000	100	4.852.139.000	100	5.082.139.000	100	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.460.744.000		1.916.160.000		1.884.660.000		2.134.660.000		1.904.660.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Bencana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100	4,47	232.150.000	4,88	80.000.000	5,28	140.000.000	5,68	120.000.000	6,07	130.000.000	6,07	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	0,49	527.594.000	0,50	814.860.000	0,51	699.860.000	0,53	919.860.000	0,54	679.860.000	0,54	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	226.015.000	100	302.800.000	100	325.800.000	100	375.800.000	100	375.800.000	100	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatkan Daya Lenting Masyarakat Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Indeks Pemulihan Pascabencana	Nilai	0,74	0,78	0,82	376.685.000	0,86	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	700.000.000	0,9	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase lembaga yang terlibat dalam menghadapi bencana	%	100	100	100	98.300.000,00	100	18.500.000,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000	100	19.000.000	100	1.05.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SASARAN 1.5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	**ton CO2Eq**	**n/a**	**1.335.975,00**	**1.496.777,00**		**1.680.913,00**		**1.892.658,00**		**2.137.234,00**		**2.421.045,00**		**2.421.045,00**	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.454.430.000		16.900.000.000		16.900.000.000		16.900.000.000		16.900.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	16.454.430.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	16.900.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						239.950.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia	%	100	100	100	239.950.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						892.996.000		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		
Telaksanannya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau badan air dengan kategori minimal sedang	%	0	71	74	892.996.000	77	1.650.000.000	80	1.650.000.000	83	1.650.000.000	85	1.650.000.000	85	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						3.100.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		5.650.000.000		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase pemenuhan RTH Publik	%	34,56	34,59	34,62	3.100.000.000	34,66	5.650.000.000	34,69	5.650.000.000	34,73	5.650.000.000	34,76	5.650.000.000	34,76	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						42.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	90,31	90,33	90,34	42.500.000	90,36	50.000.000	90,38	50.000.000	90,39	50.000.000	90,41	50.000.000	90,41	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						105.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan sesuai izin lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	90	90	91	105.000.000	92	150.000.000	93	150.000.000	94	150.000.000	95	150.000.000	95	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						0		110.000.000		135.000.000		150.000.000		175.000.000		
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelola Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga di desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0	100	0	100	110.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi entitas/masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0	0	30	0	35	150.000.000	35	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						5.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Optimalisasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	%	0	100	100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3.401.690.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	61,6	65	69	3.401.690.000	73	2.950.000.000	77	2.950.000.000	80	2.950.000.000	82	2.950.000.000	82	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
BOYOLALI RAMAH INVESTASI																
Misi 5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan																
Sasaran 1.6. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	**Pertumbuhan investasi**	**%**	**1,7**	**2,1**	**2,4**		**2,8**		**3,2**		**3,5**		**3,7**		**3,7**	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.333.385.000		15.670.836.000		15.670.836.000		15.670.836.000		15.670.836.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	14.333.385.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	15.670.836.000	100	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						0		0		0		0		0		
Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan yang diterbitkan	rekomendasi perijinan yang diterbitkan	Dokumen	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						443.102.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		
Meningkatnya jumlah pasar dalam kondisi baik	Persentase pasar dalam kondisi baik	%	63,64	63,64	65,91	443.102.000	68,18	1.200.000.000	70,45	1.400.000.000	72,73	1.600.000.000	75	1.800.000.000	75	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						0		0		0		0		0		
Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jumlah barang pokok dalam kondisi stabil	%	56,25	58,82	60	0	62	0	64	0	66	0	68	0	68	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						125.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		
Meningkatnya kegiatan promosi usaha unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi usaha unggulan daerah yang diikuti	Kegiatan	0	4	4	125.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	570.000.000	4	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya alat ukur UTTP yang sudah terstandarisasi	Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	%	75	76	77	0	78	10.000.000	79	10.000.000	80	10.000.000	81	10.000.000	81	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						64.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya IKM yang mendapatkan fasilitasi pemasaran	Jumlah IKM yang difasilitasi pelatihan pemasaran	IKM	0	50	50	64.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						163.860.000		151.760.000		151.760.000		151.760.000		151.760.000		
Meningkatnya IKM yang mengikuti pelatihan perindustrian	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan perindustrian	IKM	0	40	40	163.860.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	151.760.000	40	3.30.3.31.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.520.898.000		9.105.408.000		9.164.400.000		9.327.500.000		9.481.600.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.520.898.000	100	9.105.408.000	100	9.164.400.000	100	9.327.500.000	100	9.481.600.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	1217	1218	1219	50.000.000	1220	50.000.000	1221	50.000.000	1222	50.000.000	1223	50.000.000	1223	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						432.990.000		464.000.000		464.000.000		464.000.000		464.000.000		
Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	34150	34174	34198	432.990.000	34222	464.000.000	34246	464.000.000	34270	464.000.000	34294	464.000.000	34294	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Jumlah produksi pengolahan ikan	Produksi pengolahan ikan	Ton	242	244	246	65.000.000	248	65.000.000	250	65.000.000	252	65.000.000	254	65.000.000	254	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.083.560.000		16.072.877.000		16.072.877.000		16.072.877.000		16.072.877.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	%	100	100	100	16.083.560.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	16.072.877.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						7.759.314.000		8.749.750.000		8.787.858.000		8.772.858.000		8.760.858.000		
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan produksi Tanaman Pangan	%	8,74	0,02	0,04	268.500.000	0,06	700.000.000	0,08	700.000.000	0,1	700.000.000	0,12	700.000.000	0,12	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura	%	-22,77	0,02	0,04	431.500.000	0,06	390.544.000	0,08	390.544.000	0,1	390.544.000	0,12	390.544.000	0,12	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan	%	8,77	0,35	0,7	5.659.314.000	1,05	5.809.314.000	1,41	5.809.314.000	1,77	5.809.314.000	2,13	5.809.314.000	2,13	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	7,6	0,7	0,7	1.400.000.000	0,7	1.849.892.000	0,7	1.888.000.000	0,7	1.873.000.000	0,7	1.861.000.000	0,7	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			-			4.198.000.000		4.636.000.000		4.636.000.000		4.636.000.000		4.636.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase cakupan luas LP2B yang dipertahankan	%	100	100	100	100.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	1.525.000.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	%	30,77	31,21	31,65	3.929.000.000	32,09	2.942.000.000	32,53	2.942.000.000	32,97	2.942.000.000	33,41	2.942.000.000	33,41	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	%	50	50	60	169.000.000	70	169.000.000	80	169.000.000	90	169.000.000	100	169.000.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						2.010.504.000		985.000.000		985.000.000		985.000.000		985.000.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	Persentase Penanganan Penyakit Hewan yang terlaporkan	%	100	100	100	979.504.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pembinaan Pra NKV atau NKV Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang mengajukan	%	32	40	48	1.031.000.000	56	501.000.000	64	501.000.000	72	501.000.000	80	501.000.000	80	3.27.0.00.3.25.01.0000 - Dinas Peternakan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						90.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kejadian Bencana di Sektor pertanian yang tertangani	%	80,65	80,73	80,81	90.000.000	80,89	500.000.000,00	80,97	500.000.000,00	81,06	500.000.000,00	81,14	500.000.000,00	81,14	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						838.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		1.213.240.000		
Terlaksananya pembinaan kelompok tani	Persentase kelompok tani yang memperoleh pembinaan	%	100	100	100	838.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	1.213.240.000	100	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.509.121.000		4.301.020.000		4.301.020.000		4.301.020.000		4.301.020.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.509.121.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	4.301.020.000	100	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						52.150.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		
Tercapainya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	52.150.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						81.900.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	10	10	10,5	81.900.000	11	105.000.000	11,5	105.000.000	12	105.000.000	12,5	105.000.000	12,5	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						155.800.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97	97	97	155.800.000	98	65.000.000	98	65.000.000	98	65.000.000	99	65.000.000	99	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						49.350.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi LKPM	%	12	12	12,5	49.350.000	13	154.000.000	13,5	154.000.000	14	154.000.000	14,5	154.000.000	14,5	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
																Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						306.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	306.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SASARAN 1.7 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan	**Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap Provinsi Jawa Tengah**	**%**	**2,52**	**2,55**	**2,58**		**2,61**		**2,64**		**2,67**		**2,7**		**2,7**	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.843.792.000		6.501.463.000		6.501.463.000		6.501.463.000		6.501.463.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.843.792.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	6.501.463.000	100	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						0		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	0	0	5,6	0	5,8	185.000.000	6,0	185.000.000	6,2	185.000.000	6,4	185.000.000	6,4	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						0		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kepatuhan terhadap peraturan	%	0	0	40,21	0	40,3	135.000.000	40,5	135.000.000	40,75	135.000.000	40,9	135.000.000	40,9	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	perundang-undangan															
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						150.000.000		80.700.000		80.700.000		80.700.000		80.700.000		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase peningkatan KSP/USP Koperasi yang meningkat nilai kesehatannya	%	0,28	0,28	0,3	150.000.000	0,3	80.700.000	0,3	80.700.000	0,35	80.700.000	0,36	80.700.000	0,36	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						250.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	40	45	50	250.000.000	55	70.000.000	60	70.000.000	65	70.000.000	70	70.000.000	70	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						100.000.000		700.000.000		825.000.000		900.000.000		975.000.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	0,27	0,27	0,27	100.000.000	0,31	700.000.000	0,31	825.000.000	0,39	900.000.000	0,39	975.000.000	0,39	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						0		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		
Meningkatnya daya saing UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0	0	3,04	0	3,22	150.000.000	3,41	200.000.000	3,5	225.000.000	3,63	250.000.000	3,63	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.781.984.736		8.225.411.000		8.225.411.000		8.225.411.000		8.225.411.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.781.984.736	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	8.225.411.000	100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						116.700.000		142.550.000		142.550.000		142.550.000		142.550.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	80	80	81	116.700.000	82	142.550.000	83	142.550.000	84	142.550.000	85	142.550.000	85	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4.257.748.400		5.388.400.000		5.388.400.000		5.388.400.000		5.388.400.000		
Meningkatnya prestasi atlet	Persentase pembinaan cabang olahraga	%	87,5	87,5	89	4.257.748.400	91	5.388.400.000	92,5	5.388.400.000	94	5.388.400.000	95	5.388.400.000	95	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	%	100	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
SASARAN 1.8 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**3,16**	**3,09**	**3,02**		**2,95**		**2,88**		**2,81**		**2,74**		**2,74**	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase jumlah Instansi/Lembaga/Perusahaan yang menyusun RTK	%	0	0	20	50.000.000	40	50.000.000	60	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	2.17.2.07.3.32.01.0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,87	71	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	4.650.000.000	71	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	94,13	94	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	800.000.000	94	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						212.400.000		212.400.000		212.400.000		212.400.000		212.400.000		
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,45	55,55	59,36	212.400.000	62,4	212.400.000	65,6	212.400.000	68,96	212.400.000	72,31	212.400.000	72,31	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya penempatan transmigran	Jumlah penempatan transmigran asal Kabupaten Boyolali	KK	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	1.500.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	2.17.2.07.3.32.01 .0000 - Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
BOYOLALI BERDAYA SAING																
MISI 3. Mewujudkan Sumber daya Manusia Unggul, Sehat Cerdas dan Berjiwa Pancasila																
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**9,63**	**9,63-9,27**	**9,27-9,09**		**8,68-8,51**		**8,07-7,92**		**7,47-7,32**		**6,89-6,74**		**6,89-6,74**	
Sasaran 2.1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**75,96**	**76,7**	**77**		**77,3**		**77,61**		**77,91**		**78,21**		**78,21**	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						601.220.722.000		593.536.655.000		593.536.655.000		593.536.655.000		593.536.655.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	601.220.722.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	593.536.655.000	100	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						132.213.745.000		132.444.445.000		132.444.445.000		132.444.445.000		132.444.445.000		
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	90,6	90,7	90,8	62.477.192.000	90,9	61.191.106.000	91	61.191.106.000	91,1	61.191.106.000	91,2	61.191.106.000	91,2	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	85,75	85,85	85,95	4.131.497.000	86,05	3.228.897.000	86,15	3.228.897.000	86,25	3.228.897.000	86,35	3.228.897.000	86,35	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	89,75	89,85	89,95	40.485.129.000	90,05	38.781.000.000	90,15	38.781.000.000	90,25	38.781.000.000	90,35	38.781.000.000	90,35	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	80,26	80,36	80,46	3.451.027.000	80,56	3.678.842.000	80,66	3.678.842.000	80,76	3.678.842.000	80,86	3.678.842.000	80,86	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	89,93	90,03	90,13	18.222.800.000	90,23	22.620.400.000	90,33	22.620.400.000	90,43	22.620.400.000	90,53	22.620.400.000	90,53	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A	%	100	100	100	3.446.100.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	2.944.200.000	100	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						13.456.738.000		8.417.910.000		8.417.910.000		8.417.910.000		8.417.910.000		
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,8	96	96,4	13.456.738.000	96,9	8.417.910.000	97,3	8.417.910.000	97,6	8.417.910.000	98	8.417.910.000	98	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		
Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Obyek	0	0	21	1.420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	21	1.01.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						2.564.859.000		1.419.000.000		1.419.000.000		1.419.000.000		1.419.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kelompok kesenian yang mendapat pembinaan	Persentase kelompok seni yang dibina	%	29	29	30	2.564.859.000	30,02	1.419.000.000	30,05	1.419.000.000	30,06	1.419.000.000	30,07	1.419.000.000	30,07	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						596.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	85	85	85,01	596.000.000	85,03	390.000.000	85,05	390.000.000	85,06	390.000.000	85,07	390.000.000	85,07	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						808.355.000		808.355.000		808.355.000		808.355.000		808.355.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Koleksi Museum dengan Baik	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	%	95,25	95,25	95,27	808.355.000	95,28	808.355.000	95,29	808.355.000	95,3	808.355.000	95,31	808.355.000	95,31	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						436.851.024.618		440.171.922.000		464.231.734.000		488.290.584.000		512.350.413.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	188.926.202.618	100	184.071.922.000	100	185.131.734.000	100	186.190.584.000	100	187.250.413.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD PA)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD PA	%	100	100	100	172.136.622.000	100	181.000.000.000	100	201.000.000.000	100	221.000.000.000	100	241.000.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD SIMO)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD SIMO	%	100	100	100	37.100.000.000	100	38.000.000.000	100	40.000.000.000	100	42.000.000.000	100	44.000.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (RSUD Waras Wiris)	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar RSUD WARAS WIRIS	%	100	100	100	38.688.200.000	100	37.100.000.000	100	38.100.000.000	100	39.100.000.000	100	40.100.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						145.098.623.382		133.092.856.000		126.920.730.000		127.238.384.000		127.566.148.000		
Meningkatnya cakupan imunisasi bayi	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97	97	97	697.815.000	98	680.808.000	99	680.891.000	99	680.974.000	99	681.057.000	99	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	%	40,98	40,98	40,98	55.439.862.775	40,98	47.553.838.000	50,82	41.342.357.000	50,82	41.620.656.000	60,66	41.909.065.000	60,66	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Kab/Kota Sehat	%	100	100	100	3.234.126.300	100	2.957.042.000	100	2.957.042.000	100	2.957.042.000	100	2.957.042.000	100	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya kasus stunting pada balita	Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	3	3	2,3	6.202.242.000	1,7	6.218.781.000	1,5	6.219.770.000	1,3	6.220.759.000	1	6.221.748.000	1	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gratis	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	30	40	2.361.113.200	50	2.129.987.200	60	2.138.012.200	70	2.146.037.200	80	2.154.062.200	80	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD Pandanarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (RSUD PA)	%	100	100	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD Simo	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (RSUD SIMO)	%	100	100	100	1.196.749.000	100	1.196.749.000	100	1.196.749.000	100	1.196.749.000	100	1.196.749.000	100	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD WARAS WIRIS	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (RSUD Waras Wiris)	%	100	100	100	1.763.000.000	100	1.763.000.000	100	1.763.000.000	100	1.763.000.000	100	1.763.000.000	100	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	10	10	20	19.750.000	35	20.007.000	45	20.264.000	50	20.521.000	55	20.778.000	55	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	98	98,48	64.600.592.307	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	60.998.852.000	98,48	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Angka	15	15	14,5	3.506.551.300	14	3.496.490.800	13,5	3.526.491.800	13	3.556.492.800	12,5	3.586.493.800	12,5	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penanganan TB	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90	90	90	2.615.580.800	90	2.451.970.800	90	2.451.970.800	90	2.451.970.800	90	2.451.970.800	90	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	62	62	64	10.000.000	67	196.075.000	69	196.075.000	71	196.075.000	73	196.075.000	73	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penanganan HIV	ODHIV (orang dengan HIV) baru yang ditemukan memulai minum obat ARV	%	90	90	91	1.601.240.700	92	1.579.255.200	93	1.579.255.200	94	1.579.255.200	95	1.579.255.200	95	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.321.224.000		1.215.055.000		1.215.055.000		1.215.055.000		1.215.055.000		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,42	2,42	2,44	1.321.224.000	2,48	1.215.055.000	2,52	1.215.055.000	2,56	1.215.055.000	2,6	1.215.055.000	2,6	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						414.772.000		341.030.000		341.030.000		341.030.000		341.030.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	83,5	83,5	84	270.580.000	84,5	196.838.000	85	196.838.000	85,5	196.838.000	86	196.838.000	86	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya keamanan pangan	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	75	75	76	144.192.000	77	144.192.000	78	144.192.000	79	144.192.000	80	144.192.000	80	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						211.956.000		184.036.000		184.036.000		184.036.000		184.036.000		
Meningkatnya jumlah desa yang memiliki minimal 4 jenis UKBM	persentase desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	%	87,64	87,64	90,26	211.956.000	92,88	184.036.000	95,5	184.036.000	98,12	184.036.000	100	184.036.000	100	1.02.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kesehatan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.717.176.864		2.344.477.000		2.344.477.000		2.344.477.000		2.344.477.000		
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	%	70	70	70,5	1.717.176.864	71	2.344.477.000	71,5	2.344.477.000	72	2.344.477.000	72,5	2.344.477.000	72,5	2.19.3.26.0.00.01 .0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						417.825.000		1.473.375.000		1.473.375.000		1.473.375.000		1.473.375.000		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Promosi potensi pariwisata yang dipasarkan	%	87,5	87,5	89	417.825.000	91	1.473.375.000	92,5	1.473.375.000	94	1.473.375.000	95	1.473.375.000	95	2.19.3.26.0.00.01 .0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.372.000.000		262.710.000		262.710.000		262.710.000		262.710.000		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	2,5	2,5	5	1.372.000.000	7,5	262.710.000	10	262.710.000	12,5	262.710.000	15	262.710.000	15	2.19.3.26.0.00.01 .0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki	%	NA	0,01	0,02	0	0,05	25.000.000	0,07	25.000.000	0,08	25.000.000	0,1	25.000.000	0,1	2.19.3.26.0.00.01 .0000 - Dinas Pemuda, Olah

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kekayaan intelektual															
Sasaran 2.2. Penguatan pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender	**1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Angka**	**63,78**	**64,54-64,55**	**65,31 – 65,32**		**66,08 – 66,09**		**66,84 – 66,87**		**67,61 – 67,64**		**68,38 – 68,41**		**68,38 – 68,41**	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.090.826.000		3.767.250.000		3.767.250.000		3.767.250.000		3.767.250.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.090.826.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	3.767.250.000	100	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						575.200.000		505.200.000		505.200.000		505.200.000		505.200.000		
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	27	33	40	575.200.000	47	505.200.000	53	505.200.000	60	505.200.000	67	505.200.000	67	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	21,4	21,5	21,6	0	21,7	0	21,8	0	22	0	22,2	0	22,2	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		10.320.800.000		

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	31,3	33,3	35,3	10.320.800.000	37,3	10.320.800.000	39,3	10.320.800.000	41,3	10.320.800.000	43,3	10.320.800.000	43,3	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						6.060.000.000		6.559.797.000		6.559.797.000		6.559.797.000		6.559.797.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	39	48	52	6.060.000.000	55	6.559.797.000	58	6.559.797.000	60	6.559.797.000	65	6.559.797.000	65	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 2.2. Penguatan pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender	**2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	**Angka**	**0,233**	**0,233-0,216**	**0,23 – 0,213**		**0,228 – 0,202**		**0,226 – 0,192**		**0,223 – 0,182**		**0,221 – 0,172**		**0,221 – 0,172**	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						118.363.000		38.233.000		38.233.000		38.233.000		38.233.000		
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	%	2,56	2,56	2,58	70.000.000	2,6	2.000.000	2,62	2.000.000	2,64	2.000.000	2,68	2.000.000	2,68	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pejabat Publik Perempuan	%	6,67	6,67	6,76	48.363.000	6,85	36.233.000	6, 94	36.233.000	7,03	36.233.000	7,12	36.233.000	7,12	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
																Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						21.600.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penanganan kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Korban Kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prevalensi kasus kekerasan pada Perempuan	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	%	7	7	6,59	21.600.000	6,5	14.000.000	6,4	14.000.000	6,3	14.000.000	6,2	14.000.000	6,2	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						111.100.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	%	85	90	92	111.100.000	94	18.500.000	96	18.500.000	98	18.500.000	100	18.500.000	100	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						225.100.000		115.400.000		115.400.000		115.400.000		115.400.000		
Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Mendapat Layanan	%	100	100	100	225.100.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	115.400.000	100	2.14.2.08.0.00.01 .0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
																Perlindungan Anak
Sasaran 2.3. Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan	**Rasio Gini**	**Angka**	**0,370****	**0,365**	**0,364**		**0,363**		**0,361**		**0,36**		**0,359**		**0,359**	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.019.967.000		3.224.080.000		3.224.080.000		3.224.080.000		3.224.080.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	3.019.967.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	3.224.080.000	100	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase kelompok lumbung pangan yang aktif	%	25,32	26	27	0	28	10.000.000	29	10.000.000	30	10.000.000	31	10.000.000	31	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.104.672.000		1.165.000.000		1.165.000.000,00		1.165.000.000,00		1.165.000.000,00		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan oleh masyarakat	Persentase Kelompok/ UMKM yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan	%	40,51	42	43	480.772.000	44	700.000.000	45	700.000.000	46	700.000.000	47	700.000.000	47	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Distribusi Pangan yang Dapat diakses Masyarakat	%	100	100	100	378.300.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	%	21,95	31,73	50	245.600.000	75	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						149.780.000		222.000.000		222.000.000		222.000.000		222.000.000		
Meningkatnya upaya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,5	4,1	3,7	149.780.000	3,4	222.000.000	3	222.000.000	2,6	222.000.000	2,2	222.000.000	2,2	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						111.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Meningkatnya pengawasan kualitas pangan aman	Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi)	%	87,8	88	88,5	111.000.000	89	90.000.000	89,5	90.000.000	90	90.000.000	90,5	90.000.000	90,5	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.951.225.000		5.579.910.000		5.579.910.000		5.579.910.000		5.579.910.000		
Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.951.225.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	5.579.910.000	100	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						166.410.000		142.710.000		142.710.000		142.710.000		142.710.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	166.410.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	142.710.000	100	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.812.090.000		1.655.640.000		1.655.640.000		1.655.640.000		1.655.640.000		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS yang ditangani	%	100	100	100	1.812.090.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.655.640.000	100	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						5.803.250.000		5.995.450.000		5.995.450.000		5.995.450.000		5.995.450.000		
Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi	%	100	100	100	5.803.250.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	5.995.450.000	100	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kebutuhan dasar															
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA						651.100.000		585.150.000		585.150.000		585.150.000		585.150.000		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	100	100	651.100.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	585.150.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						84.141.000		234.141.000		234.141.000		234.141.000		234.141.000		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan TMP sesuai standar	%	100	100	100	84.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	234.141.000	100	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan demokratis, dengan didukung aparatur profesional, berintegritas, responsif dan inovatif																
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**76,5**	**77,63**	**77,97**		**78,31**		**78,66**		**79**		**79,34**		**79,34**	
Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional	**1. Indeks Pelayanan Publik**	**Angka**	**4,51**	**4,52**	**4,53**		**4,54**		**4,55**		**4,56**		**4,57**		**4,57**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.478.173.500		5.534.787.500		5.486.713.500		5.474.913.500		5.476.913.500		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	5.478.173.500	100	5.534.787.500	100	5.486.713.500	100	5.474.913.500	100	5.476.913.500	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Kecamatan Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.601.900.000		2.301.900.000		2.301.900.000		2.201.900.000		2.201.900.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1.601.900.000	100	2.301.900.000	100	2.301.900.000	100	2.201.900.000	100	2.201.900.000	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						50.580.000		44.900.000		44.900.000		44.900.000		44.900.000		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	50.580.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	44.900.000	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						50.777.500		63.377.500		63.377.500		63.377.500		63.377.500		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	50.777.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	63.377.500	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Boyolali
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Boyolali
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.414.252.000		2.382.918.000		2.377.918.000		2.357.918.000		2.377.918.000		Kecamatan Musuk
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.414.252.000	100	2.382.918.000	100	2.377.918.000	100	2.357.918.000	100	2.377.918.000	100	Kecamatan Musuk

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Kecamatan Musuk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Musuk
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Musuk

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.075.168.000		4.341.252.500		4.261.252.500		4.281.252.500		4.231.252.500		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	4.075.168.000	100	4.341.252.500	100	4.261.252.500	100	4.281.252.500	100	4.231.252.500	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						265.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	265.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	Kecamatan Mojosongo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.065.000.000		822.800.000		822.800.000		822.800.000		822.800.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1.065.000.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	822.800.000	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		57.050.000		57.050.000		57.050.000		57.050.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	57.050.000	100	57.050.000	100	57.050.000	100	57.050.000	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						96.190.000		110.169.000		110.169.000		110.169.000		110.169.000		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	96.190.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	110.169.000	100	Kecamatan Mojosongo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Mojosongo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Mojosongo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.106.107.000		2.270.299.000		2.245.299.000		2.245.299.000		2.245.299.000		Kecamatan Teras
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.106.107.000	100	2.270.299.000	100	2.245.299.000	100	2.245.299.000	100	2.245.299.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Teras
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000		Kecamatan Teras
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	69.500.000	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Teras
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Teras
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.481.808.000		2.622.957.000		2.622.957.000		2.622.957.000		2.622.957.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.481.808.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	2.622.957.000	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	Kecamatan Banyudono
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Banyudono

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Banyudono
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Banyudono
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.274.396.000		2.172.358.000		2.167.358.000		2.147.358.000		2.167.358.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.274.396.000	100	2.172.358.000	100	2.167.358.000	100	2.147.358.000	100	2.167.358.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Sawit
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sawit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.223.852.000		2.235.686.000		2.235.686.000		2.235.686.000		2.235.686.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.223.852.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	2.235.686.000	100	Kecamatan Sambi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		59.716.000		59.716.000		59.716.000		59.716.000		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	59.716.000	100	Kecamatan Sambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Sambi
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Sambi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.550.585.000		2.554.368.000		2.531.368.000		2.529.368.000		2.531.368.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.550.585.000	100	2.554.368.000	100	2.531.368.000	100	2.529.368.000	100	2.531.368.000	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	Kecamatan Ngemplak

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Ngemplak
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ngemplak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.075.476.000		2.189.475.000		2.189.475.000		2.189.475.000		2.189.475.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.075.476.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	2.189.475.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		40.540.000		40.540.000		40.540.000		40.540.000		Kecamatan Simo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	40.540.000	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Simo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Simo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.547.827.000		2.573.348.000		2.573.348.000		2.573.348.000		2.573.348.000		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.547.827.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	2.573.348.000	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Nogosari

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		70.840.000		70.840.000		70.840.000		70.840.000		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	70.840.000	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Nogosari
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Nogosari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.949.127.000		2.981.745.000		2.951.745.000		2.931.745.000		2.951.745.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.949.127.000	100	2.981.745.000	100	2.951.745.000	100	2.931.745.000	100	2.951.745.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		Kecamatan Klego
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Klego
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Klego
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.230.000.000		2.356.955.000		2.356.955.000		2.356.955.000		2.356.955.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.230.000.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	2.356.955.000	100	Kecamatan Andong

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	Kecamatan Andong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		70.925.000		70.925.000		70.925.000		70.925.000		Kecamatan Andong
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	70.925.000	100	Kecamatan Andong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Andong
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Andong

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.104.709.000		2.544.894.000		2.544.894.000		2.471.394.000		2.471.394.000		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.104.709.000	100	2.544.894.000	100	2.544.894.000	100	2.471.394.000	100	2.471.394.000	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		64.500.000		64.500.000		64.500.000		64.500.000		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	64.500.000	100	Kecamatan Wonosegoro

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosegoro
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosegoro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.392.391.000		2.396.775.000		2.366.775.000		2.336.775.000		2.356.775.000		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.392.391.000	100	2.396.775.000	100	2.366.775.000	100	2.336.775.000	100	2.356.775.000	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Karanggede
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Karanggede
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.512.013.000		2.517.756.000		2.512.756.000		2.492.756.000		2.512.756.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.512.013.000	100	2.517.756.000	100	2.512.756.000	100	2.492.756.000	100	2.512.756.000	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Kemusu

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.600.000		60.600.000		60.600.000		60.600.000		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	60.600.000	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Kemusu
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Kemusu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.840.174.000		2.799.230.000		2.719.230.000		2.739.230.000		2.689.230.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.840.174.000	100	2.799.230.000	100	2.719.230.000	100	2.739.230.000	100	2.689.230.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	Kecamatan Juwangi

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						397.668.000		178.156.000		178.156.000		178.156.000		178.156.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	397.668.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	178.156.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						72.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	72.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Juwangi
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Juwangi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.205.157.000		2.354.102.000		2.349.102.000		2.329.102.000		2.349.102.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.205.157.000	100	2.354.102.000	100	2.349.102.000	100	2.329.102.000	100	2.349.102.000	100	Kecamatan Ampel

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		63.550.000		63.550.000		63.550.000		63.550.000		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	63.550.000	100	Kecamatan Ampel
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Ampel
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Ampel

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.591.891.000		2.695.081.000		2.690.081.000		2.670.081.000		2.568.581.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.591.891.000	100	2.695.081.000	100	2.690.081.000	100	2.670.081.000	100	2.568.581.000	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	30.900.000	100	Kecamatan Cepogo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Cepogo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Cepogo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.654.337.000		2.617.775.000		2.612.775.000		2.592.775.000		2.627.775.000		Kecamatan Selo
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.654.337.000	100	2.617.775.000	100	2.612.775.000	100	2.592.775.000	100	2.627.775.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Selo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		73.100.000		73.100.000		73.100.000		73.100.000		Kecamatan Selo
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	73.100.000	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Selo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Selo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.061.142.000		2.307.540.000		2.302.540.000		2.282.540.000		2.302.540.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.061.142.000	100	2.307.540.000	100	2.302.540.000	100	2.282.540.000	100	2.302.540.000	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	Kecamatan Gladagsari

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		69.325.000		69.325.000		69.325.000		69.325.000		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	69.325.000	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Gladagsari
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Gladagsari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.187.809.000		2.224.035.000		2.219.035.000		2.199.035.000		2.219.035.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	2.187.809.000	100	2.224.035.000	100	2.219.035.000	100	2.199.035.000	100	2.219.035.000	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		60.926.000		60.926.000		60.926.000		60.926.000		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	60.926.000	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Tamansari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.257.839.000		2.504.246.000		2.431.246.000		2.426.246.000		2.426.246.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	0	0	0	2.257.839.000	0	2.504.246.000	0	2.431.246.000	0	2.426.246.000	0	2.426.246.000	0	Kecamatan Wonosamodro

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Kecamatan yang Tepat Waktu	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro
P R O G R A M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya kualitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.000.000		52.650.000		52.650.000		52.650.000		52.650.000		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	62.000.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	52.650.000	100	Kecamatan Wonosamodro
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0		0		0		0		0		Kecamatan Wonosamodro
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kecamatan Wonosamodro

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.401.339.000		6.239.398.000		6.239.398.000		6.239.398.000		6.239.398.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	6.401.339.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	6.239.398.000	100	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						716.965.000		596.800.000		596.800.000		596.800.000		596.800.000		
Tersalurkannya pengaduan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah	Presentase aduan masyarakat yang tersalurkan	%	100	100	100	716.965.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	596.800.000	100	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						1.985.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		
Meningkatnya layanan pemerintah berbasis digital	Persentase tercapainya pemerintahan berbasis digital	%	100	100	100	235.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya akses internet di Desa Mandiri	Persentase OPD dan Desa Mandiri yang terhubung dengan internet dari Diskominfo	%	100	100	100	1.750.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						0		0		0		0		0		
Meningkatnya statistik sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase statistik sektoral yang terselenggara sesuai standar	%	52,6	65,75	66	0	66	0	66,25	0	66,25	0	67,5	0	67,5	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya rumah tangga yang terhubung internet	Persentase rumah tangga yang terhubung dengan internet	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN						0		0		0		0		0		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																
Meningkatnya keamanan informasi sesuai standar	Persentase keamanan informasi sesuai standar	%	61	61	62	0	63	0	63	0	65	0	65	0	65	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41.657.318.000		41.321.591.000		41.321.591.000		41.416.591.000		41.321.591.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	41.657.318.000	100	41.321.591.000	100	41.321.591.000	100	41.416.591.000	100	41.321.591.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						45.060.411.000		41.437.787.000		41.437.787.000		41.342.787.000		41.437.787.000		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	%	100	100	100	43.453.411.000	100	39.830.787.000	100	39.830.787.000	100	39.735.787.000	100	39.830.787.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	1.607.000.000	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.369.200.000		567.700.000		567.700.000		567.700.000		567.700.000		
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	%	7,17	8,67	9,5	193.500.000	10,33	387.700.000	11,17	387.700.000	12	387.700.000	12,8	387.700.000	12,8	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	SKM Layanan Perpustakaan	Angka	86,38	86,4	86,5	1.175.700.000	86,7	180.000.000	86,8	180.000.000	86,9	180.000.000	87	180.000.000	87	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						3.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno yang	%	0	0	100	3.500.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	terlindungi melalui digitalisasi															
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.670.318.000		5.339.824.000		5.339.824.000		5.339.824.000		5.339.824.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	4.670.318.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	5.339.824.000	100	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						86.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		
Meningkatnya tata kelola arsip yang dinamis dan statis	Nilai Audit Kearsipan	Angka	81,44	81,5	81,6	86.500.000	81,7	22.500.000	81,8	22.500.000	81,9	22.500.000	82	22.500.000	82	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						130.000.000		51.600.000		51.600.000		51.600.000		51.600.000		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	50	55	60	130.000.000	65	51.600.000	70	51.600.000	75	51.600.000	80	51.600.000	80	2.24.2.23.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.933.098.000		10.577.364.000		9.910.103.000		10.735.103.000		9.935.103.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	8.933.098.000	100	10.577.364.000	100	9.910.103.000	100	10.735.103.000	100	9.935.103.000	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						28.800.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP Elektronik	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	%	98,7	98,8	98,8	28.800.000	98,9	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL						8.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persentase peningkatan kepemilikan	%	99,07	67,9	99,1	8.000.000	99,15	0	99,2	0	99,25	0	99,3	0	99,3	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dokumen akta kelahiran															dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kematian	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	%	25	50	50	0	60	40.000.000	61	40.000.000	62	40.000.000	63	40.000.000	63	2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						313.200.000		488.200.000		488.200.000		488.200.000		488.200.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	%	85	85	86	313.200.000	87	488.200.000	88	488.200.000	89	488.200.000	90	488.200.000	90	2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0		0		0		0		0		
Meningkatnya ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.843.490.000		9.312.504.000		9.317.504.000		9.322.504.000		9.322.504.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	9.843.490.000	100	9.312.504.000	100	9.317.504.000	100	9.322.504.000	100	9.322.504.000	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.959.888.000		2.650.768.000		1.990.254.000		3.354.234.000		5.442.954.000		
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	196.500.000	100	910.000.000	100	249.486.000	100	299.486.000	100	3.702.186.000	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	59.000.000	100	213.980.000	100	213.980.000	100	1.527.960.000	100	213.980.000	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan	%	100	100	100	1.704.388.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.526.788.000	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Perkada yang ditegakkan															Polisi Pamong Praja
Tercapainya peningkatan Kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						489.100.000		541.500.000		441.500.000		2.641.500.000		441.500.000		
Tercapainya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	489.100.000	100	541.500.000	100	441.500.000	100	2.641.500.000	100	441.500.000	100	1.05.0.00.0.00.01 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional	**2. Nilai SAKIP**	**Angka**	**68,96**	**70,2**	**71,16**		**72,12**		**73,08**		**74,04**		**75**		**75**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						276.960.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan kajian bidang penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan	Persentase kajian bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	%	75	75	80	276.960.000	85	450.000.000	90	450.000.000	92	450.000.000	95	450.000.000	95	5.01.5.05.0.00.01 .0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						443.250.000		368.500.000		368.500.000		368.500.000		368.500.000		
Meningkatnya pelaksanaan riset dan inovasi	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	%	75	75	80	443.250.000	85	368.500.000	90	368.500.000	92	368.500.000	95	368.500.000	95	5.01.5.05.0.00.01 .0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.110.748.000		5.170.208.000		5.170.208.000		5.170.208.000		5.170.208.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	5.110.748.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.170.208.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						445.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000		
Meningkatnya capaian indikator program	Persentase capaian indikator program	%	100	100	100	445.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						327.000.000		327.000.000		327.000.000		327.000.000		327.000.000		
Meningkatnya keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	327.000.000	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.404.297.000		23.400.842.000		23.400.842.000		23.400.842.000		23.400.842.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	24.404.297.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	23.400.842.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						7.002.360.000		8.208.304.000		8.208.304.000		8.208.304.000		8.208.304.000		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase capaian kinerja tata kelola pemerintahan (Rata-rata capaian masing-masing kegiatan)	%	100	100	100	304.538.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kesejahteraan rakyat	Persentase Capaian kinerja Kesejahteraan Rakyat (Rata-rata capaian masing-masing kegiatan)	%	100	100	100	6.450.120.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	7.807.402.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase Rancangan Produk Hukum daerah yang diharmonisasi	%	100	100	100	247.702.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	158.402.000	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						563.606.000		997.731.000		997.731.000		997.731.000		997.731.000		
Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi daerah	Persentase capaian kinerja monev daerah	%	100	100	100	29.500.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,31	20	25	241.375.000	30	370.000.000	35	370.000.000	40	370.000.000	42	370.000.000	42	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah	Return On Asset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,09	15.000.000	2,09	350.000.000	2,09	350.000.000	2,1	350.000.000	2,1	350.000.000	2,1	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah	Persentase capaian kinerja kebijakan sumber daya alam	%	100	100	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	277.731.000	100	Sekretariat Daerah
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.228.469.000		11.655.896.000		11.655.896.000		11.655.896.000		11.655.896.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	9.228.469.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	11.655.896.000	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						77.313.000		71.513.000		71.513.000		71.513.000		71.513.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya penyelesaian laporan hasil pemeriksaan inspektorat	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	90	90	91	77.313.000	92	71.513.000	93	71.513.000	94	71.513.000	95	71.513.000	95	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
Terselesaikannya aduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	94	94	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	98	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						858.960.000		1.032.795.000		1.032.795.000		1.032.795.000		1.032.795.000		
Meningkatnya perumusan kebijakan dan asistensi	Persentase Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	858.960.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	1.032.795.000	100	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.088.837.000		3.630.320.000		3.630.320.000		3.630.320.000		3.630.320.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi sesuai Standar	%	100	100	100	3.088.837.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	3.630.320.000	100	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						958.300.000		735.670.000		735.670.000		735.670.000		735.670.000		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	70	70	73	958.300.000	76	735.670.000	79	735.670.000	82	735.670.000	85	735.670.000	85	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.179.695.000		1.215.000.000		1.215.000.000		20.015.000.000		29.415.000.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Masyarakat yang paham tentang politik	%	70	70	73	1.179.695.000	76	1.215.000.000	79	1.215.000.000	82	20.015.000.000	85	29.415.000.000	85	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						1.100.000.000		1.779.600.000		1.779.600.000		1.779.600.000		1.779.600.000		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas	%	70	70	73	1.100.000.000	76	1.779.600.000	79	1.779.600.000	82	1.779.600.000	85	1.779.600.000	85	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						0		385.000.000		385.000.000		385.000.000		385.000.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Konflik SARA yang diselesaikan	%	100	100	100	0	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						106.700.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		121.800.000		
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	106.700.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	121.800.000	100	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.122.917.000		38.203.790.000		38.292.790.000		38.371.790.000		38.401.790.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	19.122.917.000	100	38.203.790.000	100	38.292.790.000	100	38.371.790.000	100	38.401.790.000	100	5.02.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						471.555.576.000		463.539.206.000		463.539.206.000		463.539.206.000		463.539.206.000		

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya persentase realisasi belanja daerah	Persentase Realisasi Belanja Daerah	%	92	92	92,2	0	92,4	0	92,6	0	92,8	0	93	0	93	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD tepat waktu	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan Penyajian APBD yang transparan dan akuntabel	%	100	100	100	130.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terselenggaranya Penyusunan dan Penyanjian pertanggungjawaban APBD yang transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Penyajian Pertanggung jawaban APBD yang transparan, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan	%	100	100	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terkelolanya Bantuan Keuangan, Dana darurat mendesak dan DBH dengan baik	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana darurat dan mendesak dan DBH	%	100	100	100	471.216.626.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	463.155.386.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Terintegrasinya sistem informasi keuangan	Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	%	100	100	100	39.150.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	40.020.000	100	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						907.900.000		939.900.000		939.900.000		939.900.000		939.900.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	98,65	98,65	98,7	907.900.000	98,75	939.900.000	98,8	939.900.000	98,85	939.900.000	98,9	939.900.000	98,9	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						8.253.150.000		8.888.150.000		8.888.150.000		9.188.150.000		9.188.150.000		
Meningkatnya Ketercapaian Penerimaan PAD	Ketercapaian Penerimaan PAD	Rupiah	538.701.689.777	603.023.969.000	628.898.864.000	25.000.000	660.343.806.000	25.000.000	666.947.244.000	25.000.000	673.616.717.000	25.000.000	680.352.884.000	25.000.000	680.352.884.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Ketercapaian Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	181.884.303.321	250.863.463.000	259.400.000.000	8.228.150.000	272.369.999.505	8.863.150.000	275.093.699.500	8.863.150.000	277.844.636.495	9.163.150.000	280.623.082.860	9.163.150.000	280.623.082.860	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.414.503.500		5.750.030.000		5.750.030.000		5.750.030.000		5.750.030.000		
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	100	21.414.503.500	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.750.030.000	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.121.840.000		1.195.900.000		1.195.900.000		1.195.900.000		1.195.900.000		
Terpenuhinya kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	%	80	80	81	890.920.000	82	1.061.000.000	83	1.061.000.000	84	1.061.000.000	85	1.061.000.000	85	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tingkat disiplin ASN	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	0,0008	0,0008	0,0008	130.920.000	0,0075	94.900.000	0,0007	94.900.000	0,0065	94.900.000	0,0006	94.900.000	0,0006	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Jumlah ASN yang memenuhi target SKP minimal Baik	%	99,9	99,9	99,9	0	99,9	0	99,9	0	99,9	0	99,9	0	99,9	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kompetensi ASN yang adaptif digital	Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	%	90	90	90,5	100.000.000	91	40.000.000	91,5	40.000.000	92	40.000.000	92,5	40.000.000	92,5	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						977.083.500		1.340.920.000		1.340.920.000		1.340.920.000		1.340.920.000		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	62,05	62,05	63,25	777.083.500	64,5	1.120.920.000	65,25	1.090.920.000,00	66,25	1.070.920.000	66,75	1.040.920.000	66,75	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN PD/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Kinerja		TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024 (R)	2025 (T)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya layanan pengembangan jabatan fungsional	Persentase jabatan fungsional	%	5,16	5,16	5,3	200.000.000	5,52	220.000.000	5,75	250.000.000	6	270.000.000	6,14	300.000.000	6,14	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Data Diolah, 2025
*Keterangan : **Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur secara menyeluruh melalui kerangka indikator yang terintegrasi, dimulai dari Indikator Kinerja Makro yang mencerminkan kondisi umum pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, pengangguran, dan ketimpangan, kemudian diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagai tolok ukur strategis keberhasilan visi dan misi pembangunan jangka menengah, dilengkapi dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan terakhir Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang lebih operasional untuk menilai kinerja spesifik OPD, sehingga secara keseluruhan terbentuk sistem cascading kinerja yang konsisten dari makro hingga teknis, serta memastikan pembangunan daerah terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

a. Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan daerah merupakan tolok ukur utama yang mencerminkan kondisi perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas lingkungan. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika aktivitas produksi barang dan jasa, sementara PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat dan kontribusi PDRB memperlihatkan peran sektor-sektor utama dalam struktur ekonomi. Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka menjadi ukuran kesejahteraan serta ketersediaan lapangan kerja, sedangkan rasio gini menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator komprehensif kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Di sisi lain, aspek keberlanjutan ditunjukkan melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang mencerminkan upaya pembangunan rendah karbon serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi daya dukung lingkungan. Keseluruhan indikator ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut indikator makro Kabupaten Boyolali:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 3
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	5,70-5,94	5,80-6,00	5,86-6,06	5,92-6,12	5,98-6,19	6,04-6,25	6,04-6,25
2	PDRB Perkapita	Rp Juta	41,69	46,5	51,3	56,11	60,91	65,72	66,92	66,92
3	Kontribusi PDRB	%	2,52	2,55	2,58	2,61	2,64	2,67	2,7	2,7
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,63	9,63-9,27	9,27-9,09	8,68-8,51	8,07-7,92	7,47-7,32	6,89-6,74	6,89-6,74
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,16	3,09	3,02	2,95	2,88	2,81	2,74	2,74
6	Rasio Gini	Angka	0,370**	0,365	0,364	0,363	0,361	0,36	0,359	0,359
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,96	76,7	77	77,3	77,61	77,91	78,21	78,21
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	n/a	1.335.975,00	1.496.777,00	1.680.913,00	1.892.658,00	2.137.234,00	2.421.045,00	2.421.045,00
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65,49	70,39	70,66	70,93	71,21	71,48	71,75	71,75

Data Diolah, 2025
*Keterangan: ** Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indaktor tujuan dan sasaran strategis pada level pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2025-2029.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,96	76,7	77	77,3	77,61	77,91	78,21	78,21
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,63	9,63-9,27	9,27-9,09	8,68-8,51	8,07-7,92	7,47-7,32	6,89-6,74	6,89-6,74
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,5	77,63	77,97	78,31	78,66	79	79,34	79,34
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	5,70-5,94	5,80-6,00	5,86-6,06	5,92-6,12	5,98-6,19	6,04-6,25	6,04-6,25
5	Rasio Gini	Angka	0,370**	0,365	0,364	0,363	0,361	0,36	0,359	0,359
6	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	4,57	4,57
7	Indeks Infrastruktur	Angka	80,71	80,97	81,32	81,50	81,64	81,79	81,94	81,94
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,16	3,09	3,02	2,95	2,88	2,81	2,74	2,74
9	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	n/a	1.335.975,00	1.496.777,00	1.680.913,00	1.892.658,00	2.137.234,00	2.421.045,00	2.421.045,00

Data Diolah, 2025
*Keterangan: ** Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

c. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Dalam hal ini, indikator daerah didapatkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan beberapa indikator sesuai kebutuhan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,7	87,92	88,2	88,49	88,77	89,06	89,34	89,34	Ketahanan pangan
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak	%	97,26	98,93	99,58	99,87	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan PDAM
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	64,88	65	65,25	65,5	65,75	66	66,25	66,25	Pekerjaan Umum
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,1	8,95	8,80	8,32	7,7	7,08	6,2	6,2	Ketahanan Pangan
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65,49	70,39	70,66	70,93	71,21	71,48	71,75	71,75	Lingkungan Hidup
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aman	%	29,24	29,28	29,31	29,34	29,37	29,4	29,43	29,43	Pekerjaan Umum dan PDAM
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	27,18	32,75	35	37	40	43,33	46	46	Lingkungan Hidup
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	NA	1.335.975,00	1.496.777,00	1.680.913,00	1.892.658,00	2.137.234,00	2.421.045,00	2.421.045,00	Lingkungan Hidup
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	94,67	92,49	91,41	89,23	88,14	87,05	85,96	85,96	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,87	0,89	0,9	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	BPBD, DPU, Perkim, Lingkungan Hidup
11	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.114.070	1.117.134	1.118.560	1.127.520	1.136.190	1.144.580	1.152.700	1.152.700	Kependudukan, Statistik
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,89	0,86	0,83	0,8	0,77	0,74	0,71	0,71	Kependudukan, Statistik
13	Rasio Penduduk	%	100,88	100,78	100,67	100,55	100,44	100,33	100,21	100,21	Kependudukan, Statistik
14	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	1094,00	1011,60	1020,02	1028,19	1036,09	1043,74	1051,15	1051,15	Kependudukan, Statistik
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	5,70-5,94	5,80-6,00	5,86-6,06	5,92-6,12	5,98-6,19	6,04-6,25	6,04-6,25	Ekonomi, Statistik
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,63	9,63-9,27	9,27-9,09	8,68-8,51	8,07-7,92	7,47-7,32	6,89-6,74	6,89-6,74	Kesejahteraan Sosial, Statistik
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	41,69	46,5	51,3	56,11	60,91	65,72	66,92	66,92	Ekonomi, Statistik
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	19,42	19,51	19,59	19,68	19,76	19,85	19,85	Kesejahteraan Sosial, Statistik

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,16	3,09	3,02	2,95	2,88	2,81	2,74	2,74	Ekonomi, Statistik
6	Rasio Gini	Angka	0,370**	0,365	0,364	0,363	0,361	0,36	0,359	0,359	Kesejahteraan Sosial, Statistik
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,96	76,7	77	77,3	77,61	77,91	78,21	78,21	Kesejahteraan Sosial, Statistik
8	Indeks Kesehatan	Angka	86,83	86,89	87,09	87,28	87,48	87,68	87,87	87,87	Kesehatan, Statistik
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,44	76,48	76,61	76,74	76,86	76,99	77,12	77,12	Kesehatan, Statistik
10	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	19	13	12	11	11	10	10	10	Kesehatan, Statistik
11	Prevalensi Stunting (e-PPGBM)	%	11,9	12,24	11,68	11,12	10,56	10	9,44	9,44	Kesehatan, Statistik
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	%	55,9	90	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*	%	88	90	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
14	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	76	80	80	80	80	80	80	80	Kesehatan, BPJS Kesehatan
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,45	55,55	59,36	62,40	65,60	68,96	72,31	72,31	Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
16	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	86,14	86,34	86,54	86,74	86,94	87,14	87,3	87,3	Pendidikan
17	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	85,34	85,54	85,74	85,94	86,14	86,34	86,5	86,5	Pendidikan
18	Numerasi SD/Sederajat	%	81,60	81,80	82,00	82,20	82,40	82,4	82,6	82,6	Pendidikan
19	Numerasi SMP/Sederajat	%	83,23	83,43	83,63	83,8	84,03	84,23	84	84	Pendidikan
20	Indeks Pendidikan	Angka	62,43	64,22	65,59	66,96	68,33	69,7	71,07	71,07	Pendidikan, Statistik
21	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,17	8,27	8,37	8,47	8,57	8,67	8,77	8,77	Pendidikan, Statistik
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	13,23	13,63	14,03	14,42	14,82	15,22	15,22	Pendidikan, Statistik
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,28	6,48	6,68	6,88	7,08	7,28	7,48	7,48	Pendidikan
24	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	89,97	94,91	95	95,1	95,19	95,28	95,37	95,37	Pendidikan
25	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutama-kan kebudayaan	%	76,00	76	77,25	78,5	79,75	81	82,25	82,25	Pendidikan dan Kebudayaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
26	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	1,75	1,75	4,25	6,75	9,25	11,75	14,25	14,25	Kebudayaan
27	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	131	132	132	132	133	133	133	Kebudayaan
28	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	22,46	22,96	23,46	23,96	24,46	24,96	24,96	Kebudayaan
29	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,12	0,13	0,27	0,42	0,56	0,7	0,84	0,84	Perpustakaan
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,78	64,54-64,55	65,31 – 65,32	66,08 – 66,09	66,84 – 66,87	67,61 – 67,64	68,38 – 68,41	68,38 – 68,41	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,233	0,233-0,216	0,23 – 0,213	0,228 – 0,202	0,226 – 0,192	0,223 – 0,182	0,221 – 0,172	0,221 – 0,172	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,61	0,64	0,67	0,7	0,73	0,76	0,79	0,79	Kesejahteraan Sosial, Baznas
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
1	Angka Ketergantungan	%	47,02	47,42	47,86	48,34	48,84	49,35	49,87	49,87	Statistik
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	31,48	31,50	32	33	33,11	34	34,27	34,27	Statistik
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,87	2,93	2,98	3,09	3,20	3,31	3,42	3,42	Statistik
4	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milyar Rupiah	9.415,89	9.846,33	10.363,59	10.880,85	11.398,11	11.915,37	12.432,63	12.432,63	Statistik
5	Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap Provinsi Jawa Tengah	%	2,52	2,55	2,58	2,61	2,64	2,67	2,7	2,7	Ekonomi, Statistik
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	1.296	1.347	1.396	1.446	1.496	1700	1.750	1.750	Pariwisata
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0	0	3,04	3,22	3,41	3,5	3,63	3,63	UMKM
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34	Koperasi
9	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,88	2,95	3,00	3,05	3,10	3,10	3,20	3,20	Riset dan Inovasi, BRIN
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,25	75,77	76,29	76,81	77,33	77,85	78,37	78,37	Tenaga Kerja, Statistik
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,85	66,82	67,82	68,82	69,82	70,82	71,82	71,82	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
											Keluarga Berencana, Statistik
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	83,64	83,92	84,2	84,4	84,6	84,8	85	85	Riset dan Inovasi, BRIN
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,09	2,09	2,09	2,1	2,1	2,1	Ekonomi
14	Disparitas Harga	%	10	10	10	10	10	10	10	10	Ekonomi, Perdagangan
15	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional PMA/PMDN	Juta Rupiah	1.830.706,9	1.890.304,6	1.984.819,83	2.084.060,82	2.188.263,86	2.258.317	2.326.066,51	2.326.066,51	Penanaman Modal
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	94,25	94,5	94,75	95	95,25	95,5	95,75	95,75	Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
17	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,20	83,32	83,52	83,72	83,92	84,12	84,32	84,32	Pekerjaan Umum
18	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	89,19	89,33	89,46	89,59	89,73	89,86	90	90	Perhubungan
19	Rasio Konektivitas Wilayah	Angka	0,51**	0,51	0,51	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55	Perhubungan
20	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	29,24	29,82	30,4	30,98	31,56	32,15	32,73	32,73	Perumahan Permukiman
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Komunikasi dan Informatika
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,44	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	Keuangan dan Pendapatan Daerah
23	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,60	1,65	1,6	1,55	1,49	1,44	1,39	1,39	Ekonomi, Statistik
24	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,32	1,52	1,47	1,41	1,36	1,3	1,25	1,25	Ekonomi, Statistik
25	Tingkat Inflasi	%	1,57	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	Ekonomi, Statistik
26	Indeks Desa	%	0,7707	0,7515	0,7699	0,7883	0,8067	0,8251	0,8435	0,8435	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	Persentase Desa Mandiri	%	20,31	19,54	22,22	24,14	26,05	27,97	30,60	30,60	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,16	4,22	4,25	4,29	4,32	4,35	4,36	4,36	Ekonomi (Setda), Bappenas
29	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto	%	21,15	21,15	21,45	21,75	22,15	22,93	23,00	23,00	Penanaman Modal
30	Indeks Infrastruktur	Angka	80,71	80,97	81,32	81,50	81,64	81,79	81,94	81,94	Bidang Infrastruktur

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline		Target					Kondisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
31	Pertumbuhan Investasi	%	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	3,5	3,7	3,7	Penanaman Modal
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	76,5	78,5	79,5	82,5	85,5	88,5	90	90	Tata Pemerintahan
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,5	77,63	77,97	78,31	78,66	79	79,34	79,34	Tata Pemerintahan
3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	3,89	3,91	3,93	3,95	3,96	3,97	4	4	Komunikasi dan Informatika
4	Nilai SAKIP	Angka	68,96	70,2	71,16	72,12	73,08	74,04	75	75	Tata Pemerintahan
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	4,57	4,57	Tata Pemerintahan
6	Indeks Integritas Nasional	%	75,98	89,95	89,95	90,76	90,76	91,57	91,57	91,57	Inspektorat
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	Keamanan dan Ketertiban
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67	3,76	3,78	3,81	3,83	3,85	3,87	3,87	Ekonomi, BRIN
V	**Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)**										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,44	76,48	76,61	76,74	76,86	76,99	77,12	77,12	Kesehatan, Statistik
2	Total Fertility Rate	%	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	Keluarga Berencana
3	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	19	13	12	11	11	10	10	10	Kesehatan
4	Jumlah Kematian Balita	kasus	203	164	151	143	137	130	118	118	Kesehatan
5	Prevalensi Stunting (Survey Status Gizi Indonesia)	%	20,9	19,9	18,9	17,9	16,9	15,9	14,9	14,9	Kesehatan, Statistik
6	Cakupan penerima pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	30	40	50	60	70	80	80	Kesehatan
7	Cakupan imunisasi Bayi lengkap	%	94	94	95	96	96	97	98	98	Kesehatan
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	76	80	80	80	80	80	80	80	Kesehatan
9	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	88	90	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	10	10	20	35	45	50	55	55	Kesehatan
11	Persentase kab/kota dengan peningkatan aktivitas fisik	%	NA	28,57	42,85	71,42	100	100	100	100	Kesehatan

Sumbet: Data Diolah, 2025

*Keterangan: ** Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

d. Indikator Utama Pembangunan RPJPD

Guna menjamin keselarasan antara dokumen RPJPD dengan RPJMD, penyusunan indikator RPJMD dimuat dengan mengakomodir Indikator Utama Pembanguanan (IUP) RPJPD. Penyusunan target IUP tersaji pada tabel berikut::

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 6
Indikator Utama Pembangunan RPJPD

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline		Target					Konidisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,63	9,63-9,27	9,27-9,09	8,68-8,51	8,07-7,92	7,47-7,32	6,89-6,74	6,89-6,74	Kesejahteraan Sosial, Statistik
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,1	8,95	8,8	8,32	7,72	7,08	6,17	6,17	Ketahanan Pangan
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,7	87,92	88,2	88,49	88,77	89,06	89,34	89,34	Ketahanan pangan
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,44	76,48	76,61	76,74	76,86	76,99	77,12	77,12	Kesehatan, Statistik
5	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	19	13	12	11	11	10	10	10	Kesehatan, Statistik
6	Prevalensi Stunting (e-PPGBM)	%	11,9	12,24	11,68	11,12	10,56	10	9,44	9,44	Kesehatan, Statistik
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	55,9	90	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88	90	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
9	Cakupan Kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	76	80	80	80	80	80	80	80	Kesehatan, BPJS Kesehatan
10	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	86,14	86,34	86,54	86,74	86,94	87,14	87,3	87,3	Pendidikan
11	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	85,34	85,54	85,74	85,94	86,14	86,34	86,5	86,5	Pendidikan
12	Numerasi SD/Sederajat	%	81,60	81,80	82,00	82,20	82,40	82,4	82,6	82,6	Pendidikan
13	Numerasi SMP/Sederajat	%	83,23	83,43	83,63	83,8	84,03	84,23	84	84	Pendidikan
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	13,23	13,63	14,03	14,42	14,82	15,22	15,22	Pendidikan, Statistik
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,28	6,48	6,68	6,88	7,08	7,28	7,48	7,48	Pendidikan
16	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutama-kan kebudayaan	%	76	76	77,25	78,5	79,75	81	82,25	82,25	Pendidikan dan Kebudayaan
17	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	1,75	1,75	4,25	6,75	9,25	11,75	14,25	14,25	Kebudayaan
18	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	131	132	132	132	133	133	133	Kebudayaan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline		Target					Konidisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
19	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	22,46	22,96	23,46	23,96	24,46	24,96	24,96	Kebudayaan
20	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,12	0,13	0,27	0,42	0,56	0,7	0,84	0,84	Perpustakaan
21	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	Keamanan dan Ketertiban
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,78	64,54-64,55	65,31 – 65,32	66,08 – 66,09	66,84 – 66,87	67,61 – 67,64	68,38 – 68,41	68,38 – 68,41	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,233	0,233-0,216	0,23 – 0,213	0,228 – 0,202	0,226 – 0,192	0,223 – 0,182	0,221 – 0,172	0,221 – 0,172	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	31,48	31,50	32	33	33,11	34	34,27	34,27	Statistik
25	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	NA	2,73	2,97	3,22	3,46	3,7	3,94	3,94	Statistik
26	Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap Provinsi Jawa Tengah	%	2,52	2,55	2,58	2,61	2,64	2,67	2,7	2,7	Ekonomi, Statistik
27	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	1296	1347	1396	1446	1496	1700	1750	1750	Pariwisata
28	Rasio Kewirausahaan	%	2,86	2,86	3,04	3,22	3,41	3,5	3,63	3,63	UMKM
29	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34	Koperasi
30	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,08	2,08	2,09	2,09	2,09	2,1	2,1	2,1	Ekonomi
31	Disparitas Harga	%	10	10	10	10	10	10	10	10	Ekonomi
32	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	21,15	21,15	21,45	21,75	22,15	22,93	23,00	23,00	Penanaman Modal
33	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,44	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	Keuangan dan Pendapatan Daerah
34	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,60	1,65	1,6	1,55	1,49	1,44	1,39	1,39	Ekonomi, Statistik
35	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,32	1,52	1,47	1,41	1,36	1,3	1,25	1,25	Ekonomi, Statistik
36	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,88	2,95	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,20	Riset dan Inovasi, BRIN
37	Persentase Desa Mandiri	%	20,31	19,54	22,22	24,14	26,05	27,97	30,60	30,60	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline		Target					Konidisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
38	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,16	3,09	3,02	2,95	2,88	2,81	2,74	2,74	Ekonomi, Statistik
39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,85	66,82	67,82	68,82	69,82	70,82	71,82	71,82	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Statistik, Statistik
40	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,45	55,55	59,36	62,40	65,60	68,96	72,31	72,31	Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
41	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Komunikasi dan Informatika
42	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	94,25	94,5	94,75	95	95,25	95,5	95,75	95,75	Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
43	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,20	83,32	83,52	83,72	83,92	84,12	84,32	84,32	Pekerjaan Umum
44	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	89,19	89,33	89,46	89,59	89,73	89,86	90	90	Perhubungan
45	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	29,24	29,82	30,40	30,98	31,56	32,15	32,73	32,73	Pekerjaan Umum
46	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	97,26	98,93	99,58	99,87	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan PDAM
47	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	64,88	65	65,25	65,5	65,75	66	66,25	66,25	Pekerjaan Umum
48	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65,49	70,39	70,66	70,93	71,21	71,48	71,75	71,75	Lingkungan Hidup
49	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	27,18	32,75	35	37	40	43,33	46	46	Lingkungan Hidup
50	Indeks Risiko Bencana	Angka	94,67	92,49	91,41	89,23	88,14	87,05	85,96	85,96	BPBD
51	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	NA	1.335.975,00	1.496.777,00	1.680.913,00	1.892.658,00	2.137.234,00	2.421.045,00	2.421.045,00	Lingkungan Hidup
52	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,5	77,63	77,97	78,31	78,66	79	79,34	79,34	Tata Pemerintahan
53	Indeks Reformasi Hukum	Angka	76,5	78,5	79,5	82,5	85,5	88,5	90	90	Tata Pemerintahan
54	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan digital	Angka	3,89	3,91	3,93	3,95	3,96	3,97	4	4	Komunikasi dan Informatika

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline		Target					Konidisi Akhir	Urusan/Sumber Data
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
55	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	4,57	4,57	Tata Pemerintahan
56	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,98	89,95	89,95	90,76	90,76	91,57	91,57	91,57	Inspektorat
57	PDRB Per Kapita	Rp Juta	41,69	46,5	51,3	56,11	60,91	65,72	66,92	66,92	Ekonomi, Statistik
58	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	19,42	19,51	19,59	19,68	19,76	19,85	19,85	Kesejahteraan Sosial, Statistik
59	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional PMA/PMDN	Juta Rupiah	1.830.706,9	1.890.304,6	1.984.819,83	2.084.060,82	2.188.263,86	2.258.317	2.326.066,51	2.326.066,51	Penanaman Modal
60	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67	3,76	3,78	3,81	3,83	3,85	3,87	3,87	Ekonomi, BRIN
61	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	89,97	94,91	95	95,1	95,19	95,28	95,37	95,37	Pendidikan

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

e. Indikator Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan pelaksanaan program perangkat daerah, penyusunan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Indikator ini menjadi instrumen utama dalam mengukur kinerja serta memastikan keterhubungan langsung antara arah kebijakan kepala daerah dengan kinerja masing-masing perangkat daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 7
Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 2025-2029

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
"TERWUJUDNYA PERUBAHAN BOYOLALI YANG MAJU, NYAMAN DIHUNI, BERDAYA SAING DAN RAMAH INVESTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045"													
	Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, inklusif dan berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,64**	**5,70-5,94**	**5,80-6,00**	**5,86-6,06**	**5,92-6,12**	**5,98-6,19**	**6,04-6,25**	**6,04-6,25**	
	Sasaran 1.1. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah		**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**80,71**	**80,97**	**81,32**	**81,50**	**81,64**	**81,79**	**81,94**	**81,94**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	**Persentase Infrastruktur Wilayah yang Terbangun***	**%**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap minum Perpipaan	%	0,00070	0,00075	0,00080	0,00085	0,00090	0,00095	0,001	0,001	
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan daerah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota*	%	83,20	83,32	83,52	83,72	83,92	84,12	84,32	84,32	
		Meningkatnya ketaatan pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang*	%	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98	98	
		Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	64,88	65,00	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	66,25	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam PBG	Persentase kepatuhan PBG	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya sanitasi permukiman yang aman dan berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aman	%	29,24	29,28	29,31	29,34	29,37	29,4	29,43	29,43	
		Meningkatnya Fasilitasi Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Boyolali	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi	%	98,6	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tujuan PD: Meningkatkan kapasitas dan kualitas konektivitas wilayah	**Rasio konektivitas wilayah***	**Angka**	**0,51****	**0,51**	**0,51**	**0,52**	**0,54**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**Dinas Perhubungan**
		Meningkatnya layanan transportasi darat yang aman	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	89,19	89,33	89,46	89,59	89,73	89,86	90	90	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Angka	81	81	81,02	81,04	81,06	81,08	81,1	81,1	
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat		**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	**%**	**94,25**	**94,50**	**94,75**	**95**	**95,25**	**95,50**	**95,75**	**95,75**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	**Pertumbuhan Rumah Layak Huni***	**%**	**1,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**1,25**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase luasan kawasan kumuh*	**%**	**N/A**	**1,05**	**1,02**	**0,97**	**0,92**	**0,87**	**0,82**	**0,82**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh kabupaten/kota yang ditangani	%	N/A	3,49	4,02	4,83	4,83	4,83	4,83	26,83	
		Meningkatnya persentase rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	94,25	94,50	94,75	95	95,25	95,50	95,75	95,75	
	Sasaran 1.3. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah		**Indeks Desa**	**%**	**0,7707**	**0,7515**	**0,7699**	**0,7883**	**0,8067**	**0,8251**	**0,8435**	**0,8435**	
		Meningkatkan Kemandirian Desa	**Persentase Desa Mandiri***	**%**	**20,31**	**19,54**	**22,22**	**24,14**	**26,05**	**27,97**	**30,60**	**30,60**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
		Meningkatnya status desa	Persentase kenaikan status desa*	%	22,20	16,09	26,05	36,01	45,97	55,93	65,89	65,89	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Sasaran 1.4. Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana		**Indeks Risiko Bencana**	**Angka**	**94,67**	**92,49**	**91,41**	**89,23**	**88,14**	**87,05**	**85,96**	**85,96**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah	**Indeks Ketahanan Daerah***	**Angka**	**0,87**	**0,89**	**0,9**	**0,92**	**0,93**	**0,94**	**0,95**	**0,95**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
			Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat*	**Angka**	**0,41**	**0,45**	**0,48**	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana*	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana dan melayani penanggulangan bencana	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Angka	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Angka	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Angka	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,91	
			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Angka	0,97	0,97	0,97	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	
			Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Angka	0,83	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	0,96	0,96	
			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Angka	0,74	0,78	0,82	0,86	0,9	0,9	0,94	0,94	
			Indeks Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Angka	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Pencegahan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
			Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran 1.5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	**TonCO2eq**	**n/a**	**1.335.975,00**	**1.496.777,00**	**1.680.913,00**	**1.892.658,00**	**2.137.234,00**	**2.421.045,00**	**2.421.045,00**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah***	**Angka**	**65,49**	**70,39**	**70,66**	**70,93**	**71,21**	**71,48**	**71,75**	**71,75**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	40,91	54,59	54,60	54,61	54,62	54,63	54,64	54,64	
		Meningkatnya kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Udara	Angka	83,34	83,58	83,78	83,98	84,18	84,38	84,58	84,58	
			Indeks kualitas air	Angka	60,59	65,39	65,89	66,39	66,89	67,39	67,89	67,89	
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca sektor Limbah	Penurunan Emisi GRK sektor Limbah	TonCO2eq	n/a	27.451.00	31.489.00	36.190.00	41.671.00	48.072.00	55.560.00	55.560.00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase desa/kelurahan yang menerapkan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat	%	NA	16,85	17,98	19,10	20,22	21,35	22,47	22,47	
	Sasaran 1.6. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan		**Pertumbuhan investasi**	**%**	**1,7**	**2,1**	**2,4**	**2,8**	**3,2**	**3,5**	**3,7**	**3,7**	
		Tujuan PD: Meningkatnya hilirisasi ekonomi berbasis kerakyatan	**Rasio PDRB Sektor Perdagangan***	**%**	**12,01**	**12,10**	**12,23**	**12,44**	**12,66**	**12,87**	**13,09**	**13,09**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
			Rasio PDRB Industri Pengolahan*	**%**	**31,48**	**31,50**	**32**	**33**	**33,11**	**34**	**34,27**	**34,27**	
			Pengeluaran perkapita*	**Juta Rupiah**	**41,69**	**44,97**	**48,50**	**52,31**	**56,41**	**60,85**	**65,62**	**65,62**	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya perekonomian sektor Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	99,07	99,08	99,09	99,10	99,11	99,12	99,13	99,13	
		Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Pertumbuhan Angka neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	%	1,78	1,80	2,10	2,42	2,73	3,05	3,37	3,37	
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok	Disparitas harga	%	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Tujuan PD: Meningkatnya produktivitas sektor peternakan dan perikanan	**Peningkatan Ketersediaan Pangan Asal Hewan (Ternak dan Ikan)***	**%**	**3,92**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	
		Meningkatnya mutu dan produksi peternakan	Produktivitas Hasil Peternakan Daging	Ton	13.409	13.433	13.457	13.481	13.505	13.529	13.553	13.553	**Dinas Peternakan dan Perikanan**
			Produktivitas Hasil Peternakan Telur	Ton	23.470	23.494	23.518	23.542	23.566	23.590	23.614	23.614	
			Produktivitas Hasil Peternakan Susu	Ton	43.957	43.963	43.969	43.975	43.981	43.987	43.933	43.933	
		Meningkatnya mutu dan produksi perikanan	Produktivitas Hasil Perikanan Budidaya	Ton	34.150	34.174	34.198	34.222	34.246	34.270	34.294	34.294	
			Produktivitas Hasil Perikanan Tangkap	Ton	1.217	1.218	1.219	1.220	1.221	1.222	1.223	1.223	
			Produktvitas pengolahan ikan	Ton	242	244	246	248	250	252	254	254	
		Tujuan PD: Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	**Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pertanian***	**%**	**-1,04**	**0,05**	**0,1**	**0,15**	**0,2**	**0,25**	**0,3**	**0,3**	
		Meningkatnya mutu dan produksi tanaman pangan	Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	77,03	77,06	77,10	77,14	77,18	77,22	77,26	77,26	**Dinas Pertanian**
		Meningkatnya mutu dan produksi hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ku/Ha	229,01	229,13	229,24	229,36	229,47	229,59	229,70	229,70	
		Meningkatnya mutu dan produksi perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kg/Ha	7541,50	7545,27	7549,04	7552,82	7556,59	7560,37	7564,15	7564,15	
		Tujuan PD: Meningkatkan Penanaman Modal	**Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto***	**%**	**21,15**	**21,15**	**21,45**	**21,75**	**22,15**	**22,93**	**23,00**	**23,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai investasi tahunan berskala nasional PMA/PMDN	Juta Rupiah	1.830.706.9	1.890.304.6	1.984.819.83	2.084.060.82	2.188.263.86	2.258.317	2.326.066.51	2.326.066.51	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Angka	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	
	1.7 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan		**Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali Terhadap Provinsi Jawa Tengah**	**%**	**2,52**	**2,55**	**2,58**	**2,61**	**2,64**	**2,67**	**2,7**	**2,7**	
		Tujuan PD: Tujuan PD: Meningkatnya perekonomian kerakyatan dengan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB, usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha menuju usaha kecil, produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja	**Persentase usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menuju usaha kecil***	**%**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,4**	**0,4**	**Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja**
		Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	%	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34	
		Meningkatnya usaha mikro binaan yang naik hasil penjualanya.	Persentase pertumbuhan usaha mikro binaan yang naik hasil penjualanya	%	20	20	20	25	25	25	25	25	
		Tujuan PD: Meningkatnya daya saing pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan	**Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata***	**%**	**0.01**	**0.02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**	**0,07**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**
		Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	%	0,6	0,7	0,85	1,1	1,35	1,6	1,85	1,85	
		Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	%	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	7,5	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan	%	2,87	2,93	2,98	3,09	3,20	3,31	3,42	3,42	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		pendukung kepariwisataan daerah	Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto										
	1.8 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas		**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**3,16**	**3,09**	**3,02**	**2,95**	**2,88**	**2,81**	**2,74**	**2,74**	
		Tujuan PD: Meningkatnya perekonomian kerakyatan dengan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB, usaha mikro yang berkembang dengan orientasi peningkatan skala usaha menuju usaha kecil, produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	**%**	**75,25**	**75,77**	**76,29**	**76,81**	**77,33**	**77,85**	**78,37**	**78,37**	**Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja**
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja*	**Juta Rupiah/ Tenaga Kerja**	**307,36**	**310,43**	**313,53**	**316,67**	**319,84**	**323,03**	**326,27**	**326,27**	
			Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi*	**%**	**44,45**	**55,55**	**59,36**	**62,40**	**65,60**	**68,96**	**72,31**	**72,31**	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,27	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
		Menurunnya Pengangguran	Persentase penurunan pengangguran	%	0,89	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
		Meningkatnya Kesejahteraan Buruh Melalui Upah Minimum yang Layak	Persentase Perusahaan Yang memiliki LKS Bipartit	%	80	79	80	81	82	83	84	84	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	%	95	92	93	94	95	96	96	96	
	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**9,63**	**9,63-9.27**	**9,27-9,09**	**8,68-8,51**	**8,07-7,92**	**7,47-7,32**	**6,89-6,74**	**6,89-6,74**	
	Sasaran 2.1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**75,96**	**76,7**	**77**	**77,3**	**77,61**	**77,91**	**78,21**	**78,21**	
		Tujuan PD: Meningkatkan pendidikan masyarakat	**Harapan Lama Sekolah***	**Tahun**	**12,67**	**13,23**	**13,63**	**14,03**	**14,42**	**14,82**	**15,22**	**15,22**	**Dinas Pendidikan**
			Rata-rata Lama Sekolah*	**Tahun**	**8,17**	**8,27**	**8,37**	**8,47**	**8,57**	**8,67**	**8,77**	**8,77**	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		yang berkualitas dan berbudaya	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan***	**%**	**1,75**	**1,75**	**4,25**	**6,75**	**9,25**	**11,75**	**14,25**	**14,25**	**dan Kebudayaan**
		Meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik	Literasi membaca SD/Sederajat	%	86,14	86,34	86,54	86,74	86,94	87,14	87,3	87,3	
			Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	85,34	85,54	85,74	85,94	86,14	86,34	86,5	86,5	
			Numerasi SD/Sederajat	%	81,60	81,80	82,00	82,20	82,40	82,4	82,6	82,6	
			Numerasi SMP/Sederajat	%	83,23	83,43	83,63	83,8	84,03	84,23	84	84	
		Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	89,97	94,91	95	95,1	95,19	95,28	95,37	95,37	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	90,99	91,09	91,2	91,29	91,39	91,49	91,59	91,59	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	105,21	105,28	105,33	105,38	105,43	105,48	105,53	105,53	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	89,84	89,94	90,04	90,14	90,24	90,34	90,44	90,44	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,28	6,48	6,68	6,88	7,08	7,28	7,48	7,48	
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kompetensi	%	93,60	93,8	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	94,80	
		Meningkatnya upaya internalisasi budaya dalam masyarakat	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah	**%**	76,00	76	77,25	78,5	79,75	81	82,25	82,25	
			Persentase kelompok kesenian yang aktif	**%**	22,46	22,46	22,96	23,46	23,96	24,46	24,96	24,96	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
			terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir										
		Tujuan PD: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup***	**Tahun**	**76,44**	**76,48**	**76,61**	**76,74**	**76,86**	**76,99**	**77,12**	**77,12**	
		Menurunnya Keluhan Kesehatan Masyarakat	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	99,40	99,5	99,6	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	77,20	80	82	85	85,0	87,0	90	90	
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan khususnya ibu dan anak	Jumlah Kematian Ibu	kasus	19	13	12	11	11	10	10	10	
			Jumlah kematian balita	kasus	203	164	151	143	137	130	118	118	
			Prevalensi Stunting (Survey Status Gizi Indonesia)	%	20,9	19,90	18,90	17,90	16,90	16	14,90	14,90	**Dinas Kesehatan**
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	74	80	82	84	86	88	90	90	
		Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan Kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	76,00	80	80	80	80	80	80	80	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Indikator Mutu Prioritas pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memenuhi standar	%	89,7	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	
		Tujuan PD: Meningkatnya daya saing pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan	**Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti***	**%**	**0,25**	**0,25**	**0,3**	**0,35**	**0,4**	**0,45**	**0,5**	**0,5**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**
			Indeks Pembangunan Pemuda*	**%**	**58,83**	**58,83**	**59,5**	**60,83**	**62,10**	**63,80**	**63,94**	**63,94**	
		Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Pertumbuhan wirausaha muda	%	0,02	0,02	0,07	0,12	0,17	0,22	0,27	0,27	
		Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	15	15	15,25	15,5	15,75	16	16,25	16,25	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**
		Meningkatnya prestasi olahraga	Proporsi jumlah atlet yang berprestasi	%	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	0,31	
	Sasaran 2.2. Penguatan		**1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Angka**	**63,78**	**64,54-64,55**	**65,31 – 65,32**	**66,08 – 66,09**	**66,84 – 66,87**	**67,61 – 67,64**	**68,38 – 68,41**	**68,38 – 68,41**	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender												
		Tujuan PD: Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Perempuan, dan anak	**Presentase Kelompok Kegiatan Aktif***	**%**	**72**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**77**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Status Kabupaten Layak Anak*	**Angka**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**Nindya**	**Utama**	**Utama**	**Utama**	
		Mempertahankan keseimbangan pengendalian penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	
		Meningkatnya perlindungan anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
			2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**Angka**	**0,233**	**0,233-0,216**	**0,23 – 0,213**	**0,228 – 0,202**	**0,226 – 0,192**	**0,223 – 0,182**	**0,221 – 0,172**	**0,221 – 0,172**	
		Tujuan PD: Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Perempuan, dan anak	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)***	**Indeks**	**94,79**	**94,79**	**94,79**	**94,85**	**94,90**	**95,10**	**95,20**	**95,20**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	80,31	80,31	80,40	80,50	80,60	80,70	80,80	80,80	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	65,85	65,85	65,90	66	66,50	66,7	67	67	
	Sasaran 2.3. Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan		**Rasio Gini**	**Angka**	**0,370****	**0,365**	**0,364**	**0,363**	**0,361**	**0,36**	**0,359**	**0,359**	
		Tujuan PD: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)***	**Indeks**	**87,7**	**87,92**	**88,2**	**88,49**	**88,77**	**89,06**	**89,34**	**89,34**	**Dinas Ketahanan Pangan**
		Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,1	8,95	8,80	8,32	7,7	7,08	6,2	6,2	
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,1	91,3	91,68	92,06	92,44	92,82	93	93	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tujuan PD: Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Boyolali	**Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***	**Angka**	**48840**	**47863**	**46906**	**45968**	**45049**	**44148**	**43265**	**43265**	**Dinas Sosial**
		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan keberdayaan PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Boyolali		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**76,5**	**77,63**	**77,97**	**78,31**	**78,66**	**79**	**79,34**	**79,34**	
	Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional		**1. Indeks Pelayanan Publik**	**Angka**	**4,51**	**4,52**	**4,53**	**4,54**	**4,55**	**4,56**	**4,57**	**4,57**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Boyolali	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**85,97**	**86,41**	**86,61**	**86,81**	**87,21**	**87,81**	**88**	**88**	**Kecamatan Boyolali**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Boyolali	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Musuk	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**91,27**	**91,3**	**91,5**	**91,7**	**91,9**	**92,1**	**92,3**	**92,3**	**Kecamatan Musuk**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Musuk	pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum										
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Mojosongo	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**86,6**	**86,70**	**86,90**	**87,10**	**87,30**	**87,50**	**87,70**	**87,70**	**Kecamatan Mojosongo**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mojosongo	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Teras	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,32**	**84,52**	**84,72**	**84,92**	**85,12**	**85,32**	**85,52**	**85,52**	**Kecamatan Teras**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Teras	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Banyudono	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**86,04**	**86,11**	**86,31**	**86,51**	**86,71**	**86,91**	**87,11**	**87,11**	**Kecamatan Banyudono**

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Banyudono	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Sawit	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**88,19**	**88,39**	**88,59**	**88,79**	**88,99**	**89,19**	**89,39**	**89,39**	**Kecamatan Sawit**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sawit	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Sambi	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**86,27**	**86,47**	**86,67**	**86,87**	**90,6**	**90,8**	**91**	**91**	**Kecamatan Sambi**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sambi	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**83,84**	**84,05**	**84,25**	**84,45**	**84,65**	**84,85**	**85,05**	**85,05**	**Kecamatan Ngemplak**

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		publik Kecamatan Ngemplak											
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ngemplak	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Simo	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**83,96**	**90**	**90,2**	**90,4**	**90,6**	**90,8**	**91**	**91**	**Kecamatan Simo**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Simo	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Nogosari	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,65**	**84,85**	**85,05**	**85,25**	**85,45**	**85,65**	**85,85**	**85,85**	**Kecamatan Nogosari**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Nogosari	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Klego	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,76**	**85,62**	**85,82**	**86,02**	**86,22**	**86,42**	**86,62**	**86,62**	**Kecamatan Klego**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Klego	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Andong	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**82,72**	**82,92**	**83,12**	**83,32**	**83,52**	**83,72**	**83,92**	**83,92**	**Kecamatan Andong**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Andong	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Wonosegoro	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**86,3**	**86,50**	**86,70**	**86,90**	**87,10**	**87,30**	**87,50**	**87,50**	**Kecamatan Wonosegoro**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		umum Kecamatan Wonosegoro											
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Karanggede	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,9**	**85,1**	**85,3**	**85,5**	**85,7**	**85,9**	**86,1**	**86,1**	**Kecamatan Karanggede**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Karanggede	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Kemusu	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,12**	**84,3**	**84,5**	**84,7**	**84,9**	**85,1**	**85,3**	**85,3**	**Kecamatan Kemusu**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan Masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kemusu	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Juwangi	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,04**	**85,20**	**85,40**	**85,60**	**85,80**	**86,00**	**86,20**	**86,20**	**Kecamatan Juwangi**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Juwangi	masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum										
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Ampel	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**89,75**	**90**	**90,20**	**90,40**	**90,60**	**90,80**	**91,00**	**91**	**Kecamatan Ampel**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ampel	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Cepogo	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,29**	**84,49**	**84,69**	**84,89**	**85,09**	**85,29**	**85,49**	**85,49**	**Kecamatan Cepogo**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cepogo	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Selo	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**84,34**	**85,11**	**85,31**	**85,51**	**85,71**	**85,91**	**86,11**	**86,11**	**Kecamatan Selo**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian,	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian,	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Selo	pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum										
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Gladagsari	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**83,19**	**83,75**	**83,95**	**84,15**	**84,35**	**84,55**	**84,75**	**84,75**	**Kecamatan Gladagsari**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gladagsari	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Tamansari	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**83,08**	**83,25**	**83,45**	**83,65**	**83,85**	**84,05**	**84,25**	**84,25**	**Kecamatan Tamansari**
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tamansari	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD:Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Wonosamodro	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**90,75**	**90,95**	**91,15**	**91,35**	**91,55**	**91,75**	**91,95**	**91,95**	**Kecamatan Wonosamodro**

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Wonosamodro	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, sosial pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum serta ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang adaptif dan profesional	**Indeks Pemerintahan Digital***	**Angka**	**NA**	**NA**	**2**	**2.50**	**3**	**3,15**	**3,25**	**3,25**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)*	**Angka**	**3,89**	**3,91**	**3,93**	**3,95**	**3,96**	**3,97**	**4**	**4**	
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	61.2	61,2	62	63	63	65	65	65	
		Terwujudnnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (INMEN No. 2 Tahun 2025)	Angka	2,63	2,63	2,64	2,64	2,65	2,65	2,7	2,7	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Boyolali	**Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)***	**Angka**	**87**	**87**	**87,2**	**87,3**	**87,4**	**87,5**	**87,6**	**87,6**	**Sekretariat DPRD**
		Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase propemperda yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tujuan PD: Meningkatnya literasi dan tata kelola kearsipan	**Tingkat Pengelolaan/ ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja***	**%**	**83,7**	**84**	**84,3**	**84,7**	**85**	**85,3**	**85,7**	**85,7**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	**Angka**	**62,92**	**63**	**63,5**	**64**	**64,5**	**65**	**65,5**	**65,5**	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesai	%	60	60	65	70	72	75	80	80	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		arsip sesai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan	dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan										
		Meningkatnya literasi masyarakat	Tingkat kegemaran membaca Dinas Arpus	Angka	65,00	65,25	65,50	65,77	66,77	67,77	68,77	68,77	
		Tujuan PD: Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**Nilai**	**93,23**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**93**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP elektronik	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	98,7	98,8	98,9	99	99	99	99	99	
		Meningkatnya administrasi catatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	%	99,07	99.1	99.15	99,20	99,25	99,3	99,3	99,3	
		Tujuan PD: Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	**Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)***	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**SATPOL PP**
			Cakupan pelayanan kebakaran*	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		Menurunnya pelanggaran perda trantibum	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	Menit	22,79	21	19	17	16	15	15	15	
	Sasaran 3.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional		**2. Nilai SAKIP**	**Angka**	**68,96**	**70,2**	**71,16**	**72,12**	**73,08**	**74,04**	**75**	**75**	
		Tujuan PD: Meningkatkan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	**Indeks Kualitas Perencanaan***	**Angka**	**NA**	**6,5**	**6,7**	**6,9**	**7,2**	**7,5**	**7,8**	**7,8**	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**
			Indeks Inovasi Daerah*	**Angka**	**83,64**	**83,92**	**84,2**	**84,4**	**84,6**	**84,8**	**85**	**85,00**	
		Tercapainya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	%	71,11	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00	
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,88	2,95	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,20	
		Tujuan PD: Meningkatnya kinerja pemerintah dan reformasi hukum	**Indeks Pencapaian SPM***	**Angka**	**98,13**	**98,13**	**98,3**	**98,5**	**98,7**	**98,9**	**99,3**	**99,3**	
			Indeks Reformasi Hukum*	**Angka**	**76,5**	**78,5**	**79,5**	**82,5**	**85,5**	**88,5**	**90**	**90**	
		Meningkatnya capaian kinerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan Pembangunan, dan administrasi umum	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2	96,2	**Sekretariat Daerah**
			Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2	96,2	
			Capaian Kinerja Bidang Administrasi Umum	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2	96,2	
		Meningkatnya harmonisasi produk hukum daerah	Tingkat Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%	44,3	44,3	51	54	57	60	63	63	
		Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali	Angka ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	Angka	75,84	75,84	75,90	76	76,10	76,15	76,20	76,20	
		Tujuan PD: Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah dan pencegahan korupsi	**Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***	**Angka**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**INSPEKTORAT**
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP*	Angka	3	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	
		Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah	IPKD MCP*	Angka	81,41	82	83	84	85	86	87	87	
		Tujuan PD: Meningkatnya Stabilitas Ipoleksosbudhankam Daerah	**Persentase konflik Ipoleksosbud, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselesaikan***	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Menguatnya Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni	Angka	NA	6,97	6,98	6,99	7,00	7,01	7,02	7,02	

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tujuan PD: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	**Opini BPK Atas Laporan Keuangan***	**Nilai**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**Badan Keuangan Daerah**
			Derajat Fiskal Otonomi Daerah*	**%**	**21,94**	**22**	**25,58**	**27,15**	**28,82**	**30,59**	**32,46**	**32,46**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	80,27	80,27	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,3	
		Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik daerah	Tingkat Pemanfaatan Barang Milik daerah	%	98,65	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	98,90	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	7	7	7	7	7	7	7	7	
			Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,44	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	
		Tujuan PD: Meningkatnya manajemen ASN berbasis Merit Sistem	**Angka Merit Sistem***	**Angka**	**280**	**280**	**282,5**	**285**	**287,5**	**290**	**292,5**	**292,5**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
		Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	93	93	93,25	93,5	93,75	94	94,25	94,25	
		Menurunnya pelanggaran ASN terhadap peraturan kepegawaian	Persentase pelanggaran ASN terhadap peraturan kepegawaian	%	0,00086	0,00086	0,00084	0,00082	0,00080	0,00078	0,00076	0,00076	
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase Jumlah ASN yang mendapat Angka Kinerja Minimal Baik	%	99,90	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,95	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui Digitalisasi ASN	Tingkat Keterpaduan Data ASN pada Sistem terkait	%	90	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	
		Meningkatnya kapabilitas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	62,05	62,05	63,25	64,5	65,25	66,25	66,75	66,75	
			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,16	5,16	5,3	5,52	5,57	6	6,16	6,16	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*	Nilai	80,1	77,5	77,7	77,9	78,1	78,3	78,5	78,5	**Semua Perangkat Daerah**

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan*	Nilai	82,45	81,65	81,85	82,05	82,25	82,45	82,65	82,65	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*	Nilai	81,9	81,3	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	82,3	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*	Nilai	87,7	86,15	86,35	86,55	86,75	86,95	87,15	87,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja*	Nilai	79,10	77,85	78,05	78,25	78,45	78,65	78,85	78,85	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	Nilai	82,4	75,15	75,35	75,55	75,75	75,95	76,15	76,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial*	Nilai	85,60	83,50	83,70	83,90	84,10	84,30	84,50	84,50	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan*	Nilai	83,3	80,15	80,35	80,55	80,75	80,95	81,15	81,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup*	Nilai	82,65	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	83,9	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	Nilai	82,1	77,75	77,95	78,15	78,35	78,55	78,75	78,75	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	Nilai	82,9	75,15	75,35	75,55	75,75	75,95	76,15	76,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Nilai	79,25	79,55	79,75	79,95	80,15	80,35	80,55	80,55	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan*	Nilai	81,35	78,8	79	79,2	79,4	79,6	79,8	79,8	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika*	Nilai	81,85	75,35	75,55	75,75	75,95	76,16	76,35	76,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja*	Nilai	82,10	78,15	78,35	78,55	78,75	78,95	79,15	79,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	Nilai	83,2	79,05	79,25	79,45	79,65	79,85	80,05	80,05	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SAKIP Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata*	Nilai	83,95	75,35	75,55	75,75	75,95	76,15	76,35	76,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan*	Nilai	81,25	75,05	75,25	75,45	75,65	75,85	76,05	76,05	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian*	Nilai	84,3	77,45	77,65	77,85	78,05	78,25	78,45	78,45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan*	Nilai	82,2	79,7	79,9	80,1	80,2	80,3	80,5	80,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian*	Nilai	82,4	78,15	78,35	78,55	78,75	78,95	79,15	79,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah*	Nilai	86,75	85,55	85,75	85,95	86,15	86,35	86,55	86,55	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD*	Nilai	83,6	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,7	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah*	Nilai	84,3	77,35	77,55	77,75	77,95	78,15	78,35	78,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah*	Nilai	83,5	83,65	83,85	84,05	84,25	84,45	84,65	84,65	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan	Nilai	83,6	75,85	76,05	76,25	76,45	76,65	76,85	76,85	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia*										
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah*	Nilai	84,9	78,8	79	79,2	79,4	79,6	79,8	79,8	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Boyolali	Nilai SAKIP Kecamatan Boyolali*	Nilai	81,2	74,4	74,6	74,8	75	75,2	75,4	75,4	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Musuk	Nilai SAKIP Kecamatan Musuk*	Nilai	79,7	75,35	75,55	75,75	75,95	76,15	76,35	76,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojosongo	Nilai SAKIP Kecamatan Mojosongo*	Nilai	80,50	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Teras	Nilai SAKIP Kecamatan Teras*	Nilai	73,35	72,35	72,55	72,75	72,95	73,15	73,35	73,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyudono	Nilai SAKIP Kecamatan Banyudono*	Nilai	79,25	74,6	74,8	75	75,2	75,4	75,6	75,6	
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sawit	Nilai SAKIP Kecamatan Sawit*	Nilai	79,90	79,35	79,55	79,75	79,95	80,15	80,35	80,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Sambi	Nilai SAKIP Kecamatan Sambi*	Nilai	81,25	78,95	79,15	79,35	79,55	79,75	79,95	79,95	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak	Nilai SAKIP Kecamatan Ngemplak*	Nilai	78,9	74,8	75	75,2	75,4	75,6	75,8	75,8	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Simo	Nilai SAKIP Kecamatan Simo*	Nilai	80,6	77,4	77,6	77,8	78	78,2	78,4	78,4	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari	Nilai SAKIP Kecamatan Nogosari*	Nilai	79,25	78,35	78,55	78,75	78,95	79,15	79,35	79,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Klego	Nilai SAKIP Kecamatan Klego*	Nilai	82	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,1	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Andong	Nilai SAKIP Kecamatan Andong*	Nilai	80,5	79,45	79,65	79,85	80,05	80,25	80,45	80.45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosegoro	Nilai SAKIP Kecamatan Wonosegoro*	Nilai	80,5	79	79,2	79,4	79,6	79,8	80	80	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggede	Nilai SAKIP Kecamatan Karanggede*	Nilai	80,6	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,7	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemusu	Nilai SAKIP Kecamatan Kemusu*	Nilai	79,4	76,60	76,80	77	77,2	77,4	77,6	77,6	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

VISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Juwangi	Nilai SAKIP Kecamatan Juwangi*	Nilai	80,95	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,3	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Ampel	Nilai SAKIP Kecamatan Ampel*	Nilai	81,25	74,65	74,85	75,05	75,25	75,45	75,65	75,65	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cepogo	Nilai SAKIP Kecamatan Cepogo*	Nilai	82,3	76,6	76,8	77	77,2	77,4	77,6	77,6	
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selo	Nilai SAKIP Kecamatan Selo*	Nilai	81,7	78,04	78,06	78,08	79,00	79,02	79,04	79,04	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gladagsari	Nilai SAKIP Kecamatan Gladagsari*	Nilai	80,65	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95	75,15	75,15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Tamansari	Nilai SAKIP Kecamatan Tamansari*	Nilai	80,75	78,85	79,05	79,25	79,45	79,65	79,85	79,85	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosamodro	Nilai SAKIP Kecamatan Wonosamodro*	Nilai	79,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	Nilai	81,30	80,4	80,6	80,8	81	81,2	81,4	81,4	

Sumber: Data Diolah, 2025

*Keterangan : *Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah*

**Baseline 2023*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

f. Indikator Kinerja Kunci Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah yang berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis di setiap urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan. IKK dipilih secara selektif untuk merepresentasikan outcome yang paling signifikan dan berdampak langsung pada masyarakat. Adapun IKK Kabupaten Boyolali tersajikan pada tabel berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Tabel IV. 8
Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	89,96	94,91	95	95,1	95,19	95,28	95,37	95,37
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,53	99,54	99,55	99,56	99,57	99,57	99,58	99,58
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	48,85	50,56	50,56	50,57	50,58	50,6	50,65	50,65
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	86,14	86,34	86.54	86,74	86,94	87,14	87,3	87,3
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	81,61	81,80	82,00	82,20	82,40	82,40	82,60	82,60
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	85,34	85,54	85,74	85,94	86,14	86,34	86,50	86,50
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	83,23	83,43	83,63	83,80	84,03	84,23	84	84
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	84,36	85,01	85,45	85,80	85,99	86,08	86,15	86,15
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	77,91	78,10	78,50	78,70	78,97	79,20	79,41	79,41
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Angka	77,87	78,05	78,45	78,60	78,91	79,15	79,39	79,39
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Angka	72,44	72,98	73,15	73,33	73,80	73,98	74,22	74,22
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Angka	78,06	78,15	78,45	78,68	78,90	79,08	79,24	79,24
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Angka	75,82	76,15	76,31	76,71	76,97	77,19	77,36	77,36
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Angka	61,44	62,09	62,38	62,79	62,98	63,24	63,48	63,48
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Angka	61,38	62,03	62,30	62,74	62,95	63,21	63,43	63,43
b. Kesehatan										
1	Jumlah Kematian Ibu	kasus	19	13	12	11	11	10	10	10
2	Prevalensi Stunting (Survey Status Gizi Indonesia)	%	20,9	19,9	18,9	17,9	16,9	15,9	14,9	14,9
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	98,47	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	99,78	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	99,82	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	99,79	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100,13	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,19	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	89,11	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	109,58	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	75,78	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* sesuai standar	%	78,27	100	100	100	100	100	100	100
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Kab/Kota	%	NA	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	25,00
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Kab/Kota	%	NA	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	77,50
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	%	97,26	98,93	99,58	99,87	100	100	100	100
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi(air limbah domestik) layak dan aman	%	98,33	98,37	98,4	98,43	98,46	98,49	98,54	98,54
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	83,20	83,5	83,8	84,1	84,4	84,7	85	85
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis									
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah		NA	20	20	20	20	20	20	20
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	N/A	3,49	4,02	4,83	4,83	4,83	4,83	26,83
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	6,64	4,28	2,24	2,29	2,34	2,40	2,46	2,46
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	N/A	98,95	98,98	99,03	99,08	99,13	99,18	99,18
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	5	5	7	9	11	13	15	15
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	NA	67,5	70	72,5	75	77,5	80	80
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	4,47	4,88	5,28	5,68	6,07	6,07

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,54
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	NA	50	50	100	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	89,74	100	100	100	100	100	100	100
f. Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Kabupaten/Kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,27	2,73	4,18	5,64	7,09	8,55	10	10
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	307,36	310,43	313,53	316,67	319,84	323,03	326,27	326,27
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	49,51	55	60	65	70	75	80	80
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	95,50	100	100	100	100	100	100	100
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,79	94,79	94,81	94,83	94,85	94,87	94,89	94,89
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,233	0,233-0,216	0,23 – 0,213	0,228 – 0,202	0,226 – 0,192	0,223 – 0,182	0,221 – 0,172	0,221 – 0,172
3	Persentase ARG Daerah	%	2,56	2,56	2,58	2,6	2,62	2,64	2,68	2,68
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan	%	75	77	79	81	83	85	87	87
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
c. Pangan										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	21,95	31,73	50	75	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Angka	91,1	91,3	91,68	92,06	92,44	92,82	93	93
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,5	4,1	3,7	3,4	3	2,6	2,2	2,2
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	87,80	88	88,5	89	89,5	90	90,5	90,5
d. Pertanahan										
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	80	82	84	86	88	90	90
9	Persentase Luas Peta Angka Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	80	82	84	86	88	90	90
e. Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	65,49	70,39	70,66	70,93	71,21	71,48	71,75	71,75
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	64,2	65	65,5	66	66,5	67	67,5	67,5
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4,83	4,02	96,35	96,9	97,2	97,33	97,5	97,5

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99,07	99,23	99,38	99,54	99,69	99,85	100	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	62,41	63,41	64,41	64,51	64,61	64,71	64,81	64,81
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	6,4	6,8	7,1	7,3	7,4	7,5	7,7	7,7
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	64,06	29,68	18,07	13,26	11,71	10,48	9,48	9,48
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	NA	60,53	66,28	72,03	77,77	83,52	89,27	89,27
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	NA	NA	12	20	20	12	36	36
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	NA	95,99	95,99	95,99	95,99	95,99	95,99	95,99
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	65,3	65,4	65,5	65,6	65,7	65,8	65,9	66
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,4	11,3	11,2	11,1	11	10,9	10,8	10,7
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	12,2	12,2	12,1	12	11,9	11,8	11,7	11,7
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,78	64,54-64,55	65,31 - 65,32	66,08 - 66,09	66,84 - 66,87	67,61 - 67,64	68,38 - 68,41	68,38 - 68,41
i. Perhubungan										
1	Rasio Konektivitas Wilayah	Angka	0,51	0,51	0,51	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	89,19	89,33	89,46	89,59	89,73	89,86	90	90
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
j. Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo									
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	3,77%	5,66%	7,55%	9,43%	11,32%	13,20%	15,09%	15,09%
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,31	1,81	1,88	1,90	1,95	1,98	2,01	2,01
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	21,4	24,51	27,61	30,71	33,8	36,9	40	40
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,41	2,41	2,59	2,77	2,95	3,04	3,18	3,18
l. Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	57,19	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	136,18	100	100	100	100	100	100	100
m. Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,12
2	Persentase Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,15	0,15
n. Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,63	2,63	2,65	2,67	2,69	2,71	2,73	2,73
o. Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	61,24	63,53	65,83	68,12	70,41	72,71	75	75
p. Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	6,74	7,87	8,99	10,11	11,24	12,36	13,48	13,48
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	NA	25	30	35	40	45	50	50
q. Perpustakaan										
1	Angka Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	65,00	67,5	70,00	72,5	75	77,5	80	80
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	62,92	63,00	63,5	64,00	64,5	65,00	65,5	65,5
r. Kearsipan										
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	81,44	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Urusan Pilihan										
a. Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.217	1.218	1.219	1.220	1.221	1.222	1.223	1.223
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	34.150	34.174	34.198	34.222	34.246	34.270	34.294	34.294
b. Pariwisata										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	11,49	11,99	12,49	12,99	13,49	13,99	14,49	14,49
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-3,86	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,5
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
c. Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	8,74	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	8,79	8,79
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	- 22,78	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	18,05	18,05
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan									
	Daging	%	-2.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Telur	%	4.39	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Susu	%	13.11	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	8,77	0,35	0,70	1,05	1,41	1,77	6,55	6,55
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80,65	80,73	80,81	80,89	80,97	81,06	81,14	2,5
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	-24,39	50	33	33	33	33	33	33
d. Kehutanan										
e. Energi dan Sumber Daya Mineral										
f. Perdagangan										
1	Angka Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100
g. Perindustrian										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:									
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	31,48	31,59	31,59	31,59	31,59	31,59	31,59	31,59
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	31,48	31,76	31,89	32,02	32,11	32,37	32,63	32,63

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	orang	85,653	85,653	85,753	85,853	85,953	86,053	86,153	86,153
	4. Angka Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Rupiah	29293020000,00	267105430,48	280460791,02	294483830,36	309208021,74	319106733,33	328679935,33	328679935,33
	5. Angka Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	2.891.621,04	1.890.304,60	1.984.819,83	2.084.060,82	2.188.263,86	2.258.317,00	2.326.066,51	2.326.066,51
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	83,00	84,14	84,78	85,40	86,00	86,37	86,72	86,72
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	80	80	80	80	80	80	80	80
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	100
h. Transmigrasi										
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
a. Perencanaan										
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
b. Keuangan										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%								
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,97	22	25,58	27,15	28,82	30,59	32,46	32,46
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	93,46	94	94	94	94	94	94	94
4	Persentase Penambahan Angka Aset Tetap	%	-0,13	7	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%								
6	Persentase Penurunan SILPA	%	20,09	18	16	14	12	12	12	12
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Angka Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	N/A	76	77	78	79	80	81	81
d. Penelitian dan Pengembangan										

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

NO	IKK	SATUAN	BASELINE		TARGET					KONDISI AKHIR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	100
e. Fungsi Pengawasan										
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
4	Manajemen Risiko Indeks	Angka	2,92	2,96	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	97,43%	95%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
f. Fungsi Pengadaan										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Angka	NA	19	20	21	22	23,5	25	25
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Angka	NA	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	NA	40	40	40	40	40	40	40
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	100
h. Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Angka	97,31	97,4	97,45	97,5	97,55	97,6	97,65	97,65

Sumber: Data Diolah, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman, dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu, dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Boyolali serta kerja sama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan, serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runtut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bapperida.

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi transformasi pembangunan Kabupaten Boyolali menuju Terwujudnya Perubahan Boyolali yang Maju, Nyaman Dihuni, Berdaya Saing dan Ramah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini merangkum tantangan utama pembangunan yang dihadapi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Fokus utama pembangunan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada transformasi struktural yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, sekaligus memperkokoh kontribusi Boyolali dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Boyolali maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih periode berikutnya.
3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. terjadi perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. terjadi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. adanya perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

5.3 Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan ini menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah terintegrasi dengan agenda nasional dan global. Lima pengarusutamaan pembangunan yang dimaksud meliputi:

1. **gender dan inklusi sosial**, untuk mendorong kesetaraan dan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pembangunan;
2. **tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)**, sebagai panduan pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan;
3. **transformasi digital**, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan daya saing daerah di era teknologi;
4. **pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,** untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, adaptif, serta mampu mengurangi risiko perubahan iklim.
5. **pengentasan kemiskinan,** sebagai upaya prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Pengarusutamaan ini diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program tidak hanya berdampak pada pencapaian target RPJMD, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional dan global.

5.4 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Boyolali berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
4. setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;

5. RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Boyolali dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. terhadap perubahan Perangkat Daerah (PD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat diubah terhadap nomenklatur program, urusan dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bapperida Kabupaten Boyolali melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Boyolali serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
9. dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.